

EXPANDING IMPACT TOWARDS SUSTAINABLE FUTURE

MEMPERLUAS DAMPAK, MENUJU MASA DEPAN BERKELANJUTAN



EXPANDING IMPACT TOWARDS SUSTAINABLE FUTURE

MEMPERLUAS DAMPAK, MENUJU MASA DEPAN BERKELANJUTAN

Tahun 2023 menandai pencapaian kinerja terbaik PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII sejak didirikan pada 2009. Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, PT PII berhasil menjaga kredibilitasnya dalam penjaminan pembangunan infrastruktur, memberikan kepercayaan kepada investor untuk berinvestasi di sektor ini. Setelah pulih dari dampak COVID-19, PT PII fokus pada penguatan *pipeline* mandat dan memperluas manfaat di sektor-sektor yang mendukung transisi energi dan perubahan iklim.

Dalam upaya memperluas dampak menuju masa depan yang berkelanjutan, PT PII berkomitmen untuk memainkan peran kunci dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan terutama di sektor infrastruktur sosial dan perubahan iklim, termasuk pengelolaan sampah, sanitasi, kesehatan, transisi dan konservasi energi, serta KPBU berskala kecil di daerah untuk percepatan pemerataan pembangunan dan ekosistem pembiayaan inovatif di Indonesia. Beberapa proyek yang diberikan penjaminan mencakup sektor jalan, energi, ketenagalistrikan, air minum, transportasi, telekomunikasi, dan pariwisata. Beberapa proyek yang didukung PT PII juga sudah mengedepankan konsep infrastruktur hijau, yaitu pengembangan jaringan transmisi dan distribusi di Jawa (*Sustainable and Reliable Energy Access Program/SREAP*) dan proyek pencahayaan hemat energi di Kabupaten Madiun dan Lombok Barat dengan teknologi lampu LED untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Upaya-upaya ini juga merupakan manifestasi dari dukungan PT PII atas upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan.

The year 2023 marked Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF)'s best performance since its establishment in 2009. Amidst the challenging economic conditions, IIGF managed to maintain its credibility in guaranteeing infrastructure development, giving investors the confidence to invest in this sector. Having recovered from the impact of COVID-19, IIGF is focused on strengthening its mandate pipeline and expanding benefits in industries that support energy transition and climate change.

To expand its impact towards a sustainable future, IIGF is committed to playing a key role in sustainable infrastructure development, especially in the social infrastructure and climate change sectors, including waste management, sanitation, health, energy transition and conservation, as well as small-scale PPP in the regions to accelerate equitable development and innovative financing ecosystem in Indonesia. The guaranteed projects cover roads, energy, electricity, drinking water, transportation, telecommunications, and tourism. Some of the projects supported by IIGF have also prioritized the concept of green infrastructure, namely the development of transmission and distribution networks in Java (*Sustainable and Reliable Energy Access Program/SREAP*) and energy-efficient lighting projects in Madiun and West Lombok Regencies with LED technology to reduce greenhouse gas emissions. These efforts are also a form of IIGF's support for climate change mitigation and adaptation of low-carbon development by prioritizing sustainable development principles.



PT PII yakin melalui penjaminan proyek-proyek infrastruktur yang inovatif, mengedepankan kesejahteraan sosial dan ramah lingkungan, tidak hanya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih hijau, inklusif, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia.

IIGF understands that guaranteeing innovative infrastructure projects that prioritize social welfare and are environmentally friendly will not only support national economic growth but also create a strong foundation for a greener, more inclusive, and prosperous future for Indonesians.





Daftar Isi Contents



Pendahuluan Keberlanjutan Sustainability Introduction

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keberlanjutan Highlight of Sustainability Performance Achievement	8
Prestasi dan Reputasi Tahun 2023 Achievements and Reputation in 2023	12
Peristiwa Penting Keberlanjutan Tahun 2023 Important Events in Sustainability in 2023	14
Sambutan Direktur Utama President Director's Statement	18
Komitmen dan Strategi Perusahaan Dalam Memperluas Dampak Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) The Company's Commitments and Strategies to Expanding Environmental, Social, and Governance (ESG) Impacts	29
Sekilas Tentang Perusahaan About The Company	40
Tentang Laporan Ini On The Report	52

Ekonomi Economy



Memperluas Dampak Bagi Pertumbuhan Perekonomian yang Tangguh, Inklusif dan Berkelanjutan Expanding the Effect for Resilient, Inclusive, and Sustainable Economic Growth

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Keuangan dan Operasi Comparison of Financial and Operational Target and Realization	68
Mengoptimalkan Perolehan dan Pendistribusian Nilai Ekonomi Optimizing Economic Value Acquisition and Distribution	72
Mengoptimalkan Kontribusi kepada Negara Optimizing Contribution to the State	73
Mengoptimalkan Manfaat/Dampak Ekonomi Tidak Langsung Optimizing Indirect Economic Benefit/Impacts	74
Mengembangkan Ekosistem Pembangunan Infrastruktur Indonesia Expanding Indonesia's Infrastructure Development Ecosystem	77

Lingkungan Environment



Memperluas Peran dan Manfaat Bagi Keberlanjutan Lingkungan Expanding Roles and Benefits for Environmental Sustainability

Biaya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan The Environmental Management and Conservation Cost	89
Mengelola Dampak Lingkungan Managing Environmental Impact	89
Menangani Pengaduan Lingkungan Handling Environmental Complaints	109



Sosial Social



Memperluas Dampak Bagi Pembangunan Sosial Expanding Social Development Impact

Memperluas Dampak dengan Produk dan Layanan Berkelanjutan yang Inovatif Expanding Impact with Innovative Sustainable Products and Services	112
Memperluas Dampak, Menghadirkan Potensi Sumber Daya Manusia Unggul Expanding Impact, Unveiling Excellent Human Resources Potential	135
Memperluas Dampak Bagi Pembangunan Masyarakat Berkelanjutan Expanding Impact for Sustainable Community Development	157

Tata Kelola Governance



Menghadirkan Tata Kelola (Governansi) Keberlanjutan Providing Sustainability Governance

Struktur Tata Kelola Perseroan Corporate Governance Structure	180
Skor Penilaian atas Penerapan GCG Perseroan GCG Assessment Score	193
Tata Nilai dan Pedoman Perilaku Core Values and Code of Conduct	194
Memperkuat Komitmen Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Strengthening Anti-Corruption Commitment and Gratification Control	196
Pelibatan Pemangku Kepentingan Stakeholders' Involvement	203
Whistleblowing System Whistleblowing System	206
Permasalahan dan Tantangan terhadap Penerapan Bisnis Berkelanjutan Problems and Challenges towards Sustainable Business Implementation	209
Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Compliance with Laws and Regulations	209



Lampiran Attachment

Indeks Konten <i>Global Reporting Initiative</i> (GRI) Standards GRI Standards Content Index	212
Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 dan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 Disclosure List in Accordance with Financial Services Authority's (FSA) Regulation No.51/POJK.03/2017 and FSA Circular Letter No.16/SEOJK.04/2021	220
Indeks International Financial Reporting Standards (IFRS) International Financial Reporting Standards (IFRS) Index	223
Lembar Umpan Balik Feedback Sheet	227





Pendahuluan Keberlanjutan

Sustainability
Introduction



Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keberlanjutan

Highlight of Sustainability Performance Achievement

[OJK B.1, B.2, B3]

Kinerja Aspek Ekonomi

Economic Performance Achievement [OJK B.1]

Total Proyek yang dijamin hingga tahun 2023

Total Projects guaranteed until 2023



50 Proyek
Project

Terdiri dari **41 proyek infrastruktur** dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan non-KPBU, serta **9 penjaminan proyek non infrastruktur**.
Consisting of 41 projects are guarantees for infrastructure projects with Public Private Partnership (PPP) and non-PPP schemes and 9 guarantees for non-infrastructure projects.



Pendapatan Usaha
Operating Revenues

Rp1.318,01

miliar billion

21,05%



Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year

Rp835,82

miliar billion

17,03%

Distribusi Nilai Ekonomi kepada Pemangku Kepentingan

Distribution of Economic Value to the Stakeholders



Rp673,91

miliar billion

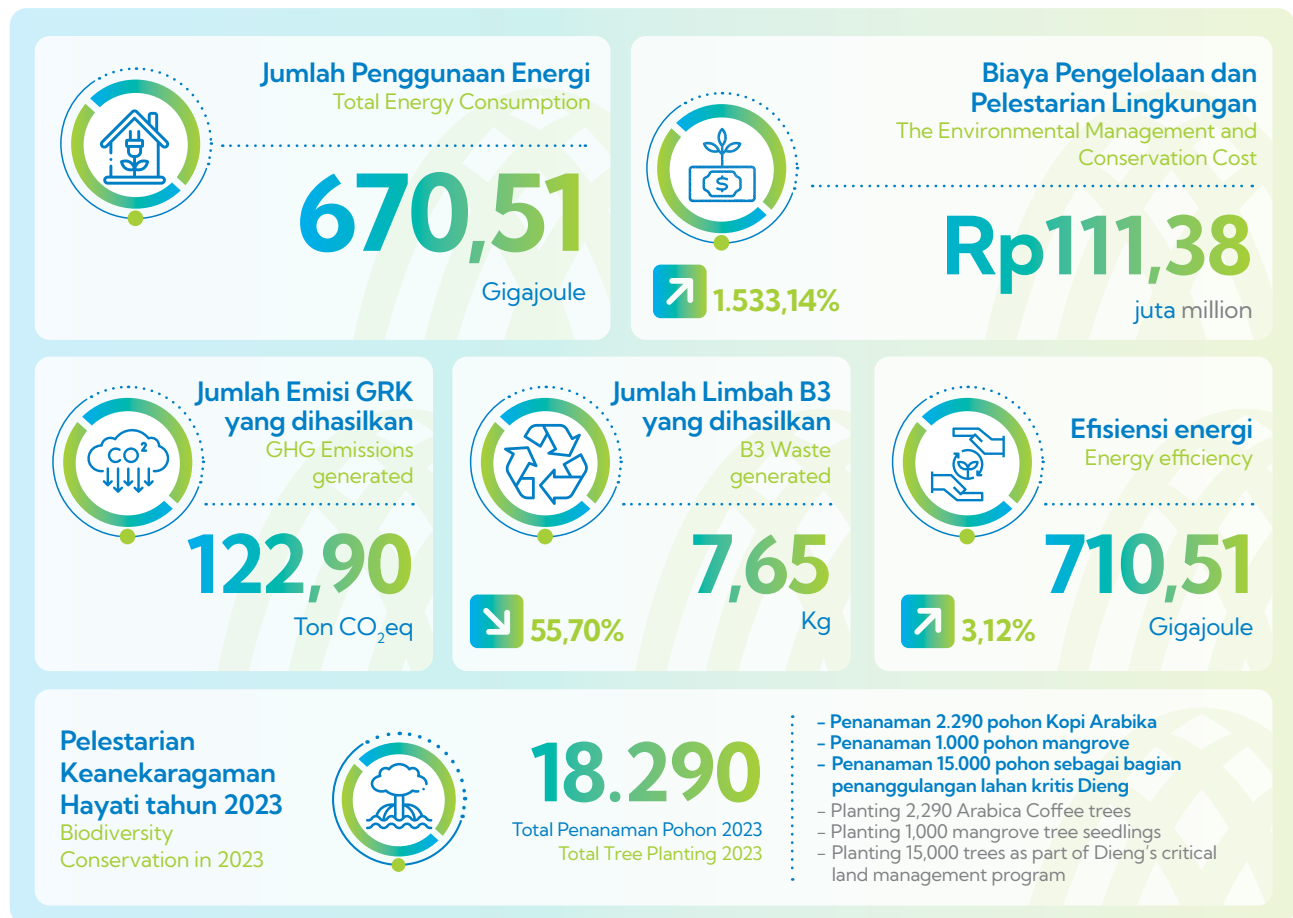
15,65%

Indikator Indicator	Satuan Unit	2023	2022	2021
Pendapatan Revenues	Rp Miliar Rp Billion	1.318,01	1.088,85	922,51
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Rp Miliar Rp Billion	835,82	714,17	625,40
Penjaminan Proyek Baru New Project Guarantee	Proyek Projects	4	12	7
Distribusi Nilai Ekonomi kepada Pemangku Kepentingan Distribution of Economic Value to the Stakeholders	Rp Miliar Rp Billion	673,91	582,74	554,18
Produk Ramah Lingkungan Eco-friendly Product	Proyek Penjaminan Guarantee Project	1	1	-
Pelibatan Pihak Lokal Local Suppliers Involvement				
Jumlah Pemasok Lokal Total of Local Suppliers	Pemasok Suppliers	306	332	293
Nilai Pengadaan Pemasok Lokal Procurement Value of Local Vendor	Rp Miliar Rp Billion	180,40	101,61	74,73
Presentase Pemasok Lokal Percentage of Local Suppliers	%	98,39	98,81	97,99



Pencapaian Kinerja Aspek Lingkungan

Environmental Performance Achievement [OJK B.2]



Indikator Indicator	Satuan Unit	2023	2022	2021
Pengelolaan Energi Energy Management				
Penggunaan Energi Energy Consumption	Gigajoule	670,51	472,92	686,99
Intensitas penggunaan Energi Energy consumption intensity	Gigajoule/m ²	4,08	3,11	4,80
Efisiensi Energi Energy Efficiency	Gigajoule	710,51	689,04	546,68
Pengelolaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Greenhouse Gas (GHG) Emission Control				
Emisi GRK Scope 1 dan 2 yang dihasilkan GHG Emissions Scope 1 and 2 generated	Ton CO ₂ eq	122,90	71,91	88,53
Pengurangan Emisi yang dihasilkan Reduction of Generated Emissions	Ton CO ₂ eq	(50,99)	16,62	38,06
Intensitas Emisi GRK GHG Emissions Intensity	Ton CO ₂ eq/Karyawan Ton CO ₂ eq/Employee	0,74	0,47	0,62
Pengelolaan Air Water Management				
Jumlah Pengambilan/Penarikan dan Penggunaan Air Water Withdrawal and Consumption	Megaliter	0,15	0,09	0,03
Pengurangan Pengambilan/Penarikan dan Penggunaan Air Reduction of Water Withdrawal and Use	Megaliter	(0,06)	(0,06)	0,04
Pengelolaan Limbah Waste Management				
Jumlah Limbah B3 yang Dihasilkan B3 Waste Generated	Kg	7,65	17,27	7,30
Pengurangan Limbah B3 yang Dihasilkan Reduction of B3 Waste Generated	Kg	9,62	(9,97)	N/A
Jumlah Limbah Non B3 yang Dihasilkan Non-B3 Waste Generated	Kg	2.075,20	324,60	225,90
Pengurangan Limbah Non B3 yang Dihasilkan Reduction of Non-B3 Waste Generated	Kg	(1.750,60)	(98,70)	N/A
Biaya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan The Environmental Management and Conservation Cost				
Biaya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan The Environmental Management and Conservation Cost	Rp Juta Rp Million	111,38	6,82	6,60



Pencapaian Kinerja Aspek Sosial Social Performance Achievement [OJK B.3]

Capaian Pengembangan Produk dan Layanan Berkelanjutan Sustainable Products and Services Development Achievement

Nilai Proyek Penjaminan Pada Kegiatan
Usaha Berwawasan Lingkungan
Value of Guarantee Projects for Green Business Activities



Rp58,34
triliun trillion

Capaian Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Human Resource Management Achievement

Tingkat Rekrutmen
Karyawan
Employee
Recruitment Rate



10,13%

Tingkat Turnover
Karyawan
Employee
Turnover Rate

3,17%

48,03%



Rasio Gaji Karyawan
Golongan Terendah/Entry Level
Dibandingkan Upah Minimum
Ratio of Lowest Position/Entry Level
Employee Salary to Minimum Wage

130,59%



Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan
Average Employee Training Hours

15,79%

22 Jam/Orang
Hours/Employee



Karyawan Mendapatkan
Promosi Jabatan
Employee Promoted

25,61%

Capaian Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility Program Achievement



Rp4.430
Juta Million

Realisasi Penyaluran
Program TJSL
CSR Program
Realization

27,12%



Lingkungan dan Kesehatan
Environment & Health



Pemberdayaan Masyarakat
Community Empowerment



Pendidikan
Education



Sosial, Budaya dan
Keagamaan
Social, Cultural, and
Religious Affair

Program TJSL Prioritas Priority CSR Program

Beberapa program TJSL Prioritas PT PII Diantaranya:

- Program WE CARE (Waste Management for Circular Economy)
- Program Pemulihan Ekosistem DAS Citarum
- Program Pemberdayaan UMKM
- Program Peningkatan Produksi Pertanian Padi Nutrizinc
- Program pengentasan *stunting* dan program guru binar

Several IIGF's Priority CSR programs include:

- WE CARE (Waste Management for Circular Economy) Program
- Citarum Watershed Ecosystem Recovery Program
- MSMEs Empowerment Program
- Nutrizinc Rice Agricultural Production Improvement Program
- Stunting eradication program and binar teacher program



Indikator Indicator	Satuan Unit	2023	2022	2021
Produk dan Layanan Berkelanjutan Sustainable Product and Services				
Total Proyek Penjaminan Total Guarantee Project	Proyek Projects	50	49	37
Total Nilai Proyek Total Project Value	Rp Triliun Rp Trillion	497	550	357,7
Sumber Daya Manusia Human Capital				
Jumlah Karyawan Number of Employees	Orang People	164	152	143
Tingkat Rekrutmen Karyawan Employee Recruitment Rate	%	10,13	11,18	16,08
Tingkat Turnover Karyawan Employee Turnover Rate	%	3,17	6,10	8,06
Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan Average Employee Training Hours	Jam/Orang Hours/Employee	22	19	45
Presentase Karyawan yang Mendapat Promosi Jabatan Percentage of Employee Promoted	%	25,61	26,32	23,78
Rasio Gaji Karyawan Golongan Terendah/Entry Level Dibandingkan Upah Minimum Ratio of Lowest Position/Entry Level Employee Salary to Minimum Wage	%	130,59	137,88	136,09
Masyarakat Community				
Realisasi Penyaluran TJSL CSR Realization	Rp Miliar Rp Billion	4,43	3,49	5,57

Pencapaian Kinerja Aspek Tata Kelola (Governansi) Berkelanjutan Sustainability Governance Performance Achievement





Prestasi dan Reputasi Tahun 2023

Achievements and Reputation in 2023

Penghargaan Tahun 2023

Awards in 2023



15 – 17 Maret 2023
15–17 March 2023

Penghargaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) kategori Pengelolaan Sampah Perkotaan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada acara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Award

Received Corporate Environmental Social Responsibility (TSLP) Award in the category of Urban Waste Management by the Yogyakarta Municipal at the Corporate Social and Environmental Responsibility Award



17 Maret 2023
17 March 2023

Peraihan Bronze Winner untuk kategori Owned Media oleh PR Indonesia pada acara PR Indonesia Awards

Achieved Bronze Winner for Owned Media category by PR Indonesia at the PR Indonesia Awards



6 April 2023
6 April 2023

Peraihan Indonesia Best CEO Award 2023 pada kategori Infrastructure Support Financing oleh The Iconomics pada acara Indonesia Best 50 Most CEO Awards 2023

Achieved Indonesia Best CEO Award 2023 in the Infrastructure Support Financing category by The Iconomics at the 2023 Indonesia Best 50 Most CEO Awards



26 Mei 2023
26 May 2023

Peraihan Best CSR & TJSL in Infrastructure Guarantee Sector Industry 2023 oleh The Iconomics pada acara Indonesia Best CSR & TJSL Awards 2023

Achieved the Best CSR & TJSL in Infrastructure Guarantee Sector Industry 2023 by The Iconomics at the 2023 Indonesia Best CSR & TJSL Awards



7 Juni 2023
7 June 2023

Penghargaan Top CSR 2023 on Star 4, serta Kategori Khusus TOP CSR Award 2023 untuk CSR Bidang Lingkungan oleh Majalah Top Business pada acara TOP CSR Award 2023

Achieved Top CSR 2023 on Star 4 and on the Special Category of TOP CSR Award 2023 for CSR in the Environmental Sector from Top Business Magazine in the 2023 Top CSR Award



7 Juli 2023
7 July 2023

Peraihan ASEAN GRC Award dan Runner-up pada kategori Public Initiative Award oleh ERMA (Enterprise Risk Management Academy) pada acara ASEAN Risk Awards 2023

Received ASEAN GRC Award and Runner-up in the Public Initiative Award by ERMA (Enterprise Risk Management Academy) at the 2023 ASEAN Risk Awards



10 Agustus 2023
10 August 2023

Peraihan penghargaan Inovasi Sosial kategori *Silver* oleh PT Sucofindo pada acara *Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2023*

Achieved the Silver Social Innovation Award by PT Sucofindo at the 2023 Environmental and Social Innovation Award (ENSIA)



21 Agustus 2023
21 August 2023

Peraihan *PPP Agency of the Year 2023* pada acara *The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards*

Achieved 2023 PPP Agency of the Year at the Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards



30 Agustus 2023
30 August 2023

Peraihan *The Best GRC for Corporate Culture 2023, The Best GRC for Corporate Finance 2023, The Best CEO for GRC Excellence 2023* Oleh Business News pada acara *GRC & Performance Excellence Award 2023*

Achieved The Best GRC for Corporate Culture 2023, The Best GRC for Corporate Finance 2023, The Best CEO for GRC Excellence 2023 By Business News at the 2023 GRC & Performance Excellence Award



6 September 2023
6 September 2023

Peraihan *TOP GRC Award #5 dan The Most Committed GRC Leader 2023* Oleh TOP Business pada acara *TOP GRC Awards 2023*

Achieved TOP GRC Award #5 and The Most Committed GRC Leader 2023 By TOP Business at the 2023 TOP GRC Awards



25 Oktober 2023
25 October 2023

Peraihan penghargaan *Financial Services In-House* pada acara *Asian Legal Business Indonesia Law Awards* oleh Asian Legal Business Indonesia

Received the Financial Services In-House award at the Asian Legal Business Indonesia Law Awards by Asian Legal Business Indonesia

Sertifikasi dan Akreditasi di Tahun 2023

Certification and Accreditation in 2023



ISO 37001:2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Anti-Bribery Management System

Tanggal Perolehan Date Obtained
30 Maret 2022 30 March 2022

Lingkup Scope
Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Process of Procurement of Goods and Services

Berlaku Hingga Valid Until
29 Maret 2025 29 March 2025

Pemberi Sertifikasi Certifying Body
PT Chesna dan Komite Akreditasi Nasional
PT Chesna and National Accreditation Committee



Peristiwa Penting Keberlanjutan Tahun 2023

Important Events in Sustainability in 2023



6 Januari January

Penanaman 15.000 pohon di wilayah Dataran Tinggi Dieng, Banjarnegara bersama PT Geo Dipa Energi Sebagai bentuk Sinergi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
Planting 15,000 trees in the Dieng Plateau area, Banjarnegara with PT Geo Dipa Energi, as a form of Social and Environmental Responsibility (CSR) Synergy



24 Januari January

Penandatanganan Perjanjian Penjaminan & Regres pada proyek Jalan Tol Akses Patimban bersama PJPK Kementerian PUPR dalam rangka mendukung pengembangan ekspor industri otomotif nasional
Signing of Guarantee & Recourse Agreement on Patimban Access Toll Road project with the GCA, Ministry of Public Works and Housing, to support the development of national automotive industry exports



2 Februari February

Penandatanganan MoU Kerjasama terkait Implementasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) & *Creative Financing* antara PT PII dan Politeknik Negeri Madiun untuk mendorong penguatan dan partisipasi dari 48 pimpinan Politeknik seluruh Indonesia sebagai pelaku ekosistem di lingkungan Pendidikan Vokasi
Signing of the MoU of Cooperation on the Public Private Partnership (PPP) & Creative Financing between IIGF and Madiun State Polytechnic to encourage the strengthening and participation of 48 Polytechnic leaders throughout Indonesia as the ecosystem actors in the Vocational Education



14 Februari February

Seremonial kesepakatan bersama antara PT PII dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagai langkah strategis dalam upaya penguatan ekosistem pengembangan infrastruktur melalui skema KPBU khususnya dalam pengembangan *pipeline* penjaminan
A ceremonial joint agreement between IIGF and Ngawi Regency Government as a strategic step in efforts to strengthen the infrastructure development ecosystem through PPP scheme, especially in developing the guarantee pipeline



15 Februari February

Market Sounding untuk proyek TPA Sampah Regional Piyungan sebagai upaya untuk mendukung program Pemerintah DI Yogyakarta dalam meningkatkan pengelolaan persampahan melalui skema KPBU
Market Sounding of Landfill Project of Piyungan Region to support the Government of the Special Region of Yogyakarta to enhance waste management through PPP scheme



9 Maret March

Kerjasama PT PII melalui IIGF Institute dengan Universitas Mulawarman dalam pelaksanaan *Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR)* ke-24 dengan tema Peluang dan Tantangan Pengembangan Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Melalui Skema KPBU
IIGF, via IIGF Institute, in collaboration with Mulawarman University, held the 24th Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) with the theme Opportunities and Challenges for Public Street Lighting (PJU) Project Development through PPP Scheme



4-6 April

Pelaksanaan kegiatan TJSL PT PII di Panti Sosial Tresna Wedha Budi Mulia I Jakarta Timur, Panti Asuhan Muhammadiyah Tanah Abang dan Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama
CSR activities by IIGF at Tresna Wedha Budi Mulia I Social Center East Jakarta, Muhammadiyah Orphanage Tanah Abang and Anak Putra Utama Orphanage



8 April

Kolaborasi antara PT PII, Mata Garuda, LPDP dan PT Pembangunan Perumahan dalam kegiatan MGTalk2 yang bertajuk Peran Pemuda sebagai Penyangga Ibu Kota Negara (IKN) untuk Mendukung Percepatan Pembangunan yang Berkelanjutan
Collaboration between IIGF, Mata Garuda, LPDP, and PT Pembangunan Perumahan in the MGTalk2 activity entitled The Role of Youth as the Support of the National Capital City (IKN) to Encourage the Acceleration of Sustainable Development



5 Mei May

PT PII berpartisipasi pada kegiatan *Roundtable Discussion* bertemakan "Breaking Barriers – Scaling the sustainable finance agenda in Asia-Pacific" yang diselenggarakan oleh The Asset di Incheon, Korea Selatan yang merupakan rangkaian dari The 56th Annual Meeting of Asian Development Bank (ADB)
IIGF participated in the Roundtable Discussion with the theme "Breaking Barriers – Scaling the sustainable finance agenda in Asia-Pacific" organized by The Assets in Incheon, South Korea, which was a series of the 56th Annual Meeting of the Asian Development Bank (ADB)



24 Mei May

Kerja sama program pemberdayaan mustahik antara PT PII dengan BAZNAS melalui pembangunan Zmart untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Madiun, Jawa Timur
Cooperation of mustahik empowerment program between IIGF and BAZNAS through the construction of Zmart for the development of MSMEs in Madiun Regency, East Java.



7 Juni June

Pelaksanaan kesepakatan bersama antara PT PII dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) terkait kolaborasi pengembangan ekosistem pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU
Joint agreement between IIGF and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) on the cooperation in developing an infrastructure financing ecosystem through PPP scheme



13 Juni June

Pelaksanaan sosialisasi Kebijakan Kode Etik 2023 di internal PT PII sebagai komitmen penuh PT PII dalam penerapan budaya *integrity* dan kebijakan kode etik
Socialization of the 2023 Code of Conduct within IIGF, as IIGF's full commitment to implementing a culture of integrity and code of conduct



27 Juli July

Pelaksanaan *talkshow* oleh PT PII dengan BEI bertajuk "Fostering the Role of Capital Market for Creative Financing in Indonesia's Infrastructure Development" dalam rangka mendukung peran Pasar Modal untuk pembiayaan kreatif dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia
Talkshow by IIGF and IDX, entitled "Fostering the Role of Capital Market for Creative Financing in Indonesia's Infrastructure Development" to support the role of Capital Market for creative financing in Indonesia's infrastructure development



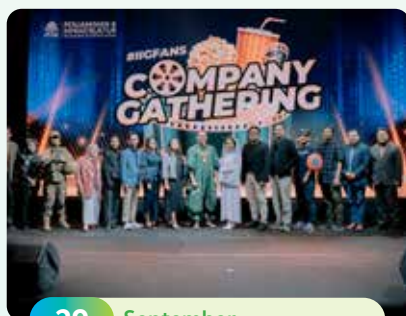
9 Agustus August

Kolaborasi antara PT PII, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Universitas Padjadjaran dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat
Collaboration between IIGF, West Java Provincial Government and Padjadjaran University to accelerate infrastructure development in West Java



10 Agustus August

Penandatanganan MoU antara Kementerian Perhubungan dengan PT PII tentang pemberian dukungan pembiayaan kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi
Signing of the MoU between the Ministry of Transportation and IIGF on the provision of creative financing for the Provision of Transportation Infrastructure



29 September

Pelaksanaan *company gathering* oleh PT PII yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris, Organ Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan PT PII
IIGF's company gathering, attended by Members of the Board of Commissioners, Board of Commissioners' Organs, Board of Directors, and IIGF's Employees



17 Oktober October

Penandatanganan perjanjian Proyek KPBu Jalan Tol JORR Elevated Cikunir – Ulujami yang terdiri atas Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Jakarta Metro Expressway selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Perjanjian Regres dengan Kementerian PUPR
Signing of the JORR Elevated Cikunir – Ulujami Toll Road PPP Project agreement consisting of a Guarantee Agreement between IIGF and PT Jakarta Metro Expressway as the Toll Road Business Entity (BUJT), and a Recourse Agreement with the Ministry of Public Works and Housing



19 Oktober October

Sinergi antara PT PII, PT SMF dan PT SMI dalam program penghijauan berupa penanaman 10.933 pohon di DAS Citarum, Nagrak Kabupaten Bandung
Synergy between IIGF, PT SMF and PT SMI in a reforestation program by planting 10,933 trees at the Citarum watershed, Nagrak, Bandung Regency



23 Oktober October

Partisipasi PT PII dalam kegiatan Kemenkeu Mengajar 8 (KM8) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan
IIGF's participation in the Kemenkeu Mengajar 8 (KM8) by the Ministry of Finance



28 Oktober October

PT PII membuka *booth* untuk meramaikan *gathering* perayaan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-77 dengan menampilkan hasil UMKM binaan PT PII dan aktivitas-aktivitas interaktif lainnya
IIGF opened a booth to enliven the gathering to celebrate the 77th Republic of Indonesia Oeang Day (HORI) by displaying the results of MSMEs assisted by IIGF, and other interactive activities



28 November

Inisiasi sinergi PT PII bersama dengan SMV Kemenkeu untuk mendukung penyelesaian masalah sampah di Indonesia melalui program WE CARE (Waste Management for Circular Economy) yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara di Yogyakarta
Synergy of IIGF with the Ministry of Finance's SMV to solve the waste problems in Indonesia through the WE CARE (Waste Management for Circular Economy) program which was inaugurated by the Directorate General of State Assets of the Ministry of Finance in Yogyakarta



30 November

Pelaksanaan seremonial peresmian Rumah Oleh-oleh Situbondo sebagai salah satu Program TJSL pemberdayaan masyarakat khususnya pelaku UMKM
Ceremonial inauguration of the Situbondo Souvenir House as one of its CSR Programs for community empowerment especially MSME players



4 Desember December

Penyelenggaraan kegiatan Talkshow Forum GRC bertajuk "Membangun Budaya Organisasi/Perusahaan dalam Mencegah Korupsi dan Penyuapan" oleh PT PII dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023
GRC Forum Talkshow entitled "Establishing an Organization/Company Culture in Preventing Corruption and Bribery" by IIGF to commemorate 2023 World Anti-Corruption Day



12 Desember December

Pelaksanaan *workshop* "Kebijakan Implementasi LST dalam mendorong Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan" yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Bappenas, dan LKPP dengan *support* dari Kemitraan Indonesia
"ESG Implementation Policy in Promoting Sustainable Infrastructure Development" workshop, involving Ministry of Finance, Ministry of Public Works and Housing, Bappenas, with the support from Indonesian Partnership



16 Desember December

Pelaksanaan rangkaian HUT PT PII yang ke-14 sekaligus *Employee Volunteerism Program* (EVP), segenap karyawan PT PII melaksanakan program penanaman 1.000 bibit pohon mangrove di Kawasan Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk serta donasi 1.000 *eco polybag*
At the 14th IIGF Anniversary, in conjunction with the Employee Volunteerism Program (EVP), all IIGF's employees planted 1,000 mangrove tree seedlings at the Angke Kapuk Mangrove Nature Park and donated 1,000 *eco polybags*



20 Desember December

Pelaksanaan program pembangunan hunian untuk Korban Bencana Kebakaran Langkat Sumatera Utara telah selesai dilaksanakan dan dilakukan serah terima bersama dengan 6 keluarga penerima manfaat bersama Pemerintah Daerah
Shelter construction program for Fire Victims in Langkat, North Sumatra were completed and handed over, together with 6 beneficiary families and the Local Government



Sambutan Direktur Utama

President Director's Statement

[GRI 2-22, 2-24] [OJK D.1]



Muhammad Wahid Sutopo
Direktur Utama
President Director



Tahun 2023 menjadi momentum positif bagi PT PII, seiring dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inovasi yang terus memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang, PT PII telah berhasil mencapai kinerja yang positif dan merupakan pencapaian terbesar sepanjang sejarah berdirinya Perseroan. Sebagai salah satu *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan, PT PII telah membukukan kinerja keuangan per 31 Desember 2023 dengan raihan laba bersih mencapai Rp835,82 miliar, meningkat 17,03% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp714,17 miliar. Pada akhir tahun 2023, aset Perseroan menjadi Rp 16,40 Triliun dan ekuitas Perseroan menjadi Rp 15,96 Triliun.

2023 was a positive momentum for IIGF, in line with sustainable growth and innovation that have important roles in facing challenges and seizing opportunities. IIGF managed to record positive performance as its biggest achievement in the Company's history. IIGF, as one of the Special Mission Vehicles (SMV) of the Ministry of Finance, has recorded financial performance as of 31 December 2023 with a net profit amounting to Rp835.82 billion, increased by 17.03% compared with 2022, which was Rp714.17 billion. At the end of 2023, the Company recorded Rp16.40 trillion of assets and Rp15.96 trillion equity.

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dengan penuh rasa bangga dan syukur, mewakili Direksi dan seluruh insan PT PII, izinkan saya menyampaikan Laporan Keberlanjutan PT PII Tahun 2023 yang merupakan salah satu media komunikasi untuk menyampaikan kinerja keberlanjutan Perseroan serta salah satu bentuk komitmen transparansi dan dukungan PT PII terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Dalam Laporan Keberlanjutan ini, PT PII mengungkapkan informasi atas komitmen, strategi, kinerja, inisiatif dan pengelolaan dampak keberadaan Perseroan dari sisi ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola (*governansi*) yang berkelanjutan sebagai kontribusi Perusahaan dalam mencapai *SDGs*.

Tahun ini, PT PII telah mulai menyusun Laporan Keberlanjutan yang mengacu pada IFRS S1 dan IFRS S2, termasuk pengungkapan atas empat pilar: *governance*, *strategy*, *risk management*, serta *metrics & targets*. Sebagai bagian dari upaya dan inisiatif dalam mengelola risiko iklim dan memitigasi isu-isu di tingkat korporasi serta proyek infrastruktur, PT PII berkomitmen kepada prinsip-prinsip keberlanjutan dan terus mengembangkan penerapan dan pengintegrasian ke dalam aspek bisnis dan operasionalnya. Beberapa inisiatif yang dilakukan sepanjang tahun 2023 meliputi *ESG benchmark* dengan Kemitraan Indonesia-Australia dan *ESG workshop* bersama *stakeholder*. Upaya-upaya ini menjadi salah satu strategi PT PII untuk dapat mengintegrasikan aspek LST secara menyeluruh dan berkelanjutan.

To All Distinguished Shareholders and Stakeholders,

With highest praise and gratitude, on behalf of the Board of Directors and all IIGF personnel, please allow me to submit the 2023 IIGF Sustainability Report, as one of the communication media to convey the Company's sustainability performance, as well as a form of commitment to transparency and IIGF's support for the Sustainable Development Goals (SDGs). In this Sustainability Report, IIGF discloses commitments, strategies, performance, initiatives, and impact management of the Company's presence in terms of economic, social, environmental, and sustainable governance as the Company's contribution to achieving SDGs.

This year, IIGF has started preparing a Sustainability Report that refers to IFRS S1 and IFRS S2, including disclosures on four pillars: governance, strategy, risk management, and metrics & targets. As part of its efforts and initiatives in managing climate risks and mitigating issues at the corporate level as well as infrastructure projects, IIGF is committed to the principles of sustainability and continues to develop its implementation and integration into its business and operational aspects. Some of the initiatives undertaken throughout 2023 include ESG benchmark with the Indonesia-Australia Partnership and ESG workshop with stakeholder. These efforts are one of IIGF's strategies to be able to integrate ESG aspects in a comprehensive and sustainable manner.



Didirikan sejak tahun 2009, PT PII memiliki visi untuk menjadi penggerak utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Sebagai alat fiskal pemerintah, PT PII menjalankan mandat Pemerintah Indonesia dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan melalui skema pembiayaan kreatif dan secara aktif berkontribusi pada strategi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) pemerintah yang sejalan dengan pencapaian SDGs. Untuk memenuhi komitmen ini, PT PII mengintegrasikan LST ke dalam budaya perusahaan dan strategi bisnisnya.

Established in 2009, IIGF has a vision to be the main driver in accelerating sustainable infrastructure development in Indonesia, to encourage economic growth and enhance the quality of life of Indonesia society. As a fiscal tool of the government, IIGF is mandated by the Government of Indonesia to support sustainable infrastructure development through creative financing schemes and actively contributes to the government's ESG (Environment, Social, and Governance) strategy, in line with the SDGs. To fulfil this commitment, IIGF integrates ESG into its corporate culture and business strategy.

Situasi Eksternal dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan Perusahaan

External Situation and Its Impact on Company Sustainability

Tantangan yang dihadapi PT PII dalam upaya mencapai keberlanjutan tidak terlepas dari pengaruh situasi eksternal, baik dari aspek ekonomi, lingkungan hidup, maupun sosial. Kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19, ditambah dengan ketidakpastian geopolitik, inflasi yang tinggi, dan volatilitas pasar keuangan, menambah kompleksitas dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional PT PII. Fluktuasi harga komoditas dan ketidakstabilan nilai tukar juga dapat mempengaruhi biaya operasional Perseroan.

The challenges faced by IIGF in its efforts to achieve sustainability cannot be separated from the influence of the external situation, both from the economic, environmental and social aspects. Global economic conditions that have not fully recovered from the impact of the COVID-19 pandemic, coupled with geopolitical uncertainty, high inflation, and financial market volatility, have added complexity to IIGF's strategic and operational decision-making. Commodity price fluctuations and exchange rate instability may also affect the Company's operating costs.

Perubahan iklim dan ketidaksetaraan sosial menjadi tantangan global yang mendesak, menuntut PT PII untuk beradaptasi dalam strategi bisnis dan memenuhi komitmen lingkungan. PT PII berupaya terus memastikan bahwa setiap proyek yang dijaminakan tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga ramah lingkungan, berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, dan memberikan manfaat sosial yang signifikan. Dalam menghadapi situasi eksternal ini, PT PII memperkuat strategi keberlanjutan dengan mengintegrasikan aspek LST ke dalam semua lini bisnis, yakin bahwa strategi adaptif dan inovatif akan mengatasi tantangan ini dan mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Climate change and social inequality are pressing global challenges, requiring IIGF to adapt its business strategy and fulfill its environmental commitments. IIGF strives to continue to ensure that each guaranteed project is not only financially profitable but also environmentally friendly, contributes to the reduction of carbon emissions, and provides significant social benefits. In the face of this external situation, IIGF strengthens its sustainability strategy by integrating ESG aspects into all business lines, confident that adaptive and innovative strategies will overcome these challenges and support sustainable infrastructure development in Indonesia.

Prestasi dan Tantangan dalam Periode Pelaporan

Achievements and Challenges in the Reporting Period

Dalam menghadapi tantangan keberlanjutan, PT PII mengintegrasikan prinsip LST ke dalam kebijakan keuangan, pengelolaan risiko perubahan iklim, serta melakukan penyesuaian dengan regulasi keuangan berkelanjutan yang terus berkembang. Tantangan lainnya mencakup membangun kapasitas internal, termasuk pelatihan karyawan, serta meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan terkait keberlanjutan. Untuk mencapai target keuangan berkelanjutan, PT PII berfokus pada inovasi, adaptasi, dan kemitraan strategis guna turut mendukung dalam memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia.

In facing sustainability challenges, IIGF integrates ESG principles into financial policies, manage climate change risks, and adjust to evolving sustainable finance regulations. Other challenges include building internal capacity, including employee training, and improving transparency in sustainability-related financial reporting. To achieve sustainable finance targets, IIGF focuses on innovation, adaptation, and strategic partnerships to help strengthen the sustainable finance ecosystem in Indonesia.



Pada tahun 2023, PT PII berhasil meraih berbagai penghargaan yang mencerminkan keberhasilan dalam menjalankan strategi keberlanjutan, diantaranya yakni:

1. Peraih *Best CSR & TJSL in Infrastructure Guarantee Sector Industry 2023* oleh The Iconomics pada acara Indonesia *Best CSR & TJSL Awards 2023*, yang mencerminkan dedikasi PT PII dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan baik.
2. Penghargaan *Top CSR 2023 on Star 4* serta Kategori Khusus *TOP CSR Award 2023* untuk CSR Bidang Lingkungan oleh Majalah Top Business pada acara *TOP CSR Award 2023*, yang menggarisbawahi upaya kami dalam melestarikan lingkungan dan memberikan dampak positif kepada masyarakat.
3. Peraih *TOP GRC Award #5* dan *The Most Committed GRC Leader 2023* oleh TOP Business pada acara *TOP GRC Awards 2023*, yang menegaskan komitmen kuat kami dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola, risiko, dan kepatuhan (GRC).

Prestasi-prestasi ini tidak hanya menunjukkan pengakuan eksternal atas usaha PT PII, tetapi juga memperkuat posisi Perseroan dalam menjalankan prinsip keberlanjutan dan program tanggung jawab sosial.

In 2023, IIGF won various awards that reflect the success in implementing sustainability strategies, including:

1. Achievement of Best CSR & TJSL in Infrastructure Guarantee Sector Industry 2023 by The Iconomics at the Indonesia Best CSR & TJSL Awards 2023 event, which reflects IIGF's dedication in carrying out the CSR program well.
2. The Top CSR Award 2023 on Star 4 as well as the Special Category of TOP CSR Award 2023 for CSR in the Environmental Sector by Top Business Magazine at the TOP CSR Award 2023 event, which underscores our efforts in preserving the environment and providing positive impacts to society.
3. TOP GRC Award #5 and The Most Committed GRC Leader 2023 by TOP Business at the TOP GRC Awards 2023, which emphasized our strong commitment to GRC principles.

These achievements not only show external recognition of IIGF's efforts, but also strengthen the Company's position in implementing sustainability principles and social responsibility programs.

Kebijakan untuk Merespons Tantangan dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan Policies to Respond to Challenges to Meet Sustainability Strategy

PT PII menjalankan strategi dan kebijakan strategis yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 untuk memperluas kebermanfaatan di berbagai sektor dan proyek infrastruktur. Pada tahun 2023, PT PII berfokus pada penguatan *pipeline* dalam mandat eksisting dan perluasan sektor penjaminan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), khususnya terkait upaya transisi energi dan perubahan iklim, serta pengembangan jasa *advisory* dan *capacity building*.

Inisiatif strategis secara umum telah dilaksanakan guna mendukung tercapainya target kinerja Perseroan tahun 2023 dengan memperluas jangkauan penjaminan di luar infrastruktur tradisional, seperti ekonomi hijau melalui pelaksanaan kerangka kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST), termasuk transisi energi dan fasilitas perkotaan dalam bentuk konservasi energi. Beberapa proyek yang diberikan penjaminan mencakup jalan, konservasi energi, ketenagalistrikan, air minum, transportasi, telekomunikasi, hingga pariwisata. Salah satu proyek transisi dan konservasi energi adalah proyek pengembangan jaringan transmisi dan distribusi di Jawa Bagian Barat dan Jawa Bagian Tengah (*Sustainable and Reliable Energy Access Program/SREAP*). PT PII juga mendukung proyek pencahayaan hemat energi di Kabupaten Madiun dan Lombok Barat dengan teknologi lampu LED untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

IIGF implements the strategies and strategic policies outlined in the 2023 Work Program and Budget (RKAP) to expand benefits in various sectors and infrastructure projects. In 2023, IIGF focused on strengthening the pipeline in the existing mandate and expanding the Public Private Partnership (PPP) guarantee sector, specifically in terms of energy transition and climate change, as well as establishing advisory services and capacity building.

Generally, strategic initiatives have been implemented to support the achievement of the Company's performance targets in 2023, by expanding the range of guarantees in addition to traditional infrastructure, such as the green economy, by applying the Environment, Social, and Governance (ESG) framework, including energy transition and urban facilities in the form of energy conservation. The guaranteed projects are very diverse, from roads, energy conservation, electricity, drinking water, transportation, telecommunications, to tourism. One of the energy transition and conservation projects is the transmission and distribution network development project in Western and Central Java (*Sustainable and Reliable Energy Access Program/SREAP*). IIGF supports energy-efficient lighting projects in Madiun and West Lombok Regencies with LED light technology to reduce greenhouse gas emissions.



Selain itu, PT PII berfokus pada keberlanjutan penjaminan *small scale* KPBU untuk mengembangkan infrastruktur potensial di berbagai daerah, termasuk proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Madiun dan Lombok Barat, dan proyek KPBU di 31 Kabupaten/Kota di Indonesia. PT PII juga menyiapkan Kajian *Grand Design* Kota Jakarta untuk optimalisasi aset Barang Milik Negara (BMN) pasca pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan, PT PII mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema pembiayaan kreatif dan inovatif yang menjadi salah satu upaya untuk mengatasi anggaran pemerintah yang terbatas dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. PT PII memperkenalkan *Innovative Financing Community* (*Infinity*) untuk memperkuat kolaborasi dan kerjasama dalam pembiayaan infrastruktur. Melalui komunitas ini, PT PII berkomitmen untuk mengenali risiko yang terus berubah dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan.

PT PII juga berkomitmen memperkuat implementasi LST untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik, meminimalisasi risiko, dan meningkatkan nilai jangka panjang. Saat ini, PT PII dalam proses untuk mengadopsi *Manual* dan *Framework* ESG Kementerian Keuangan untuk memastikan operasional perusahaan dan proyek yang dijamin telah memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, hak asasi manusia, serta kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar.

Dalam menjalankan mandatnya, PT PII menempatkan pemangku kepentingan sebagai fokus utama di seluruh operasi bisnis dan menyediakan struktur penjaminan baru untuk diversifikasi sektor-sektor baru, menunjukkan komitmen untuk mengakomodasi kebutuhan pasar dan membantu mengurangi risiko dalam penjaminan proyek-proyek yang didukung oleh Kementerian Keuangan dan Pemerintah Indonesia.

Pencapaian Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance Achievement

Visi PT PII adalah untuk menjadi entitas penggerak utama dalam mendukung upaya akselerasi pengembangan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan oleh pemerintah melalui berbagai skema inovatif. Dengan fokus pada keberlanjutan, PT PII berkomitmen untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Dukungan kami terhadap kinerja keberlanjutan perseroan dapat dilihat dari kinerja aspek ekonomi, lingkungan dan bagaimana kami memperhatikan pembangunan dan keberlanjutan sosial sebagai berikut:

In addition, IIGF focuses on the sustainability of small-scale PPP guarantees to develop potential infrastructure in various areas, including Public Street Lighting (PJU) in Madiun and West Lombok and PPP projects in 31 Regencies/Cities in Indonesia. IIGF also prepared the Grand Design Study for Jakarta City for the optimization of State-Owned Assets (BMN) after the relocation of the Capital to the Nusantara Capital City (IKN).

As a Special Mission Vehicle (SMV) of the Ministry of Finance, IIGF supports the acceleration of infrastructure development through creative and innovative financing schemes which are one of the efforts to face the limited government budget in encouraging infrastructure development acceleration in Indonesia. IIGF introduced the Innovative Financing Community (*Infinity*) to strengthen collaboration and cooperation in infrastructure financing. In this community, IIGF is committed to recognizing the changing risks and adapting to the needs of sustainable development.

IIGF is also committed to strengthening ESG to achieve good corporate governance, minimize risks, and increase long-term value. Currently, IIGF is in the process of adopting the Ministry of Finance's ESG Manual and Framework to ensure that the company's operations and guaranteed projects have taken into account social and environmental impacts, human rights, and employee welfare and the surrounding community.

In carrying out its mandate, IIGF considers stakeholders as the main focus in all business operations and provides new guarantee structures to diversify into new sectors, demonstrating a commitment to accommodating market needs and assisting in reducing risks in guaranteed projects supported by the Ministry of Finance and the Government of Indonesia.

IIGF's vision is to become a main driver entity in supporting the government's efforts to accelerate infrastructure development and sustainable development through various innovative schemes. With a focus on sustainability, IIGF is committed to supporting infrastructure projects that not only provide economic benefits but also pay attention to environmental and social aspects.

Our support for the company's sustainability performance can be seen from the performance of economic, environmental aspects and how we pay attention to social development and sustainability as follows:



Kinerja Aspek Ekonomi

Economic Performance

Secara umum, kinerja yang dibukukan PT PII berhasil mencapai target yang positif dan merupakan pencapaian terbesar sepanjang sejarah berdirinya Perseroan. PT PII telah membukukan kinerja keuangan yang sangat baik per 31 Desember 2023, dengan raihan laba bersih mencapai Rp835,82 miliar, meningkat 17,03% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp714,17 miliar. Sedangkan, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan adalah sebesar Rp116,34 miliar. Pada akhir tahun 2023, aset Perseroan menjadi Rp 16,40 triliun dan ekuitas Perseroan menjadi Rp 15,96 triliun. Prestasi ini menunjukkan bahwa PT PII mampu mengelola risiko dengan baik, memanfaatkan peluang bisnis dan menjalankan strategi keuangan yang efisien.

Dengan kinerja ekonomi di atas, maka nilai ekonomi langsung yang dihasilkan berupa pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan bisnis Perseroan tercatat sebesar Rp1,3 triliun tumbuh 21,05% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp1,1 triliun. Perseroan juga mendistribusikan nilai ekonomi yang merupakan beragam pengeluaran sebagai bentuk kontribusi Perseroan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan para pemangku kepentingan, seperti pembayaran gaji pegawai, pajak, dividen, maupun realisasi dana untuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Sejalan dengan perkembangan usaha, nilai ini juga tumbuh 15,65% dari tahun sebelumnya sebesar Rp582,74 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp673,91 miliar pada tahun 2023.

Sementara itu, nilai ekonomi yang ditahan, yaitu selisih antara nilai ekonomi yang dihasilkan dikurangi dengan nilai ekonomi yang didistribusikan guna pengembangan usaha Perseroan, mengalami kenaikan 27,26% menjadi sebesar Rp644,09 miliar dibanding tahun 2022 yakni sebesar Rp506,11 miliar.

Pada tahun 2023, PT PII terus mengoptimalkan perannya dalam mempercepat pengembangan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, baik melalui kegiatan komersial maupun melalui program TJSL. Upaya ini bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan pemerataan kesejahteraan dan mendukung pembangunan sarana prasarana umum. PT PII memberikan penjaminan proyek pembangunan infrastruktur pada tujuh sektor, yaitu pariwisata, ketenagalistrikan, telekomunikasi, air minum, transportasi, jalan, dan konservasi energi. Selain itu, PT PII telah memberikan bantuan untuk pembangunan Rumah Oleh-Oleh di Situbondo, Gerai Usaha UMKM Zmart di Madiun, Rumah Kemas UMKM di Maros, Akses Air Bersih di NTT dan 6 Plasma Pengelolaan Sampah Organik berbasis *Black Soldier Fly* (BSF) di Kota Yogyakarta melalui program TJSL, sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Generally, IIGF recorded a positive performance which was the greatest achievement in the history of the Company's establishment. IIGF recorded excellent financial performance as of 31 December 2023, with a net profit of Rp835.82 billion, increased by 17.03% compared to 2022 of Rp714.17 billion. Meanwhile, the total comprehensive profit for the year was Rp116.34 billion. At the end of 2023, the Company recorded Rp16.40 trillion of assets and Rp15.96 trillion equity. This achievement reflects that IIGF can manage risks well, seize business opportunities, and implement efficient financial strategies.

With the above economic performance, the Company generated direct economic value from the Company's business activities, of Rp1.3 trillion, increased by 21.05% compared to 2022, which was Rp1.1 trillion. The Company also distributed economic value, in the form of various expenditures, as the Company's contribution to increasing the rate of economic growth and the welfare of stakeholders, such as payment of employee salaries, taxes, dividends, and realization of funds for Social and Environmental Responsibility (CSR) programs. In line with business development, this value also increased by 15.65% compared to the previous year of Rp582.74 billion in 2022 to Rp673.91 billion in 2023.

Meanwhile, the retained economic value, which is the difference between the economic value generated minus the economic value distributed, used for the Company's business development, increased by 27.26% to Rp644.09 billion compared to 2022, which was Rp506.11 billion.

In 2023, IIGF optimized its role in accelerating infrastructure development and sustainable development in Indonesia, both through commercial activities and the CSR program. The objective is to accelerate economic growth, create equal distribution of welfare, and support the development of public infrastructure facilities. IIGF provides guarantees for infrastructure development projects in seven sectors, i.e., tourism, electricity, telecommunications, drinking water, transportation, roads, and energy conservation. In addition, IIGF has provided assistance for the construction of Situbondo Souvenir House, Zmart MSME Outlet in Madiun, MSME Packaging House in Maros, Clean Water Access in East Nusa Tenggara, and 6 Black Soldier Fly (BSF)-based Organic Waste Management Plasma in Yogyakarta using the CSR program, as part of the Company's commitment to providing maximum benefits to the community.



Kinerja Aspek Lingkungan

Environmental Performance

PT PII menunjukkan komitmen yang kuat untuk melestarikan lingkungan dengan memastikan setiap proyek yang dijaminakan memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan. Kepatuhan terhadap persyaratan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, seperti yang tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Rencana Mitigasi Risiko, adalah syarat utama yang wajib dipatuhi di setiap proyek yang dijamin.

Dalam hal komitmen internal terhadap pengelolaan dampak lingkungan, PT PII secara konsisten melaksanakan program pengelolaan dampak lingkungan secara berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan dengan mematuhi semua peraturan lingkungan serta melakukan pemantauan dan pengelolaan yang mencakup penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam, efisiensi energi, pencegahan polusi, pengendalian emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Untuk meningkatkan penyerapan emisi karbon dan melestarikan keanekaragaman hayati, PT PII melaksanakan program konservasi lingkungan hidup dan sumber daya alam hayati lokal secara berkelanjutan. Dalam upaya konservasi mangrove, PT PII menanam 1.000 bibit pohon mangrove di kawasan konservasi alam mangrove Angke, Kapuk, Jakarta Utara. PT PII juga menanam 2.290 pohon Kopi Arabika sejak Oktober 2022 hingga Oktober 2023 dalam rangka program pemulihan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum sebagai bagian dari konservasi sumber daya alam hayati. Selain itu, dalam upaya penanggulangan lahan kritis di Dataran Tinggi Dieng, PT PII juga menanam 15.000 pohon bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Melalui berbagai inisiatif dan komitmen ini, PT PII menunjukkan dedikasi yang kuat dalam melestarikan lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan memastikan bahwa semua proyek yang didukung memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Pencapaian Kinerja Sosial

Social Performance Achievements

Perseroan secara proaktif bertanggung jawab untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program TJSI yang dijalankan didasarkan pada komitmen Perseroan untuk mendukung pencapaian SDGs dan mendukung program pemerintah yang dilakukan secara rutin sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat dan komunitas lokal yang terbagi dalam lima fokus bidang utama yakni lingkungan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta sosial, budaya dan keagamaan.

IIGF demonstrates a strong commitment to preserving the environment by ensuring that each guaranteed project fulfills sustainability principles. Compliance with environmental management and monitoring requirements, as stipulated in the Environmental Impact Assessment (AMDAL) and Risk Mitigation Plan documents, is a vital requirement to be adhered to in every guaranteed project.

In terms of internal commitment to managing environmental impact, IIGF consistently implements environmental impact management programs in a sustainable manner. This commitment is actualized by complying with all environmental regulations and conducting monitoring and management, including the consumption and management of natural resources, energy efficiency, pollution prevention, greenhouse gas emission control, waste management, and biodiversity preservation.

IIGF exercises environmental conservation programs and local biological natural resources in a sustainable manner to increase the absorption of carbon emissions and preserve biodiversity. In terms of mangrove conservation, IIGF planted 1,000 mangrove tree seedlings Angke mangrove nature conservation area, Kapuk, North Jakarta. IIGF also planted 2,290 Arabica Coffee trees from October 2022 up to October 2023 for the Citarum watershed ecosystem recovery program as part of the conservation of biological natural resources. In addition, in an effort to overcome critical land in the Dieng Plateau, IIGF also planted 15,000 trees, in synergy with various stakeholders.

By means of these various initiatives and commitments, IIGF confirms strong dedication in preserving the environment and supporting sustainable development in Indonesia. The Company strives to enhance its environmental performance and ensure that all supported projects provide long-term benefits to the community and the environment.

The Company is proactively responsible for developing and enhancing community welfare. Various CSR programs are based on the Company's commitment to support SDGs achievement and support government programs, that are carried out regularly as a form of contribution to society and local communities, which are divided into five main focus areas, i.e., environment, community empowerment, education, health, and social, cultural, and religious affairs.



Dalam aspek sosial pemberdayaan masyarakat, Perseroan berkomitmen untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan menumbuhkan kemandirian ekonomi, dan pengembangan kapasitas masyarakat sekitar. Beberapa program yang dilakukan diantaranya adalah: Program WE CARE (*Waste Management for Circular Economy*), Program pemberdayaan UMKM, revitalisasi sarana prasarana pendidikan, program konservasi alam hingga program pelestarian lingkungan, peningkatan kesehatan termasuk pengentasan masalah *stunting* dan kegiatan bantuan sosial lainnya. Pada tahun 2023, total realisasi penyaluran dana TJSL Perseroan adalah sebesar Rp4,43 miliar, meningkat 27,12% dari tahun 2022 sebesar Rp3,48 miliar.

Dalam praktik pengelolaan karyawan, PT PII berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan karyawan menjadi individu berkualitas dan adaptif terhadap tantangan masa depan. Perusahaan fokus pada pengembangan kompetensi dengan meningkatkan keterampilan teknis dan soft skills karyawan melalui pelatihan berkelanjutan, penugasan langsung, dan kesempatan belajar yang tersedia untuk seluruh karyawan. Selain itu, PT PII mendorong budaya inovasi dan kolaborasi, menciptakan ruang bagi karyawan untuk berkontribusi dengan ide-ide kreatif dan solusi inovatif.

PT PII berkomitmen untuk terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Perusahaan memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan untuk berkembang dan mencapai potensi maksimalnya seiring dengan pertumbuhan perusahaan.

Selama tahun 2023, Perseroan telah menginvestasikan dana untuk program pendidikan dan pelatihan sebesar Rp4,01 miliar meningkat 265% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1,1 miliar. Rata-rata jam pelatihan per karyawan mencapai 22 jam pada tahun 2023. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 sebesar 19 jam/karyawan. Selain itu, Perseroan berhasil menekan tingkat *turnover* karyawan menjadi 3,17% di tahun 2023 dari 6,10% di tahun 2022.

Dalam rangka mendukung pengembangan produk dan layanan melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, PT PII telah memperkenalkan berbagai produk penjaminan yang inovatif. Selain itu, PT PII juga fokus pada pengembangan produk penjaminan di sektor energi terbarukan. Dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap isu perubahan iklim, PT PII berperan aktif dalam mendukung proyek-proyek energi baru terbarukan, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air. Produk penjaminan di sektor ini membantu menarik investasi swasta dan mempercepat transisi energi bersih di Indonesia.

In terms of the community empowerment social aspect, the Company is committed to enhancing the quality of life of the community, by fostering the economic independence and capacity building of the surrounding community. The programs implemented include WE CARE (*Waste Management for Circular Economy*) program, MSMEs empowerment program, revitalization of educational infrastructure, nature conservation program, environmental preservation program, health improvement, including *stunting* eradication and other social activities. In 2023, the Company distributed a total of Rp4.43 billion in CSR fund, which increased by 27.12% from 2022 of Rp3.48 billion.

In employee management practices, IIGF is committed to creating a work environment that supports the development of high-quality employees who are adaptive to future challenges. The company focuses on competency development by enhancing employees' technical and soft skills through continuous training, hands-on assignments, and learning opportunities available to all employees. In addition, IIGF encourages a culture of innovation and collaboration, creating space for employees to contribute with creative ideas and innovative solutions.

IIGF is committed to continue to grow and make a positive contribution to society and the environment. The company ensures that every employee has the opportunity to develop and reach their maximum potential in line with the Company's growth.

In 2023, the Company invested Rp4.01 billion for education and training programs, increased by 265% compared to Rp1.1 billion in 2022. The average training hours per employee reached 22 hours per employee in 2023. This figure increased compared to 2022, which was 19 hours/employee. In addition, the Company reduced the employee turnover rate to 3.17% in 2023 from 6.10% in 2022.

IIGF has introduced various innovative guarantee products to support the development of products and services through sustainable infrastructure development. In addition, IIGF focuses on developing guarantee products in the renewable energy sector. With the increasing attention to climate change issues, IIGF has an active role in supporting new renewable energy projects, including geothermal and hydropower projects. Products guaranteed in this sector attract private investment and accelerate the clean energy transition in Indonesia.



Selain itu, PT PII memperluas layanan *advisory* untuk membantu proyek-proyek infrastruktur menjadi lebih berkelanjutan. Layanan ini mencakup bantuan teknis dalam penyusunan studi kelayakan, analisis risiko, serta penyusunan dokumen *tender* yang memperhatikan aspek LST. Melalui layanan *advisory* ini, PT PII memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga ramah lingkungan dan bermanfaat sosial. Selain itu, keberadaan layanan ini berfungsi sebagai *platform* kolaboratif bagi berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Dengan berbagai upaya tersebut, PT PII terus berkomitmen untuk memainkan peran utama dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Melalui pengembangan produk dan layanan yang inovatif dan berkelanjutan, PT PII tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian SDGs.

Implementasi Tata Kelola (Governansi) Berkelanjutan Sustainable Governance

PT PII berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) yang didorong oleh kesadaran bahwa hal tersebut menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan praktik bisnis yang sehat, kompetitif dan berkelanjutan. Saat ini, PT PII turut menjadikan LST sebagai salah satu tolok ukur dalam implementasi GCG dan proses bisnis Perseroan. Hal ini tidak hanya memperluas cakupan GCG pada aspek keuangan dan operasional, tetapi juga menanamkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai pilar utama. Sehingga penerapan GCG Perseroan tidak hanya mengoptimalkan kinerja finansial, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, yang mencerminkan komitmen Perseroan terhadap keberlanjutan.

Penerapan GCG didukung oleh struktur tata kelola perusahaan yang terdiri dari organ utama dan pendukung yang telah memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing dalam pelaksanaan tata kelola. Perseroan juga telah memiliki kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan kode etik, kebijakan pengendalian gratifikasi, Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing Sistem* (WBS) dan peraturan internal lainnya yang menjadi landasan pelaksanaan GCG Perseroan. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola, Perseroan telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* sebagai sarana pengaduan atas praktik penyimpangan dan kecurangan serta pelanggaran atas prinsip-prinsip GCG yang berlaku. Perseroan juga telah memiliki dan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 sebagai landasan pedoman sistem manajemen anti penyuapan yang berlaku di Perseroan. Pengelolaan pengendalian gratifikasi dan anti korupsi ini diharapkan dapat memperkuat penegakan GCG Perseroan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

In addition, IIGF expanded its advisory services to assist infrastructure projects to be more sustainable. These services include technical assistance in the preparation of feasibility studies, risk analysis, and the preparation of tender documents that consider ESG aspects. Through these advisory services, IIGF ensures that infrastructure projects are not only financially profitable, but also environmentally friendly and socially beneficial. In addition, this service existence acts as a collaborative platform for various stakeholders to develop innovative and sustainable financing schemes.

Under various efforts, IIGF is committed to playing a leading role in encouraging sustainable infrastructure development in Indonesia. Through the development of innovative and sustainable products and services, IIGF not only supports economic growth, but also contributes significantly to the SDGs achievement.

IIGF is committed to enhancing Good Corporate Governance (GCG), encouraged by the awareness that governance is one of the key factors to ensure sound, competitive, and sustainable business. Currently, IIGF considers ESG as one of the benchmarks in the Company's GCG and business processes. This not only expands the GCG scope to the financial aspects of operations, but also instills social and environmental responsibility as key pillars. Thus, the Company's GCG not only optimizes financial performance, but also creates a positive impact on society and the environment, reflecting the Company's commitment to sustainability.

The corporate governance is implemented with support from the corporate governance structure, consisting of main and supporting organs with their respective responsibilities and duties in implementing governance. The Company also has a risk management framework, code of ethics policy, gratification control policy, Whistle Blowing System (WBS) and other internal regulations which are the basis for implementing the Company's GCG. In addition, to improve the quality of governance, the Company has a whistleblowing system in place as a means of reporting irregularities and fraudulent practices, as well as violations of applicable GCG principles. The Company has and implements ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System as a guideline for anti-bribery policies at the Company. The gratification control and anti-corruption management shall strengthen the GCG enforcement within the Company and enhance stakeholders' trust.



Perseroan juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kepatuhan terhadap implementasi GCG sebagai upaya untuk mencapai tujuan strategi keberlanjutan serta mencapai kinerja yang terukur dalam setiap aktivitas operasional Perseroan. Hal ini ditunjukkan dalam penilaian dan evaluasi penerapan GCG pada tahun 2023 yang menunjukkan peningkatan yang signifikan dari penilaian tahun sebelumnya yakni sebesar 90,036 dengan predikat “Sangat Baik”, meningkat 2,12% dari hasil penilaian tahun 2022 sebesar 88,170.

Prospek dan Peluang Prospects and Opportunities

Untuk mencapai tujuan pembangunan Indonesia Maju tahun 2045, Pemerintah pada tahun 2024 fokus pada transformasi ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, pengembangan ekonomi hijau, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), penguatan reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. Pembangunan infrastruktur akan difokuskan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur dalam APBN 2024 sebesar Rp422,7 triliun, naik 5,8% dari Rp399,6 triliun pada tahun 2023. Karena anggaran ini belum mencukupi kebutuhan investasi, pemerintah mendorong keterlibatan badan usaha dalam pembiayaan infrastruktur melalui berbagai skema pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan skema inovatif lainnya.

PT PII terus mendorong skema pembiayaan inovatif untuk *me-leverage* kapasitas APBN dengan mendorong investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. PT PII juga mendukung Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan proyek KPBU dan *sustainable finance*, sesuai dengan aspek LST dan konsep *green energy*. Sebagai SMV Kementerian Keuangan, PT PII menjamin risiko infrastruktur untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor.

Pengalaman lebih dari satu dekade membuat PT PII optimis dalam mendukung pengembangan infrastruktur nasional dan menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang kompleks di masa mendatang.

The Company is committed to enhancing compliance with GCG in an effort to achieve the Company's sustainability strategy objectives, and to achieve measurable performance in every Company's operations. This is reflected in the GCG assessment and evaluation in 2023, which showed a significant increase from the previous year's assessment of 90.036 with a “Very Good” predicate, increased by 2.12% from the 2022 result of 88.170.

In 2024, the Government will focus on transforming the economy through infrastructure development, enhancing human resources quality, developing a green economy, utilizing new renewable energy (NRE), strengthening bureaucratic reform, and simplifying regulations to achieve the development objectives of Advanced Indonesia by 2045. Infrastructure development is focused on supporting the acceleration of inclusive and sustainable economic transformation.

In 2024, the Government allocated Rp422.7 trillion of infrastructure budget at the 2024 State Budget, which increased by 5.8% from Rp399.6 trillion in 2023. As this budget is insufficient to fulfill the investment needs, the government encourages the involvement of business entities in infrastructure financing through various innovative financing schemes, including PPP and other innovative schemes.

IIGF encourages innovative financing schemes to leverage the load of the state budget by encouraging private investment in infrastructure development. IIGF supports Ministries/Institutions and Local Governments in developing PPP and sustainable finance projects, in accordance with ESG aspects and green energy concepts. As the SMV of the Ministry of Finance, IIGF guarantees infrastructure risks to provide certainty and comfort for investors.

With more than a decade of experience under IIGF's belt, IIGF is optimistic about supporting the national infrastructure development and facing future changes in the complex business dynamics.



Apresiasi dan Komitmen Keberlanjutan Masa Depan

Appreciation and Commitment to Future Sustainability

Pencapaian kinerja yang membanggakan di tahun ini, menjadi bukti keberhasilan PT PII dalam membangun ketangguhan di tengah tantangan yang dihadapi. Dengan dukungan, kolaborasi dan sinergi dari segenap pemangku kepentingan, kami optimis akan mampu mempertahankan pencapaian-pencapaian tersebut dan bahkan menggapai prestasi yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Sebagai penutup, atas nama Direksi, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap pemangku kepentingan, kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, Manajemen dan insan Perseroan, serta pemangku kepentingan lainnya atas dedikasi dan kerja keras selama ini. Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan yang diberikan kepada Perseroan untuk terus maju, berkembang dan berkelanjutan mencapai visi dan misi Perseroan. Pencapaian ini akan kami jadikan motivasi untuk terus memberikan kinerja dan kontribusi terbaik dalam menghadapi tantangan masa depan.

The proud achievement of sustainable performance is evidence of IIGF's success in establishing resilience amidst the challenges it faces. With the support, collaboration, and synergy of all stakeholders, we are optimistic that we shall be able to maintain these achievements, and actualize even better achievements in the future.

Finally, on behalf of the Board of Directors, I would like to express my highest gratitude and appreciation to the stakeholders, the Board of Commissioners, the Shareholders, the Management, and the Company's personnel, as well as other stakeholders, for their dedication and hard work. We thank and appreciate all stakeholders for the trust given to the Company to strive to advance, develop, and achieve the Company's vision and mission sustainably. We will use this achievement as a benchmark to motivate to provide the best performance and contribution in facing future challenges.

Jakarta, 6 Mei 2024 Jakarta, May 6 2024 [GRI 2-3]
Atas Nama Direksi On behalf of the Board of Directors

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Muhammad Wahid Sutopo

Direktur Utama
President Director



Komitmen dan Strategi Perusahaan Dalam Memperluas Dampak Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST)

The Company's Commitments and Strategies to Expanding Environmental, Social, and Governance (ESG) Impacts

[OJK A.1]

Pada tahun 2023, PT PII menghadapi berbagai tantangan keberlanjutan. Perubahan iklim menjadi salah satu isu atau tantangan utama yang dihadapi karena berdampak pada manusia dan lingkungan sekitar seperti kekeringan, kenaikan permukaan air laut, banjir, dan lain sebagainya, di mana Perseroan perlu beradaptasi dan mengembangkan solusi inovatif dalam mengintegrasikan aspek lingkungan dalam setiap proyek infrastruktur yang dijamin, guna mengurangi emisi karbon dan mengurangi potensi dampak negatif terhadap keberlanjutan lingkungan. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia juga menjadi perhatian penting karena masih banyak wilayah yang masih tertinggal dalam hal aksesibilitas dan kualitas infrastruktur, sehingga PT PII harus memastikan bahwa proyek yang dijamin dapat merata ke seluruh pelosok negeri. Di samping itu, membangun infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan tantangan lain yang dihadapi, mengingat pentingnya memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak hanya memenuhi standar kualitas tinggi, tetapi juga memastikan terimplementasinya aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) yakni mampu menjaga lingkungan, memperhatikan aspek sosial dan menjaga tata kelola dan aturan hukum yang baik. [OJK E.5]

Tantangan *funding gap* atau kesenjangan pendanaan juga menjadi isu krusial, dimana berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, pendanaan dan pembiayaan infrastruktur di Indonesia membutuhkan Rp7,12 kuartdriliun yang hanya dapat dipenuhi 37% dari anggaran pemerintah dan sisanya harus dipenuhi dengan skema pembiayaan kreatif (termasuk KPBU). *Scarring effect* akibat Pandemi Covid-19 membuat pergeseran fokus sumber daya (manusia dan anggaran) yang memberikan lebih banyak hambatan untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, *Budget Spending Preference* atau preferensi pengeluaran anggaran juga menjadi tantangan, di mana disparitas pengetahuan dan perubahan pola pikir dari pengadaan konvensional ke penggunaan skema pembiayaan kreatif. [OJK E.5]

In 2023, IIGF faced various sustainability challenges. Climate change is one of the main issues or challenges faced, because it affects humans and the surrounding environment, such as drought, sea level rise, flooding, etc. Thus, the Company needs to adapt and develop innovative solutions in integrating environmental aspects in every guaranteed infrastructure project, to reduce carbon emissions and potential negative impacts on environmental sustainability. In addition, the equitable distribution of infrastructure development in Indonesia is also a vital concern because there are still many areas that are lagging in terms of accessibility and quality of infrastructure. Therefore, IIGF shall ensure that guaranteed projects can be evenly distributed throughout the country. In addition, another challenge is establishing quality and sustainable infrastructure, given the importance of ensuring that the infrastructure built not only meets high-quality standards, but also ensures the Environmental, Social and Governance (ESG) aspects, i.e., be able to protect the environment, care for social aspects, and maintain good governance and law. [OJK E.5]

The funding gap is also a crucial challenge. Based on the 2020–2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), infrastructure funding and financing in Indonesia requires Rp7.12 quardrillion, which can only be met by 37% of the government budget. The remaining budget shall be fulfilled by creative financing schemes (including PPP). Scarring effect due to the COVID-19 Pandemic shifted the focus of resources (human and budget), which obstructs infrastructure development. In addition, Budget Spending Preference is also a challenge, where knowledge disparity and mindset change from conventional procurement to creative financing schemes. [OJK E.5]



Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, PT PII berkomitmen untuk terus melakukan optimalisasi peran strategis Perseroan sesuai dengan mandat yang diamanatkan oleh Kementerian Keuangan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan melalui pembiayaan inovatif, serta terus meningkatkan kebermanfaatan untuk keberlanjutan Perseroan. Dalam rangka terus memperkuat peran Perseroan dalam penjaminan KPBU, pada tahun 2023 PT PII menfokuskan pada inisiatif strategis atau sasaran Perseroan sebagai berikut: [S1-30a] [S2-10a]

To answer these challenges, IIGF is committed to optimizing the Company's strategic role in accordance with the mandate given by the Ministry of Finance, to encourage sustainable infrastructure development through innovative financing schemes, as well as to increase benefits for the Company's sustainability. In 2023, IIGF focused on the following Company's strategic initiatives or targets to continue to strengthen the Company's roles in PPP guarantees: [S1-30a] [S2-10a]

Pengusahaan dan penjaminan atas sektor yang mendukung upaya transisi energi dan menghadapi tantangan perubahan iklim (*climate change*), serta memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat

Business and guarantees for sectors that support energy transition efforts and face the climate change challenges, and have a beneficial impact on society



Replikasi penjaminan *small scale* KPBU yang berperan dalam mendorong proyek infrastruktur yang dapat memberikan dampak ekonomi yang besar dan dirasakan oleh masyarakat luas

Replication of small-scale PPP guarantees with a role in encouraging infrastructure projects that can have a significant economic impact and be felt by the community



Dalam rangka pencapaian sasaran Perseroan tersebut, terdapat tema strategi tahunan yang dijadikan acuan dalam pembuatan RKAP setiap tahunnya. Strategi tahunan yang dijalankan di tahun 2023 dan yang akan dijalankan Perseroan untuk empat tahun mendatang dapat dijelaskan secara umum sebagai berikut: [S1-30a, 30b] [S2-10a, 10.c, 10.d]

An annual strategy theme is used as a reference in making the RKAP every year to achieve the Company's objectives. The annual strategy in 2023 and the strategy to be conducted by the Company for the next four years in general are as follows: [S1-30a, 30b] [S2-10a, 10.c, 10.d]



Arah Strategis Pengembangan Jangka Panjang RJPP PT PII Tahun 2023 – 2027

Strategic Direction for Long Term Development of IIGF's RJPP 2023 – 2027

[S1-30a, 30b, 46, 51] [S2-10a, 10.c, 10.d, 33]

Memperluas kebermanfaatan di berbagai sektor maupun dalam tahapan proyek infrastruktur Expanding benefits in various sectors and in infrastructure project stages

Pada tahun 2023, strategi yang ingin dijalankan oleh Perseroan adalah peningkatan kontribusi dalam ekosistem pembangunan infrastruktur dan memperluas kebermanfaatan di berbagai sektor dan tahapan proyek infrastruktur. Adapun bentuk nyata dari implementasi strategi tersebut adalah adanya layanan *advisory*, PDF non-KPBU (pendampingan terkait program pemanfaatan BMN), serta melengkapi sertifikasi CP3P melalui modul *execution*.

In 2023, the Company's strategy was to increase its contribution to the infrastructure development ecosystem and expand its usefulness in various sectors and phases of infrastructure projects. The tangible form of the strategy is the existence of advisory services, non-PPP PDF (assistance related to BMN utilization programs), and completion of CP3P certification through the execution module.

Memperbesar dampak kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur Increasing the impact on community welfare through infrastructure development

Pada tahun 2024, fokus dari strategi Perseroan adalah mempersiapkan perluasan sektor infrastruktur sosial pada segmen layanan penjaminan untuk memperbesar dampak kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Di tahun tersebut, Perseroan diperkirakan akan memulai melakukan penjaminan untuk sektor fasilitas pendidikan dan mempersiapkan perluasan ke sektor kesehatan pada tahun berikutnya.

In 2024, the focus of the Company's strategy is to prepare for the expansion of the social infrastructure sector in the guarantee services segment to enhance the impact of community welfare through infrastructure development. In that year, the Company shall start the guarantee to education facility sector and prepare for expansion to the health sector in the following year.

Meningkatkan kenyamanan partisipasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur terkini dan proyek berkelanjutan Increasing the comfort of participation to accelerate the development of the latest infrastructure and sustainable projects

Di tahun 2025, Perseroan berencana meluncurkan layanan penjaminan untuk proyek *renewables* dengan skema selain KPBU untuk meningkatkan kenyamanan investasi pada sektor tersebut. Selain itu, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, posisi *gearing ratio* pada tahun 2025 sudah mendekati nilai 8x pada skenario *Business as Usual* (BAU) + *enhancement* + *diversification*, sehingga Perseroan perlu mulai mempersiapkan implementasi strategi yang berhubungan dengan manajemen eksposur risiko ataupun peningkatan kapasitas.

In 2025, the Company will launch the guarantee services for renewables projects with schemes in addition to PPP to enhance the investment confidence in the sector. In addition, based on the calculation, the gearing ratio position in 2025 will be close to 8x in the Business as Usual (BAU) + enhancement + diversification scenario. Thus, the Company needs to start preparing the strategies to be implemented in terms of risk exposure management or capacity building.

Menjadi *top of mind solution* untuk mendukung keberlangsungan proyek infrastruktur Become a top of mind solution to support the sustainability of infrastructure projects

Untuk tahun 2026, Perseroan akan mulai untuk melakukan pelaksanaan jasa *capacity building* untuk *stakeholders* dalam ekosistem infrastruktur yang lebih menyeluruh melalui pelaksanaan *pilot project* dan *market study* mengenai sertifikasi dan pelatihan topik baru terkait proyek infrastruktur, agar Perseroan bisa menjadi *top-of-mind solution* untuk mendukung keberlangsungan proyek infrastruktur.

In 2026, the Company will start to implement capacity building services for stakeholders in a more comprehensive infrastructure ecosystem by implementing pilot projects and market studies on certification and training on new topics related to infrastructure projects. Thus, the Company can become a top-of-mind solution to support the sustainability of infrastructure projects.

Memperkuat dukungan Perseroan pada ekosistem infrastruktur Indonesia Strengthening the Company's support for the Indonesian infrastructure ecosystem

Pada tahun 2027, diharapkan Perseroan telah mengimplementasikan seluruh rencana terkait pengembangan bisnis, baik yang bersifat komersial maupun *enabler*. Dengan demikian, Perseroan dapat mulai merencanakan pengembangan peran dan bisnis untuk periode berikutnya, dengan kapabilitas dan kapasitas yang sudah lebih komprehensif.

By 2027, the Company shall have implemented all plans related to business development, both commercial and enabler. Thus, the Company can start planning for role and business development for the next period, with more comprehensive capabilities and capacities.





Sebagai bentuk penerapan strategi keberlanjutan dalam menghadapi dampak perubahan iklim, di tahun 2023 PT PII telah mendukung proyek pembangkit listrik energi terbarukan, yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik sebagai energi bersih dan meningkatkan rasio elektrifikasi, hal ini juga sejalan dengan agenda pemerintah mencapai ekonomi rendah karbon yang memiliki target bauran pencapaian energi terbarukan 23% pada tahun 2025. Di lingkungan kantor, PT PII telah mengurangi pemakaian Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan menggantinya dengan penggunaan botol kaca untuk meminimalisasi limbah plastik yang dihasilkan dan mendukung pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, menggunakan kendaraan berbasis listrik sejak 2022, menerapkan mekanisme kerja kombinasi antara *Work from Home* (WFH) dan *Work from Office* (WFO) sehingga karyawan yang melakukan WFH dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan kendaraan dan penghematan bahan bakar serta waktu perjalanan. [S1-33a, 33.b] [S2-14a]

Tantangan kesenjangan pembiayaan infrastruktur dan tantangan perubahan iklim terus mendorong minat investasi infrastruktur menjadi lebih hijau dan berkelanjutan. Untuk itu, Kementerian Keuangan berinisiatif untuk mengintegrasikan faktor LST ke dalam dukungan dan fasilitas pemerintah untuk proyek infrastruktur guna mengatasi potensi risiko lingkungan dan sosial, yang berdampak pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG), serta menjadi peluang untuk memanfaatkan ketersediaan pembiayaan yang bersifat lebih hijau dan berkelanjutan. Sebagai tindakan nyata, Kementerian Keuangan telah meluncurkan kerangka kerja dan *manual* Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (*ESG Framework* dan *Manual*) sebagai dukungan dan fasilitas pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur. *ESG Framework* merupakan prinsip-prinsip/standar yang digunakan dalam pengelolaan bisnis/proses bisnis yang mengikuti kriteria tertentu dan yang membawa dampak positif bagi lingkungan, sosial dan tata kelola. *ESG Framework* akan diterapkan dalam proses pemberian pembiayaan infrastruktur, khususnya proyek KPBU. *Framework* ini mencakup 10 standar ESG yang menekankan dimensi lingkungan, dimensi sosial dan dimensi tata kelola sebagai berikut:

As a form of implementing a sustainability strategy in facing the impacts of climate change, in 2023, IIGF supported renewable energy power plant projects, in addition to aiming to increase the reliability of electricity supply as clean energy and increase the electrification ratio. This is also in line with the government's agenda to achieve a low-carbon economy, which has a target mix of 23% renewable energy by 2025. In the office, IIGF reduced the use of Bottled Water (AMDK) by replacing it with cups to minimize plastic waste generated and support the reduction of negative impacts on the environment, using electric-based vehicles since 2022, implementing a combination of working mechanisms between *Work from Home* (WFH) and *Work from Office* (WFO) so that employees who work from home can reduce greenhouse gas emissions generated by vehicles and save fuel and travel time. [S1-33a, 33.b] [S2-14a]

The infrastructure financing gap and climate change challenges keep driving the interest in infrastructure investment to be greener and more sustainable. Therefore, the Ministry of Finance initiated to integrate ESG factors into government support and facilities for infrastructure projects to address potential environmental and social risks, impact the Sustainable Development Goals (SDGs) achievements, and seize an opportunity to capitalize on the availability of greener and more sustainable financing. As a concrete action, the Ministry of Finance, launched an Environmental, Social, and Governance Framework and Manual (*ESG Framework* and *Manual*) for government support and facilitation of infrastructure financing. *ESG Framework* is a set of principles/standards used in managing business processes that follow certain criteria and have a positive impact on the environment, social, and governance. The *ESG Framework* shall be applied in the process of providing infrastructure financing, especially PPP projects. The framework includes 10 ESG standards that emphasize the environmental, social and governance dimensions as follows:



Sepuluh Standar ESG oleh Kementerian Keuangan Ten ESG Standards by the Ministry of Finance



ESG *Framework* dan *Manual* diterapkan pada seluruh infrastruktur yang didukung oleh SMV Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu SMV Kementerian Keuangan, PT PII berkomitmen mendukung penerapan ESG *Framework* tersebut untuk pembangunan proyek infrastruktur, yakni dengan mengadaptasi ESG *Framework* ini dalam penyediaan penjaminan proyek KPBU. Selain itu, perluasan mandat PT PII sebagai *enabler* dalam penyiapan *business case* juga akan mulai mengimplementasikan aspek-aspek LST ke dalam kualitas infrastruktur. Pada tahun 2023, penerapan LST PT PII masih dalam tahap *need analysis* dari penerapan ESG *Framework* Kementerian Keuangan.

The ESG framework and manual shall be applied to all infrastructure supported by the Ministry of Finance's SMV. As one of the Ministry of Finance's SMVs, IIGF is committed to supporting the ESG Framework for infrastructure project development, which will adopt the ESG Framework in the provision of PPP project guarantees. In addition, IIGF's wider mandate as an enabler to prepare business cases also implements ESG aspects into infrastructure quality. In 2023, IIGF's ESG needs further analysis in terms of the Ministry of Finance's ESG Framework implementation.



Memperkuat Program Keberlanjutan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Strengthening Sustainability Programs to Support Sustainable Development

[GRI 2-23] [OJK A.1, C.1]

PT PII telah mengintegrasikan program keberlanjutan Perseroan terhadap pencapaian SDGs dengan menggunakan pendekatan SDGs *Compass* yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti GRI, United Nations Global Compact dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), untuk memetakan isu dan program-program Perseroan yang relevan terhadap setiap indikator-indikator SDGs. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan prinsip keberlanjutan secara terarah, terukur, dapat dievaluasi dan ditingkatkan penerapannya. Penjabaran capaian program keberlanjutan tahun 2023 yang relevan dengan tujuan SDGs adalah sebagai berikut:

IIGF integrated the Company's sustainability program towards achieving SDGs with reference to SDGs *Compass* developed by international institutions such as GRI, United Nations Global Compact, and World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), to map relevant issues and program the relevant SDGs indicators in the Company's activities. The objective is to implement sustainability principles in a directed, measurable, evaluable, and improved implementation. The description of the 2023 sustainability program achievements that are relevant to the SDGs objective is as follows:



Integrasi Program Keberlanjutan Perseroan terhadap SDGs
Integration of the Company's Sustainability Program towards SDGs
[OJK F.25]



Topik Keberlanjutan yang Material Material Sustainability Topics	SDGs	Program dan Pencapaian Tahun 2023 Programs and Achievements in 2023	GRI Standards
EKONOMI: Memperluas Dampak Bagi Pertumbuhan Perekonomian yang Tangguh, Inklusif dan Berkelanjutan ECONOMY: Expanding the Effect for Resilient, Inclusive, and Sustainable Economic Growth			
Distribusi nilai ekonomi kepada pemangku kepentingan Distribution of economic value to the stakeholders	   	- Perolehan nilai ekonomi langsung yang dihasilkan (pendapatan) sebesar Rp1.318,00 miliar, meningkat 21,05% dari tahun 2022 - Distribusi nilai ekonomi kepada pemangku kepentingan Perseroan sebesar Rp673,91 miliar, meningkat 15,65% dari tahun 2022 - Direct economic value generated (revenue) of Rp1,318.00 billion, increased by 21.05% from 2022 - Distributed economic value to the Company's stakeholders of Rp673.91 billion, which increased by 15.65% from 2022	GRI 201-1
Mengoptimalkan manfaat/dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur Optimizing indirect economic benefits/impacts from infrastructure development	     	- Menciptakan manfaat/dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur berkelanjutan, melalui penjaminan infrastruktur pada proyek yang dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antar wilayah dan pembangunan infrastruktur yang bersifat bantuan melalui program TJSL yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar untuk peningkatan taraf ekonomi dan sosial masyarakat - Meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat melalui Program Pemberdayaan UMKM "Rumah Oleh-oleh Situbondo" dan "Rumah Kemas Maros" - Mengoptimalkan pelibatan pemasok lokal sebanyak 306 pemasok (98,39% dari total pemasok) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal - Creating economic benefits/impacts from sustainable infrastructure development, through infrastructure guarantees on projects that can have a major impact on economic improvement through increased connectivity between regions and infrastructure development in the form of assistance through the CSR program that supports the fulfillment of basic needs to improve the community's economic and social standards - Increasing economic added value for the community through the MSME Empowerment Program, "Situbondo Souvenir House" and "Maros Packaging House" MSME Empowerment Programs - Optimizing the involvement of 306 local suppliers (98.39% of total suppliers) to encourage local economic growth	GRI 203-1 GRI 203-2
LINGKUNGAN: Memperluas Peran dan Manfaat Bagi Keberlanjutan Lingkungan ENVIRONMENT: Expanding Roles and Benefits for Environmental Sustainability			
Mengelola penggunaan energi dan intensitas energi Managing energy consumption and energy intensity	  	- Penggunaan energi Perseroan sebesar 670,51 gigajoule, dengan nilai intensitas penggunaan energi sebesar 4,08 gigajoule/karyawan - Melakukan penghematan atau efisiensi energi sebesar 710,51 gigajoule, meningkat 3,12% dari tahun 2022 melalui program penggunaan lampu LED, pengoptimalan pemanfaatan alat elektronik, program penghematan energi di peralatan kantor, penggunaan kendaraan berbahan bakar alternatif dan pemantauan dan pemeliharaan kendaraan yang teratur - The Company's energy consumption was 670.51 gigajoules with an energy consumption intensity of 4.08 gigajoules/employee - Making energy savings or efficiency of 710.51 gigajoules, increased by 3.12% from 2022 through programs of using LED lights, optimizing the use of electronic devices, energy saving programs in office equipment, using alternative fuel vehicles, and regular monitoring and maintenance of vehicles.	GRI 302-1 GRI 302-3 GRI 302-4 GRI 302-5



Topik Keberlanjutan yang Material Material Sustainability Topics	SDGs	Program dan Pencapaian Tahun 2023 Programs and Achievements in 2023	GRI Standards
Memitigasi dampak emisi gas rumah kaca Mitigating the impact of greenhouse gas emissions	    	- Jumlah emisi GRK <i>Scope 1</i> dan <i>Scope 2</i> yang dihasilkan Perseroan sebesar 122,90 ton CO₂eq dengan nilai intensitas emisi GRK sebesar 0,74 ton CO₂eq/karyawan - Mengambil langkah-langkah inisiatif pengurangan atau reduksi emisi GRK melalui program efisiensi energi, penggunaan kendaraan ramah lingkungan, pengelolaan limbah dan penanaman pohon atau penyuluhan lingkungan - Komitmen tidak menggunakan Bahan Perusak Ozon (BPO) untuk AC yang ramah lingkungan dan menggunakan APAR yang tidak menggunakan bahan kimia halon sehingga tidak terdapat perhitungan volume produksi, impor maupun ekspor emisi zat BPO di seluruh wilayah operasional Perseroan - The total <i>Scope 1</i> and <i>Scope 2</i> GHG emissions generated by the Company amounted to 122.90 tons CO₂eq with a GHG emission intensity value of 0.74 tons CO₂eq/employee - Taking initiatives to reduce or mitigate GHG emissions through energy efficiency programs, using environmentally friendly vehicles, waste management, and tree planting or environmental education - The commitment to not using Ozone Depleting Substances (ODS) for air conditioners and using fire extinguishers that do not use halon chemicals. Therefore, there is no calculation of production volume, import, or export of ODS emissions in all the Company's operational areas	GRI 305-1 GRI 305-2 GRI 305-4 GRI 305-6
Mengelola air dan air limbah (efluen) yang bertanggung jawab Managing water and wastewater (effluent) responsibly	   	- Mencegah dampak negatif pada badan air dengan tidak menggunakan air dan membuang air limbah domestik yang bersumber atau diambil dari badan air yang berada di kawasan lindung maupun yang berada di lokasi daerah <i>water-stressed area</i> - Jumlah volume air yang ditarik/diambil dan digunakan sebanyak 0,15 megaliter - Mendorong upaya efisiensi penggunaan air melalui sosialisasi kepada para karyawan untuk melakukan penghematan/efisiensi penggunaan air, penggunaan teknologi terbarukan, melakukan program kesadaran dan pendidikan praktik terbaik dalam konservasi air, optimalisasi sistem irigasi, melakukan pemantauan terkait air, serta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga terkait konservasi air - Memastikan air limbah domestik Perseroan terkelola dengan baik dengan tidak membuang air limbah domestik ke lokasi-lokasi daerah <i>water-stressed area</i>, tidak mencemari badan air dan sesuai standar baku mutu - Preventing negative impacts on water bodies by not consuming water and discharging domestic wastewater sourced or extracted from water bodies located in protected areas or in water-stressed areas - Total volume of water withdrawn/taken and consumed of 0.15 megaliters - Encouraging water consumption efficiency efforts through socialization to employees to save/efficiency in water use, use of renewable technology, conducting awareness and education programs on best practices in water conservation, optimizing irrigation systems, conducting water-related monitoring, and collaborating with third parties related to water conservation - Ensuring that the Company's domestic wastewater is well managed by not discharging domestic wastewater to water-stressed areas, not polluting water bodies, and in accordance with quality standards	GRI 303-1 GRI 303-2 GRI 303-3 GRI 303-4 GRI 303-5



Topik Keberlanjutan yang Material Material Sustainability Topics	SDGs	Program dan Pencapaian Tahun 2023 Programs and Achievements in 2023	GRI Standards
Mengelola limbah B3 dan non B3 yang bertanggung jawab Managing B3 and non-B3 waste responsibly	   	- Mengimplementasikan program untuk mengurangi limbah seperti program hemat kertas (<i>paperless</i>) dan pengurangan sampah plastik - Meluncurkan program <i>flagship</i> WE CARE (Waste Management for Circular Economy) dalam pengelolaan sampah organik maupun anorganik - Kegiatan operasional kantor Perseroan menghasilkan limbah B3 sebanyak 7,65 kg dan limbah non B3 sebanyak 2.075,20 kg. Atas limbah tersebut, PT PII telah melakukan pengelolaan berdasarkan jenis limbah dengan bekerja sama dengan pihak ketiga - Implementing programs to reduce waste, such as paper-saving programs and plastic waste reduction - Launching WE CARE (Waste Management for Circular Economy) flagship program in organic and inorganic waste management - The Company's office operations generated 7.65 kg of hazardous (B3) waste and 2,075.20 kg of non-B3 waste. IIGF has carried out management for both B3 and non-B3 waste based on the type of waste in collaboration with third parties	GRI 306-1 GRI 306-2 GRI 306-3 GRI 306-4 GRI 306-5
Melestarikan keanekaragaman hayati Conserving biodiversity	    	- Kantor Perseroan tidak berada di dekat atau di dalam daerah konservasi atau daerah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi - Melaksanakan program pelestarian lingkungan hidup melalui Pemulihan Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Penanggulangan Lahan Kritis di Kawasan Dataran Tinggi Dieng serta Penanaman Pohon Mangrove - The Company's office is not located near or in a conservation area or an area with high biodiversity value - Implementing environmental conservation programs through Citarum Watershed Ecosystem Restoration, Critical Land Management in Dieng Plateau, and Mangrove Tree Planting	-
SOSIAL: Memperluas Dampak bagi Pembangunan Sosial SOCIAL: Expanding Social Development Impact			
Memperluas dampak, Menghadirkan potensi SDM Unggul Expanding impact, Presenting Excellent HR potential	    	- Persentase gaji pegawai <i>entry level</i> dengan upah minimum adalah sebesar 130,59% terhadap upah minimum - Sebanyak 43 orang manajemen senior pada pangkat VP – EVP atau 26% dari total karyawan, dimana seluruhnya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di area Jabodetabek - The entry level salary to minimum wage ratio is 130.59% - A total of 43 senior management at the rank of VP – EVP or 26% of the total employees, all of whom are Indonesian citizens (WNI) domiciled in the Greater Jakarta area - Merekrut 16 orang karyawan baru dengan tingkat rekrutmen sebesar 10,13% - Menjaga <i>turnover</i> sebesar 3,17% dari total keseluruhan karyawan sebanyak 164 karyawan - PT PII memiliki kebijakan perbedaan pemberian tunjangan berdasarkan status kepegawaian antara karyawan tetap dan tidak tetap dengan tetap memperhatikan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku - Sebanyak dua karyawan perempuan menggunakan hak <i>maternity leave</i> dan empat karyawan laki-laki menggunakan hak <i>paternity leave</i> dimana seluruhnya (100%) kembali bekerja setelah masa cuti berakhir - Recruiting 16 new employees with a recruitment rate of 10.13% - Maintaining a turnover rate of 3.17% from a total of 164 employees - IIGF has a policy of differentiating allowances by employment status, i.e., permanent and non-permanent employees, while still paying attention to prevailing employment regulations - Two female employees exercised their maternity leave and four male employees exercised their paternity leave where all (100%) returned to work after the leave ended	GRI 202-1 GRI 202-2 GRI 401-1 GRI 401-2 GRI 401-3



Topik Keberlanjutan yang Material Material Sustainability Topics	SDGs	Program dan Pencapaian Tahun 2023 Programs and Achievements in 2023	GRI Standards
		- Memberikan kesempatan yang sama dan setara bagi setiap individu untuk berkarir dan menempati posisi strategis di Perseroan. Sebanyak 2 orang wanita menempati posisi Dewan Komisaris, 3 orang wanita menempati posisi Executive Vice President (EVP) dan 11 orang wanita menempati posisi Vice President (VP)/Senior Vice President (SVP) - Rasio <i>basic salary</i> karyawan berdasarkan kategori karyawan dan jenis kelamin di Perseroan adalah sebesar 1:1 - Providing fair and equal opportunities for every individual to have a career and occupy a strategic position in the Company. Two (2) women have the position of Board of Commissioners, three (3) women are in the Executive Vice President (EVP), and eleven (11) people have the position of Vice President (VP)/Senior Vice President (SVP) - The employee's basic salary ratio by employee category and gender in the Company is 1:1	GRI 405-1 GRI 405-2
		- Program pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan melalui berbagai program <i>inhouse training</i>, <i>public training</i> dan <i>knowledge sharing</i> - Jumlah jam pelatihan karyawan Perseroan mencapai 3.678 jam dengan rata-rata jam pelatihan per karyawan mencapai 22 jam/orang - Sebanyak satu orang karyawan mengikuti kegiatan pelatihan Masa Persiapan Pensiun (MPP) - Seluruh karyawan dengan masa kerja minimal tiga bulan sepenuhnya (100%) baik laki-laki maupun perempuan di setiap jenjang jabatan telah mendapatkan penilaian dan evaluasi kinerja - Sebanyak 42 karyawan atau 25,61% dari total karyawan mendapatkan promosi jabatan - Employee training and competency development programs through various in-house training, public training, and knowledge sharing programs - The training hours for the Company's employees reached 3,678 hours, with an average of training hours of 22 hours/employee - One employee participated in the Pension Preparation Training (MPP) - All employees (100%) with at least three months of tenure, both male and female employees, at each level, have received performance assessment and evaluation and career development - 42 employees or 25.61% of total employees received promotions	GRI 404-1 GRI 404-2 GRI 404-3
Memperluas dampak bagi pembangunan masyarakat berkelanjutan Expanding impact for sustainable community development	     	- Menyalurkan dana program TJSL sebesar Rp4,43 miliar - Melaksanakan berbagai program TJSL, dengan program prioritas tahun 2023 diantaranya yaitu Program WE CARE (Waste Management for Circular Economy) yang berfokus pada pengelolaan sampah organik melalui budidaya BSF (<i>Black Soldier Fly</i>)/maggot, dan optimalisasi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Dewanata Dieng Kulon, Program Pemulihan Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Program Penanggulangan Lahan Kritis Dataran Tinggi Dieng, Program Pemberdayaan UMKM, serta Program Peningkatan Produksi Pertanian Padi Nutrizinc dan Pengembangan Pemasaran Produk - Melakukan upaya pengelolaan dampak operasional terhadap masyarakat lokal pada tahapan kegiatan operasi dan mengupayakan program penanggulangannya - Disbursing CSR program amounted to Rp4.43 billion - Implementing various CSR programs, with priority programs for 2023 including the WE CARE (Waste Management for Circular Economy) Program which focuses on organic waste management through BSF (Black Soldier Fly)/maggot cultivation, and optimizing the Dewanata Dieng Integrated Waste Disposal Site (TPST). Kulon, Citarum Watershed Ecosystem Restoration Program, Dieng Plateau Critical Land Management Program, MSME Empowerment Program, as well as the Nutrizinc Rice Agricultural Production Increase and Product Marketing Development Program - Striving to manage operational impacts on local communities at the operational phase and working on mitigation programs	GRI 413-1 GRI 413-2



Topik Keberlanjutan yang Material Material Sustainability Topics	SDGs	Program dan Pencapaian Tahun 2023 Programs and Achievements in 2023	GRI Standards
Memperluas dampak dengan produk dan layanan berkelanjutan yang inovatif Expanding impact with innovative sustainable products and services	     	- Mengembangkan portofolio produk dan layanan berkelanjutan - Dalam melakukan pengelolaan aspek sosial dan lingkungan dalam penjaminan proyek, PT PII telah menyusun dan menerapkan <i>Environmental and Social Management Framework (ESMF)</i> - Melakukan <i>need analysis</i> dari penerapan <i>ESG Framework</i> Kementerian Keuangan - sebanyak $\pm 20\%$ total proyek yang dijamin Perseroan telah memenuhi kriteria hijau - Memberikan penjaminan terhadap Proyek Pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) berdasarkan kriteria taksonomi hijau dengan total nilai proyek penjaminan pada KUBL sebesar Rp58,34 triliun - Memberikan penjaminan proyek <i>small scale</i> KPBU yang dapat memberikan dampak ekonomi yang besar dan dirasakan oleh masyarakat luas - Developing a portfolio of sustainable products and services - In managing social and environmental aspects in project guarantees, IIGF developed and implemented the Environmental and Social Management Framework (ESMF) - Conducting a need analysis of the Ministry of Finance's ESG Framework of $\pm 20\%$ of the Company's total projects guaranteed have met the green criteria - Providing guarantees for Projects on Green Business Activities (KUBL) based on green taxonomy criteria with a total guaranteed project value on KUBL of Rp58.34 trillion - Providing guarantees for PPP small-scale projects that can have a large economic impact and be felt by the community	-
TATA KELOLA: Menghadirkan Tata Kelola (Governansi) Keberlanjutan GOVERNANCE: Providing Sustainability Governance			
Menghadirkan Tata Kelola Keberlanjutan Providing Sustainability Governance		- Peningkatan sistem manajemen anti korupsi dan gratifikasi melalui Audit Pengawasan/<i>Surveillance</i> Tahun I ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) - Melakukan proses identifikasi risiko melalui <i>bribery risk assessment</i> pada setiap area bisnis dan operasional Perseroan - Memberikan sosialisasi, pembelajaran, kolaborasi dan diseminasi kepada pihak internal dan eksternal Perusahaan - Seluruh anggota badan tata kelola dan karyawan telah memperoleh informasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi - Sebanyak 90 vendor/mitra telah mendapatkan sosialisasi anti korupsi melalui kegiatan <i>vendor gathering</i> - Pada tahun 2023, tidak terdapat insiden korupsi yang terjadi yang melibatkan insan Perseroan maupun mitra kerja, sehingga tidak ada karyawan yang diberhentikan atau dihukum karena korupsi dan tidak terdapat kontrak mitra bisnis yang diakhiri atau tidak diperbarui karena pelanggaran terkait korupsi - Improving the anti-corruption and gratification management system through ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) Surveillance Audit Year I - Carrying out the risk identification process through bribery risk assessment in each area of the Company's business and operations - Providing anti-corruption and gratification socialization, training, collaboration, and dissemination to the Company's internal and external parties - All members of the governance bodies and employees have been informed about the anti-corruption policies and procedures - 90 vendors/partners have received anti-corruption socialization through vendor gathering activities - In 2023, there were no incidents of corruption involving the Company's personnel or business partners. Thus, no employees were dismissed or convicted due to corruption and no business partners' contracts were terminated or not renewed due to corruption-related offenses	GRI 205-1 GRI 205-2 GRI 205-3



Sekilas Tentang Perusahaan

About The Company

Identitas Perusahaan

Corporate Identity



Nama Perusahaan

Corporate Identity [GRI 2-1] [OJK C.2]



PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund

Tanggal Pendirian

Date of Establishment



30 Desember 2009
30 December 2009

Negara Tempat Beroperasi

Countries of Operation [GRI 2-1]

Indonesia



Kegiatan, Merek, Produk dan Jasa Perusahaan

Company's Activities, Brands, Products, and Services [GRI 2-6] [OJK C.4]



Kegiatan Bisnis Utama Sesuai Anggaran Dasar

1. Memberikan penjaminan pemerintah (*Sovereign Guarantee*) di bidang infrastruktur;
2. Memberikan penjaminan pemerintah (*Sovereign Guarantee*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah; dan
3. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan pemerintah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional baik pusat maupun daerah.

Produk dan Jasa yang Dihasilkan

1. Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur untuk Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU) maupun non KPBU,
2. Penjaminan Pemerintah terhadap Pinjaman dan Penerbitan Obligasi BUMN untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur,
3. Penjaminan Pemerintah terhadap Pinjaman dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
4. Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (*Project Development Facility*)
5. Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Selama tahun 2023, seluruh produk dan layanan baru (100%) telah dievaluasi berdasarkan aspek keamanan dan sesuai kriteria lain yang ditetapkan oleh Perseroan serta persetujuan dari regulator. Tidak terdapat produk dan jasa Perseroan yang dilarang atau ditarik kembali dari pasar. [GRI 2-6] [OJK F.27, F.29]

Main Business Pursuant to the Articles of Association

1. Providing Sovereign Guarantee in the infrastructure sector;
2. Providing Sovereign Guarantee in other sectors' financing in addition to infrastructure based on government assignments; and
3. Conducting activities related to the sovereign guarantee implementation, as well as other activities related to the project development to support the central and local national economy.

Generated Products and Services

1. Sovereign Guarantee in the Infrastructure Sector for Public Private Partnership (PPP) and Non-PPP,
2. Sovereign Guarantee for SOE Loans and Bond Issuance to Finance Infrastructure,
3. Sovereign Guarantee of Loans for the implementation of the Government Food Reserve
4. Project Development Facility
5. Sovereign Guarantee for Corporate Entrepreneurs in terms of the National Economic Recovery Program

During 2023, all new products and services (100%) have been evaluated based on safety aspects and in accordance with other criteria set by the Company and regulatory approvals. There were no products and services of the Company that were prohibited or withdrawn from the market. [GRI 2-6] [OJK F.27, F.29]

Anak Perusahaan

Subsidiaries



-

Kantor Pusat

Head Office [GRI 2-1] [OJK C.2]



Capital Place, Lantai 7-8 7-8th Floor
Jl. Gatot Subroto, No. Kav 18
Jakarta 12710 - Indonesia

+62 21 5795 0550
info@iigf.co.id
www.ptpii.co.id



Bentuk Hukum dan Kepemilikan Legal Form and Ownership [GRI 3-1]



Status Perusahaan Corporate Status

Perseroan Terbatas yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan Limited Liability Company, as a State-Owned Enterprise (SOE) under the guidance and supervision of the Minister of Finance

Kepemilikan Saham Shareholdings [GRI 2-1] [OJK C.3.c]

100% milik Negara Republik Indonesia
100% owned by the Republic of Indonesia



Dasar Hukum Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Legal Basis for Establishment and Amendments to the Articles of Association

Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor 29 tertanggal 30 Desember 2009, dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Nomor 14 tertanggal 14 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang telah beberapa kali dilakukan perubahan dan perubahan terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor 06 tertanggal 12 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Arry Supratno S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0139871 tertanggal 13 Juli 2023

Deed of Establishment of the Company (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia No. 29 dated 30 December 2009, made before Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, a Notary in Jakarta, as amended by Deed of Amendment No. 14 dated 14 January 2010 made before Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, a Notary in Jakarta, which has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-04444.AH.01.01.2010 dated 27 January 2010. 01.Tahun 2010 dated 27 January 2010 on the Ratification of the Company's Legal Entity, which has been amended several times, lastly by the Deed of Statement of the Shareholders' Resolution of the Company (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia No. 06 dated 12 July 2023, made before Arry Supratno S.H., a Notary in Jakarta, which has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Letter of Acceptance of Notification of Changes in the Company Data of the Company (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia No. AHU-AH.01.09-0139871 dated 13 July 2023

Skala Usaha Perusahaan Company's Organizational Scale [GRI 2-6] [OJK C.3.a, C.6]

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021
Jumlah Karyawan Number of Employees	Orang Person	164	152	143
Jumlah Pendapatan Total Income	Rp Juta Rp Million	1.318.006	1.088.852	922.507
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Rp Juta Rp Million	835.821	714.173	625.402
Jumlah Aset Total Assets	Rp Juta Rp Million	16.406.049	15.555.081	14.144.434
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	Rp Juta Rp Million	443.249	401.612	355.720
Jumlah Ekuitas Total Equity	Rp Juta Rp Million	15.962.800	15.153.469	13.788.714
Pendapatan Per Segmen Revenue Per Segment				
Pendapatan Penjaminan Guarantee Income	Rp Juta Rp Million	232.354	252.574	156.529
Pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Project Development Facility Revenue	Rp Juta Rp Million	70.530	41.099	29.172
Pendapatan Pengelolaan Dana Fund Management Income	Rp Juta Rp Million	1.009.080	793.702	735.871
Pendapatan Lain-Lain Other Income	Rp Juta Rp Million	6.042	1.477	935
Kepemilikan Saham Shareholdings				
Negara Republik Indonesia The Republic of Indonesia	%	100	100	100



Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perusahaan

Vision, Mission, and Corporate Culture and Values

[GRI 2-12, 2-22, 2-23] [OJK C.1]

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022, PT PII menetapkan perubahan visi dan misi yang sekaligus merupakan visi dan misi dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2023–2027. Penetapan visi dan misi tersebut merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dengan turut memperhatikan kepentingan dari seluruh pemangku kepentingan berkenaan dengan berakhirnya periode RJPP sebelumnya dan penyusunan RJPP periode berjalan sebagai bentuk evaluasi dan kesinambungan. [GRI 2-6] [OJK C.6]

Pursuant to the General Meeting of Shareholders (GMS) on 15 December 2023, IIGF stipulated changes to the vision and mission, simultaneously as the Company's Long-Term Vision and Mission in 2023–2027. The determination of the vision and mission is the result of a study by the Board of Directors and the Board of Commissioners with due regards to the stakeholders' interests, regarding the end of the previous Company's Long-Term Plan and the preparation of the Company's Long-Term Plan for the current period as a form of evaluation and continuity. [GRI 2-6] [OJK C.6]

Visi Vision



Menjadi entitas penggerak yang terpercaya dalam mendukung upaya akselerasi pengembangan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan oleh pemerintah melalui berbagai skema inovatif.

To be the trusted driving entity in supporting efforts to accelerate infrastructure and sustainable development by the government through various innovative schemes.

Misi Mission



Memastikan percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan dengan memberikan penjaminan dan dukungan lainnya melalui:

1. Menjalankan peran sebagai alat fiskal Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan risiko dan proses yang transparan dan akuntabel;
2. Menyediakan *instrument de-risking*, penjaminan, dan fasilitasi pengelolaan risiko untuk mendukung investasi oleh badan usaha dan pemenuhan pembiayaannya secara berkelanjutan;
3. Berperan aktif sebagai bagian dari ekosistem Pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip lingkungan dan sosial;
4. Memperkuat kapabilitas, kapasitas organisasi, dan kualitas sumber daya manusia guna mendukung tercapainya visi Perseroan.

To ensure the accelerated fulfillment of equitable and sustainable infrastructure development by providing guarantees and other support by:

1. Performing the role as the Government's fiscal tool in implementing sustainable development through transparent and accountable risk management and processes;
2. Providing *de-risking* instruments, guarantees, and risk management facilitation to support investment by business entities and the fulfillment of their financing in a sustainable manner;
3. Having an active role as part of the ecosystem of sustainable national development with due regard to environmental and social principles;
4. Strengthening the capabilities, organizational capacity, and quality of human resources to support the achievement of the Company's vision.

Adapun penjelasan kepada seluruh karyawan mengenai pembaharuan visi dan misi Perseroan dilakukan oleh PT PII pada bulan Januari 2023 dan senantiasa dikaji secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan lingkungan bisnis Perseroan. [GRI 2-6, 2-12] [OJK C.6]

IIGF disseminated to all employees the renewal of the Company's vision and mission in January 2023. The vision and mission are reviewed regularly to ensure its suitability for the development of the Company's business environment. [GRI 2-6, 2-12] [OJK C.6]



Nilai-Nilai Budaya Cultural Values

In TIME



Integritas Integrity

Berperilaku jujur bekerja dengan standar etika tinggi dan mengutamakan kepentingan publik.
Behaving honestly, working with high ethical standards, and prioritizing public interest.

- › Jujur
- › Amanah (menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab)
- › Honest
- › Trustworthy (carrying out duties responsibly)



Kerja Sama Team Work

Bekerja sebagai tim untuk mencapai tujuan Perseroan.
Working in a team to achieve the Company's objectives.

- › Proaktif
- › Memberikan nilai tambah
- › Proactive
- › Providing added value



Berpikiran Luas Think Big

Berpikir ke depan dengan wawasan yang luas dan berani untuk membuat terobosan yang inovatif.
Thinking ahead with great insight and being brave to make innovative breakthroughs.

- › Visioner
- › Berpikiran terbuka
- › Belajar berkelanjutan
- › Visionary
- › Open-minded
- › Continuous learning



Saling Percaya Mutual Trust

Membangun dan saling menjaga kepercayaan secara konsisten dan berkesinambungan.
Establishing and maintaining mutual trust consistently and continuously.

- › Berorientasi untuk kepentingan bersama
- › Saling menghargai
- › Orientated to the common good
- › Mutual respect



Keunggulan Excellence

Melakukan peningkatan kinerja secara berkelanjutan untuk menjadi yang terunggul.
Continuously improving performance to be the best.

- › Memberi hasil kerja terbaik
- › Bekerja cerdas dan gigih
- › Giving the best work
- › Working smart and persistently





Struktur Organisasi Perusahaan

Company's Organizational Structure

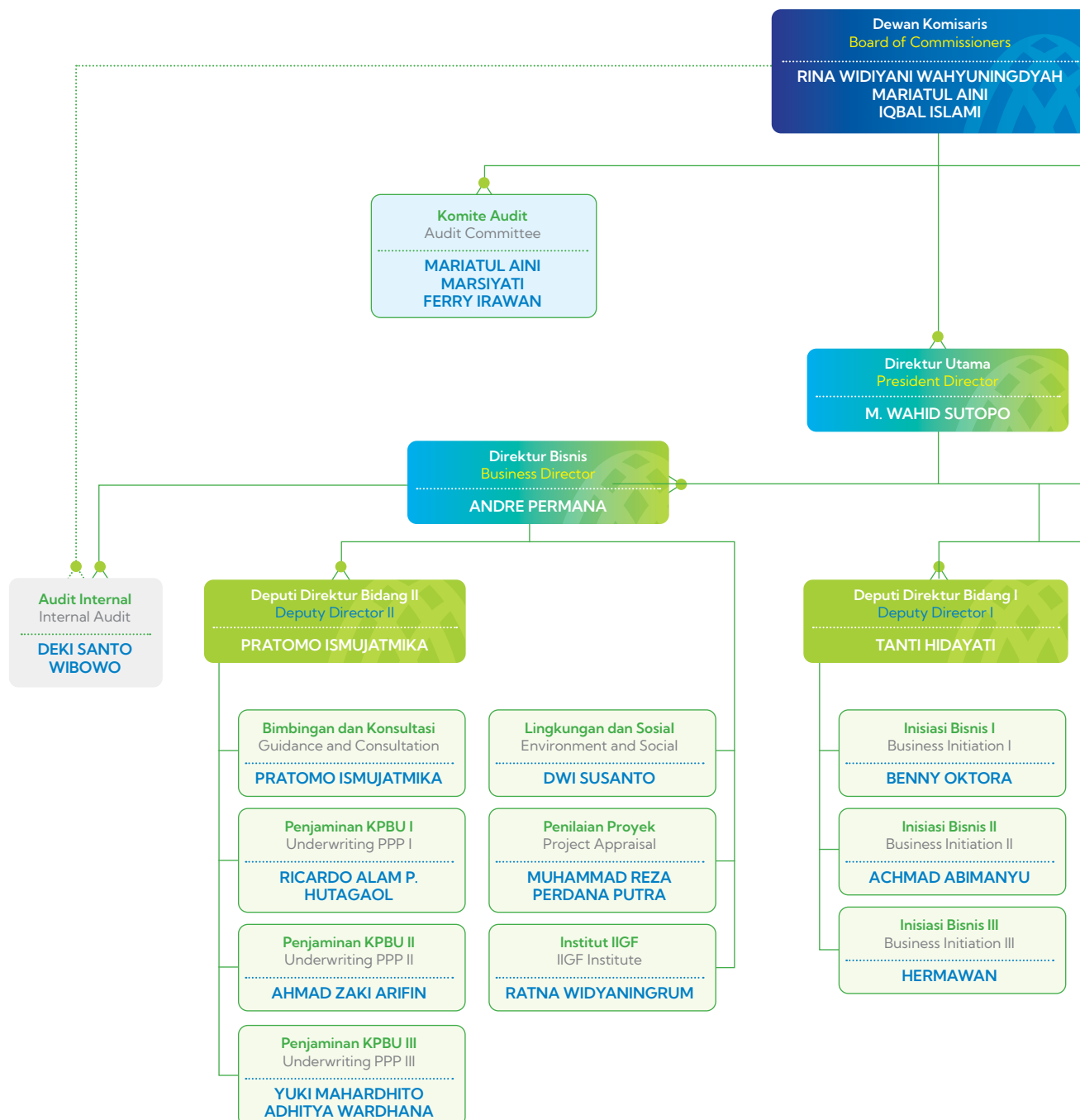
[GRI 2-9]

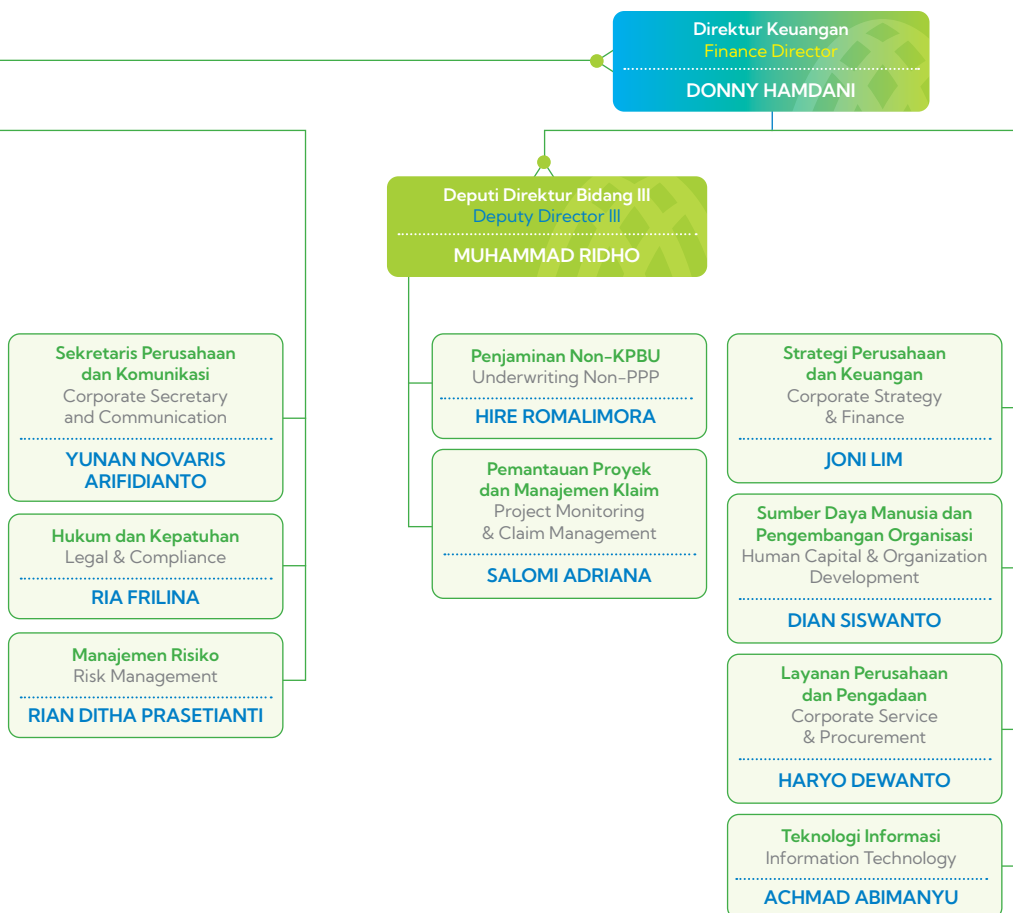
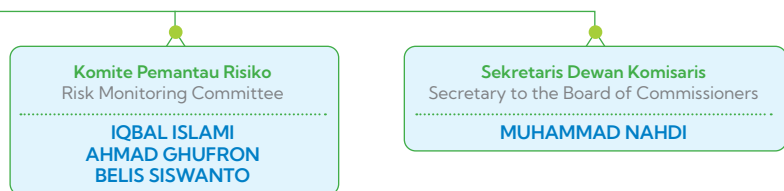
Struktur Organisasi PT PII per 31 Desember 2023 mengacu pada Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK-004/PII-BOD/0322 tentang Struktur Organisasi Perseroan yang mulai diterapkan sejak 18 Maret 2022 dengan uraian sebagai berikut:

[GRI 2-6, 2-9] [OJK C.6]

IIGF's Organizational Structure valid until 31 December 2023 refers to the Company's Board of Directors' Decree No. SK-004/PII-BOD/0322 on the Company's Organizational Structure, implemented since 18 March 2022, as follows:

[GRI 2-6, 2-9] [OJK C.6]







Wilayah Operasional Perusahaan

Company's Operational Area

[GRI 2-1] [OJK C.2, C.3.d]

Wilayah operasional PT PII secara keseluruhan berada di wilayah Indonesia, dengan lokasi kantor pusat di Capital Place, Lt. 7 dan 8, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710 – Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2023, PT PII tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, kantor cabang dan kantor perwakilan.

IIGF's operations covers all territory of Indonesia, whilst headquartered at Capital Place, 7th-8th Floor, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710, Indonesia. As of 31 December 2023, IIGF did not have subsidiaries, associates, branch offices, and representative offices.

Pasar yang Dilayani

Served Market

[GRI 2-6]

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero), yang merupakan *Special Mission Vehicles* (SMV) Kementerian Keuangan RI, PT PII terus berupaya meningkatkan kontribusinya dalam mempercepat pengembangan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia melalui sektor-sektor yang bisa mendapatkan penjaminan dari Perseroan sebagai berikut:

As a State-Owned Enterprise (SOE) in the form of a Company (Persero), which is a Special Mission Vehicles (SMV) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, IIGF strives to increase its contribution in accelerating infrastructure development and sustainable development in Indonesia through sectors that can obtain guarantees from the Company as follows:

Dua Puluh Dua Sektor yang Memenuhi Syarat Untuk Dijamin

Twenty Two Sectors Eligible For Guarantee

[GRI 2-6]



Air Minum
Drinking Water



Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
Centralized Wastewater Management System



Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
Local Wastewater Management System



Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan termasuk Bio Energi
Oil and gas and renewable energy including Bio Energy



Konservasi Energi
Energy Conservation



Pariwisata
Tourism



Kesehatan
Healthcare



Lembaga Pemasyarakatan
Correctional Facilities



Ekonomi Fasilitas Perkotaan
Urban Facilities Economy



Perumahan Rakyat
Public Housing



Per 31 Desember 2023, PT PII telah menjamin 50 proyek yang terdiri dari 41 proyek penjaminan infrastruktur dengan skema KPBU dan non-KPBU serta 9 proyek penjaminan non infrastruktur dengan total nilai investasi keseluruhan proyek infrastruktur sebesar Rp 497 triliun.

As of 31 December 2023, IIGF has guaranteed 50 projects consisting of 41 infrastructure guarantee projects with PPP and non-PPP schemes, and 9 non-infrastructure guarantee projects, with a total guaranteed project investment value of Rp497 trillion.

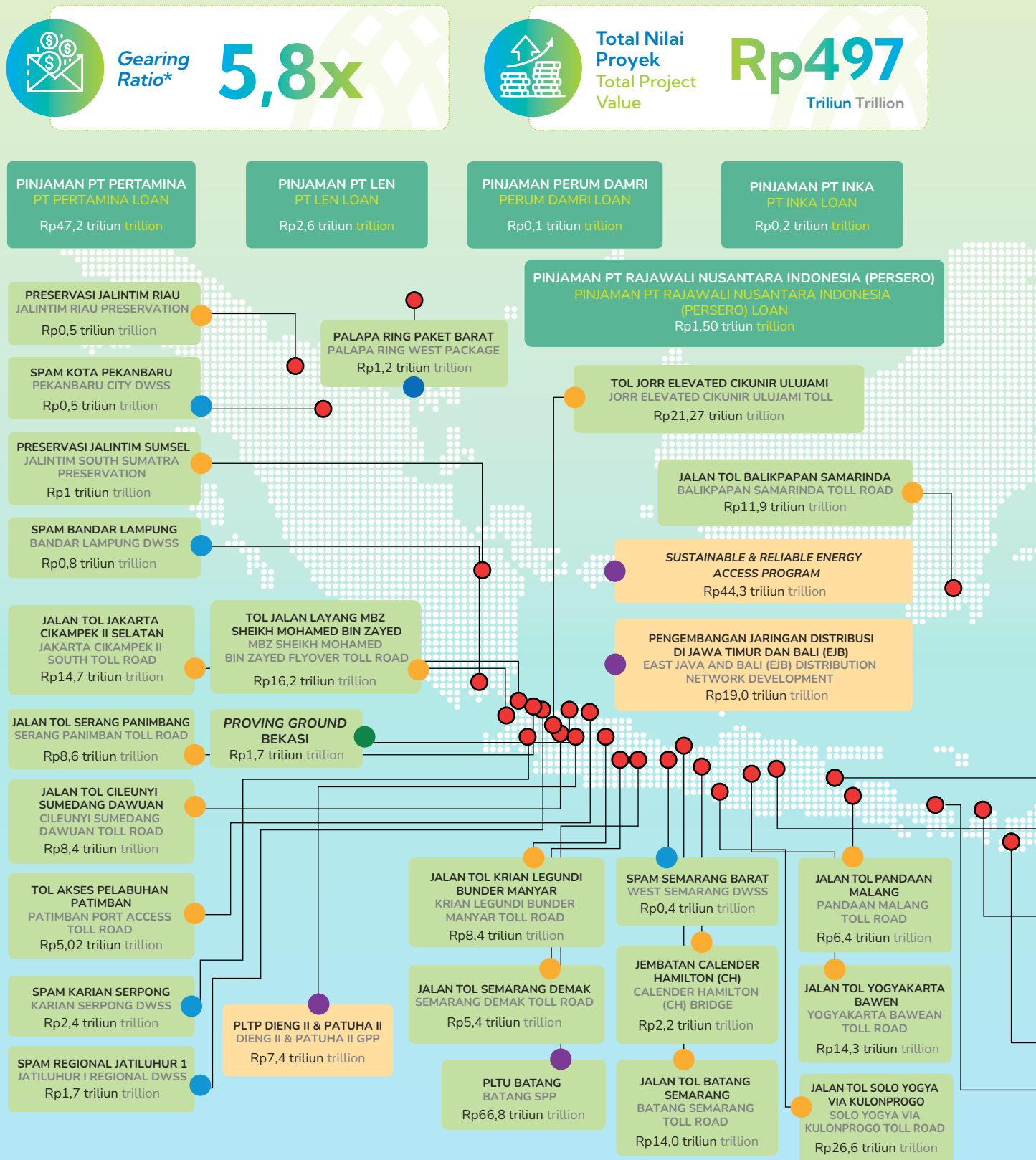




Peta Sebaran Proyek Penjaminan PT PII Hingga Tahun 2023 di wilayah Indonesia

Distribution Map of IIGF's Guarantee Projects up to 2023 in Indonesian territory

[GRI 2-6]





Jumlah
Proyek
Total
Project

50
Proyek Project

OBLIGASI III WASKITA KARYA
WASKITA KARYA BOND III

Rp1,8 triliun trillion

PINJAMAN WASKITA KARYA
WASKITA KARYA LOAN

Rp8,1 triliun trillion

SUKUK MUDHARABAH I
WASKITA
WASKITA SUKUK
MUDHARABAH I

Rp1,2 triliun trillion

OBLIGASI IV WASKITA KARYA
WASKITA KARYA BOND IV

Rp2,1 triliun trillion

JALAN TOL MANADO BITUNG
MANADO BITUNG TOLL ROAD
Rp4,9 triliun trillion

PALAPA RING PAKET TENGAH
PALAPA RING CENTRAL PACKAGE
Rp1,1 triliun trillion

HYDROPOWER
PROGRAMME
Rp7,0 triliun trillion

KERETA API MAKASSAR PAREPARE
MAKASSAR PAREPARE TRAIN
Rp1,0 triliun trillion

JALAN TOL PROBOLINGGO BANYUWANGI
PROBOLINGGO BANYUWANGI TOLL ROAD
Rp23,4 triliun trillion

SPAM UMBULAN
UMBULAN DWSS
Rp2,1 triliun trillion

PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) KAB. MADIUN
MADIUN REGENCY PUBLIC STREET LIGHT
Rp0,09 triliun trillion

PENGEMBANGAN DISTRIBUSI
KALIMANTAN MALUKU PAPUA
KALIMANTAN MALUKU PAPUA
DISTRIBUTION DEVELOPMENT
Rp33,2 triliun trillion

PENGEMBANGAN DISTRIBUSI SULAWESI
DAN NUSA TENGGARA (SNT)
SULAWESI AND NUSA TENGGARA (SNT)
DISTRIBUTION DEVELOPMENT
Rp23,0 triliun trillion

KEK MANDALIKA
MANDALIKA SEZ
Rp5,0 triliun trillion

PLTU TIMOR TIMOR SPP
Rp3,7 triliun trillion

PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
KAB. LOMBOK BARAT
WEST LOMBOK REGENCY PUBLIC STREET LIGHT
Rp0,10 triliun trillion

SATELIT MULTIFUNGSI
MULTIFUNCTIONAL SATELLITE
Rp6,4 triliun trillion

PALAPA RING PAKET TIMUR
PALAPA RING EAST PACKAGE
Rp5,1 triliun trillion

- Sektor Pariwisata Tourism Sector
- Sektor Ketenagalistrikan Electricity Sector
- Sektor Telekomunikasi Telecommunication Sector
- Sektor Air Minum Drinking Water Sector
- Sektor Transportasi Transportation Sector
- Sektor Jalan dan Jembatan Roads and Bridge Sector
- Sektor Konservasi Energi Energy Conservation Sector
- Titik Lokasi Location Point
- Proyek KPB PPP Proyek
- Direct Lending
- PEN BUMN PEN SOE

* Perhitungan mengacu kepada PMK 95/2017
Calculation refers to MoFR 95/2017



Pemetaan terhadap potensi penjaminan pemerintah terus dilakukan PT PII dengan mengacu pada dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti Daftar Rencana KPBU/ PPP *Book*, dokumen perencanaan pemerintah pusat dan daerah, dokumen perencanaan dari sektor infrastruktur terkait dan sebagainya. Kemudian, PT PII akan merancang daftar proyek dengan kategori *longlist* dan *shortlist projects* serta mengembangkan strategi dengan menganalisis peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh setiap proyek tersebut.

Pada tahun 2023, strategi *pipeline* KBPU meliputi *initial project identification*, *scanning* terhadap potensi proyek-proyek KBPU dari berbagai sumber yang menghasilkan *longlist projects*, *shortlist project* hingga penerapan skema *pre-screening* yang merupakan proses persiapan pelaksanaan *screening project* yang berfokus pada keberlanjutan proyek dan kepastian proyek dapat diterima oleh investor serta *lender*. Adapun pangsa pasar PT PII meliputi: [GRI 2-6]

1. Kementerian pusat yang telah melaksanakan proyek KBPU namun masih memiliki rencana proyek lainnya yang akan dilaksanakan dengan menerapkan skema KPBU dan berpotensi mendapat penjaminan pemerintah;
2. Pemerintah daerah yang belum pernah melaksanakan pengembangan proyek infrastruktur dengan menerapkan skema KPBU; dan
3. Pemerintah daerah yang telah menerapkan skema KPBU namun masih memiliki rencana proyek lainnya yang berpotensi dilaksanakan dengan menerapkan skema KPBU dan mendapat penjaminan pemerintah.

IIGF continues to map the potential for sovereign guarantee while still referring to documents issued by the government, such as the List of PPP Plans (PPP Book), central and local government planning documents, planning documents from related infrastructure sectors, etc. Further, IIGF will design a list of long list and short list projects, and develop a strategy by analyzing the opportunities and challenges that will be faced by each project.

In 2023, the PPP pipeline strategy includes initial project identification, scanning potential PPP projects from various sources, generating shortlist & longlist projects, up to the preparation for the pre-screening projects, which is a preparation of screening project with focus on project sustainability and certainty, that may be accepted by investors and lenders. IIGF's market share includes: [GRI 2-6]

1. Central ministries with PPP projects that still have additional plans for other PPP projects and have the potential to receive sovereign guarantee;
2. Local governments that have never implemented an infrastructure project development by implementing PPP scheme; and
3. Local government with PPP projects that still have additional project plans with potential to be implemented by PPP scheme and to receive sovereign guarantee.

Rantai Pasokan Perusahaan Company's Supply Chain

[GRI 2-6]

Untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung kegiatan usaha Perseroan, PT PII bekerja sama dengan berbagai jenis pemasok yang berasal dari Indonesia dan Inggris untuk memenuhi kebutuhan Perseroan akan penyediaan barang dan jasa dengan jangka kerjasama mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang. Selama tahun 2023, PT PII telah bekerja sama dengan pemasok sebanyak 311 dengan total nilai pengadaan sebesar Rp181,7 miliar. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 336 pemasok dengan nilai pengadaan sebesar Rp103,4 miliar.

IIGF cooperates with various types of suppliers from Indonesia, and the UK to fulfill the needs and support the Company's business activities, for the provision of goods and services with cooperation periods ranging from short term up to long term. In 2023, IIGF collaborated with 311 suppliers with a total procurement value of Rp181.7 billion. This value was greater compared to 2022, which was 336 suppliers with a procurement value of Rp103.4 billion.



Rantai Pasokan PT PII

IIGF's Supply Chain

[GRI 2-6]

Jenis Penyedia Provider Type	Lokasi Penyedia Location	Jenis Hubungan Bisnis dengan Penyedia Type of Business Relationships with Suppliers	2023	
			Jumlah Penyedia Number of Providers	Nilai Perjanjian (Rp Miliar) Value of Agreement (Billion)
Barang Cargo	Indonesia	Jangka pendek Short-term	65	4,5
Jasa Services	Indonesia, Luar Negeri Indonesia, Overseas	Jangka pendek & jangka panjang Short-term and long-term	168	86,7
Konstruksi Construction	Indonesia	Jangka pendek Short-term	2	8,9
Konsultansi Consultancy	Indonesia	Jangka pendek & jangka panjang Short-term and long-term	76	81,6
Jumlah Total			311	181,7

Keanggotaan Asosiasi

Association Membership

[GRI 2-28] [OJK C.5]

Hingga laporan keberlanjutan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki keanggotaan di asosiasi industri apapun.

As of the issuance of this sustainability report, the Company did not have membership in any industry association.

Perubahan Signifikan

Significant Changes

[GRI 2-6] [OJK C.6]

- Perubahan komposisi Dewan Komisaris, pengangkatan Bapak Iqbal Islami dan pemberhentian Bapak Wahyu Utomo serta pengangkatan Ibu Rina Widiyanti Wahyuningdyah dan pemberhentian Bapak Awan Nurmawan Nuh
- Penambahan mandat non KPBU sektor cadangan pangan pemerintah.

- Changes in the composition of the Board of Commissioners, appointment of Mr. Iqbal Islami, and dismissal of Mr. Wahyu Utomo, and the appointment of Mrs. Rina Widiyanti Wahyuningdyah, and dismissal of Mr. Awan Nurmawan Nuh
- Additional mandate for non-PPP in the government food reserve sector.





Tentang Laporan Ini On The Report

Pada tahun 2023, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah menerbitkan laporan keberlanjutan keenam. Laporan ini mengungkapkan komitmen, kinerja keberlanjutan dan pengungkapan dampak keberadaan bisnis Perseroan terhadap segenap pemangku kepentingan selama periode 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023, data tahun yang telah lalu dan juga gagasan strategi keberlanjutan di masa mendatang. Sebagai bentuk komitmen dalam transparansi kepada pemangku kepentingan, PT PII berkomitmen untuk senantiasa menerbitkan laporan keberlanjutan secara periodik setiap tahunnya. Laporan tahun ini dipublikasikan pada tanggal 6 Mei 2024. [GRI 2-3]

Laporan ini memuat kata “PT PII” dan “Perseroan” yang didefinisikan sebagai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk memudahkan penyebutan. Laporan ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang dapat dilihat dan diunduh di situs resmi Perseroan yaitu www.ptpii.co.id/laporan-keberlanjutan.

In 2023, Indonesia Infrastructure Guarantee Fund published its sixth sustainability report. This report discloses the commitment, sustainability performance, and impact of the Company's business presence on all stakeholders during 1 January 2023 up to 31 December 2023, data in the previous years, as well as future ideas for sustainability strategies. As a form of commitment to transparency to stakeholders, IIGF is committed to publishing sustainability report annually. This year's report was published on May 6, 2024. [GRI 2-3]

In this report, the word “IIGF” and “Company” are defined as Indonesia Infrastructure Guarantee Fund to facilitate the reader. The report is presented in two languages, i.e., Bahasa Indonesia and English, that can be viewed and downloaded at the Company's official website www.ptpii.co.id/laporan-keberlanjutan.

Dasar dan Acuan Penyusunan Laporan Keberlanjutan Basis and References for Sustainability Report Preparation

Dalam menyusun laporan keberlanjutan, PT PII menggunakan dasar dan acuan penyusunan pelaporan keberlanjutan sebagai berikut: [GRI 1]

- GRI *Standards*, dimana PT PII telah melaporkan sesuai (*in accordance*) dengan GRI *Standards* untuk periode 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; serta
- *The International Financial Reporting Standards (IFRS) Sustainability Disclosure Standards*:
 - IFRS S1: *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*;
 - IFRS S2: *Climate-related Disclosure*.

In formulating its sustainability report, IIGF uses the following basis and reference for sustainability reporting: [GRI 1]

- GRI *Standards*, in which IIGF reported in accordance with GRI *Standards* for the period 1 January 2023 – 31 December 2023;
- Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 on the Application of Sustainable Finance to Financial Services Institution, Issuer, and Publicly Listed Companies;
- Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia (SEOJK) No. 16 /SEOJK.04/2021 on the Form and Content of Annual Report of Issuers or Public Companies; and
- *The International Financial Reporting Standards (IFRS) Sustainability Disclosure Standards*:
 - IFRS S1: *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*;
 - IFRS S2: *Climate-related Disclosure*.



Pengungkapan IFRS S1 dan IFRS S2 yang Telah Diterapkan Perseroan Dalam Laporan Keberlanjutan Tahun 2023

Disclosure of IFRS S1 and IFRS S2 Implemented by the Company in the 2023 Sustainability Report

Pada tahun 2023, laporan keberlanjutan PT PII telah mengadopsi pedoman IFRS S1 dan IFRS S2. Hal ini untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan Perseroan terkait komitmen PT PII dalam mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan dan iklim, yang melingkupi pengungkapan empat pilar atau empat konten inti (*core content*) yaitu tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target, dengan rincian sebagai berikut:

In 2023, IIGF's sustainability report has adopted IFRS S1 and IFRS S2 guidelines. This provides information to the Company's stakeholders regarding IIGF's commitment to managing risks and opportunities related to sustainability and climate, which includes disclosure of four pillars or four core contents, i.e., governance, strategy, risk management, and metrics and targets, under the following details:

Tata kelola Governance

PT PII telah mengungkapkan informasi mengenai badan tata kelola atau individu yang bertanggung jawab atas pengawasan risiko dan peluang terkait keberlanjutan dan iklim, yang melingkupi tanggung jawab, keterampilan dan kompetensi, frekuensi pemberian informasi, maupun pengawasan terkait risiko dan peluang terkait keberlanjutan dan iklim.

IIGF disclosed information on the governance bodies or individuals responsible for supervision of sustainability and climate-related risks and opportunities, which include responsibilities, skills and competencies, frequency of information provision, and supervision of sustainability and climate-related risks and opportunities.

Strategi Strategy

PT PII telah mengungkapkan informasi mengenai risiko dan peluang terkait keberlanjutan dan iklim yang diperkirakan akan mempengaruhi prospek, strategi dan pengambilan keputusan.

IIGF disclosed information about sustainability and climate-related risks and opportunities that may affect the Company's prospects, strategy and decision making.

Manajemen risiko Risk management

PT PII telah mengungkapkan proses yang digunakan Perseroan untuk mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan dan memantau risiko dan peluang terkait keberlanjutan dan iklim.

IIGF disclosed the processes it uses to identify, assess, prioritize, and monitor sustainability and climate-related risks and opportunities.

Metrik dan target Metrics and targets

PT PII telah mengungkapkan target dan kinerja Perseroan terkait dengan risiko dan peluang terkait keberlanjutan dan iklim, seperti mengungkapkan pengukuran emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang selaras dengan peluang terkait perubahan iklim.

IIGF disclosed the Company's targets and performance related to sustainability and climate-related risks and opportunities, such as disclosing measurements of greenhouse gas (GHG) emissions, that are aligned with opportunities related to climate change.



Penjelasan detail terkait pengungkapan empat pilar IFRS S1 dan IFRS S2 Perseroan, tersebar pada laporan keberlanjutan ini terutama pada bab "Komitmen dan Strategi Perseroan Dalam Memperluas Dampak Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST)", bab "Memperluas Peran dan Manfaat Bagi Keberlanjutan Lingkungan", bab "Memperluas Dampak dengan Produk dan Layanan Berkelanjutan yang Inovatif" dan bab Menghadirkan Tata Kelola (Governansi) Keberlanjutan". Untuk memudahkan para pembaca dan pemangku kepentingan mengetahui dimana pengungkapan penerapan empat pilar yang telah dijalankan Perseroan selama tahun 2023 tersebut, PT PII telah memberikan tanda rujukan IFRS S1 dan IFRS S2 dalam tanda kurung misalnya "[S1-33a]" "[S2-29a]" pada setiap paragraf yang relevan, dan melampirkan referensi indikator IFRS S1 dan IFRS S2 lengkap pada bagian akhir dari laporan ini.

Detailed explanations related to the disclosure of the Company's four IFRS S1 and IFRS S2 pillars are covered in this sustainability report, specifically in the "The Company's Commitments and Strategies to Expanding Environmental, Social, and Governance (ESG) Impacts", "Expanding Roles and Benefits for Environmental Sustainability", "Strengthening Commitment, Expanding Role for Environmental Sustainability", "Expanding Impact with Innovative Sustainable Products and Services", and "Providing Sustainability Governance" chapters. To facilitate the readers and stakeholders to understand where the disclosure of the Company's four pillars are in 2023, IGF provided IFRS S1 and S2 references in brackets, such as "[S1-33a]" "[S2-29a]" in each relevant paragraph, and attached complete IFRS S1 and IFRS S2 indicator references at the end of this report.





Prinsip dan Proses Penyusunan Laporan Keberlanjutan

Principles and Process for Preparing Sustainability Report

Untuk memastikan kualitas dan penyajian yang tepat dari informasi yang dilaporkan pada laporan keberlanjutan mencapai pelaporan keberlanjutan berkualitas, PT PII telah menerapkan prinsip pelaporan sesuai GRI *Standards* sebagai berikut: [GRI 3-1]

To ensure the quality and appropriate presentation of the reported information in this sustainability report to achieve quality sustainability reporting, IIGF implemented reporting principles in accordance with the GRI *Standards* as follows: [GRI 3-1]

GRI Reporting Principles [GRI 3-1]

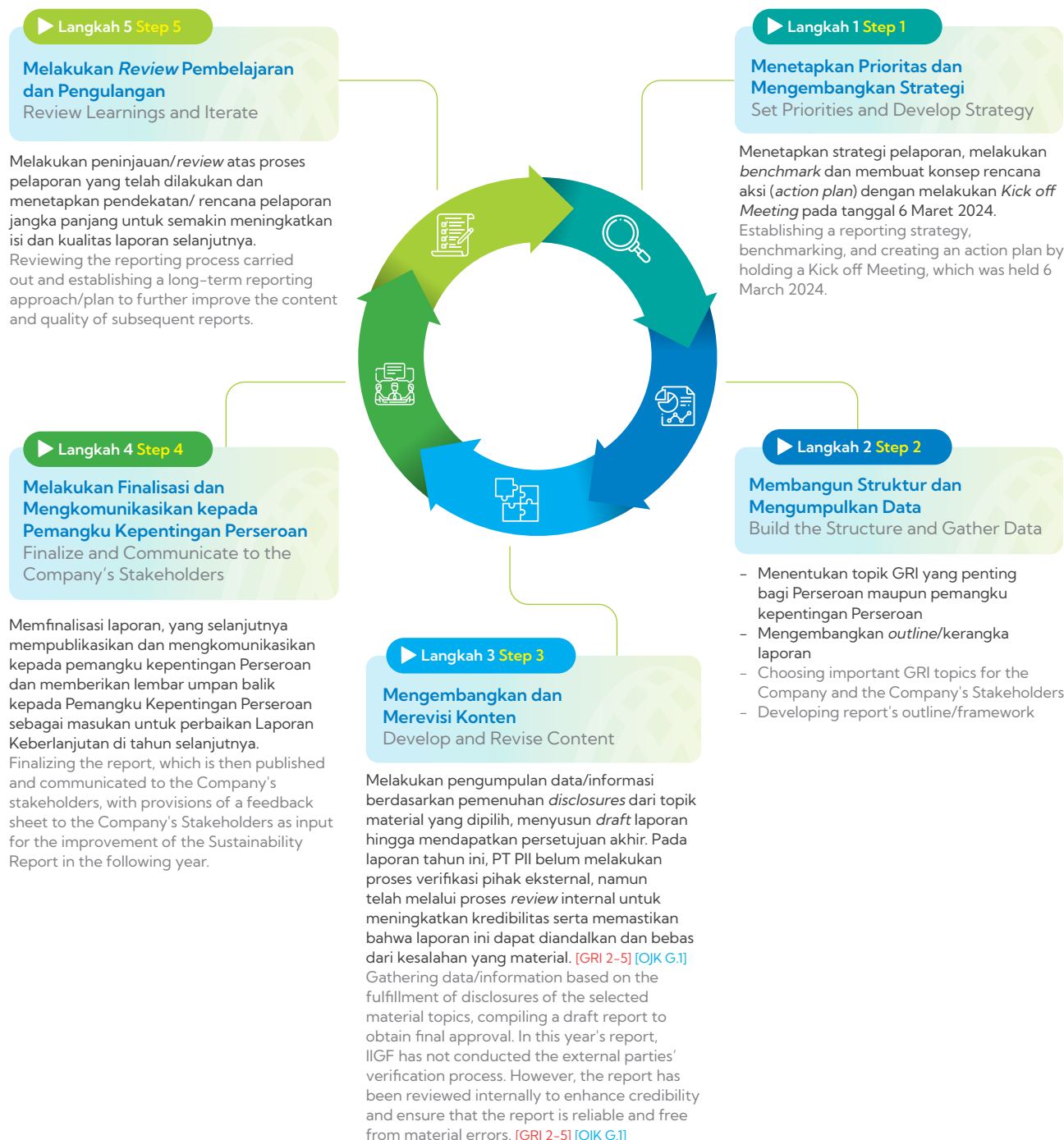
Akurasi Accuracy Laporan ini telah mengungkapkan informasi yang benar dan cukup terperinci yang telah melalui proses verifikasi internal untuk memastikan akurasi informasi This report has disclosed correct and sufficiently detailed information, which has been verified internally to ensure the accuracy of the information	Keseimbangan Balance Laporan ini telah mengungkapkan informasi yang berimbang tentang dampak positif maupun negatif dari kegiatan bisnis dan operasional Perseroan This report has disclosed balanced information about the positive and negative impacts of the Company's business and operations	Kejelasan Clarity Laporan ini telah menyajikan informasi dengan jelas dalam 2 (dua) bahasa yang dapat diakses dan dapat dipahami pemangku kepentingan This report has presented clear information in two (2) languages that are accessible and understandable to the stakeholders
Keterbandingan Comparability Laporan ini telah menyajikan informasi untuk periode pelaporan saat ini (2023) dan 2 (dua) periode sebelumnya (2021 dan 2022), sehingga dapat menggambarkan perubahan dalam pengelolaan dampak kegiatan Perseroan This report has presented information for the current reporting period (2023) and two (2) previous periods (2021 and 2022), in order to describe the changes in managing the impact of the Company's activities	Kelengkapan Completeness Laporan ini telah menyediakan informasi yang memadai sesuai pedoman acuan yang digunakan, sehingga dapat menggambarkan pengelolaan dampak Perseroan This report has provided adequate information in accordance with the reference guidelines referred to, in order to describe the Company's impact management	Konteks Keberlanjutan Sustainability Context Laporan ini telah mengungkapkan informasi tentang dampak Perseroan bagi pembangunan berkelanjutan dengan melakukan <i>materiality assessment</i> yang melibatkan pemangku kepentingan This report has disclosed information about the Company's impact on sustainable development by conducting a materiality assessment involving stakeholders
Ketepatan Waktu Timeliness PT PII telah melaporkan Laporan ini secara rutin dan tepat waktu bagi pengguna informasi untuk mengambil keputusan IIGF has reported this Sustainability Report regularly and in a timely manner for the users to make informed decisions	Keterverifikasian Verifiability PT PII telah mengumpulkan, mencatat, menyusun dan menganalisis informasi laporan ini dengan benar sehingga informasi tersebut dapat diteliti untuk menentukan kualitasnya IIGF has collected, recorded, compiled, and analyzed the information in this Report appropriately, thus the information can be examined to establish its quality	



Selanjutnya, prinsip-prinsip pelaporan keberlanjutan tersebut diimplementasikan ke dalam lima tahapan penyusunan sebagai berikut:

Further, the principles of sustainability reporting are implemented into the five phases of preparation as follows:

Lima Langkah Penyusunan Laporan Keberlanjutan Five Phases in Compiling Sustainability Report [GRI 3-1]





Proses Penentuan Topik Material dan *Boundary* Laporan

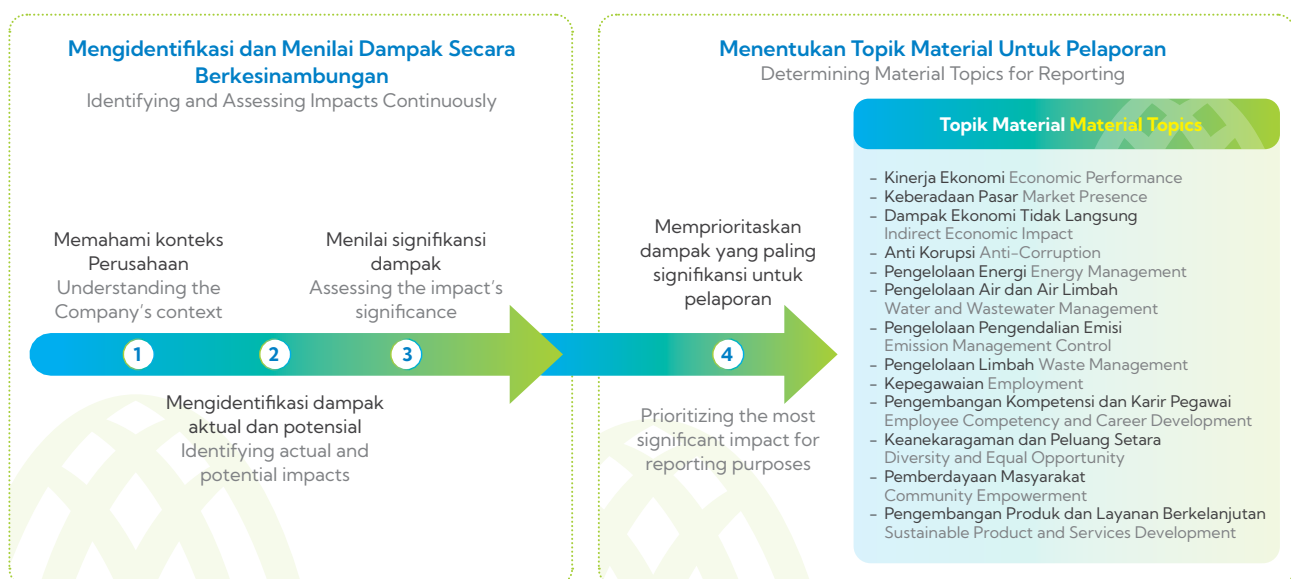
Process of Determining Material Topics and Boundary of the Report

[GRI 3-1, 3-2]

Seluruh topik material yang disajikan dalam laporan ini mencakup seluruh topik keberlanjutan yang relevan dan dijalankan Perseroan. Dalam menentukan topik-topik material tersebut, PT PII telah melakukan analisa topik-topik material melalui pembahasan dengan beberapa pemangku kepentingan internal seperti pemegang saham, badan tata kelola dan karyawan dalam menentukan topik material yang terkait, begitu pula dengan analisa juga dilakukan dengan pemangku kepentingan eksternal baik PJKP, konsultan, *vendor* dan lainnya di waktu yang berbeda. Dalam proses pembahasan bersama pemangku kepentingan tersebut, PT PII mengidentifikasi berbagai isu LST yang penting dan relevan dengan memperhatikan dampaknya terhadap aktivitas bisnis dan pemangku kepentingan Perseroan. Kemudian, PT PII melakukan penilaian signifikansi dampak dari topik-topik material tersebut, dan memberikan skala prioritas dampak yang paling signifikan untuk dituangkan dalam laporan keberlanjutan ini. [GRI 3-1, 3-2]

All material topics presented in this report cover all topic of sustainability that are carried out by the Company. In determining these material topics, IIGF has analyzed material topics through discussions with several internal stakeholders such as shareholders, governance bodies and employees in determining relevant material topics, as well as analysis is also carried out with external stakeholders both PJKP, consultants, vendors and others at different times. In the process of discussion with these stakeholders, IIGF identified various important and relevant ESG issues with due regards to their impact on the Company's business activities and stakeholders. Further, IIGF assessed the significance of the impact of these material topics, and prioritized the most significant impacts to be included in this sustainability report. [GRI 3-1, 3-2]

Proses Penentuan Topik Material Process of Determining Material Topics [GRI 3-1, 3-2]



Berdasarkan hasil dari proses penentuan topik material yang telah dilakukan, pada laporan tahun ini PT PII mengungkapkan sebanyak 13 topik material, tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan beberapa topik LST lainnya tidak termasuk topik material, mengingat topik tersebut tidak relevan terhadap aktivitas bisnis Perseroan, seperti topik perilaku anti persaingan, material, privasi pelanggan, keanekaragaman hayati dan beberapa topik lainnya. Dalam laporan ini, tidak terdapat penyajian ulang informasi (*restatement*) atas data tahun lalu, namun untuk meningkatkan kualitas laporan, PT PII melakukan pengungkapan yang lebih komprehensif atas berbagai *disclosures* yang diungkapkan sesuai pemenuhan atas pedoman, standar dan peraturan pelaporan keberlanjutan yang diterapkan Perseroan. [GRI 2-2, 2-4]

Based on the process of determining material topics, this year's report resulted in IIGF disclosing 13 material topics, which did not change compared to the previous year. Some ESG topics are not included as material topics, considering that these topics are not relevant to the Company's business activities, such as antitrust behavior, materials, customer privacy, biodiversity, and several other topics. In this report, there was no restatement of the last year's data. However, to improve the quality of the report, IIGF provided more comprehensive disclosures of various data disclosed in compliance with the guidelines, standards, and regulations for sustainability reporting implemented by the Company. [GRI 2-2, 2-4]



Adapun *boundary* laporan keberlanjutan PT PII tahun ini adalah kantor PT PII. Terkait topik kinerja ekonomi yakni data-data keuangan, diperoleh dari laporan keuangan yang hanya menyajikan informasi PT PII yang telah diaudit oleh auditor independen, dikarenakan Perseroan tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, entitas pengendalian bersama, perseroan patungan atau *Joint Venture* (JV) maupun *Special Purpose Vehicle* (SPV). [GRI 2-2, 2-6]

The boundary of IIGF sustainability report this year is the IIGF's office. In terms of economic performance, i.e., financial data, obtained from financial statements, IIGF presented information that has been audited by an independent auditor, because the Company does not have subsidiaries, associated entities, jointly controlled entities, Joint Ventures (JV), or Special Purpose Vehicles (SPV). [GRI 2-2, 2-6]

Daftar topik material yang penting bagi PT PII maupun pemangku kepentingan serta *boundary* masing-masing topik dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

The list of material topics and the boundaries of this report that are important to IIGF and the stakeholders are as follows:

Daftar Topik Material dan *Boundary* Laporan

Material Topics and Boundary of the Report

[GRI 2-2, 3-2, 3-3]

Topik Material Material Topics	Kenapa Topik Ini Material Why the Topic is Material	Boundary	
		PT PII IIGF	Di Luar Perseroan Outside the Company
Kinerja Ekonomi Economic Performance	Berdampak signifikan bagi keberlangsungan bisnis Perseroan dan pemangku kepentingan Have significant impacts on the business continuity of the Company and its stakeholders	√	-
Keberadaan Pasar Market Presence	Berdampak signifikan bagi karyawan Have significant impacts on the employees	√	-
Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impact	Berdampak signifikan bagi keberlangsungan bisnis Perseroan dan pemangku kepentingan Have significant impacts on the business continuity of the Company and its stakeholders	√	-
Anti Korupsi Anti-Corruption	Berdampak signifikan bagi keberlangsungan bisnis Perseroan Have significant impacts on the Company's business continuity	√	-
Pengelolaan Energi Energy Management	Berdampak signifikan bagi keberlanjutan lingkungan dan kesehatan Have significant impacts on the environmental sustainability and health	√	-
Pengelolaan Air dan Air Limbah Water and Wastewater Management	Berdampak signifikan bagi keberlanjutan lingkungan dan kesehatan Have significant impacts on the environmental sustainability and health	√	-
Pengelolaan Pengendalian Emisi Emission Management Control	Berdampak signifikan bagi keberlanjutan lingkungan dan kesehatan Have significant impacts on the environmental sustainability and health	√	-
Pengelolaan Limbah Waste Management	Berdampak signifikan bagi keberlanjutan lingkungan dan kesehatan Have significant impacts on the environmental sustainability and health	√	-
Kepegawaian Employment	Berdampak signifikan bagi karyawan Have significant impacts on the employees	√	-
Pengembangan Kompetensi dan Karir Karyawan Employee Competency and Career Development	Berdampak signifikan bagi karyawan Have significant impacts on the employees	√	-
Keanekaragaman dan Peluang Setara Diversity and Equal Opportunity	Berdampak signifikan bagi karyawan Have significant impacts on the employees	√	-
Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment	Berdampak signifikan bagi masyarakat Have significant impacts on the community	√	-
Pengembangan Produk dan Layanan Berkelanjutan Sustainable Product and Services Development	Berdampak signifikan bagi Badan Usaha Pelaksana (BUP) Have significant impacts on Implementing Business Entity (BUP)	√	-



Selanjutnya, topik-topik material tersebut diprioritaskan menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu *high*, *medium* dan *low* yang dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Further, the material topics are prioritized into three (3) levels, i.e., high, medium, and low, as shown in the following graph.

Grafik Materialitas

Graph: Materiality

[GRI 3-2]



- | | | |
|--|---|--|
| 1 Kinerja Ekonomi
Economic Performance | 5 Pengembangan Produk dan Layanan Berkelanjutan
Sustainable Product and Services Development | 9 Keanekaragaman dan Peluang Setara
Diversity and Equal Opportunity |
| 2 Pengembangan Kompetensi dan Karir Karyawan
Employee Competency and Career Development | 6 Pengelolaan Pengendalian Emisi
Emission Management Control | 10 Keberadaan Pasar
Market Presence |
| 3 Dampak Ekonomi Tidak Langsung
Indirect Economic Impact | 7 Anti Korupsi
Anti-Corruption | 11 Pengelolaan Energi
Energy Management |
| 4 Kepegawaian
Employment | 8 Pemberdayaan Masyarakat
Community Empowerment | 12 Pengelolaan Limbah
Waste Management |
| | | 13 Pengelolaan Air dan Air Limbah
Water and Wastewater Management |



Tanggapan Terhadap Lembar Umpan Balik

Response to the Feedback Sheet

[OJK G.3]

PT PII telah menerima masukan dari para pemangku kepentingan Perseroan atas laporan keberlanjutan tahun lalu yang telah dipublikasikan. Input atau masukan tersebut dijadikan sebagai bahan perbaikan pada laporan keberlanjutan Perseroan tahun ini. Atas masukan perbaikan yang diberikan, PT PII telah melakukan tindak lanjut dengan memperkuat kualitas informasi yang diungkapkan pada laporan keberlanjutan ini, diantaranya yaitu memperkuat pengungkapan risiko dan peluang terkait keberlanjutan dan perubahan iklim dengan menggunakan IFRS *Sustainability Disclosure Standards*, metodologi penghitungan/pengukuran penggunaan energi, jumlah dan program inisiatif efisiensi energi, informasi terkait badan tata kelola yang diberikan wewenang untuk mengambil keputusan dan mengawasi pengelolaan dampak perusahaan terhadap LST dan perubahan iklim sebagai bentuk penerapan tata kelola keberlanjutan.

IIGF received feedback from the Company's stakeholders on last year's issued sustainability report. The feedback is used as material for improvements in the Company's sustainability report this year. IIGF followed up the feedback received by strengthening the quality of information disclosed in this sustainability report, including strengthening the disclosure of risks and opportunities related to sustainability and climate change using IFRS *Sustainability Disclosure Standards*, methodology for calculating/measuring energy consumption, number and program of energy efficiency initiatives, information related to governance bodies that are authorized to make decisions and supervise the Company's management regarding the impact on ESG and climate change as a form of sustainability governance.

Kontak Informasi

Contact Information

Untuk meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan ini, seluruh pemangku kepentingan dan pembaca dapat menyampaikan pertanyaan, saran, ide, kritik dan tanggapan melalui Lembar Umpan Balik yang dapat ditemukan pada bagian akhir laporan ini atau dengan menghubungi: [GRI 2-3]

To improve the quality of this sustainability report, all stakeholders and reader may submit their questions, suggestions, ideas, critics, and feedbacks through the Feedback Form which can be found in the last chapter of this report, or through contact to: [GRI 2-3]

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Corporate Secretary and Communication

Capital Place, Lt. 7 dan 8th and 8th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710 – Indonesia

☎ (62-21) 5795 0550
🌐 www.ptpii.co.id
✉ info@iigf.co.id



13th Beyond
Infrastructure



SRI MULYANI INDRAWATI

Menteri Keuangan Republik Indonesia







Memperluas Dampak Bagi Pertumbuhan Perekonomian yang Tangguh, Inklusif dan Berkelanjutan

Expanding the Effect for
Resilient, Inclusive, and
Sustainable Economic
Growth



Tahun 2023 menjadi tonggak penting pencapaian kinerja terbaik dan tertinggi bagi PT PII semenjak didirikan pada tahun 2009. Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema pembiayaan inovatif (*innovative financing*), memperluas jangkauan penjaminan di luar infrastruktur seperti ekonomi hijau melalui pelaksanaan *framework* ESG dan dukungan pada Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berskala kecil, menjadi beberapa inisiatif strategis yang mendukung capaian kinerja PT PII di tahun ini. Hal ini menunjukkan komitmen Perseroan memperluas dampak bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

2023 is an important milestone for IIGF in terms of the best and highest performance achievement since its establishment in 2009. IIGF's performance achievement this year is supported by several strategic initiatives, i.e., supporting the acceleration of infrastructure development through innovative financing schemes, and expanding the scope of guarantees outside infrastructure, such as the green economy by implementing the ESG framework and supporting small-scale Public Private Partnership (PPP). This demonstrates the Company's commitment to expanding its impact on economic growth, welfare equity, and sustainable development in Indonesia.



Pendekatan Manajemen Topik Kinerja Ekonomi dan Dampak Ekonomi Tidak Langsung

Management Approach to Economic Performance and Indirect Economic Impact
[GRI 3-3]

PENGELOLAAN DAMPAK



IMPACT MANAGEMENT

PT PII menjadikan topik kinerja ekonomi dan dampak ekonomi tidak langsung sebagai topik yang penting bagi Perseroan dan pemangku kepentingan karena kinerja ekonomi mencerminkan kinerja dan keberlanjutan bisnis Perseroan, sehingga dapat memberikan kepercayaan terhadap pemangku kepentingan. Sebagai lembaga penjaminan infrastruktur, peran PT PII sangat signifikan dalam memperkuat infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, baik dalam sektor publik maupun swasta. Dengan menciptakan kinerja ekonomi yang positif dan tumbuh, PT PII tidak hanya menjamin keberlangsungan bisnis Perseroan, tetapi juga memperkuat infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan di Indonesia dan juga menghadirkan nilai atau manfaat bersama atau *Creating Shared Value* (CSV) bagi seluruh pemangku kepentingan Perseroan.

Untuk itu, PT PII telah melakukan pengelolaan dampak terkait kinerja ekonomi untuk mencegah dan meminimalkan potensi dampak negatif seperti penurunan kinerja dan kerugian yang mengancam keberlangsungan usaha Perseroan. Untuk mencegah dampak negatif tersebut, PT PII telah melakukan berbagai inisiatif strategis dan upaya berkelanjutan diantaranya yaitu (i) memperluas jangkauan penjaminan di luar infrastruktur tradisional, seperti ekonomi hijau melalui pelaksanaan kerangka kerja LST, termasuk transisi energi dan fasilitas perkotaan (*urban facility*) dalam bentuk konservasi energi, (ii) berfokus pada penjaminan *small scale* KPBU untuk mengembangkan infrastruktur potensial di berbagai daerah, (iii) mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dengan memperkenalkan *Innovative Financing Community* (*Infinity*) untuk memperkuat kolaborasi dan kerjasama dalam pembiayaan infrastruktur, serta (iv) memperkuat implementasi LST untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik, meminimalisasi risiko dan meningkatkan nilai jangka panjang.

IIGF considers the economic performance and indirect economic impact as important topics for the Company and stakeholders because economic performance reflects the performance and sustainability of the Company's business, to provide confidence to the stakeholders. As an infrastructure guarantee institution, IIGF's role is very vital in strengthening infrastructure that supports economic growth, both in the public and private sectors. By creating positive and growing economic performance, IIGF not only ensures the sustainability of the Company's business, but also strengthens the infrastructure that encourages resilient, inclusive, and sustainable economic growth in Indonesia, and creates Shared Value (CSV) for all Company's stakeholders.

Therefore, IIGF managed impacts related to economic performance to minimize potentially negative impacts, such as performance and losses that threaten the Company's business continuity. To prevent these negative impacts, IIGF performed various strategic initiatives and sustainable efforts, including (i) expanding the scope of guarantees beyond traditional infrastructure, such as the green economy, through the ESG framework implementation, including energy transition and urban facilities in the form of energy conservation, (ii) focusing on small scale PPP guarantees to develop potential infrastructure in various regions, (iii) supporting the infrastructure development acceleration by introducing the Innovative Financing Community (Infinity) to strengthen collaboration and cooperation in infrastructure financing, and (iv) strengthening ESG to achieve good corporate governance, minimize risk, and increase long-term value.



PT PII juga telah melakukan pengelolaan dampak ekonomi tidak langsung akibat dari berlangsungnya operasi Perseroan untuk meminimalkan potensi dampak negatif seperti konflik sosial atau perubahan sosial di masyarakat lokal, minimnya akses infrastruktur dan literasi masyarakat. Untuk mencegah dampak negatif tersebut, PT PII telah melakukan berbagai inisiatif strategis dan upaya berkelanjutan diantaranya yaitu (i) memberikan penjaminan pada proyek yang dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, meningkatkan pertumbuhan sosial dan ekonomi setempat, (ii) memberikan bantuan pembangunan infrastruktur sosial yang dapat mendukung keberlangsungan hidup masyarakat, (iii) program pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (iv) pemberdayaan pemasok lokal, (v) mendorong peluang tumbuhnya ekonomi sirkular dalam pembangunan yang berkelanjutan, serta (vi) mengembangkan ekosistem infrastruktur melalui pembentukan IIGF Institute. Berbagai upaya yang dilakukan Perseroan sepanjang tahun 2023 ini akan mendorong terciptanya pembangunan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan sejalan dengan SDGs.

IIGF has managed indirect economic impacts as a result of the Company's ongoing operations to minimize potentially negative impacts, such as social conflicts, social changes in the local community, lack of access to infrastructure, and community literacy. To prevent these negative impacts, IIGF implemented various strategic initiatives and sustainable efforts, including (i) providing guarantees for projects that affect economic improvement significantly through increased connectivity between regions, increasing local social, and economic growth, (ii) providing assistance for social infrastructure development that supports the sustainability of community life, (iii) presenting community empowerment programs that can improve the quality of life of the community, (iv) empowering local suppliers, (v) encouraging opportunities for the growth of a circular economy in sustainable development, and (vi) developing an infrastructure ecosystem by the establishment of IIGF Institute. The Company performed various efforts in 2023 that shall encourage the creation of resilient, inclusive, and sustainable development, in line with the SDGs.

KEBIJAKAN YANG TELAH DIKEMBANGKAN SECARA KHUSUS



SPECIFICALLY DEVELOPED POLICIES

Kebijakan PT PII terkait Kinerja Ekonomi dan Dampak Ekonomi Tidak Langsung

- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023
- Rencana Jangka Panjang (RJP) periode 2023–2027
- Key Performance Indicator (KPI)
- Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Anggaran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
- Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
- Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
- Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
- Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Kebijakan PT PII terkait Kinerja Ekonomi dan Dampak Ekonomi Tidak Langsung mengacu pada Ketetapan Umum

- Perundang-Undangan dan Peraturan yang berhubungan dengan Keuangan yang berlaku
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.06/2013 tentang Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.08/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program PEN
- Peraturan Menteri Keuangan No 211/PMK.08/2020 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

IIGF's policies regarding Economic Performance and Indirect Economic Impact

- 2023 Company's Work Program and Budget (RKAP)
- 2023–2027 Long-Term Plan (RJP)
- Key Performance Indicators (KPIs)
- The Board of Directors' Decree regarding Budget Guidelines Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (Persero)
- Guidelines for Corporate Social and Environmental Responsibility Implementation
- Standard Operational Procedures for Corporate Social and Environmental Responsibility Implementation
- Guidelines for Procurement of Goods and Services
- Standard Operating Procedure for Procurement of Goods and Services

IIGF's policies regarding Economic Performance and Indirect Economic Impacts refer to the General Provisions

- Laws and Regulations relating to applicable Finance
- Minister of Finance Regulation No. 28/PMK.06/2013 on the Preparation, Submission, and Amendment to the Long Term Plan and Work Program and Budget of the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance
- Minister of Finance Regulation No. 106/PMK.06/2017 on the Performance Management of the Board of Directors and Board of Commissioners in a Limited Liability Company (Persero) Under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance
- Minister of Finance Regulation No. 32/PMK.08/2021 dated 1 April 2021 on the Amendment to the Minister of Finance Regulation No. 98/PMK.08/2020 on the Sovereign Guarantees Procedure for Corporate Entrepreneurs through Guarantee Business Entities appointed for PEN Program
- Minister of Finance Regulation No. 211/PMK.08/2020 of 2020 on the Procedures for Providing Sovereign Guarantees for State-Owned Enterprises for National Economic Recovery Program Implementation



- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.08/2020. Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
- ESG Framework dan Manual Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan No 101/PMK.08/2018 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang Melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur
- Peraturan Menteri Keuangan No 34 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

- The Minister of Finance (PMK) Regulation No. 180/PMK.08/2020. Facilities for the Preparation and Implementation of the Public Private Partnership Transactions
- ESG Framework and Ministry of Finance's Manual
- The Minister of Finance Regulation No. 101/PMK.08/2018 of 2018 on the Procedures for Providing and Implementing Joint Sovereign Guarantees or Through Infrastructure Guarantee Business Entity against the Risk of Default from State-Owned Enterprises that Take Out Loans and/or Issue Bonds to Finance Infrastructure Provision
- Minister of Finance Regulation No. 34 of 2023 on the Procedures for the Provision of Sovereign Guarantees Within the Context of the Implementation of Government Food Reserves
- Government Regulation No. 47 of 2012 on the Corporate Social Responsibility of Limited Liability Companies

KOMITMEN



COMMITMENT

- Mengoptimalkan kinerja keuangan dan operasional yang positif secara berkelanjutan
- Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
- Memberikan penjaminan pada proyek yang dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antar wilayah serta meningkatkan pertumbuhan sosial dan ekonomi setempat
- Memberikan penjaminan pada kredit yang membantu BUMN terdampak pandemi Covid-19 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional
- Mendukung akselerasi program pembangunan berkelanjutan pemerintah yang tidak hanya terbatas pada proyek-proyek infrastruktur (*beyond infrastructure*)
- Menciptakan ekosistem pembangunan infrastruktur di Indonesia yang produktif, berkelanjutan, adil serta tangguh
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan
- Melaksanakan program TJSL khususnya pada sektor pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan dampak positif secara ekonomi kepada masyarakat
- Memberikan pendampingan penyediaan infrastruktur untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk peningkatan taraf ekonomi dan sosial
- Mendorong penyediaan infrastruktur sosial yang dapat mendukung keberlangsungan hidup masyarakat
- Mendorong peluang tumbuhnya ekonomi sirkular dalam pembangunan yang berkelanjutan
- Meningkatkan pemahaman *stakeholder* dan masyarakat melalui *capacity building* terkait dampak dan *benefit* terhadap ekonomi wilayah yang dihasilkan dari proyek penyediaan infrastruktur

- Optimizing positive financial and operational performance in a sustainable manner
- Accelerating sustainable infrastructure development
- Providing guarantees for projects that can have a major impact on encouraging the economy by increasing interregional connectivity and enhancing social and economic growth in the areas
- Providing guarantees for loans that assisted SOEs affected by the COVID-19 pandemic for the National Economic Recovery
- Supporting the acceleration of the government's sustainable development program beyond infrastructure
- Creating an infrastructure development ecosystem in Indonesia that is productive, sustainable, fair, and resilient
- Improving the community's quality of life to achieve sustainable development
- Implementing CSR programs, especially in the community empowerment sector, to enhance the positive economic impact to the community.
- Aiding in establishing infrastructure to support efforts to fulfil the basic needs of the community to improve economic and social standards
- Encouraging the provision of social infrastructure that can support the sustainability of community life
- Promoting opportunities for circular economy growth in sustainable development
- Enhancing stakeholder and community understanding through capacity building of the impacts and benefits to the regional economy resulting from infrastructure provision projects



TUJUAN/TARGET



OBJECTIVES/TARGETS

- Target Pendapatan Usaha tahun 2023 sebesar Rp1.251,30 miliar, terealisasi Rp1.318,01 miliar (105%)
- Target Pendapatan Penjaminan tahun 2023 sebesar Rp223,38 miliar, terealisasi Rp232,35 miliar (104%)
- Target Pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi tahun 2023 sebesar Rp83,44 miliar, terealisasi Rp70,53 miliar (85%)
- Target Pendapatan Pengelolaan Dana tahun 2023 sebesar Rp932,44 miliar, terealisasi Rp1.009,08 miliar (108%)
- Target Laba Tahun Berjalan tahun 2023 sebesar Rp789,23 miliar, terealisasi Rp835,82 miliar (106%)
- Target kenaikan nilai investasi proyek yang dapat dihasilkan melalui penjaminan sebesar Rp43,2 triliun, terealisasi Rp27,9 triliun
- Target penjaminan pada proyek baru sebanyak 10 proyek, terealisasi sebanyak 4 proyek (40%)

- The Revenues in 2023 was targeted at Rp1,251.30 billion, and actualized at Rp1,318.01 billion (105%)
- The Guarantee Revenue in 2023 was targeted at Rp223.38 billion, and actualized at Rp232.35 billion (104%)
- In 2023, the Project Development Facility Revenue was targeted at Rp83.44 billion, and actualized at Rp70.53 billion (85%)
- The Fund Management Income in 2023 was targeted at Rp932.44 billion, and actualized at Rp1,009.08 billion (108%)
- The Profit for the Year in 2023 was targeted at Rp789.23 billion, and actualized at Rp835.82 billion (106%)
- The increase in project investment value generated through guarantees was targeted at Rp43.2 trillion, and realized at Rp27.9 trillion
- The target for new guarantee projects was 10 projects, and there were 4 projects (40%) actualized

EVALUASI DAN EFEKTIVITAS TINDAKAN UNTUK MENGELOLA DAMPAK



EVALUATION AND EFFECTIVENESS OF IMPACT MANAGEMENT MEASURES

Efektivitas pengelolaan topik kinerja ekonomi dan dampak ekonomi tidak langsung PT PII ditinjau melalui:

- Monitoring dan evaluasi kinerja keuangan dan operasional Perseroan terhadap target RKAP Tahun 2023 yang kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen
- Penilaian proyek untuk memastikan terpenuhinya prinsip perlindungan dengan suatu uji tuntas yang kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban [GRI 2-12]

The effectiveness of economic performance and indirect economic impacts management of IIGF is reviewed by:

- Monitoring and evaluating the Company's financial and operational performance to the 2023 RKAP, which is then reported in the form of finance statements and management reports
- Assessing the projects to ensure the fulfillment of the safeguard principles with a due diligence, which is then reported in the form of an accountability report [GRI 2-12]

PENANGGUNG JAWAB



PERSON IN CHARGE

- Deputi Direktur Bidang II dan Divisi IIGF Institute di bawah Direktur Bisnis
- Deputi Direktur Bidang III, Corporate Strategy and Finance Division, and Corporate Services and Procurement Division di bawah Direktur Keuangan
- Corporate Secretary and Communications fungsi Corporate Social Responsibility (CSR) di bawah Direktur Utama

- Deputy Director of Sector II and IIGF Institute Division reporting to the Director of Business
- Deputy Director of Sector III, Corporate Strategy and Finance Division, and Corporate Services and Procurement Division reporting to the Finance Director
- Corporate Secretary and Communications under the Corporate Social Responsibility (CSR) functions reporting directly to the President Director

ALOKASI ANGGARAN



BUDGET ALLOCATION

PT PII telah mendistribusikan nilai/manfaat ekonomi kepada pemangku kepentingan Perseroan sebesar Rp673,91 miliar

IIGF distributed economic value to the Company's stakeholders amounted to Rp673.91 billion



KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN DAMPAK



STAKEHOLDERS' ENGAGEMENT IN MANAGING IMPACT

Badan Tata Kelola Tertinggi

- > Menetapkan target kinerja keuangan dan operasional Perseroan
- > Menginisiasi berbagai strategi dan kebijakan strategis Perseroan

Karyawan PT PII

- > Membantu PT PII merealisasikan target kinerja keuangan dan operasional yang telah ditetapkan dalam RKAP
- > Membantu menyelesaikan pelaksanaan berbagai program TJSL Perseroan

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)

- > Sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur yang dijamin Perseroan

Pihak Swasta/ Investor

- > Membantu PT PII merealisasikan target kinerja pendapatan Perseroan

Masyarakat

- > Terlibat aktif menyelesaikan program TJSL Perseroan

Vendor/Pemasok

- > Terlibat aktif dalam proses pengadaan yang adil dan transparan

Supreme Governance Body

- > Determining targets for the Company's financial and operational performance
- > Initiating various Company's strategies and strategic policies

IIGF's employees

- > Supporting IIGF in actualizing the predetermined financial and operational performance targets in the RKAP
- > Assisting in successfully implementing Company's various CSR programs

Government Contracting Agency

- > As a provider or organizer of infrastructure guaranteed by the Company

Private Parties/Investors

- > Assisting IIGF to realize the Company's revenue performance target

Community

- > Being actively involved in the success of the Company's CSR program

Vendor/Supplier

- > Being actively engage in a fair and transparent procurement process

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Keuangan dan Operasional

Comparison of Financial and Operational Target and Realization

Tahun 2023 menjadi capaian kinerja tertinggi PT PII semenjak didirikan pada tahun 2009, dimana PT PII berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang positif dan tumbuh di sepanjang tahun 2023. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan usaha yang berhasil dibukukan di tahun 2023 sebesar Rp1.318,01 miliar, meningkat 21,05% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.088,85 miliar dan berhasil berada 105% di atas target RKAP 2023 sebesar Rp1.251,30 miliar. Atas capaian pendapatan usaha tersebut, PT PII mencatatkan realisasi laba tahun berjalan 2023 sebesar Rp835,82 miliar, meningkat 17,03% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp714,17 miliar dan berhasil berada 106% di atas target RKAP 2023 sebesar Rp789,23 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan pengelolaan dana yang disebabkan oleh penempatan deposito dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun selama tahun 2023 dan rata-rata tingkat pengembalian investasi sebesar 6,7% atau 91 bps di atas rata-rata suku bunga acuan.

2023 was the highest performance achievement of IIGF since its establishment in 2009, in which IIGF recorded positive financial performance and growth throughout the year. This is reflected in the recorded operating revenues in 2023 of Rp1,318.01 billion, which increased by 21.05% compared to the previous year of Rp1,088.85 billion, and equivalent to 105% of the 2023 RKAP target, i.e., Rp1,251.30 billion. On the operating revenues, IIGF recorded profit for the year in 2023 of Rp835.82 billion, which increased by 17.03% compared to the previous year of Rp714.17 billion, and equivalent to 106% of the 2023 RKAP target, i.e., Rp789.23 billion. This increase was mainly influenced by the increase of fund management income, because of the placement of deposits with maturity periods of more than 3 months to 1 year during 2023 and an average investment return rate of 6.7% or 91 bps above the average reference interest rate.



Selaras dengan kinerja keuangan, kinerja operasional PT PII di tahun 2023 terus bertumbuh. Pada tahun 2023, PT PII memberikan empat penjaminan baru yaitu Tol Akses Patimban, Penerangan Jalan Umum (PJU) Lombok Barat, Tol Cikunir – Ulujami dan penjaminan dalam rangka Cadangan Pangan Pemerintah. Hingga 31 Desember 2023, PT PII telah melakukan penjaminan atas 50 proyek dengan total nilai investasi sebesar Rp497 triliun dan total nilai penjaminan sebesar Rp91 triliun. Dari total 50 proyek yang dijamin tersebut, sebanyak 41 proyek merupakan penjaminan proyek infrastruktur dengan skema KPBU dan non-KPBU, serta 9 penjaminan proyek non infrastruktur. Jumlah eksposur penjaminan atas proyek yang dijamin oleh PT PII per Desember 2023 ialah sebesar Rp91 triliun yang terdiri dari proyek Infrastruktur KPBU dan Non KPBU sebesar Rp83 triliun serta Non Infrastruktur sebesar Rp8 triliun.

In line with financial performance, IIGF's operational performance in 2023 kept growing. In 2023, IIGF provided four new guarantees, i.e., Patimban Access Toll Road, West Lombok Public Street Light, Cikunir – Ulujami Toll Road, and guarantees for the Government Food Reserves. Therefore, as of 31 December 2023, IIGF guaranteed 50 projects with a total investment value of Rp497 trillion and a total guaranteed value of Rp91 trillion. Of the total 50 projects guaranteed, 41 projects are guarantees for infrastructure projects with PPP and non-PPP schemes, and 9 guarantees for non-infrastructure projects. The total guaranteed exposure of IIGF's guaranteed projects as of December 2023 was Rp91 trillion, consisting of PPP and Non-PPP Infrastructure projects of Rp83 trillion and Non-Infrastructure projects of Rp8 trillion.

Penjaminan Pada Empat Proyek Baru Guarantee on Four New Projects



Dalam mendukung tercapainya kinerja Perseroan di sepanjang tahun 2023 ini, PT PII telah menjalankan berbagai inisiatif strategis yaitu memperluas kebermanfaatan dalam berbagai sektor maupun dalam tahapan proyek infrastruktur. Di tahun 2023, PT PII berfokus memperluas jangkauan penjaminan di luar infrastruktur tradisional, seperti ekonomi hijau melalui pelaksanaan kerangka kerja LST, termasuk transisi energi dan fasilitas perkotaan (*urban facility*) dalam bentuk konservasi energi sebagai peran Perseroan beradaptasi menghadapi tantangan perubahan iklim (*climate change*). Dalam hal ini, PT PII telah melakukan penjaminan atas proyek infrastruktur dengan skema KPBU, yaitu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Lombok Barat menjadi salah satu proyek percontohan sistem pencahayaan hemat energi pada APJ, yakni meningkatkan penggunaan teknologi lampu hemat energi (LED) yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Fokus PT PII juga diarahkan kepada penjaminan *small scale* KPBU yang menjadi proyek percontohan guna mengembangkan pembangunan infrastruktur yang potensial di setiap daerah. Beberapa penjaminan *small scale* KPBU yaitu PJU Lombok Barat.

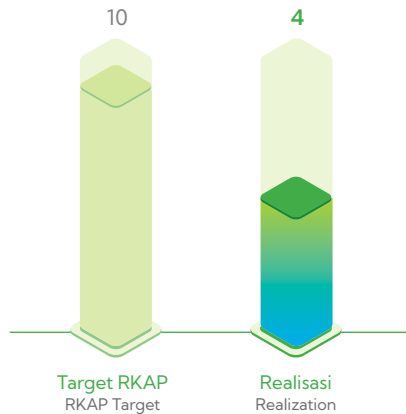
In supporting the achievement of the Company's performance during 2023, IIGF implemented various strategic initiatives, i.e., expanding benefits in various sectors and in the stages of infrastructure projects. In 2023, IIGF focused on expanding the scope of guarantees beyond traditional infrastructure, such as the green economy through the ESG framework implementation, including energy transition and urban facilities in the form of energy conservation, as the Company's role in adapting to the climate change challenges. Thus, IIGF provided guaranteed infrastructure projects under the PPP scheme, i.e., West Lombok Public Street Light (PJU) as one of the pilot projects for energy-efficient SLE lighting systems, which increases the use of energy-efficient lighting technology (LED) to be able to reduce greenhouse gas emissions (GHG). IIGF is also focusing towards small-scale PPP guarantees that become the pilot projects to develop potential infrastructure development in each region. Some of the small-scale PPP guarantees are West Lombok PJU.



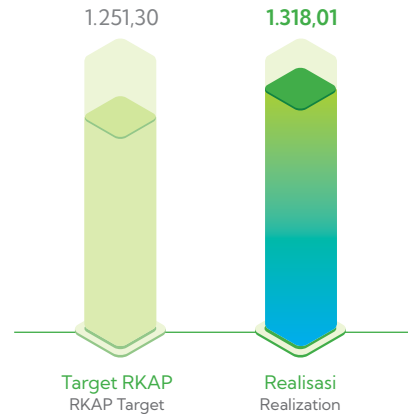
Dengan berbagai pencapaian yang ditorehkan sepanjang tahun 2023, PT PII berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan.

With various achievements in 2023, IIGF contributed to encouraging Indonesia's resilient, inclusive, and sustainable economic growth.

Penjaminan Proyek Baru (Proyek) New Project Guarantee (Project)



Pendapatan Usaha (Rp Miliar) Operating Revenues (Rp Billion)



Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Keuangan dan Operasional

Comparison of Financial and Operational Performance Realization and Target
[OJK F.2, F.3]

Keterangan Description	Satuan Unit	2023		Pencapa- ian Achieve- ment	2022		Pencapa- ian Achieve- ment	2021		Pencapa- ian Achieve- ment
		Target	Realisasi Realiza- tion		Target	Realisasi Realiza- tion		Target	Realisasi Realiza- tion	
Kinerja Keuangan Financial Performance										
Pendapatan Usaha Revenues	Rp miliar Rp billion	1.251,30	1.318,01	105%	1.106,97	1.088,85	98,36%	1.133,48	922,51	81,39%
Pendapatan Penjaminan Guarantee Revenue	Rp miliar Rp billion	223,38	232,35	104%	193,16	252,57	130,76%	275,20	156,53	56,88%
Pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (PDF) Project Development Facility (PDF) Revenue	Rp miliar Rp billion	83,44	70,53	85%	120,81	41,10	34,02%	79,93	29,17	36,50%
Pendapatan Pengelolaan Dana Fund Management Revenue	Rp miliar Rp billion	932,44	1.009,08	108%	792,23	793,70	100,19%	774,65	735,87	94,99%
Pendapatan lainnya Other Revenue	Rp miliar Rp billion	12,03	6,04	50%	0,77	1,48	192,99%	3,71	0,93	25,19%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Rp miliar Rp billion	789,23	835,82	106%	602,08	714,17	118,62%	653,32	625,40	95,73%



Keterangan Description	Satuan Unit	2023			Pencapaian Achievement	2022			Pencapaian Achievement	2021			Pencapaian Achievement
		Target	Realisasi Realization			Target	Realisasi Realization			Target	Realisasi Realization		
Kinerja Operasional Operational Performance													
Penjaminan Proyek Baru New Project Guarantee	Proyek Projects	10	4	40%		11	12	109,09%		10	7	70,00%	
Penjaminan Proyek Infrastruktur Berbasis <i>Green Energy</i> * Green Energy-based Infrastructure Project Guarantee*	Proyek Projects	1	1	100%		2	1	50%		1	0	0%	

Catatan:

* Realisasi 2022: APJ Madiun, realisasi 2023: PJU Lombok Barat

Notes:

* Realization 2022: Madiun SLE, realization 2023: Lombok Barat PJU





Mengoptimalkan Perolehan dan Pendistribusian Nilai Ekonomi

Optimizing Economic Value Acquisition and Distribution

Dalam melakukan perhitungan perolehan dan pendistribusian nilai ekonomi kepada pemangku kepentingan, PT PII mengacu pada pedoman GRI Standards dengan menggunakan data yang bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit. Pada tahun 2023, PT PII berhasil mencatatkan perolehan nilai ekonomi langsung yang dihasilkan (pendapatan) sebesar Rp1.318,00 miliar, meningkat 21,05% dari tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.088,85 miliar. Dengan capaian tersebut, PT PII juga semakin meningkatkan nilai ekonomi yang didistribusikan kepada para pemangku kepentingan Perseroan, yakni biaya terkait kepegawaian, pembayaran pajak kepada pemerintah, pembagian dividen kepada pemegang saham (pemerintah) dan biaya TJSL untuk masyarakat yaitu sebesar Rp673,91 miliar, meningkat 15,65% dari tahun 2022 yaitu sebesar Rp582,74 miliar.

In calculating the acquisition and distribution of economic value to stakeholders, IIGF uses the GRI Standards guidelines, by using data from the audited financial statements. In 2023, IIGF recorded the acquisition of economic value generated (revenue) of Rp1,318.00 billion, increased by 21.05% from 2022, which was Rp1,088.85 billion. With this achievement, IIGF further increased the economic value/benefit distributed to the Company's stakeholders, i.e., personnel expenses, tax payments to the government, dividend distribution to shareholders (government), and CSR fund for the community, amounted to Rp673.91 billion, increased by 15.65% from 2022 of Rp582.74 billion.

Nilai Ekonomi PT PII (Rp Miliar)

IIGF's Economic Value (Rp billion)

[GRI 201-1]

Nilai Ekonomi Economic Value	2023	2022	2021
Nilai Ekonomi Langsung Yang Dihasilkan Economic Value Generated	1.318,00	1.088,85	922,50
Pendapatan penjaminan Guarantee revenue	232,35	252,57	156,53
Pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi Project development facility revenue	70,53	41,10	29,17
Pendapatan pengelolaan dana Fund management revenue	1.009,08	793,70	735,87
Pendapatan lainnya Other revenue	6,04	1,48	0,93
Nilai Ekonomi yang Didistribusikan Economic Value Distributed	673,91	582,74	554,18
Beban usaha* Operating expenses*	168,92	133,54	98,75
Biaya kepegawaian Personnel expenses	169,57	150,03	114,91
Pembayaran pajak kepada negara Tax payment to the state	188,16	139,13	149,09
Pembagian dividen kepada pemegang saham Dividend payment to shareholders	142,83	156,35	186,17
Pengeluaran untuk program TJSL CSR program expenses	4,43	3,69	5,26
Nilai Ekonomi Yang Ditahan Economic Value Retained	644,09	506,11	368,32

* Beban usaha di luar beban pajak final, biaya kepegawaian dan biaya TJSL

* Operating expenses exclude final tax expenses, personnel expenses, and CSR fund



Mengoptimalkan Kontribusi Kepada Negara

Optimizing Contribution to the State

PT PII sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran sebagai *agent of value creator* dan *agent of development* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada negara diantaranya melalui pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak. Pada tahun 2023, PT PII telah melakukan pembayaran pajak kepada negara sebesar Rp188,16 miliar, meningkat 35,24% dari tahun 2022 yaitu sebesar Rp139,13 miliar.

IIGF, as one of the State-Owned Enterprises (SOEs) has a role as an agent of value creator and agent of development, which shall be able to contribute to the state, including through its obligations as a taxpayer. In 2023, IIGF paid Rp188.16 billion of taxes to the state, increased by 35.24% from 2022, of Rp139.13 billion.

Pembayaran Pajak PT PII Kepada Negara (Rp miliar)

IIGF's Tax Payment to the State (Rp billion)

[GRI 201-1]

Jenis Pajak Type of Tax	2023	2022	2021
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	35,80	28,72	23,48
PPh Pasal 22, 23, 4 ayat 2 dan 26 Income Tax Articles 22, 23, 4 paragraphs 2, and 26	3,25	3,17	3,45
PPh Final Final Income Tax	139,55	98,96	115,02
PPN Pungut dan Offshore VAT Collected and Offshore	9,56	8,29	7,14
Jumlah Pembayaran Pajak Kepada Negara Tax Payment to the State	188,16	139,13	149,09

PT PII merupakan BUMN di mana modal ditempatkan dan disetor adalah 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham. Dengan demikian, pembagian dividen sepenuhnya menjadi hak Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2023, berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No.22 tanggal 19 Mei 2023, Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2023 telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2022 sebesar 20% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah Rp142,83 miliar yang telah dibayarkan pada 9 Juni 2023. [GRI 201-1, 201-4]

IIGF is a State-Owned Enterprise, in which the issued and paid-up capital is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia as the shareholder. Therefore, the dividend distributed fully belongs to the Government of the Republic of Indonesia. In 2023, based on Deed of Notary Arry Supratno, S.H., No. 22 dated 19 May 2023, the Shareholders, through the Company's Annual General Meeting of Shareholders on 19 May 2023, have approved the dividend distribution for 2022 amounting to 20% of the Company's net profit, or equivalent to Rp142,83 billion, which was paid on 9 June 2023. [GRI 201-1, 201-4]

Dalam upaya peningkatan kapasitasnya untuk melakukan penjaminan guna akselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia, PT PII mendapatkan dukungan pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Sampai dengan tahun 2023, pemerintah telah memberikan PMN kepada Perseroan senilai Rp10,66 triliun yang terbagi menjadi 2 peruntukan yaitu sebesar Rp9,09 triliun untuk penjaminan infrastruktur dan Rp1,57 triliun untuk penjaminan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). [GRI 201-4]

IIGF received government support through State Equity Participation (PMN) to enhance its capacity to provide guarantees to accelerate infrastructure development in Indonesia. As of 2023, the government has provided State Equity Participation (PMN) to the Company of Rp10.66 trillion, which is divided into 2 designations, i.e., Rp9.09 trillion for infrastructure guarantees, and Rp1.57 trillion for guarantees in the National Economic Recovery (PEN) Program. [GRI 201-4]



Mengoptimalkan Manfaat/Dampak Ekonomi Tidak Langsung

Optimizing Indirect Economic Benefit/Impacts

PT PII berkomitmen untuk terus memperkuat peran strategis Perseroan sesuai dengan mandat yang diamanahkan oleh pemerintah, khususnya mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur dengan menjaga kinerja Perseroan untuk senantiasa dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Komitmen ini diimplementasikan PT PII dengan terus mengoptimalkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan ekonomi masyarakat dan pelibatan pemasok lokal.

IIGF is committed to strengthening the Company's strategic role in accordance with the mandate appointed by the government, in particular, supporting the infrastructure development sustainability by maintaining the Company's performance to always provide maximum benefits to the community. IIGF realized such commitment by optimizing sustainable infrastructure development, community economic improvement, and the involvement of local suppliers.

Mengoptimalkan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Optimizing Sustainable Infrastructure Development

Sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan yang menjalankan mandat dalam mendukung pembangunan infrastruktur, PT PII berkomitmen untuk senantiasa memberikan penjaminan pada proyek yang dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antar wilayah. Selain itu, PT PII juga senantiasa melakukan pembangunan infrastruktur yang bersifat bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) guna mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk peningkatan taraf ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini didasari bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu cara strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menghubungkan dan menciptakan pemerataan kesejahteraan Indonesia. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang dilakukan Perseroan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

As a *Special Mission Vehicle* (SMV) of the Ministry of Finance that is mandated to support infrastructure development, IIGF is committed to providing guarantees for projects that affect economic improvement significantly through increased connectivity between regions. In addition, IIGF implements infrastructure development in the form of assistance through Corporate Social Responsibility (CSR) programs to support fulfillment of the basic needs of the community to enhance the economic and social standards of the community. This is because infrastructure development is one of the strategic measures to accelerate economic growth and improve people's welfare in connecting and creating fair distribution of Indonesia's welfare. The sustainable infrastructure development conducted by the Company in 2023 was as follows:

Pembangunan Infrastruktur PT PII Tahun 2023 Beserta Dampaknya

IIGF's Infrastructure Development in 2023 and the Impacts

[GRI 203-1, 203-2] [OJK F.28]

Program	Sifat Nature	Wilayah Area	Nilai Investasi Investment Value (Rp)	Dampak Impact
Penjaminan Proyek Pembangunan Infrastruktur Sektor Jalan dan Jembatan (Tol Akses Pelabuhan Patimban) Guarantee for Road and Bridge Sector Infrastructure Development Project (Patimban Port Access Toll Road)	Komersial Commercial	Jawa Barat West Java	Rp5,02 triliun Rp5.02 trillion	• Penghematan waktu perjalanan • Penghematan biaya operasional kendaraan • Mengurangi kemacetan • Akses logistik dapat lebih mudah dijangkau dan kompetitif • Mendukung Pelabuhan Patimban dan pengembangan wilayah di sekitarnya • Travel time reduction • Operational vehicle cost savings • Reducing congestion • More accessible and competitive access to logistics • Supporting Patimban Port and the development of the surrounding area



Program	Sifat Nature	Wilayah Area	Nilai Investasi Investment Value (Rp)	Dampak Impact
Penjaminan Proyek Pembangunan Infrastruktur Sektor Ketenagalistrikan (PJU Kabupaten Lombok Barat) Guarantee for the Electricity Sector Infrastructure Development Project (West Lombok PJU)	Komersial Commercial	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	Rp95 miliar Rp95 billion	• Meningkatkan penggunaan teknologi lampu hemat energi (LED) yang dapat mengurangi emisi GRK • Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat • Penurunan biaya kecelakaan • Penurunan kriminalitas • Using energy-efficient lighting technology (LED) that can reduce GHG emissions • Increased community's economic activity • Reduced accident costs • Reduced criminality
Penjaminan Proyek Pembangunan Infrastruktur Sektor Jalan dan Jembatan (Tol JORR <i>Elevated</i> Cikunir – Ulujami) Guarantee for Road and Bridge Sector Infrastructure Development Project (Elevated Cikunir Ulujami JORR Toll Road)	Komersial Commercial	Jawa Barat West Java	Rp21,27 triliun Rp21,27 trillion	• Penghematan waktu perjalanan • Penghematan biaya operasional kendaraan • Memperkuat jaringan jalan tol di daerah Jabodetabek • Mengurangi beban kepadatan lalu lintas di wilayah DKI Jakarta pada JORR (Jakarta <i>Outer Ring Road</i>) eksisting • Membangun konektivitas masa depan • Travel time reduction • Operational vehicle cost savings • Strengthening the toll road network in the Greater Jakarta • Reducing traffic congestion in the Special Capital Region of Jakarta on the existing JORR (Jakarta Outer Ring Road) • Establishing future connectivity
Pembangunan Rumah Korban Bencana Kebakaran Construction of Fire Disaster Victims' Houses	Bantuan TJSL CSR Assistance	Langkat, Sumatera Utara Langkat, North Sumatera	Rp177 juta Rp177 million	• Korban kebakaran dapat memiliki rumah yang layak huni kembali dan dapat beraktivitas normal seperti sebelumnya • Fire victims have a livable home again and can carry out normal activities as per before the fire
Pembangunan dan renovasi Sekolah School construction and renovation	Bantuan TJSL CSR Assistance	Sorong, Papua Barat Sorong, West Papua	Rp199,4 juta Rp199.4 million	• Meningkatkan kualitas pendidikan untuk siswa di Suku Kokoda Papua • Improving the quality of education for students in the Kokoda Tribe of Papua
Pembangunan Rumah Oleh-oleh Souvenir House Construction	Bantuan TJSL CSR Assistance	Situbondo, Jawa Timur Situbondo, East Java	Rp197,4 juta Rp197.4 million	• Mengembangkan akses pemasaran produk UMKM • Meningkatkan produk UMKM melalui proses kurasi • Developing marketing access for MSME products • Improving MSME products through the curation process
Pembangunan Gerai Usaha UMKM Construction of MSME Outlets	Bantuan TJSL CSR Assistance	Madiun, Jawa Timur Madiun, East Java	Rp193,6 juta Rp193.6 million	• Mengembangkan akses pemasaran produk UMKM melalui sarana – prasarana yang layak • Developing marketing access for MSME products through proper infrastructure
Pembangunan Rumah Kemas UMKM Construction of MSME Packaging House	Bantuan TJSL CSR Assistance	Maros, Sulawesi Selatan Maros, South Sulawesi	Rp199,9 juta Rp199.9 million	• Meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM dalam proses pengemasan produk • Meningkatkan kualitas kemasan produk UMKM yang berimbas pada citra produk • Building the capacity of MSME entrepreneurs in the product packaging process • Enhancing the MSME product packaging, which affects product image
Pembangunan dan renovasi Warung Kerek Construction and renovation of Warung Kerek	Bantuan TJSL CSR Assistance	Jakarta Selatan South Jakarta	Rp194,8 juta Rp194.8 million	• Meningkatkan sarana–prasarana pemasaran produk UMKM kuliner • Meningkatkan citra UMKM kuliner • Improving marketing infrastructure for culinary MSME products • Enhancing the image of culinary MSMEs
Pembangunan Plasma Pengelolaan Sampah Construction of Waste Management Plasma	Bantuan TJSL CSR Assistance	Yogyakarta, DIY Special Region of Yogyakarta	Rp230,6 juta Rp230.6 million	• Meningkatkan serapan pengelolaan sampah organik • Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui produk hasil pengelolaan sampah • Increasing uptake of organic waste management • Increasing community income through waste management products
Pembangunan MCK Development of MCK	Bantuan TJSL CSR Assistance	Situbondo, Jawa Timur Situbondo, East Java	Rp189,1 juta Rp189.1 million	• Memfasilitasi masyarakat sarana – prasaran MCK yang layak yang akan berimbas pada gaya hidup sehat masyarakat setempat • Facilitating the community with proper toilet facilities that will impact on the healthy lifestyle of the local community



Mengoptimalkan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Optimizing Community Economic Improvement

PT PII juga terus mengoptimalkan keberadaan Perseroan untuk senantiasa menghadirkan nilai atau manfaat bersama atau *Creating Shared Value* (CSV) bagi seluruh pemangku kepentingan Perseroan, dalam hal ini yakni meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat melalui berbagai program TJSL Perseroan. Program peningkatan ekonomi masyarakat di tahun 2023 diantaranya yaitu:

IIIGF strives to optimize the Company's presence to always bring shared value or benefits (*Creating Shared Value/CSV*) for all Company's stakeholders, by enhancing the economic added value for the community through various Company's CSR programs. The programs to improve the community economy in 2023 include:

Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Beserta Dampaknya Community Economic Improvement Program and the Impacts [GRI 203-2]

Program Pemberdayaan UMKM "Rumah Oleh-oleh Situbondo" "Situbondo Souvenir House" MSME Empowerment Program



- Pembangunan 1 pusat pemasaran produk-produk UMKM di Kabupaten Situbondo melalui Rumah Oleh-oleh Situbondo
- Menjadikan Rumah Oleh-oleh Situbondo sebagai cikal bakal *One Stop Solution* bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan akses edukasi, pemasaran, bisnis, kolaborasi, perizinan, *co-working space* dan galeri produk unggulan Situbondo
- Memfasilitasi 22 pelaku UMKM untuk mendapatkan desain dan kemasan produk
- Peningkatan *communal branding* bagi UMKM Situbondo
- Construction of 1 marketing center for MSME products in Situbondo Regency at Situbondo Souvenir House.
- Making Situbondo Souvenir House as the forerunner of One Stop Solution for MSME entrepreneurs to obtain access to education, marketing, business, collaboration, licensing, co-working space, and gallery of Situbondo's flagship products
- Facilitating 22 MSME entrepreneurs to have product designs and packaging
- Improving communal branding for Situbondo MSMEs

Program Pemberdayaan UMKM "Rumah Kemas Maros" "Maros Packaging House" MSME Empowerment Program



- Meningkatkan standar kualitas produk yang lebih higienis dan sesuai standar permintaan pasar
- Menyediakan sarana pembinaan khusus di bidang pengemasan
- Menyediakan berbagai layanan dan fasilitas serta informasi terkait kemasan produk agar para pelaku usaha UMKM dapat meningkatkan mutu, penampilan, nilai jual dan daya saing produknya
- Meningkatkan permintaan pasar atas produk UMKM binaan BAZNAS tidak hanya pasar lokal, tapi bisa masuk pada pasar ekspor
- Mendukung keberlanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi masyarakat
- Improving product quality standards that are more hygienic and in accordance with market demand standards
- Providing specialized coaching facilities in the packaging sector
- Providing various services and facilities as well as information related to product packaging so that MSME entrepreneurs can improve the quality, appearance, selling value, and competitiveness of their products.
- Increasing market demand for BAZNAS-assisted MSME products, not only in the domestic market but also in the export market
- Supporting sustainability and creating added value for the community

* Program peningkatan ekonomi masyarakat lainnya diungkapkan lebih lengkap di sub bab "Memperluas dampak bagi pembangunan masyarakat berkelanjutan" dalam laporan keberlanjutan ini

* Other community economic development programs can be referred to in the "Expanding impact for sustainable community development" section of this sustainability report



Mengoptimalkan Pelibatan Pemasok Lokal

Optimizing Local Supplier Involvement

PT PII juga senantiasa mengoptimalkan pelibatan pemasok lokal sebagai peran Perseroan dalam menghadirkan dampak/manfaat ekonomi tidak langsung yakni mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. PT PII mendefinisikan pemasok lokal sebagai pemasok yang berdomisili di sekitar wilayah operasional Perseroan. Selama tahun 2023, PT PII telah bekerjasama dengan sebanyak 311 pemasok, dimana sebanyak 306 pemasok merupakan pemasok lokal (98,39% dari total pemasok) dengan nilai pengadaan pemasok lokal sebesar Rp180,40 miliar (99,22% dari total nilai pengadaan). [GRI 203-2]

IIGF always optimizes the involvement of local suppliers as the Company's role in presenting indirect economic impacts/benefits, i.e., encouraging local economic growth. IIGF defined local vendors as suppliers who are domiciled around the Company's operations. In 2023, IIGF collaborated with 311 suppliers, with 306 local suppliers (98.39% of total suppliers) with local suppliers procurement value of Rp180.40 billion (99.22% of the total procurement value). [GRI 203-2]

Pemberdayaan Pemasok Lokal

Local Supplier Empowerment

[GRI 203-2]

Jenis Pemasok Type of Supplier	2023		2022		2021	
	Jumlah Pemasok Vendor	Nilai (Rp miliar) Mark (Rp billion)	Jumlah Pemasok Vendor	Nilai (Rp miliar) Mark (Rp billion)	Jumlah Pemasok Vendor	Nilai (Rp miliar) Mark (Rp billion)
Pemasok Nasional National Vendor	306	180,40	332	101,61	293	74,73
Pemasok Internasional International Vendor	5	1,41	4	1,79	6	4,64
Total	311	181,81	336	103,40	299	79,37
% Pemasok Lokal % Local Vendor	98,39%	99,22%	98,81%	98,27%	97,99%	94,15%

Mengembangkan Ekosistem Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Expanding Indonesia's Infrastructure Development Ecosystem

[GRI 404-2] [OJK F.17, F.22, F.26]

Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan masyarakat di Indonesia. Infrastruktur berpengaruh besar pada produktivitas serta keterbukaan akses di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata dan efektif agar dapat memetik hasil yang optimal.

Infrastructure development has an important role in economic and social growth in Indonesia. Infrastructure heavily influences productivity and opens access to all of the country. Therefore, infrastructure development shall be carried out evenly and effectively to achieve optimal results.

Untuk mendukung penyediaan infrastruktur yang efektif dan merata, diperlukan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mencukupi. Iklim kebijakan yang kondusif juga diperlukan untuk mengatur dan mengakomodasi berbagai alternatif pendanaan kreatif seperti KPBU serta kolaborasi untuk menciptakan ekosistem pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

Qualified human resources with adequate skills and knowledge are necessary to support the provision of effective and equitable infrastructure. A conducive policy climate is also necessary to regulate and accommodate various creative funding alternatives, such as PPP and collaboration, to provide a better ecosystem for infrastructure development.



Oleh karena itu, PT PII menjadikan upaya pengembangan ekosistem infrastruktur sebagai salah satu pilar utama kegiatan Perseroan melalui pembentukan IIGF Institute. Melalui IIGF Institute, PT PII berupaya untuk menjadi katalis dalam pembangunan ekosistem ini melalui berbagai program edukasi, riset, dan advokasi kebijakan yang diharapkan dapat mendukung sinergi antara semua pihak, dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan (*sustainable*), tangguh (*resilient*), produktif (*productive*), inklusif (*inclusive*), dan merata (*equitable*), IIGF Institute berupaya membangun ekosistem yang lebih baik melalui empat pilar kegiatan, yaitu edukasi, riset, advokasi, dan *outreach*.

Therefore, IIGF strives to develop the infrastructure ecosystem as one of the main pillars of the Company's activities by establishing the IIGF Institute. Through IIGF Institute, IIGF strives to be a catalyst in this ecosystem development in various educational programs, research, and policy advocacy that shall encourage synergy between all parties, i.e., the government, private sector, academics, and the community.

IIGF Institute strives to establish a better ecosystem through four pillars of activities, i.e., education, research, advocacy, and outreach to realize sustainable, resilient, productive, inclusive, and equitable infrastructure development.



Edukasi Education

Program edukasi terdiri atas 2 (dua) jenis kegiatan yaitu *Capacity Building* (CB) dan penyelenggaraan *Certified PPP Professional* (CP3P). Program edukasi ini bertujuan untuk menyebarkan informasi serta meningkatkan pengetahuan pemangku kepentingan terkait dengan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur, khususnya terkait dengan skema KPBU. IIGF Institute menyelenggarakan program edukasi unggulan yang didesain untuk membangun kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk jangka panjang.

Untuk menjalankan kegiatan *capacity building*, IIGF Institute berkolaborasi dengan Divisi Guidance and Consultation yang memegang peran penting sebagai fungsi terdepan dalam berhubungan dengan PJP dan calon PJP. Selain dengan pihak internal, IIGF Institute juga menjadi fasilitator pelaksana *capacity building* Kantor Bersama KPBU bekerja sama dengan pihak eksternal di antaranya dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas serta mitra akademik nasional maupun daerah yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan proyek yang direncanakan.

The education program consists of two (2) types of activities, i.e., Capacity Building (CB) and the Certified PPP Professional (CP3P) program. The program has the objective to disseminate information and enhance stakeholders' knowledge regarding alternative financing for infrastructure development, particularly in terms of PPP schemes. IIGF Institute provides flagship educational programs designed to build human resource capacity in the field of long-term quality infrastructure delivery.

To carry out the capacity building, the IIGF Institute collaborates with the Guidance and Consultation Division, which plays an important role as the leading function in dealing with GCAs and prospective GCAs. In addition to the internal parties, the IIGF Institute is also a facilitator for capacity building at PPP Joint Office in collaboration with external parties, including, in this case the Ministry of National Development Planning/Bappenas and national and regional academic partners who have knowledge or experience related to the planned project.



Selama tahun 2023, IIGF Institute menyelenggarakan kegiatan CB secara tatap muka yaitu sebagai berikut:

In 2023, IIGF Institute organized face-to-face CB activities as follows:

Kegiatan Capacity Building (CB) Tahun 2023 Capacity Building (CB) in 2023

No	Tanggal Date	Kegiatan Activity
1	25 – 27 Januari 2023 25 – 27 January 2023	CB KPBU Pengembangan Jalur MRT Jakarta Fase 4 (Fatmawati – Kp. Rambutan) dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) CB PPP Phase 4 MRT Jakarta Line Development (Fatmawati – Kp. Rambutan) with PT MRT Jakarta (Perseroda)
2	30 Januari 2023 30 January 2023	CB KPBU Proyek PJU Kabupaten Banyumas CB PPP Banyumas Regency PJU Project
3	6 Februari 2023 6 February 2023	CB KPDBU bagi DPRD Kabupaten Sampang Proyek RSUD Sampang CB KPDBU for Sampang Regency DPRD Sampang Hospital Project
4	14 Februari 2023 14 February 2023	CB KPDBU Proyek APJ Kabupaten Ngawi CB KPDBU Ngawi Regency SLE Project
5	8 Maret 2023 8 March 2023	CB KPDBU bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk Proyek PJU Kota Samarinda CB KPDBU for the Samarinda Municipal Government for the Samarinda PJU Project
6	10 Maret 2023 10 March 2023	CB KPBU bagi Bank Kaltimara CB PPP for Bank Kaltimara
7	17 Mei 2023 17 May 2023	CB KPBU dengan BPIW CB PPP with BPIW
8	30 Mei 2023 30 May 2023	CB KPBU dengan Pemda DKI CB PPP with Special Capital Region of Jakarta
9	20 – 21 Juni 2023 20 – 21 June 2023	CB KPBU dengan PPIT Kemenhub Batch 1 CB PPP with PPIT of Ministry of Transportation Batch 1
10	4 – 5 Juli 2023 4 – 5 July 2023	CB KPBU dengan PPIT Kemenhub Batch 2 CB PPP with PPIT of Ministry of Transportation Batch 2
11	18 Agustus 2023 18 August 2023	CB KPBU dengan Bank BJB Bandung CB PPP with Bank BJB Bandung
12	13 November 2023 13 November 2023	CB KPBU dengan Pemprov Jawa Timur CB PPP with East Java Provincial Government
13	18 Desember 2023 18 December 2023	KPBU dengan GIZ dengan kurikulum TALP PPP with GIZ with TALP curriculum

Selain kegiatan CB, IIGF Institute juga berupaya meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan di bidang infrastruktur guna memastikan tercapainya peningkatan kapasitas ekosistem infrastruktur atas skema KPBU. Untuk itu, IIGF Institute sejak tahun 2019 telah resmi menjadi *Accredited Training Organization (ATO)* untuk *Certified PPP Professional (CP3P)* dari *Accredited Professional Manager Globally (APMG)*. Program CP3P ini merupakan program sertifikasi kompetensi KPBU berstandar internasional yang dikembangkan oleh World Bank Group (WBG) bersama Asian Development Bank (ADB), European Bank of Reconstruction and Development (EBRD), Islamic Development Bank (IsDB), dan Inter-American Development Bank (IDB) dan sebagian didanai oleh Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF). Program inovasi dari WBG tersebut memiliki visi bersama yaitu untuk mencapai peningkatan kinerja PPP secara global.

In addition to CB activities, the IIGF Institute also strives to increase the capacity of stakeholders in the infrastructure sector to ensure that infrastructure ecosystem capacity building under the PPP scheme are achieved. Therefore, since 2019, IIGF Institute has officially become an Accredited Training Organization (ATO) for Certified PPP Professionals (CP3P) from Accredited Professional Managers Globally (APMG). The CP3P program is an international standard PPP competency certification program developed by the World Bank Group (WBG) in collaboration with the Asian Development Bank (ADB), European Bank of Reconstruction and Development (EBRD), Islamic Development Bank (IsDB), and the Inter-American Development Bank (IDB), and partially funded by the Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF). This innovation from the WBG has a shared vision, i.e., to achieve improved PPP performance globally.



Pelaksanaan program CP3P bertujuan untuk membekali individu, para pemangku kepentingan, serta para profesional mengenai praktik-praktik terbaik KPBU level internasional. Para peserta yang telah mengikuti program tersebut diharapkan dapat menciptakan *framework* KPBU yang lebih optimal, meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan proyek KPBU yang berkualitas, meningkatkan kapabilitas dalam hal pendampingan penyiapan proyek serta mendapatkan peluang untuk mengembangkan bisnis pada proyek KPBU.

Program Sertifikasi CP3P dapat diikuti oleh kalangan umum dari berbagai disiplin ilmu ataupun sektor, terutama bagi para praktisi/profesional KPBU di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, praktisi KPBU, investor, operator dan lembaga keuangan, serta konsultan (keuangan, hukum, dan teknis) yang ingin memperoleh kredensial KPBU yang dapat diakui secara global.

Selama tahun 2023, ATO PT PII melalui IIGF Institute telah melaksanakan kegiatan Program CP3P *Foundation Level 3 batch*, *Preparation Level 1 batch* dan *Execution Level 1 batch* dengan tingkat kelulusan rata-rata 85,4%, sebagai berikut:

The CP3P program aims to equip individuals, stakeholders, and professionals in terms of PPP international best practices. The participants who have attended the program shall be able to create a more optimal PPP framework, increase their ability to generate quality PPP projects, increase their capabilities in terms of assisting project preparation, and obtain opportunities to develop business in the PPP projects.

CP3P Certification Program can be participated by the public from various disciplines or sectors, especially PPP practitioners/professionals in Ministries/Agencies and Local Governments, PPP Practitioners, Investors, Operators, and Financial Institutions, as well as Consultants (Finance, Legal, and Technical) who want to obtain PPP credentials that are internationally recognized.

In 2023, IIGF's ATO, through the IIGF Institute, has carried out CP3P Foundation Level 3 Program, Preparation Level 1, and Execution Level 1, with an average passing rate of 85.4%, as follows:

Program CP3P Tahun 2023 CP3P Program in 2023

No	Tanggal Date	Kegiatan Activity	Peserta Participant
1	Course: 8–12 Mei 2023 Ujian: 16 Mei 2023 Course: 8–12 May 2023 Exam: 16 May 2023	CP3P Foundation Batch 12	Internal PT PII Internal IIGF
2	Course: 22–24 Mei 2023 Ujian: 30 Mei 2023 Course: 22–24 May 2023 Exam: 30 May 2023	CP3P Foundation Batch 13	DJKN Kementerian Keuangan, PT SMF (Persero), PT Marathama Cipta Mandiri DJKN of the Ministry of Finance, PT SMF (Persero), PT Marathama Cipta Mandiri
3	Course: 10–12 Juli 2023 Ujian: 18 Juli 2023 Course: 10–12 July 2023 Exam: 18 July 2023	CP3P Foundation Batch 14	DJPK Kementerian Keuangan, PT SMI (Persero), PT MRT, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk DJPK of the Ministry of Finance, PT SMI (Persero), PT MRT, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
4	Course: 31 Juli – 4 Agustus 2023 Ujian: 22 Agustus 2023 Course: 31 July – 4 August 2023 Exam: 22 August 2023	CP3P Preparation Batch 2	PT SMF (Persero), Internal PT PII PT SMF (Persero), Internal IIGF
5	Course: 6–10 November 2023 Ujian: 22 November 2023 Course: 6–10 November 2023 Exam: 22 November 2023	CP3P Execution Batch 1	PT SMF (Persero), PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk., Internal PT PII PT SMF (Persero), PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk., Internal IIGF



Riset dan Publikasi

Research and Publication

Sejak tahun 2015, IIGF Institute telah melaksanakan berbagai riset yang melibatkan para pemangku kepentingan seperti kementerian dan lembaga teknis terkait, pemilik proyek, akademisi dan universitas serta lembaga non-pemerintah. Hasil riset diharapkan dapat menjawab berbagai macam permasalahan yang muncul dari proyek-proyek infrastruktur di berbagai sektor dengan luasnya cakupan masukan dan perspektif dari berbagai pihak yang dapat mendorong penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang lebih baik di Indonesia.

Sepanjang tahun 2023, kegiatan riset dan publikasi PT PII adalah sebagai berikut:

Since 2015, IIGF Institute has carried out various research involving stakeholders such as related technical ministries and Institutions, project owners, academics, and universities, as well as non-governmental institutions. The results from the research shall be able to answer various kinds of problems that arise from infrastructure projects in various sectors with a wide range of inputs and perspectives from various parties, to encourage a better infrastructure development in Indonesia.

In 2023, IIGF's research and publication activities are as follows:

Kegiatan Riset dan Publikasi PT PII Tahun 2023 IIGF's Research and Publication in 2023



Riset Kajian Rencana Penerapan Jaminan Pendapatan Minimum (MRG) Research on Minimum Income Guarantee (MRG) Implementation

Sebagai Instrumen Mitigasi Risiko Pendapatan Jalan Tol di Indonesia – Fase 2 Kajian Rencana Penerapan Jaminan Pendapatan Minimum (MRG) Sebagai Instrumen Mitigasi Risiko Pendapatan Jalan Tol di Indonesia – Fase 3 Kerangka Konseptual Pengembangan KPBU Skala Kecil Sebagai Opsi Moda Dalam Penyediaan Infrastruktur Daerah di Indonesia.

As an Instrument to Mitigate Toll Road Revenue Risk in Indonesia – Phase 2 Study of the Plan to Implement Minimum Income Guarantee (MRG) as a Toll Road Revenue Risk Mitigation Instrument in Indonesia – Phase 3 Conceptual Framework for Small Scale PPP as an Option in the Provision of Regional Infrastructure in Indonesia.

- Kajian Tinjauan Kritis Multipihak Untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Kajian Studi Pendahuluan Proyek KPBU Kantor DJP Kalibata
- Kajian Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Daerah Dengan Skema KPBU Melalui Perspektif Tata Kelola Kolaboratif

- Multi-stakeholders Critical Feasibility Study for Drinking Water Supply Systems (DWSS)
- Preliminary Study of the Kalibata DJP Office PPP Project
- Review of the Regional Infrastructure Provision Using the PPP Scheme through a Collaborative Governance Perspective



Publikasi Publication

- Buku Seri Kajian Skema Pembiayaan Inovatif Seri 1 – Optimalisasi Dana Pensiun untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
- Buku Seri Kajian Skema Pembiayaan Inovatif Seri 2 – Dana Filantropi Untuk Pembangunan di Indonesia
- Buku Seri Kajian Skema Pembiayaan Inovatif Seri 3 – Skema Pembiayaan Kreatif dan Inovatif untuk Pembangunan Infrastruktur
- Buku Kajian Kritis Jalan Tol Vol 1 – Perspektif Kebijakan dalam Pembangunan Jalan Tol di Indonesia
- Buku Kajian Kritis Jalan Tol Vol 2 – Pengelolaan Aspek Teknis dalam Perancangan dan Pembangunan Jalan Tol
- Buku Kajian Kritis Jalan Tol Vol 3 – Keberlanjutan dalam Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol
- *Journal of Infrastructure Policy and Management* Volume 6 Edisi 1 dan 2

- Innovative Financing Scheme Review Book Series 1 – Optimizing Pension Funds for Infrastructure Development in Indonesia
- Innovative Financing Scheme Review Book Series 2 – Philanthropy Fund for Development in Indonesia
- Innovative Financing Scheme Review Book Series 3 – Creative and Innovative Financing Schemes for Infrastructure Development
- Toll Road Critical Review Book Vol 1 – Policy Perspectives in Toll Road Development in Indonesia
- Toll Road Critical Review Book Vol 2 – Technical Aspects Management in Toll Road Design and Construction
- Toll Road Critical Review Book Vol 3 – Sustainability in the Toll Road Operations and Maintenance
- *Journal of Infrastructure Policy and Management* Volume 6 Issues 1 and 2



Advokasi Kebijakan dan Outreach Policy Advocacy and Outreach

Untuk memperluas keterlibatan para pemangku kepentingan, PT PII melalui IIGF Institute menyelenggarakan berbagai kegiatan melalui kolaborasi dengan mitra strategis di level nasional dan internasional untuk mendorong penyusunan dan implementasi kebijakan yang lebih baik antara lain, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, lembaga riset dan institusi sejenis lainnya.

Hingga akhir tahun 2023, IIGF Institute telah menjalin kerja sama dengan 36 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, yang tergabung dalam *University Network for Indonesia Infrastructure Development* (UNIID), yaitu wadah untuk berbagi informasi dan pengalaman serta harmonisasi kebijakan. Melalui UNIID diharapkan dapat mengakomodir seluruh potensi yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi di bidang pembangunan dan penyediaan Infrastruktur.

Sepanjang tahun 2023, kegiatan *outreach* yang dilaksanakan meliputi:

IIGF, via the IIGF Institute, organizes various activities in collaboration with strategic partners at the national and international levels to encourage better policy formulation and implementation to expand the involvement of the stakeholders, including ministries/agencies, universities, research institutions, and other similar institutions.

As of the end of 2023, the IIGF Institute has collaborated with 36 colleges/universities throughout Indonesia, which are members of the *University Network for Indonesia Infrastructure Development* (UNIID), i.e., a forum for sharing information and experiences as well as harmonizing policies. UNIID shall accommodate all the potential of colleges/universities in the infrastructure development and provision sector.

In 2023, outreach activities carried out include:





Kegiatan Outreach Tahun 2023 Outreach in 2023

Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) ke-24
24th Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR)

Topik/Tema dan Case Study
Peluang dan Tantangan Pengembangan Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Di Kota Samarinda dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha *Availability Payment* (KPBU-AP)

Topic/Theme and Case Study
Opportunities and Challenges for Developing Public Street Lighting (PJU) Projects in Samarinda City with the Public Private Partnership *Availability Payment* (KPBU-AP) Scheme

Universitas
Universitas Mulawarman

University
Mulawarman University

INFI-ers Connectivity Talk (INCoTalk)

Topik/Tema dan Case Study
Kajian Kritis Pembangunan Jalan Tol di Indonesia

Topic/Theme and Case Study
Critical Study of Toll Road Development in Indonesia

Universitas
Universitas Gadjah Mada

University
University of Gadjah Mada

Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) ke-25 Edisi World Water Forum 2024
25th Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) World Water Forum 2024 Edition

Topik/Tema dan Case Study
Amplifying Partnership: A Collaborative Drive to Strengthen Indonesia's Water Sector

Topic/Theme and Case Study
Amplifying Partnership: A Collaborative Drive to Strengthen Indonesia's Water Sector

Universitas
Universitas Brawijaya

University
Brawijaya University





LINGKUNGAN
ENVIRONMENT



Memperluas Peran dan Manfaat Bagi Keberlanjutan Lingkungan

Expanding Roles
and Benefits for
Environmental
Sustainability



PT PII berkomitmen untuk memperluas peran dan manfaat bagi keberlanjutan lingkungan dengan menjadikan praktik perlindungan lingkungan sebagai hal yang penting untuk mendukung integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan proyek dan menghadirkan pengelolaan operasional kantor ramah lingkungan. Komitmen ini diwujudkan dengan mematuhi semua peraturan lingkungan, mengintegrasikan aspek lingkungan dalam proses penjaminan guna mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta melakukan pengelolaan dampak lingkungan yakni pengelolaan sumber daya alam dan efisiensi energi, pencegahan polusi dan pengelolaan limbah dan pelestarian keanekaragaman hayati. Komitmen dan langkah strategis ini membuktikan langkah nyata Perseroan mendorong penerapan keuangan berkelanjutan, adaptasi terhadap tantangan perubahan iklim dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam membangun masa depan berkelanjutan.

IIGF is committed to expanding its role and benefits for environmental sustainability by implementing environmental protection practices as the key to support the integration of environmental considerations into the project decision-making process and presenting environmentally friendly office operational management. This commitment is realized by complying with all environmental regulations, integrating environmental aspects in the guarantee process to encourage sustainable infrastructure development, and managing environmental impacts, i.e., natural resource management and energy efficiency, pollution prevention and waste management, and biodiversity preservation. These commitments and strategic steps are the Company's evidence to encourage the implementation of sustainable finance, adapt to the climate change challenges, and support the Sustainable Development Goals (SDGs) achievement in building a sustainable future.



Pendekatan Manajemen Topik Pengelolaan Lingkungan

Management Approach to Environmental Management
[GRI 3-3]

PENGLOLAAN DAMPAK



IMPACT MANAGEMENT

PT PII menjadikan topik pengelolaan lingkungan (energi, air dan air limbah, emisi dan limbah) sebagai topik yang penting bagi Perseroan dan pemangku kepentingan karena sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan penjaminan terutama pada proyek-proyek infrastruktur, PT PII berkomitmen menciptakan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan dengan memastikan bahwa setiap proyek-proyek infrastruktur yang memperoleh jaminan senantiasa mengedepankan praktik-praktik pengelolaan lingkungan terbaik dalam mengurangi dampak terhadap lingkungan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. PT PII juga berkomitmen untuk memperluas peran dalam meningkatkan keberlanjutan lingkungan dengan memastikan setiap kegiatan operasional kantor senantiasa memperhatikan aspek lingkungan.

Untuk itu, PT PII melakukan pengelolaan dampak lingkungan guna meminimalkan potensi dampak negatif seperti penurunan kualitas air, tanah dan udara, penurunan fungsi biodiversitas sebagai penopang kehidupan manusia, pencemaran lingkungan yang merusak lingkungan, mempengaruhi kualitas kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, dan juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perseroan yang mempengaruhi keberlanjutan usaha Perseroan. Untuk mencegah dampak negatif tersebut, PT PII telah melakukan berbagai strategi dan upaya berkelanjutan diantaranya yaitu melakukan efisiensi energi, konservasi air, pengelolaan air limbah domestik, inisiatif pengurangan atau reduksi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), meminimalkan timbulan limbah serta melakukan berbagai program pelestarian keanekaragaman hayati.

IIGF considers the environmental management (energy, water and wastewater, emission, and waste) as an important topic for the Company and the stakeholders because as a Company that is engaged in the guarantee activities, especially for infrastructure projects, IIGF is committed to creating sustainable infrastructure development by ensuring that every infrastructure project that receives guarantees prioritizes best environmental management practices to minimize the impact on the environment to ensure environmental sustainability for the future generations. IIGF is committed to expanding its role in improving environmental sustainability by ensuring that every office operations always pays attention to environmental aspects.

Therefore, IIGF manages environmental impact to minimize potential negative impacts, such as degradation of water, soil, and air quality, degradation of biodiversity functions as a support for human life, environmental pollution that damages the environment, affects the quality of health and the survival of humans and other living things, and has the potential to cause losses to the Company which affects the Company's business sustainability. IIGF performed various sustainable strategies and efforts to prevent these negative impacts, including energy efficiency, water conservation, domestic wastewater management, initiatives to reduce Greenhouse Gas (GHG) emissions, minimize waste generation, and implemented various biodiversity conservation programs.



Dengan melakukan berbagai strategi dan upaya pengelolaan dampak lingkungan yang berkelanjutan pada kegiatan penjaminan maupun operasional kantor yang telah dijalankan tersebut, PT PII yakin akan menciptakan dampak atau manfaat lingkungan diantaranya yaitu penghematan biaya operasional, pengurangan emisi GRK dan kontribusi terhadap transisi menuju energi bersih. Hal ini membuktikan bahwa PT PII senantiasa menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, memperkuat penerapan kerangka LST dan memperluas peran untuk melindungi bumi yang berkontribusi pada pencapaian target emisi nol karbon atau *Net Zero Emission* (NZE) Indonesia pada 2060 dan pencapaian SDGs.

By executing various strategies and efforts to manage sustainable environmental impacts on guarantee activities and office operations, IIGF believes that such actions shall create environmental impacts or benefits, including operational cost savings, reduction of GHG emissions, and contribution to the transition to clean energy. This proves that IIGF applies the sustainable finance principles, strengthens the ESG framework, and expands the role to protect the earth, which contributes to the achievement of Indonesia's Net Zero Emission (NZE) target by 2060 and the SDGs.

KEBIJAKAN YANG TELAH DIKEMBANGKAN SECARA KHUSUS



SPECIFICALLY DEVELOPED POLICIES

Kebijakan PT PII terkait Pengelolaan Lingkungan:

- Kebijakan Pengelolaan Kegiatan *General Affair*
- Standar Operasional Prosedur Siaga Tanggap Darurat/SMKU Sistem Manajemen kelangsungan Usaha
- Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
- Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- *Environmental and Social Management Framework* (ESMF)

Kebijakan PT PII terkait Pengelolaan Lingkungan mengacu pada Ketentuan Umum:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perubahannya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

IIGF's policies on Environmental Management:

- General Affairs Management Policy
- Standard Operating Procedure for Business Continuity Emergency Response/SMKU Management System
- The Board of Directors' Decree on the Guidelines for Corporate Social Responsibility Implementation
- Standard Operational Procedures for Corporate Social Responsibility Implementation
- Environmental and Social Management Framework (ESMF)

IIGF's policy in terms of the Environmental Management refers to the General Provisions:

- Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and its Amendments, Law No. 6 of 2023 on the Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation as Law
- Law No. 16 of 2016 on the Ratification of the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change
- Law of the Republic of Indonesia No. 18 of 2008 on Waste Management
- Presidential Regulation No. 98 of 2021 on the Carbon Economic Value for the Achievement of a National Contribution Target and Greenhouse Gas Emissions Control in the National Development
- Government Regulation No. 22 of 2021 on the Environmental Protection and Management

KOMITMEN



COMMITMENT

- Memastikan dalam setiap kegiatan operasional memperhatikan aspek lingkungan yang sejalan dengan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan
- Mendukung upaya kelestarian lingkungan
- Menerapkan program penghematan/efisiensi penggunaan listrik, kertas dan air untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan
- Mengurangi emisi gas rumah kaca dari operasionalnya penggunaan kendaraan listrik, pengurangan limbah di tempat kerja

- Ensuring that every operations consider the environmental aspects that are in line with the sustainable development goals
- Supporting environmental sustainability
- Implementing programs to save electricity, paper, and water consumption efficiently, to increase environmental sustainability
- Reducing greenhouse gas emissions from operations by utilizing electric vehicles and reducing workplace waste



TUJUAN/TARGET



OBJECTIVES/TARGETS

- Mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan terkait lingkungan yang berlaku
- Meningkatkan efisiensi penggunaan energi dengan mengadopsi berbagai inisiatif

- Complying with all prevailing environmental laws and regulations
- Improving energy use efficiency by adopting various initiatives

EVALUASI DAN EFEKTIVITAS TINDAKAN UNTUK MENGELOLA DAMPAK



EVALUATION AND EFFECTIVENESS OF IMPACT MANAGEMENT MEASURES

- Efektivitas pengelolaan lingkungan pada operasional kantor PT PII ditinjau melalui pengukuran, pemantauan dan evaluasi program pengelolaan lingkungan dalam rangka memastikan Perseroan senantiasa mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan terkait lingkungan yang berlaku

- The effectiveness of environmental management in IIGF's office operations is reviewed through assessment, monitoring, and evaluation of environmental management programs to ensure that the Company complies with all prevailing environmental laws and regulations

PENANGGUNG JAWAB



PERSON IN CHARGE

- Divisi Lingkungan dan Sosial di bawah Direktur Bisnis
- Divisi Corporate Service and Procurement – General Affair di bawah Direktur Keuangan
- Divisi Sekretaris Perusahaan dan Komunikasi di bawah Direktur Utama

- Environmental and Social Division reporting to the Director of Business
- Corporate Service and Procurement – General Affairs Division under the Director of Finance
- Corporate Secretary and Communication Division under the President Director

ALOKASI ANGGARAN



BUDGET ALLOCATION

PT PII telah mengeluarkan biaya lingkungan sebesar Rp111,38 juta untuk membiayai berbagai program pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup

IIGF spent Rp111.38 million of environmental costs to finance various environmental management and conservation programs

KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN DAMPAK



STAKEHOLDERS' ENGAGEMENT IN MANAGING IMPACT

Pemerintah

- Menerbitkan undang-undang dan peraturan terkait lingkungan
- Menginisiasi berbagai kebijakan terkait lingkungan

Government

- Issuing laws and regulations related to the environment
- Initiating various policies related to the environment

Badan Tata Kelola Tertinggi

- Menetapkan target kinerja lingkungan Perseroan
- Menginisiasi berbagai strategi dan kebijakan strategis terkait pengelolaan lingkungan Perseroan

Supreme Governance Body

- Determining the Company's environmental performance targets
- Initiating various strategies and strategic policies related to the Company's environmental management

Karyawan PTPII

- Merumuskan perencanaan dan melaksanakan program penghematan/efisiensi penggunaan listrik, kertas dan air

IIGF's employees

- Formulating the plan and implementing programs for saving/efficiency of electricity, paper, and water

Masyarakat

- Terlibat aktif menyukses program TJSJ Perseroan, yaitu Pemulihan Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Program Penanggulangan Lahan Kritis dan Penanaman Mangrove

Community

- Being actively involved in the success of the Company's CSR program, i.e., Citarum Watershed Ecosystem Restoration, Critical Land Management Program, and Mangrove Planting



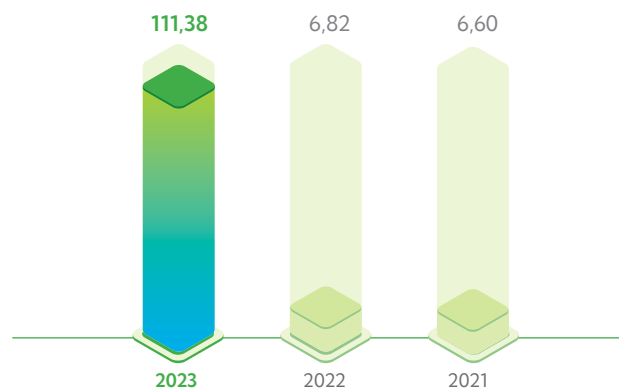
Biaya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan

The Environmental Management and Conservation Cost

Selama tahun 2023, PT PII telah mengeluarkan biaya lingkungan sebesar Rp111,38 juta untuk membiayai berbagai program pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, antara lain berupa pengelolaan sampah kantor secara berkelanjutan yang bekerja sama dengan pihak ketiga, program pemulihan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan program penanggulangan lahan kritis Dataran Tinggi Dieng. [OJK F.4]

In 2023, IIGF spent Rp111.38 million of environmental expenditure to finance various environmental management and preservation programs, including the sustainable office waste management in collaboration with third parties, Citarum Watershed ecosystem recovery program, and the Dieng Plateau land management program. [OJK F.4]

Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Rp Juta)
Environmental Management and Monitoring Cost (Rp Million)
[OJK F.4]



Mengelola Dampak Lingkungan

Managing Environmental Impact

PT PII senantiasa mengoptimalkan pengelolaan dampak lingkungan sesuai dengan peraturan pemerintah, kerangka kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) pada dukungan dan fasilitas pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta berbagai kerangka keberlanjutan guna mencegah dampak negatif dan menghadirkan keberlanjutan lingkungan. Dampak lingkungan yang dikelola PT PII yaitu pengelolaan sumber daya alam dan efisiensi energi, pencegahan polusi, pengelolaan limbah, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

IIGF optimizes the environmental impact management, in accordance with government regulations, the Environmental, Social, and Governance (ESG) framework on government support and facilities for infrastructure financing issued by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and various sustainability frameworks, to prevent negative impacts and provide environmental sustainability. The environmental impacts managed by IIGF are natural resources management and energy efficiency, pollution prevention and waste management, and biodiversity conservation.



Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi Natural Resources Management and Energy Efficiency

Dalam rangka mencegah dampak negatif dan menghadirkan keberlanjutan lingkungan, PT PII senantiasa mengintegrasikan aspek lingkungan, yakni dengan mengelola sumber daya alam dan efisiensi energi dalam proses penjaminan. Hal ini didasari karena aktivitas proyek berpotensi menurunkan kualitas dan kuantitas air, mengganggu ketersediaan air bersih, meningkatkan konsentrasi polutan di udara dan menurunkan kualitas tanah.

Untuk itu, PT PII senantiasa mendorong pengelola proyek untuk menyusun rencana pencegahan dan/atau pengurangan terlepasnya polutan ke udara, air, tanah untuk memastikan kualitas udara, air, dan tanah tetap sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku, menyusun rencana pengolahan air dan air limbah yang timbul dari aktivitas proyek, sekaligus mendorong pengelola proyek untuk membuat bangunan yang mengonsumsi energi secara efisien, penggunaan energi terbarukan serta patuh dan melaksanakan segala jenis peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan bangunan hijau dan peraturan lain yang terkait. Selama tahun 2023, PT PII telah melakukan berbagai inisiatif dan upaya untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang Perseroan dukung tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan. Peran dan langkah tersebut adalah sebagai berikut:

IIGF integrates environmental aspects, i.e., natural resources and energy efficiency management in the guarantee process to prevent negative impacts and provide environmental sustainability. This is based on the fact that project activities have the potential to reduce water quality and quantity, disrupt clean water availability, increase the concentration of pollutants in the air, and reduce soil quality.

Therefore, IIGF encourages project managers to develop plans to prevent and/or reduce the generation of pollutants into the air, water, and soil to ensure that the quality of air, water, and soil remains in accordance with the quality standards set forth in the prevailing legislation, develop water and wastewater treatment plans in the project activities, as well as encourage project managers to construct buildings that consume energy efficiently, consume renewable energy, and comply with and implement all types of laws and regulations relating to green buildings and other related regulations. In 2023, IIGF undertaken various initiatives and efforts to ensure that the projects that the Company supports, not only provide economic benefits, but also consider environmental impacts. These roles and actions are as follows:

Penyediaan Penjaminan Proyek yang Berkelanjutan Provision of Sustainable Project Guarantee

PT PII memberikan penjaminan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan memastikan bahwa proyek-proyek yang mendapat penjaminan telah memenuhi standar lingkungan yang ketat dan mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya alam dan efisiensi energi.

IIGF provides guarantees for infrastructure projects that are sustainable and environmentally friendly, by ensuring that the projects guaranteed have met strict environmental standards and adopted best practices in natural resource management and energy efficiency.

Promosi Praktik Konstruksi Hijau Promotion of Sustainable Construction Practices

PT PII aktif mempromosikan praktik konstruksi hijau di antara pengelola proyek, termasuk penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan, penerapan teknologi efisiensi energi dan pengelolaan limbah konstruksi yang baik. PT PII juga mendorong penggunaan sumber energi terbarukan dalam proyek-proyek infrastruktur.

IIGF actively promotes sustainable construction practices to project managers, including the use of environmentally friendly building materials, energy efficiency technology implementation, and good construction waste management. IIGF encourages the use of renewable energy sources in infrastructure projects.

Pendanaan Proyek Energi Terbarukan Renewable Energy Project Financing

Selama tahun 2023, PT PII telah mendukung dan memberikan penjaminan kepada berbagai proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin dan air. Dengan mendanai proyek-proyek ini, PT PII berkontribusi langsung dalam peningkatan penggunaan sumber daya energi yang bersih dan terbarukan.

In 2023, IIGF supported and provided guarantees to various renewable energy projects, such as solar, wind, and hydro power plants. By financing these projects, IIGF directly contributes to the increased use of clean and renewable energy resources.



Edukasi dan Pelatihan Education and Training

PT PII menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan bagi para pengelola proyek mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan efisiensi energi. Program ini mencakup *workshop*, seminar dan kursus yang berfokus pada pengenalan teknologi efisiensi energi terbaru, strategi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan studi kasus tentang proyek-proyek sukses.

IIGF organizes education and training programs for project managers on the importance of natural resource management and energy efficiency. The program includes workshops, seminars, and courses that focus on introducing the latest energy efficiency technologies, sustainable resource management strategies, and case studies on successful projects.

Kerjasama dengan Lembaga Internasional Cooperation with International Institutions

PT PII juga menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga internasional yang memiliki fokus pada keberlanjutan lingkungan. Melalui kemitraan ini, PT PII dapat mengakses sumber daya tambahan, pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

IIGF collaborates with various international institutions that focus on environmental sustainability. Through these partnerships, IIGF can access additional resources, knowledge, and technology, applicable in infrastructure projects in Indonesia.

Monitoring dan Evaluasi Monitoring and Evaluation

PT PII melakukan *monitoring* dan evaluasi berkala terhadap proyek-proyek yang didukung untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan efisiensi energi, dengan menilai kinerja proyek dalam hal penggunaan energi, pengelolaan limbah dan dampak lingkungan secara keseluruhan.

IIGF regularly monitors and evaluates projects supported to ensure compliance with environmental and energy efficiency standards, by assessing project performance in terms of energy consumption, waste management, and comprehensive environmental impact.

Dengan langkah-langkah ini, PT PII berperan aktif dalam mendorong pengelola proyek untuk mengelola sumber daya alam dan efisiensi energi, sehingga dapat menciptakan infrastruktur yang tidak hanya berkelanjutan dari sisi ekonomi tetapi juga lingkungan

Under such measures, IIGF plays an active role in encouraging project managers to manage natural resources and energy efficiency, to create infrastructure that is not only economically but also environmentally sustainable.

PT PII juga senantiasa melakukan pengelolaan penggunaan dan efisiensi energi dan juga pengelolaan penggunaan air dan air limbah di area kantor Perseroan, sebagai bentuk penerapan operasional kantor ramah lingkungan.

IIGF continuously manages energy consumption and efficiency management, and manage water consumption and wastewater in the Company's office area, implementing environmentally friendly office operations.

Pengelolaan Penggunaan dan Intensitas Energi Energy Consumption and Intensity Management

PT PII menggunakan energi yang bersumber dari energi fosil yaitu listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mendukung berbagai kegiatan operasional Perseroan seperti pada aktivitas kegiatan di area kantor maupun untuk bahan bakar kendaraan operasional. Dalam melakukan perhitungan penggunaan energi, PT PII menggunakan pendekatan sebagai berikut: [GRI 302-1] [OJK F.6]

IIGF consumes energy sourced from fossil energy, i.e., electricity and oil fuel (BBM) to support various operations of the Company, such as activities in the office area and fuel for operational vehicles. In calculating energy consumption, IIGF uses the following approach: [GRI 302-1] [OJK F.6]



Pendekatan Perhitungan Penggunaan Energi PT PII

Approach to Calculating IIGF's Energy Consumption

[GRI 302-1] [OJK F.6]

Metodologi Perhitungan Calculation Methods	Alat Pengukuran Measurement Tool	Konversi ke Satuan Gigajoule Conversion to Gigajoule
Data penggunaan energi diperoleh dari catatan pengukuran yang dilakukan secara rutin oleh Perseroan. Informasi mengenai penggunaan energi dari sumber-sumber seperti listrik dan BBM dicatat dan dianalisis untuk mengevaluasi tren dan pola konsumsi energi dari waktu ke waktu Data on energy consumption is obtained from regular measurement conducted by the Company. Information on energy consumption from sources such as electricity and fuel is recorded and analyzed, to evaluate trends and patterns of energy consumption from time to time	Pengukuran penggunaan energi dilakukan menggunakan alat-alat pengukur energi yang dipantau oleh Perseroan, seperti meteran listrik untuk mengukur konsumsi listrik dan pencatatan pengisian BBM untuk mengukur konsumsi bahan bakar. Data yang diperoleh dari alat-alat pengukuran tersebut kemudian dianalisis dan diolah untuk keperluan pelaporan Energy consumption is measured by using energy measuring devices monitored by the Company, such as electricity meters to measure electricity consumption and fuel filling records to measure fuel consumption. The data obtained from these measurement tools is analyzed and processed for reporting purposes	Nilai dan sumber faktor konversi ke satuan joule atau kelipatannya berdasarkan <i>General Converter for Energy</i> dari <i>International Energy Agency</i> (IEA): • Pemakaian BBM dari liter dikonversi ke gigajoule dengan menggunakan pendekatan 1 liter BBM = 0,033 gigajoule • Pemakaian listrik dari kilowatt-hour (kWh) dikonversi ke gigajoule dengan pendekatan 1 kWh = 0,0036 gigajoule The value and source of the conversion factor to joules or its multiplication refers to the <i>General Converter for Energy</i> from the <i>International Energy Agency</i> (IEA): • Fuel consumption from liters is converted to gigajoules under the assumption that 1 liter of fuel = 0.033 gigajoule • Electricity consumption from kilowatt-hour (kWh) is converted to gigajoules using the assumption of 1 kWh = 0.0036 gigajoule

Dengan mengikuti standar, metodologi, dan asumsi perhitungan yang telah ditetapkan, PT PII dapat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai penggunaan energi, yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan pelaporan yang transparan. Pada tahun 2023, penggunaan energi Perseroan sebesar 670,51 gigajoule, meningkat 41,78% dari tahun 2022 yaitu sebesar 472,92 gigajoule. PT PII juga telah melakukan perhitungan intensitas penggunaan energi untuk mengetahui jumlah penggunaan energi per karyawan, dengan nilai di tahun 2023 sebesar 4,08 gigajoule/karyawan, meningkat 31,19% dari tahun 2022 yaitu sebesar 3,11 gigajoule/karyawan. Berdasarkan analisa terhadap kondisi operasional Perseroan pada tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan dalam penggunaan energi. Pulihnya kondisi pasca pandemi COVID-19 membuat aktivitas operasional Perseroan kembali normal, termasuk kegiatan karyawan yang kembali ke kantor secara reguler. Hal ini mengakibatkan peningkatan penggunaan energi karena aktivitas operasional yang lebih intensif dan penggunaan fasilitas kantor yang lebih besar. Selain itu, strategi pertumbuhan Perseroan yang melibatkan penambahan jumlah karyawan juga menjadi faktor penting dalam peningkatan penggunaan energi. Penambahan karyawan memerlukan fasilitas tambahan dan infrastruktur pendukung, seperti ruang kerja, peralatan dan sumber daya lainnya, yang secara langsung berdampak pada peningkatan penggunaan energi. [GRI 302-1, 302-3] [OJK F.6]

By following the established calculation standards, methodologies, and assumptions, IIGF can obtain accurate and accountable information on energy consumption, which is the basis for transparent decision-making and reporting. In 2023, the Company consumed energy amounted to 670.51 gigajoules, increased by 41.78% compared to 2022 of 472.92 gigajoules. IIGF has calculated the energy consumption intensity to determine the amount of energy consumed per employee, i.e., 4.08 gigajoules/employee in 2023, increased by 31.19% from 2022 of 3.11 gigajoules/employee. Based on the analysis of the Company's operational conditions in 2023, it is concluded that there was an increase in energy consumption. The recovery after the COVID-19 pandemic has returned the Company's operations to normal, including the activities of employees who work at the office regularly. This resulted in an increase in energy consumption due to more intensive operations and use of office facilities. In addition, the Company's growth strategy involving the additional employees is also an important factor in the increased energy consumption. The additional employees required additional facilities and supporting infrastructure, such as workspaces, equipment, and other resources, which directly increased energy consumption. [GRI 302-1, 302-3] [OJK F.6]



Penggunaan dan Intensitas Energi PT PII Berdasarkan Jenis Energi

IIGF's Energy Consumption and Intensity by Type of Energy

[GRI 302-1, 302-3] [OJK F.6]

Jenis Energi Energy Type	Satuan Unit	Volume				Gigajoule			
		2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
Energi Fosil Fossil Energy									
Listrik Electricity	kWh	92.428,00	78.510,82	77.943,00	145.693,00	332,74	282,64	280,59	524,49
Bahan Bakar Minyak Fuel Oil	Liter	11.046,00	5.766,00	12.315	8.063,30	337,77	190,28	406,40	266,09
Total Penggunaan Energi (Gigajoule) Total Energy Consumption (Gigajoules)						670,51	472,92	686,99	790,58
Total Karyawan (Orang) Total Employees (Person)						164	152	143	130
Intensitas Penggunaan Energi (Gigajoule/orang) Energy Consumption Intensity (Gigajoule/person)						4,08	3,11	4,80	6,08

Sampai dengan tahun 2023, PT PII belum menghitung penggunaan energi di luar Perseroan yaitu jumlah penggunaan energi untuk perjalanan bisnis/dinas karyawan baik via darat, udara ataupun laut, transportasi pulang pergi karyawan ataupun transportasi yang disewa. Hal ini disebabkan ketidaktersediaan data karena sumber data tidak berada di bawah kendali Perseroan, melainkan membutuhkan pelibatan berbagai pihak serta membutuhkan perhitungan dan validasi data lebih kompleks yang mana belum dapat dilakukan oleh PT PII pada tahun 2023. Terkait upaya Perseroan dalam penyajian data energi yang dikonsumsi di luar organisasi, PT PII saat ini sedang melakukan pencarian informasi untuk mencatat dan menyajikan data konsumsi energi di luar organisasi. PT PII juga telah menyusun rencana untuk melibatkan pihak ketiga dalam proses verifikasi data untuk memastikan akurasi. [GRI 302-2]

Until 2023, IIGF has not calculated energy consumption outside the Company, i.e., the energy consumed for employee business/official trips via land, air, or sea, employees' round-trip transportation or hired transportation. This is due to the unavailability of data, because the data is not under the Company's control, but requires the involvement of various parties and more complex data calculations and validation, which could not be carried out by IIGF in 2023. Regarding the Company's efforts in presenting energy data consumed outside the organization, IIGF is currently searching for information to record and present energy consumption data outside the organization. IIGF has also developed a plan to involve third parties in the data verification process to ensure accuracy. [GRI 302-2]

Program Efisiensi Energi

Energy Efficiency Program

Pengelolaan energi memainkan peran penting dalam efisiensi operasional dan keberlanjutan lingkungan Perseroan. Untuk itu, PT PII berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam hal ini yaitu mendorong efisiensi energi sebagai bentuk upaya Perseroan dalam mencegah dampak negatif lingkungan, mematuhi regulasi energi, memenuhi tanggung jawab lingkungan Perseroan dan mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih. Upaya ini diharapkan dapat mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam memenuhi target-target yang tercantum di dalam SDGs, antara lain Tujuan Nomor 7: Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan Nomor 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab dan Tujuan Nomor 13: Penanganan Perubahan Iklim. [GRI 3-3]

Energy management has a vital role in the Company's operational efficiency and environmental sustainability. Therefore, IIGF is committed to optimizing the use of resources, in this case, encouraging energy efficiency as a form of the Company's efforts to prevent negative environmental impacts, complying with energy regulations, fulfilling the Company's environmental responsibilities, and supporting the transition to cleaner energy. This effort shall support the Government of Indonesia's commitment to achieving targets listed in the SDGs, including Goal No. 7, Affordable and Clean Energy, Goal No. 12, Responsible Consumption and Production, and Goal No. 13, Climate Action. [GRI 3-3]



Untuk dapat secara efektif melacak dan melaporkan pengurangan konsumsi energi yang mendukung inisiatif keberlanjutan dan mematuhi standar pelaporan yang diakui secara internasional, metode perhitungan pengurangan konsumsi energi yang dilakukan oleh PT PII mengacu pada standar dan pedoman yang ditetapkan oleh GRI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

[GRI 302-4, 302-5] [OJK F.7]

IIGF calculates the energy consumption reduction with reference to the standards and guidelines set forth by the GRI and the Financial Services Authority (OJK) to effectively track and report energy consumption reductions that support sustainability initiatives and comply with internationally recognized reporting standards. The steps are as follows:

[GRI 302-4, 302-5] [OJK F.7]

Pendekatan Perhitungan Pengurangan Penggunaan Energi PT PII

Approach to Calculating IIGF's Energy Consumption Reduction

[GRI 302-4, 302-5] [OJK F.7]

Metodologi Penghitungan/Pengukuran Calculation/Measurement Methods	Alat Pengukuran Measurement Tool
- Audit Energi, dengan melakukan penilaian menyeluruh terhadap konsumsi energi untuk mengidentifikasi area yang memiliki potensi penghematan energi - Pendekatan Perbandingan Tahun Dasar: - Tahun Dasar (<i>Baseline Year</i>): menetapkan tahun tertentu sebagai titik awal untuk mengukur pengurangan konsumsi energi. Data konsumsi energi dari tahun dasar ini digunakan sebagai acuan - Perhitungan Pengurangan: mengukur konsumsi energi pada tahun pelaporan dan membandingkannya dengan konsumsi energi pada tahun dasar - Rumus Pengurangan Absolut: pengurangan konsumsi energi = konsumsi energi dasar – konsumsi energi tahun pelaporan - Normalisasi Data, dengan mengkoreksi data konsumsi energi untuk mempertimbangkan faktor eksternal seperti perubahan volume produksi, kondisi cuaca, atau perubahan operasional lainnya - Energy Audit, by conducting a comprehensive assessment of energy consumption to identify areas of potential energy savings - Baseline Year Comparison Approach: - Baseline Year: establishing a specific year as the baseline to calculate reductions in energy consumption. Energy consumption data from this baseline year is used as a reference - Reduction Calculation: measuring energy consumption in the reporting year and comparing it to energy consumption in the baseline year - Absolute Reduction Formula: energy consumption reduction = base year energy consumption – reporting year energy consumption - Data Normalization, by correcting energy consumption data to consider external factors, such as changes in production volumes, weather conditions, or other operational changes	Pengukuran dilakukan menggunakan alat-alat pengukur energi yang dipantau oleh Perseroan, seperti meteran energi yaitu meter listrik gas dan meter bahan bakar untuk mengukur konsumsi energi di berbagai titik dalam sistem energi Perseroan. Data yang diperoleh dari alat-alat pengukuran tersebut kemudian dianalisis dan diolah untuk keperluan pelaporan dari perangkat lunak manajemen energi yang mencakup data konsumsi energi, analisis tren dan rekomendasi tindakan Measurements use energy measuring devices monitored by the Company, such as energy meters, i.e., gas electricity meters and fuel meters to measure energy consumption at various points in the Company's energy system. The data obtained from these measurement tools is analyzed and processed for reporting purposes from the energy management software, which includes energy consumption data, trend analysis, and recommendations.

Pada tahun 2023, PT PII berhasil melakukan penghematan atau efisiensi energi sebesar 710,51 gigajoule, berhasil meningkat 3,12% dari tahun 2022 yaitu sebesar 689,04 gigajoule. Keberhasilan peningkatan efisiensi di tahun 2023 ini atas usaha PT PII melakukan berbagai program inisiatif efisiensi energi sebagai berikut: [GRI 302-4, 302-5] [OJK F.7]

In 2023, IIGF performed energy savings or energy efficiency of 710.51 gigajoules, increased by 3.12% compared to 2022 of 689.04 gigajoules. The success of increasing efficiency in 2023 was due to IIGF's efforts in implementing various energy efficiency initiative programs as follows:

[GRI 302-4, 302-5] [OJK F.7]



Program Inisiatif Efisiensi Energi PT PII IIGF's Energy Efficiency Initiative Program [GRI 302-4, 302-5] [OJK F.7]

No	Program Inisiatif Efisiensi Energi Energy Efficiency Initiative Program	Jenis Energi Energy Type	Hasil Efisiensi Energi (Gigajoule) Energy Efficiency (Gigajoule)		
			2023	2022	2021
1	- Penggunaan Lampu LED - Pengoptimalan Pemanfaatan Alat Elektronik: menggunakan alat elektronik secara bijaksana dan mengoptimalkan penggunaannya, seperti mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan dan mengatur suhu AC sesuai kebutuhan - Program Penghematan Energi di Peralatan Kantor: mendorong karyawan untuk menggunakan peralatan kantor yang hemat energi, seperti komputer, printer, dan peralatan kantor lainnya, serta mematikan peralatan ketika tidak digunakan - Use of LED Lamps - Optimizing the Use of Electronics: using electronic equipment wisely and optimizing its use, such as turning off electronic equipment that is not in use and adjusting the air conditioning temperature as needed - Energy Saving Program in Office Equipment: encouraging employees to use energy-efficient office equipment, such as computers, printers, and other office equipment, and switching off equipment when not in use	Listrik Electricity	332,74	282,64	280,59
2	- Penggunaan Kendaraan Berbahan Bakar Alternatif: mendorong penggunaan kendaraan berbahan bakar alternatif yang lebih efisien, seperti kendaraan listrik, kendaraan <i>hybrid</i> - Pemantauan dan Pemeliharaan Kendaraan yang Teratur: melakukan pemantauan dan pemeliharaan kendaraan secara teratur untuk memastikan bahwa mesin dan sistem penggerak beroperasi dengan efisiensi yang maksimal - Use of Alternative Fueled Vehicles: encouraging the use of more efficient alternative fueled vehicles, such as electric vehicles, hybrid vehicles - Regular Vehicle Monitoring and Maintenance: monitoring and maintaining vehicles regularly to ensure that engines and driving systems are operating at maximum efficiency	Bahan Bakar Minyak Fuel Oil	377,77	406,40	266,09
Jumlah Efisiensi Energi Energy Efficiency			710,51	689,04	546,68

Pengelolaan Air dan Air Limbah (Efluen) Water and Wastewater (Effluent) Management

Kesadaran akan keterbatasan sumber daya air menjadi krusial dalam menghadapi pertumbuhan populasi dan aktivitas manusia yang terus meningkat. Pengelolaan yang efisien atas penggunaan air menjadi kunci untuk memastikan ketersediaannya bagi generasi masa depan. Pengambilan air dari sumber-sumber alami, penggunaan air dan pembuangan air limbah yang tidak bertanggung jawab dapat memberikan dampak serius terhadap lingkungan, seperti dapat menyebabkan degradasinya habitat, penurunan kualitas air dan badan air, kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia. Untuk itu, PT PII berkomitmen untuk mengelola manajemen air dengan cara yang lebih efisien dan bertanggung jawab untuk tetap melindungi sumber daya air. Selain mempertimbangkan aspek lingkungan, pengelolaan air yang baik juga berdampak pada reputasi dan efisiensi operasional Perseroan. Kepatuhan terhadap regulasi, praktik yang bertanggung jawab, serta inovasi dalam penggunaan teknologi dapat meningkatkan reputasi Perseroan di mata konsumen dan investor, juga mengurangi biaya operasional dan memperluas peluang bisnis

Awareness of limited water resources is crucial in facing growing population and increasing human activities. Efficient water consumption management is vital in ensuring its availability for future generations. Water withdrawal from natural sources, irresponsible water use, and wastewater disposal, can have serious impacts on the environment, such as causing habitat degradation, decreased water quality and water bodies, damage to ecosystems and biodiversity, and cause health problems for humans. Therefore, IIGF is committed to managing water consumption in a more efficient and responsible way to protect the water resources. In addition to considering environmental aspects, good water management also impacts the Company's reputation and operational efficiency. Compliance with regulations, responsible practices, and innovation in the use of technology can enhance the Company's reputation with consumers and investors, and reduce operational costs and expand sustainable business opportunities. Thus, a comprehensive management approach to the water and



yang berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan manajemen yang komprehensif terhadap topik air dan efluen tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga merupakan strategi untuk menjaga keberlanjutan bisnis Perseroan jangka panjang. [GRI 3-3, 303-1, 303-2]

Sebagai bentuk upaya mencegah dampak negatif pada badan air, PT PII senantiasa berkomitmen untuk tidak menggunakan air yang bersumber atau diambil dari badan air yang berada di kawasan lindung maupun yang berada di lokasi daerah *water-stressed area* yaitu daerah-daerah dimana permintaan air melebihi jumlah yang tersedia. Dengan perwujudan komitmen tersebut, tidak terdapat dampak signifikan terhadap lingkungan dari pengambilan dan penggunaan air Perseroan. [GRI 303-1, 303-2, 303-3, 303-5]

Hal ini mengingat bahwa PT PII merupakan *tenant* di Gedung Capital Place, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan air, termasuk suplai, penggunaan, distribusi, dan pengolahan air, ditangani oleh pihak pengelola gedung. PT PII tidak secara langsung mengelola atau menyebabkan dampak terkait air selain dari penggunaan air yang tercatat dalam tagihan bulanan yang dikeluarkan oleh pihak pengelola gedung. PT PII hanya memastikan bahwa semua pembayaran terkait penggunaan air dilakukan tepat waktu kepada pihak pengelola gedung berdasarkan penggunaan yang tercatat. Mengingat bahwa pengelolaan air sepenuhnya diurus oleh pihak pengelola gedung, PT PII tidak melakukan penilaian dampak terkait air secara independen. Semua informasi dan data terkait penggunaan air disediakan oleh pihak pengelola gedung. PII memastikan bahwa penggunaan air sesuai dengan kebutuhan operasional dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pengelola gedung. PT PII tidak menggunakan alat atau metodologi khusus untuk menilai dampak air karena tanggung jawab ini ada pada pihak pengelola gedung. PT PII tidak memiliki pemasok atau pelanggan dengan dampak terkait air yang signifikan. [GRI 303-1]

PT PII menarik atau mengambil dan menggunakan air yang bersumber dari air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk mendukung kegiatan operasional kantor sehari-hari seperti untuk MCK, mencuci perlengkapan/peralatan kantor dan kebutuhan pendukung lainnya. PT PII tidak melakukan praktik penampungan/penyimpanan air, melainkan air yang ditarik/diambil langsung digunakan untuk kebutuhan operasional Perseroan. Untuk itu, jumlah volume air yang digunakan sama dengan jumlah volume air yang ditarik/diambil, dimana pada tahun 2023 adalah sebanyak 150 m³ atau 0,15 megaliter, meningkat 66,67% dari tahun 2022 yaitu sebanyak 90 m³ atau 0,09 megaliter. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut: [GRI 303-1, 303-3, 303-5] [OJK F.8]

effluent topics not only supports environmental sustainability, but is also a strategy to maintain the Company's long-term business sustainability. [GRI 3-3, 303-1, 303-2]

As a form of effort to prevent negative impacts on water bodies, IIGF is committed to not using water sourced or extracted from water bodies located in protected areas or in the location of water-stressed areas, i.e., areas where water demand exceeds the amount available. Under such commitment, there is no significant impact on the environment from the Company's water withdrawal and consumption. [GRI 303-1, 303-2, 303-3, 303-5]

This is because IIGF is a tenant in the Capital Place Building, so everything related to water management, including water supply, use, distribution, and treatment, is handled by the building management. IIGF does not directly manage or cause water-related impacts other than the water usage recorded in the monthly bill issued by the building manager. IIGF only ensures that all payments related to water usage are made on time to the building manager based on recorded usage. Given that water management is fully taken care of by the building management, IIGF does not conduct independent water-related impact assessments. All information and data related to water usage are provided by the building management. IIGF ensures that water usage is in accordance with operational needs and complies with the provisions set by the building management. IIGF does not use specific tools or methodologies to assess water impacts because this responsibility lies with the building management. IIGF does not have any suppliers or customers with significant water-related impacts. [GRI 303-1]

IIGF withdraws or takes and consumes water sourced from Local Drinking Water Company (PDAM) to support daily office operations, such as for shower and toilets, washing office supplies/equipment, and other supporting needs. IIGF does not store water, but the water withdrawn/taken is directly used for the Company's operational needs. Therefore, the total volume of water consumed is the same as the total volume of water withdrawn. In 2023, the figure was 150 m³ or 0.15 megaliters, increased by 66.67% from 2022, which was 90 m³ or 0.09 megaliters. This increase was due to the following factors: [GRI 303-1, 303-3, 303-5] [OJK F.8]



- Pengurangan pembatasan terkait COVID-19: Pada tahun 2021 dan 2022, pembatasan bekerja dari kantor (WFO) diterapkan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Sebagian besar karyawan bekerja dari rumah (WFH), sehingga penggunaan air di kantor relatif rendah. Pada tahun 2023, dengan pengurangan pembatasan dan karyawan kembali bekerja dari kantor, volume penggunaan air meningkat secara signifikan;
- Peningkatan jumlah karyawan: jumlah karyawan PT PII bertambah pada tahun 2023 yang berkontribusi langsung pada peningkatan kebutuhan air untuk berbagai keperluan operasional dan penggunaan fasilitas kantor;
- Intensifikasi aktivitas operasional: dengan karyawan kembali bekerja di kantor dan peningkatan jumlah karyawan, aktivitas operasional menjadi lebih intensif. Peningkatan frekuensi dan skala aktivitas harian seperti rapat, acara dan kegiatan rutin kantor lainnya meningkatkan kebutuhan air;
- Kegiatan kebersihan yang lebih intensif: setelah pandemi, ada peningkatan fokus pada kebersihan dan sanitasi di tempat kerja. Kegiatan kebersihan yang lebih intensif dan sering untuk memastikan lingkungan kantor yang higienis juga meningkatkan volume penggunaan air; serta
- Penggunaan fasilitas kantor yang lebih aktif: pemanfaatan fasilitas kantor seperti *pantry*, toilet, dan area umum lainnya menjadi lebih aktif dengan kembalinya karyawan ke kantor, yang turut berkontribusi pada peningkatan penggunaan air.

- Easing COVID-19-related restrictions: In 2021 and 2022, work from office (WFO) restrictions were implemented to reduce the spread of COVID-19. Most employees worked from home (WFH), thus office water consumption was relatively low. In 2023, with the easing of restrictions, the employees returned to the office, causing the volume of water consumption to increase significantly;
- Increase in the number of employees: IIGF's employees increased in 2023, which directly contributed to the increase in water consumption for various operational purposes and use of office facilities;
- Intensification of operations: with employees returning to the office and the increase in the number of employees, operations were more intensive. Increased frequency and scale of daily activities, such as meetings, events, and other routine office activities that increase water demand;
- More intensive cleaning activities: after the pandemic, there was an increased focus on hygiene and sanitation in the workplace. More intensive and frequent cleaning activities to ensure a hygienic office environment that increased the water consumption volume; and
- More active offices: the utilization of office facilities, such as pantries, toilets, and other common areas that were more active with the employees working at the office, contributing to increased water usage.

Volume Pengambilan/Penarikan dan Penggunaan Air PT PII Berdasarkan Sumber

IIGF's Water Withdrawal and Consumption Volume by Source
[GRI 303-3, 303-5] [OJK F.8]

Sumber Air Water Sources	Volume (megaliter)		
	2023	2022	2021
Air PDAM PDAM Water	0,15	0,09	0,03
Freshwater (≤ 1000 mg/L TDS)	0,15	0,09	0,03
Other Water (>1000 mg/L TDS)	-	-	-

Untuk memastikan bahwa Perseroan mengelola sumber daya air dengan efisien dan bertanggung jawab, metode perhitungan penarikan dan penggunaan air yang dilakukan oleh PT PII mengacu pada standar dan pedoman yang ditetapkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan langkah-langkah sebagai berikut: [GRI 303-3, 303-5]

To ensure that the Company manages water resources efficiently and responsibly, IIGF calculates water withdrawal and consumption usage with reference to the standards and guidelines set forth by the *Global Reporting Initiative* (GRI) and the Financial Services Authority (OJK), with the following steps: [GRI 303-3, 303-5]



Pendekatan Perhitungan Penarikan dan Penggunaan Air PT PII Approach to Calculating IIGF's Water Withdrawal and Consumption [GRI 303-3, 303-5]

Identifikasi Sumber Air Water Sources Identification

- Mengidentifikasi semua sumber air yang digunakan
- Mengklasifikasikan air berdasarkan *Total Dissolved Solids* (TDS) menjadi *fresh water* (≤ 1.000 mg/L TDS) dan *other water* (> 1.000 mg/L TDS)
- Identifying all water sources used
- Classifying water based on Total Dissolved Solids (TDS) into fresh water ($\leq 1,000$ mg/L TDS) and other water ($> 1,000$ mg/L TDS)

Sumber Data Data Source

PT PII mendapatkan data pengambilan dan konsumsi air dari pihak pengelola gedung Gedung Capital Place. Data ini disediakan dalam bentuk tagihan bulanan yang mencakup informasi tentang volume air yang digunakan.

IIGF obtains water collection and consumption data from the building management of the Capital Place Building. This data is provided in the form of a monthly bill that includes information on the volume of water used.

Metode Pengukuran Measurement Method

Pihak pengelola gedung menggunakan alat ukur *flow meter* untuk mencatat volume air yang dikonsumsi. Alat ukur ini dipasang pada titik-titik utama distribusi air dan secara otomatis merekam data aliran air. Data ini kemudian disediakan kepada PT PII sebagai *tenant* dalam bentuk laporan bulanan. Data ini dipantau dan dikelola oleh pihak pengelola gedung, dan PT PII memastikan bahwa penggunaan air kami sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The building manager uses a flow meter to record the volume of water consumed. These meters are installed at key points of water distribution and automatically record water flow data. This data is then provided to IIGF as tenants in the form of monthly reports. This data is monitored and managed by the building management, and IIGF ensures that our water usage is in accordance with applicable regulations.

Asumsi dan Metode Lainnya Other Assumptions and Methods

Selain data dari *flow meter*, informasi tambahan yang relevan mengenai penggunaan air dapat diperoleh dari laporan dan dokumen yang disediakan oleh pihak pengelola gedung. PT PII tidak menggunakan asumsi tambahan atau metode pengukuran lain dalam perhitungan penggunaan air, karena seluruh pengelolaan air berada di bawah tanggung jawab pihak pengelola gedung.

In addition to data from flow meters, additional relevant information regarding water usage can be obtained from reports and documents provided by the building management. IIGF does not use additional assumptions or other measurement methods in calculating water usage, because all water management is under the responsibility of the building management.

Pengukuran Volume Air Water Volume Measurement

- Mencatat volume air yang diukur secara rutin, misalnya setiap hari, minggu atau bulan
- Recording the water volume measured regularly, e.g., every day, week, or month

Pengumpulan Data Data Collection

- Mengumpulkan data volume air yang ditarik dari setiap sumber secara sistematis
- Mencatat data dalam format yang memungkinkan analisis lebih lanjut, misalnya dalam *spreadsheet* atau sistem manajemen data
- Collecting data systematically on the volume of water withdrawn from each source
- Recording data in a format that allows further analysis, e.g., in a spreadsheet or data management system

Penggunaan Air Water Consumption

- Memantau penggunaan air di berbagai proses operasional, termasuk produksi, sanitasi, pendinginan dan kebutuhan domestik
- Mengukur dan mencatat volume air yang digunakan di setiap proses
- Monitoring water consumption in various operational processes, including production, sanitation, cooling, and domestic needs
- Measuring and recording the volume of water consumed in each process

Analisis dan Pelaporan Analysis and Reporting

- Menghitung total volume air yang ditarik dan digunakan selama periode tertentu (misalnya per tahun)
- Membandingkan data penggunaan air dengan target efisiensi air yang telah ditetapkan oleh perusahaan
- Melaporkan hasil perhitungan dalam laporan keberlanjutan sesuai dengan standar GRI 303-3 (volume pengambilan air) dan GRI 303-5 (volume penggunaan air)
- Calculating the total volume of water withdrawn and used over a certain period (e.g., per year)
- Comparing data of water consumption with water efficiency targets set forth by the company
- Reporting the calculation in the sustainability report in accordance with GRI 303-3 (water withdrawal volume) and GRI 303-5 (water consumption volume) standards



PT PII berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam hal ini yaitu mendorong upaya efisiensi penggunaan air. Upaya ini diharapkan dapat mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam memenuhi target-target yang tercantum di dalam SDGs, antara lain Tujuan Nomor 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan Nomor 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab dan Tujuan Nomor 15: Ekosistem Daratan. Program-program efisiensi/konservasi air yang dilakukan Perseroan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut: [QJK F.8]

- Melakukan sosialisasi kepada para karyawan untuk melakukan penghematan/efisiensi penggunaan air;
- Penggunaan teknologi terbaru, dengan mengadopsi teknologi penghematan air seperti keran otomatis dan toilet *dual-flush* untuk mengurangi konsumsi air di fasilitas kantor;
- Program kesadaran dan pendidikan, dengan menyelenggarakan *workshop* dan pelatihan bagi karyawan mengenai praktik terbaik dalam konservasi air, serta mengembangkan kampanye internal yang berfokus pada pentingnya penghematan air dan langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh setiap individu;
- Optimalisasi sistem irigasi dengan menggunakan tanaman asli yang membutuhkan sedikit air dalam lanskap kantor;
- *Monitoring* dan evaluasi, dengan melakukan pemantauan konsumsi air untuk penggunaan air dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta melakukan audit rutin terhadap penggunaan air dan mempublikasikan laporan keberlanjutan untuk transparansi;
- Kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu bermitra dengan organisasi *non-profit* atau lembaga pemerintah yang bergerak di bidang konservasi air untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan.

PT PII saat ini belum memiliki standar atau panduan khusus yang dikembangkan secara internal mengenai kualitas air. Pengelolaan kualitas air di gedung tempat kami beroperasi, yaitu Gedung Capital Place, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pengelola gedung. Oleh karena itu, segala hal terkait standar kualitas air, termasuk pembuatan SOP atau Instruksi Kerja, dikelola oleh pihak pengelola gedung sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. PT PII sebagai *tenant*, memastikan senantiasa mematuhi penggunaan air sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pengelola gedung. Untuk informasi lebih lanjut mengenai standar kualitas air yang diterapkan, PT PII berkoordinasi dengan pihak pengelola gedung dan memantau kepatuhan terhadap kebijakan yang ada. [GRI 303-2]

PT PII senantiasa berkomitmen untuk memastikan air limbah domestik Perseroan dikelola dengan baik dan tidak mencemari badan air. Komitmen ini dibuktikan dengan tidak membuang air limbah domestik ke lokasi-lokasi daerah *water-stressed area*, melainkan pembuangan air limbah domestik Perseroan dilakukan melalui kerjasama dengan pihak eksternal agar tidak mengganggu lingkungan dan masyarakat sekitar, serta untuk memastikan bahwa air limbah domestik yang dibuang ke badan air telah sesuai dengan standar baku mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang

IIGF is committed to optimizing the use of resources, i.e., encouraging water consumption efficiency. This effort shall support the Government of Indonesia's commitment to achieving targets listed in the SDGs, including Goal No. 6, Clean Water and Sanitation, Goal No. 12, Responsible Consumption and Production, and Goal No. 15, Life on Land. The Company's water efficiency/conservation programs in 2023 are as follows: [QJK F.8]

- Socializing to employees to implement water savings/efficiency;
- Use of renewable technology, by adopting water saving technologies, such as automatic taps and dual-flush toilets to reduce water consumption in office facilities;
- Awareness and education programs, by organizing workshops and training for employees on water conservation best practices, as well as developing internal campaigns that focus on the importance of water saving and practical steps that can be acted on by each individual;
- Optimization of irrigation systems by using plants that require less water in the office landscape;
- Monitoring and evaluation, by conducting water consumption monitoring for water consumption and identifying areas that require improvement, as well as conducting regular audits of water consumption and publishing sustainability reports for transparency;
- Cooperation with third parties, i.e., partnering with non-profit organizations or government agencies engaged in water conservation to share resources and knowledge.

IIGF currently has no specific internally developed standards or guidelines regarding water quality. The management of water quality in the building where we operate, namely the Capital Place Building, is entirely the responsibility of the building management. Therefore, all matters related to water quality standards, including the making of SOPs or Work Instructions, are managed by the building management in accordance with applicable policies and regulations. PT PII as a tenant, ensures that it always complies with the use of water in accordance with the provisions set by the building management. For further information on the water quality standards applied, IIGF coordinates with the building manager and monitors compliance with existing policies. [GRI 303-2]

IIGF is committed to ensuring that the Company's domestic wastewater is well managed and does not pollute water bodies. This commitment is evidenced by not discharging domestic wastewater to water-stressed area locations. The Company's domestic wastewater is disposed in cooperation with external parties so as not to disturb the environment and surrounding communities, as well as to ensure that domestic wastewater discharged into water bodies is in accordance with quality standards as stipulated in the Government Regulation No. 22 of 2021 on the Environmental Protection and Management.



Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan perwujudan komitmen tersebut, tidak terdapat dampak signifikan terhadap lingkungan dari pembuangan air Perseroan. Adapun terkait jumlah pembuangan air limbah domestik yang dihasilkan, PT PII belum melakukan perhitungan tersebut dikarenakan kendala ketidaktersediaan data yang belum dapat diakomodir Perseroan di tahun ini. Namun sebagai bentuk komitmen keberlanjutan, PT PII akan mengembangkan pengukuran tersebut di masa mendatang, dimana PT PII saat ini sedang melakukan pencarian informasi untuk mencatat dan menyajikan data jumlah pembuangan air limbah domestik yang dihasilkan. PT PII telah menyusun rencana untuk berkoordinasi dengan manajemen gedung dan melibatkan pihak ketiga dalam proses verifikasi data untuk memastikan akurasi.

[GRI 303-1, 303-2, 303-4] [OJK F.13, F.14]

Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah Pollution Prevention and Waste Management

Dalam rangka mencegah dampak negatif dan menghadirkan keberlanjutan lingkungan, PT PII juga senantiasa mengintegrasikan aspek lingkungan yakni dalam hal ini melakukan pencegahan polusi dan pengelolaan limbah dalam proses penjaminan. Hal ini didasari karena aktivitas proyek menghasilkan berbagai jenis polutan dalam berbagai bentuk, seperti emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan emisi non GRK, serta limbah padat dan limbah cair baik yang termasuk dalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maupun non B3. Polutan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi mencemarkan, membahayakan dan merusak lingkungan hidup, dan juga mempengaruhi kualitas kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Untuk itu, PT PII senantiasa mendorong pengelola proyek untuk menyusun rencana inventarisasi emisi GRK, menyiapkan dan mengimplementasikan perencanaan pengurangan emisi GRK dari waktu ke waktu, menyusun rencana dan prosedur pengolahan limbah B3 dan limbah padat yang timbul dari aktivitas proyek, serta patuh dan melaksanakan segala jenis peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan polusi dan pengelolaan limbah. Pada proses screening, PT PII senantiasa melakukan identifikasi risiko dan menyusun rencana mitigasinya, termasuk dengan risiko timbulan polusi dan limbah. Melalui proses tersebut, PT PII selalu berusaha untuk mendorong para pengelola proyek melaksanakan pencegahan dan memitigasi risiko terkait aspek tersebut. Hal ini merupakan salah satu aspek penilaian dari PT PII untuk memutuskan akan menjamin proyek tersebut atau tidak, terutama pada proyek yang mendapatkan PDF karena proyek-proyek yang mendapat PDF diwajibkan untuk menerapkan LST.

PT PII juga senantiasa melakukan pengelolaan pengendalian emisi GRK dan pengelolaan limbah pada kantor Perseroan, sebagai bentuk penerapan operasional kantor ramah lingkungan.

Under such commitment, there is no significant impact on the environment from the Company's water disposal. IIGF has yet to calculate the amount of domestic wastewater discharged, due to data unavailability. To date, the Company has yet to accommodate this. However, as a form of sustainability commitment, IIGF will develop such measurements in the future, where IIGF is currently searching for information to record and present data on the amount of domestic wastewater discharge generated. IIGF has developed a plan to coordinate with building management and involve third parties in the data verification process to ensure accuracy. [GRI 303-1, 303-2, 303-4] [OJK F.13, F.14]

IIGF integrates environmental aspects, i.e., pollution prevention and waste management in the guarantee process to prevent negative impacts and provide environmental sustainability. This is based on the fact that project activities generated various pollutants in various forms, such as Greenhouse Gas (GHG) emissions and non-GHG emissions, as well as solid waste and liquid waste, both categorized as Hazardous and Toxic Material (B3) and non-B3 waste. Pollutants that are not managed properly may pollute, endanger, and damage the environment, and also affect the quality of health and survival of humans and other living things.

Therefore, IIGF encourages project managers to prepare GHG emission inventory plans, prepare and implement GHG emission reduction plans over time, develop plans and procedures for processing hazardous and solid waste arising from project activities, and comply with and implement all laws and regulations relating to pollution prevention and waste management. In the screening process, IIGF identifies risks and develops mitigation plans, including the risk of pollution and waste generation. Through this process, IIGF strives to encourage project managers to prevent and mitigate risks related to this aspect. This is one of the aspects of IIGF's assessment to decide whether to guarantee the project or not, specifically for projects that will be assisted in its PDF because projects with PDF shall implement ESG.

IIGF continuously manages GHG emission and waste control at the Company's offices, implementing environmentally friendly office operations.



Pengelolaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca

Greenhouse Gas Emission Control

[S2-29a]

Sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab terhadap lingkungan dan juga sebagai bentuk pengendalian tantangan perubahan iklim, PT PII senantiasa berkomitmen untuk melakukan inventarisasi emisi GRK secara berkala. Dalam melakukan inventarisasi emisi GRK, PT PII menggunakan pendekatan sebagai berikut: [GRI 305-1, 305-2] [OJK F.11]

As a form of manifestation of responsibility to the environment and as a form of controlling the climate change challenges, IIGF is committed to conducting regular GHG emission inventories. In inventorying GHG emissions, IIGF uses the following approach: [GRI 305-1, 305-2] [OJK F.11]

Pendekatan Inventarisasi Emisi GRK PT PII

Approach to Calculating IIGF's GHG Emissions

[GRI 305-1, 305-2] [OJK F.11]

Gas yang Masuk Dalam Perhitungan Emisi GRK Gases Included in the GHG Emissions Calculation

- Karbon dioksida (CO₂)

- Carbon dioxide (CO₂)

Sumber Faktor Emisi GRK Source of GHG Emission Factors

- Menggunakan faktor emisi GRK dari Pedoman Teknis Perhitungan *Baseline* Emisi GRK Sektor Berbasis Energi Bappenas 2014

- Using GHG emissions factors from the 2014 Bappenas Energy-Based Sector Baseline Technical Guidelines for GHG Emissions Calculation

Standar atau Metodologi Perhitungan Emisi GRK GHG Emissions Calculation Standard or Methodology

Metode perhitungan inventarisasi emisi GRK melalui tahapan sebagai berikut:

- Identifikasi sumber emisi dengan menentukan sumber-sumber utama emisi GRK di transportasi, listrik dan limbah, dimana sumber emisi GRK PT PII bersumber dari pemakaian BBM, solar dan listrik
- Mengumpulkan data emisi GRK dari setiap sumber, mencakup konsumsi energi, jenis bahan bakar yang digunakan, jumlah transportasi yang digunakan, produksi limbah
- Penentuan baseline atau kondisi awal untuk perhitungan emisi GRK yang akan diukur perubahan dari kondisi awal ke kondisi yang diinginkan. Tahun dasar/*baseline* PT PII adalah tahun 2020 dikarenakan tahun tersebut merupakan tahun pertama Perseroan melakukan perhitungan emisi GRK
- Menghitung emisi GRK dari setiap sumber menggunakan Pedoman Teknis Bappenas 2014
- Melakukan pelaporan dan *monitoring* secara berkala untuk memastikan bahwa pengurangan emisi berkelanjutan dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

The GHG emission inventory is calculated by using the following steps:

- Identifying emission sources by determining the main sources of GHG emissions in transport, electricity, and waste, in which IIGF's GHG emission sources are the consumption of fuel, diesel, and electricity
- Collecting GHG emission data from each source, including energy consumption, type of fuel used, transport used, waste production
- Determination of baseline for GHG emission calculations that will measure changes from initial conditions to desired conditions. IIGF uses 2020 as the base year because it is the first year the Company has calculated GHG emissions
- Calculating GHG emissions from each source using the 2014 Bappenas Technical Guidelines
- Reporting and monitoring regularly to ensure that emission reductions are sustainable and in accordance with the predetermined targets.

Dengan mengikuti pendekatan perhitungan yang telah ditetapkan, PT PII dapat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan pelaporan yang transparan. Pada tahun 2023, jumlah emisi GRK *Scope 1* dan *Scope 2* yang dihasilkan Perseroan sebesar 122,90 ton CO₂eq, meningkat 70,91% dari tahun 2022 yaitu sebesar 71,91 ton CO₂eq. PT PII juga telah melakukan perhitungan intensitas emisi GRK untuk mengetahui jumlah emisi GRK per karyawan, dengan nilai di tahun 2023 sebesar 0,74 ton CO₂eq/karyawan, meningkat 57,45% dari tahun 2022 yaitu sebesar 0,47 ton CO₂eq/karyawan. Pada tahun 2023, tidak terdapat jumlah pengurangan emisi GRK, melainkan pada tahun ini terjadi peningkatan emisi GRK yang disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu:

[GRI 305-1, 305-2, 305-4, 305-5] [OJK F.11, F.12]

By following the predetermined calculation approach, IIGF can obtain accurate and accountable information as the basis for transparent decision-making and reporting. In 2023, the Company's GHG emission *Scope 1* and *Scope 2* generated was 122.90 tons CO₂eq, increased by 70.91% compared to 2022, which was 71.91 tons CO₂eq. IIGF calculated the GHG emission intensity to determine the amount of GHG emission per employee, i.e., 0.74 CO₂eq/employee in 2023, increased by 57.45% from 2022 of 0.47 CO₂eq/employee. In 2023, there is no amount of GHG emission reduction, but in this year there is an increase in GHG emissions caused by several main factors, i.e.,:

[GRI 305-1, 305-2, 305-4, 305-5] [OJK F.11, F.12]



- Pembatasan terkait COVID-19: pada tahun 2021 dan 2022, pembatasan bekerja dari kantor (WFO) diterapkan untuk mengurangi penyebaran COVID-19, sehingga sebagian besar karyawan bekerja dari rumah (WFH). Pengurangan pembatasan ini pada tahun 2023 menyebabkan karyawan kembali bekerja dari kantor, yang mengakibatkan peningkatan penggunaan energi dan sumber daya lainnya yang berkontribusi pada emisi GRK;
- Peningkatan jumlah karyawan: jumlah karyawan PT PII bertambah pada tahun 2023 yang berkontribusi langsung pada peningkatan konsumsi energi untuk berbagai keperluan operasional, termasuk penggunaan listrik, pendingin ruangan dan penggunaan air, yang berdampak pada kenaikan emisi GRK;
- Intensifikasi aktivitas operasional: dengan karyawan kembali bekerja di kantor dan peningkatan jumlah karyawan, aktivitas operasional menjadi lebih intensif. Peningkatan frekuensi dan skala aktivitas harian seperti rapat, acara, dan kegiatan rutin kantor lainnya meningkatkan penggunaan energi dan sumber daya lainnya, yang turut menyumbang emisi GRK;
- Kegiatan kebersihan yang lebih intensif: setelah pandemi, ada peningkatan fokus pada kebersihan dan sanitasi di tempat kerja. Kegiatan kebersihan yang lebih intensif dan sering untuk memastikan lingkungan kantor yang higienis juga meningkatkan penggunaan energi dan sumber daya yang terkait dengan sistem kebersihan, yang berkontribusi pada emisi GRK; serta
- Penggunaan fasilitas kantor yang lebih aktif: pemanfaatan fasilitas kantor seperti *pantry*, toilet, dan area umum lainnya menjadi lebih aktif dengan kembalinya karyawan ke kantor, yang turut berkontribusi pada peningkatan penggunaan energi dan emisi GRK terkait dengan pengoperasian fasilitas tersebut.
- COVID-19-related restrictions: in 2021 and 2022, work from office (WFO) restrictions were implemented to reduce the spread of COVID-19. Thus, most of the employees worked from home (WFH). The easing of this restriction in 2023 led to employees returning to the office, resulting in increased energy consumption and other resources contributing to GHG emissions;
- Increase in the number of employees: in 2023, the number of IIGF's employees increased, which directly contributed to increased energy consumption for various operational purposes, including electricity consumption, air conditioning, and water consumption, resulting in increased GHG emissions;
- Intensification of operations: with employees returning to the office and the increase in the number of employees, operations were more intensive. Increased frequency and scale of daily activities, such as meetings, events, and other routine office activities increased the energy and other resources consumption, contributing to GHG emissions;
- More intensive cleaning activities: after the pandemic, there was an increased focus on hygiene and sanitation in the workplace. More intensive and frequent cleaning activities to ensure a hygienic office environment increased energy and resource consumption associated with cleaning systems, contributing to GHG emissions; and
- More active offices: the utilization of office facilities, such as pantries, toilets, and other common areas that were more active with the employees working at the office, contributing to increased energy consumption and related GHG emissions for facility operations.

Tabel Emisi GRK

Table: GHG Emissions

[GRI 305-1, 305-2, 305-4] [OJK F.11]

Sumber Emisi GRK Source of GHG Emissions	Satuan Unit	2023	2022	2021
Cakupan 1 (BBM) Scope 1 (Fuel)	Ton CO ₂ -eq	40,50	14,99	32,02
Cakupan 2 (Listrik) Scope 2 (Electricity)	Ton CO ₂ -eq	82,40	56,92	56,51
Jumlah Emisi GRK Total GHG Emissions	Ton CO₂-eq	122,90	71,91	88,53
Jumlah Karyawan Number of Employees	Orang People	164	152	143
Intensitas Emisi Ton CO₂-eq/Karyawan Emission Intensity Ton CO₂-eq/employee	Ton CO₂-eq/Karyawan Ton CO₂-eq/employee	0,74	0,47	0,62

* Jenis emisi GRK yang dimasukkan dalam rasio intensitas emisi GRK mencakup emisi langsung (Cakupan 1) dan emisi tidak langsung dari energi (Cakupan 2): [GRI 305-4]

- Emisi Langsung (Cakupan 1): emisi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar kendaraan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Perseroan, seperti mobil dinas dan kendaraan operasional

- Emisi Tidak Langsung dari Energi (Cakupan 2): emisi yang dihasilkan dari penggunaan energi listrik yang dibeli oleh Perseroan untuk operasional kantor dan fasilitas untuk pencahayaan, peralatan elektronik, komputer, dan perangkat lain yang digunakan dalam operasional sehari-hari

* The types of GHG emissions included in the GHG emissions intensity ratio include direct emissions (Scope 1) and indirect emissions from energy (Scope 2): [GRI 305-4]

- Direct Emissions (Scope 1): emissions resulting from fuel combustion of vehicles owned or controlled by the Company, such as official cars and operational vehicles.

- Indirect Emissions from Energy (Scope 2): emissions resulting from the use of electrical energy purchased by the Company for office and facility operations for lighting, electronic equipment, computers, and other devices used in daily operations



Adapun terkait emisi GRK *Scope 3* tidak langsung lainnya, sampai akhir tahun 2023 PT PII belum melakukan perhitungan hal tersebut beserta intensitasnya karena terkendala oleh ketidaktersediaan data, penghitungan yang membutuhkan waktu yang lebih panjang serta validasi data yang lebih kompleks. PT PII saat ini sedang dalam proses identifikasi penghitungan emisi *Scope 3* yang relevan dengan mencari tahu lebih dalam, dan memulai langkah awal untuk melakukan pengumpulan data dari perjalanan bisnis, pengelolaan limbah, dan mitra bisnis, serta mengembangkan strategi pengurangan emisi berdasarkan analisis yang dilakukan. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mengurangi jejak karbon dan meningkatkan keberlanjutan Perseroan secara keseluruhan. Selain itu, PT PII juga tidak melakukan perhitungan Nitrogen Oksida (NO_x), Sulfur Oksida (SO_x) dan emisi udara signifikan lainnya dikarenakan bidang usaha Perseroan sebagai penjaminan infrastruktur tidak menghasilkan emisi udara yang signifikan lainnya tersebut sehingga informasi tersebut tidak relevan untuk disampaikan dalam laporan keberlanjutan Perseroan. [GRI 305-3, 305-7]

PT PII juga mengidentifikasi sumber penghasil emisi lain, yaitu emisi yang menyebabkan kerusakan lapisan ozon yang menyaring sebagian besar radiasi sinar *ultraviolet*. Hal ini disebabkan karena penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO) yang antara lain bersumber dari refrigeran mesin pengatur suhu ruangan (AC) yang menggunakan *freon* berbahan *chlorofluorocarbon* (CFC) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang menggunakan halon. PT PII berupaya untuk mendukung Pemerintah Indonesia yang berkomitmen untuk berkontribusi signifikan dalam pencapaian penghapusan BPO dengan berbagai langkah, dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2022 tentang Pengesahan *Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer*, Kigali, 2016 (Amendemen atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon, Kigali, 2016). Komitmen ini diwujudkan Perseroan dengan menggunakan refrigeran untuk AC yang ramah lingkungan dan menggunakan APAR yang tidak menggunakan bahan kimia halon, sehingga tidak terdapat perhitungan volume produksi, impor maupun ekspor emisi zat BPO di seluruh wilayah operasional Perseroan, mengingat bahwa PT PII tidak terlibat dalam kegiatan yang melibatkan BPO, sehingga informasi mengenai produksi, impor, ekspor, dan penghitungan terkait BPO dianggap tidak relevan dengan operasional Perseroan. [GRI 305-6] [OJK F.5]

Sebagai bentuk komitmen dalam pengendalian perubahan iklim yang mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai target emisi nol karbon atau *Net Zero Emission* (NZE) pada 2060 dan juga dalam memenuhi target-target yang tercantum di dalam SDGs, antara lain Tujuan Nomor 13: Penanganan Perubahan Iklim, PT PII mengambil langkah-langkah inisiatif pengurangan atau reduksi emisi GRK dan mencapai tujuan keberlanjutan Perseroan dalam hal perlindungan lingkungan yaitu sebagai berikut: [OJK F.12]

In terms of other indirect *Scope 3* GHG emissions, IIGF has yet to calculate GHG emissions generated and their intensity, such as unavailability of data, a longer calculation, as well as more complex data validation. IIGF is currently in the process to identify relevant *Scope 3* emission calculations by researching and starting the initial steps to collect data from business travel, waste management, and business partners, and develop emission reduction strategies based on the analysis. These steps are part of our efforts to reduce our carbon footprint and improve the overall sustainability of the Company. In addition, IIGF did not calculate Nitrogen Oxide (NO_x), Sulfur Oxide (SO_x), and other significant air emissions because the Company's business sector as infrastructure guarantee does not produce these significant air emissions. Therefore, such information is not relevant to be presented in the Company's sustainability report. [GRI 305-3, 305-7]

IIGF also identified other emission sources, i.e., emissions that cause damage to the ozone layer that filters most ultraviolet radiation. The cause is the use of Ozone Depleting Substances (ODS) which, among others, originates from the refrigerant of air conditioning that use freon made from chlorofluorocarbons (CFC) and Fire Extinguishers (APAR) that use halon. IIGF strives to support the Government of Indonesia who is committed to contributing significantly to achieving the ODS elimination in various ways, by issuing Presidential Regulation No. 129 of 2022 on the Ratification of the Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Kigali, 2016 (Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Kigali, 2016). This commitment is actualized by the Company by using environmentally friendly refrigerants for air conditioners and using fire extinguishers that do not use halon chemicals. Therefore, there is no calculation of production volume, import, or export of ODS emissions in all of the Company's operational areas, given that IIGF is not involved in activities involving ODS, so information on production, import, export, and calculation related to ODS is considered irrelevant to the Company's operations. [GRI 305-6] [OJK F.5]

As a form of commitment in climate change control and support to the Government of Indonesia's commitment to achieving the Net Zero Emission (NZE) target by 2060, and also to fulfill the SDGs targets, including Goal No. 13, Climate Action, IIGF takes initiatives to reduce GHG emissions and achieve the Company's sustainability goals in terms of environmental protection, as follows: [OJK F.12]



Inisiatif Pengurangan atau Reduksi Emisi GRK PT PII IIGF GHG Emissions Reduction Initiative [OJK F.12]



Efisiensi Energi Energy Efficiency

Meningkatkan efisiensi energi dalam operasional Perseroan dengan menggunakan *rechargeable battery*
Improving energy efficiency in the Company's operations by using rechargeable batteries



Penggunaan Kendaraan Ramah Lingkungan The Use of Environmentally Friendly Vehicles

Mengganti armada kendaraan dengan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi gas buang dari transportasi
Replacing the vehicle fleet with electric vehicles to reduce exhaust emissions from transportation



Pengelolaan Limbah Waste Management

Menerapkan program pengelolaan limbah yang lebih efisien untuk mengurangi emisi GRK dari proses pengolahan limbah
Implementing a more efficient waste management program to reduce GHG emissions from the waste treatment process



Penanaman Pohon atau Penyuluhan Lingkungan Tree Planting or Environmental Counseling

Melakukan kegiatan penanaman pohon atau penyuluhan lingkungan kepada karyawan dan masyarakat sekitar sebagai bagian dari program peningkatan kesadaran lingkungan dan pengurangan emisi GRK
Conducting tree planting or environmental education to employees and surrounding communities as part of the program to increase environmental awareness and reduce GHG emissions

Pengelolaan Limbah Waste Management

PT PII berkomitmen untuk melakukan pengelolaan limbah secara berkala untuk menjaga agar aktivitas operasional Perseroan tidak mencemari lingkungan sekitar dan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. PT PII senantiasa melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan jenisnya serta memastikan limbah tersebut dikelola dengan baik sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan penanganan limbah yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, menyebabkan masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar, berpotensi mengakibatkan kerugian finansial bagi Perseroan akibat adanya sanksi, denda dan biaya penanganan akibat ceceran limbah yang memengaruhi keberlangsungan usaha Perseroan, dan juga menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap lingkungan yang bersih dan sehat dimana hal ini telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai hak global. [GRI 306-1, 306-2]

IIGF is committed to managing waste regularly to keep the Company's operations from polluting the surrounding environment and creating a better quality of life. IIGF manages waste according to its type and ensures that the waste is properly managed in accordance with prevailing standards and regulations. This is because poorly managed waste management can have a negative impact on the environment, cause health problems for the surrounding community, potentially result in financial losses for the Company due to sanctions, fines, and handling costs, due to waste spills that affect the Company's business continuity, and also cause violations of human rights to a clean and healthy environment which has been recognized by the United Nations (UN) as a global right. [GRI 306-1, 306-2]



Untuk itu, PT PII senantiasa melakukan pengelolaan dampak terkait limbah melalui berbagai inisiatif dan kebijakan di lingkungan Perseroan yaitu melalui program penghematan kertas (*paperless*) dan program pengurangan sampah plastik. Selain itu, pada tahun 2023 PT PII meluncurkan program *flagship* WE CARE (*Waste Management for Circular Economy*), di mana program ini merupakan program TJSL Perseroan pada sektor lingkungan dalam pengelolaan sampah organik maupun anorganik. Program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan, yakni Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dewanata di Dieng Kulon, Banjarnegara dan pengelolaan sampah organik dengan budidaya lalat *black soldier fly* (maggot) yang bertujuan mengurangi jumlah sampah organik sejak di hulu/skala rumah tangga yang berlokasi di Kota Yogyakarta. Pengembangan budidaya maggot yang sudah dilakukan sejak tahun 2022 lalu dilanjutkan dengan program pengembangan plasma maggot di enam kecamatan di kota Yogyakarta. Melalui program ini, PT PII mampu membantu pengurangan sampah organik dengan proyeksi sebesar 153,6 ton per tahun dan peningkatan ekonomi pada masyarakat pelaku budidaya dengan proyeksi sebesar Rp472,7 juta per tahun. Berbagai upaya yang dilakukan Perseroan ini, sebagai bentuk komitmen dalam meminimalisir timbulan limbah yang mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam memenuhi target yang tercantum di dalam SDGs, yaitu Tujuan Nomor 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. Atas pengelolaan dampak terkait limbah terkelola dengan baik, selama tahun 2023 tidak terdapat insiden pencemaran limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan di wilayah operasional Perseroan. [GRI 306-2] [OJK F.14, F.15]

Therefore, IIGF manages waste-related impacts through various initiatives and policies within the Company, i.e., through a paperless program and a plastic waste reduction program. In addition, in 2023, IIGF launched WE CARE (Waste Management for Circular Economy) flagship program, which is IIGF's CSR program in the environmental sector for organic and inorganic waste management. WE CARE program consists of two activities, i.e., the Optimization of the Dewanata Integrated Waste Processing Site (TPST) in Dieng Kulon, Banjarnegara, and organic waste management by cultivating black soldier fly (maggot) with the objective to reduce organic waste from upstream/household scale at Yogyakarta. The maggot cultivation development has been carried out since 2022, and further continued with a maggot plasma development in six sub-districts in Yogyakarta. Through this program, IIGF assisted in reducing organic waste with a projection of 153.6 tons per year and increasing the economy of the cultivators with a projection of Rp472.7 million per year. The Company's various efforts are a form of commitment in minimizing waste generation, which supports the commitment of the Government of Indonesia in fulfilling the targets listed in the SDGs, i.e., Goal No. 12, Responsible Consumption and Production. In 2022, because of properly managed waste-related impacts, there were no incidents of waste spillage that cause environmental pollution in the Company's operations. [GRI 306-2] [OJK F.14, F.15]

Inisiatif PT PII dalam Mengelola dan Mengurangi Limbah

IIGF's Initiative in Managing and Reducing Waste

[GRI 306-2] [OJK F.14]

Program Hemat Kertas (Paperless) Paper Saving Program (Paperless)

- Memaksimalkan penggunaan media komunikasi elektronik dalam setiap bentuk komunikasi antar unit kerja di lingkungan Perseroan
- Menggunakan *e-sign* untuk mengurangi pemakaian kertas dalam kegiatan operasional
- Pengaturan pencetakan bolak balik yang diharapkan dapat meminimalkan pencetakan. Pencetakan menggunakan kertas hanya dilakukan apabila dokumen sudah final, sedangkan dokumen *draft* dicetak menggunakan cetak bolak-balik

- Maximizing the use of electronic communications media in every form of communication between work units within the Company
- Using *e-sign* to reduce paper usage in the operational activities
- Setting two-sided printing to minimize paper usage. Printing documents are only carried out for final documents, while draft documents are printed using two-sided printing

Pengurangan Sampah Plastik Plastic Waste Reduction

- Sebagai wujud keberlanjutan lingkungan, Perseroan telah menggunakan botol kaca sebagai pengganti penggunaan Air Minum dalam Kemasan (AMDK). Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisir sampah plastik dalam kegiatan operasional sehari-hari.

- As a form of environmental sustainability, the Company uses glass bottles as a substitute for Bottled Drinking Water (AMDK). The objective is to minimize plastic waste in daily operations.



Limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional PT PII terdiri dari limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah non-B3. Jenis limbah B3 PT PII yaitu baterai yang dihasilkan dari perangkat elektronik dan alat kantor seperti jam, *microphone*, peralatan komputer, *mouse*, telepon yang digunakan dalam aktivitas administratif dan operasional. Jenis limbah non-B3 PT PII yaitu kertas yang dihasilkan dari kegiatan administratif seperti pencetakan dokumen, laporan dan korespondensi, dan plastik yang dihasilkan dari kemasan produk, botol minuman, dan penggunaan material plastik lainnya dalam kegiatan operasional kantor. [GRI 306-1]

Selama tahun 2023, jumlah limbah B3 yang dihasilkan Perseroan sebanyak 7,65 kg, berhasil menurun 55,70% dari tahun 2022 yaitu sebanyak 17,27 kg. Hal ini merupakan keberhasilan PT PII dalam menekan jumlah timbulan limbah atas berbagai program mengurangi limbah. Limbah non B3 yang dihasilkan Perseroan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 2.075,20 kg, meningkat 539,31% dari tahun 2022 yaitu sebanyak 324,60 kg. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut: [GRI 306-3, 306-4, 306-5] [OJK F.13, F.14]

- Pengurangan pembatasan terkait COVID-19: pada tahun 2021 dan 2022, pembatasan bekerja dari kantor (WFO) diterapkan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Sebagian besar karyawan bekerja dari rumah (WFH), sehingga penggunaan air di kantor relatif rendah. Pada tahun 2023, dengan pengurangan pembatasan dan karyawan kembali bekerja dari kantor, volume penggunaan bahan seperti kertas dan plastik meningkat secara signifikan;
- Peningkatan jumlah karyawan: jumlah karyawan PT PII bertambah pada tahun 2023 yang berkontribusi langsung pada peningkatan penggunaan bahan kertas dan plastik untuk berbagai keperluan operasional sehari-hari; serta
- Intensifikasi aktivitas operasional: dengan karyawan kembali bekerja di kantor dan peningkatan jumlah karyawan, aktivitas operasional menjadi lebih intensif. Peningkatan frekuensi dan skala aktivitas harian seperti rapat, acara, dan kegiatan rutin kantor lainnya meningkatkan penggunaan bahan kertas dan plastik.

Atas limbah tersebut, PT PII belum memiliki program daur ulang limbah, sehingga tidak terdapat jumlah limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir (limbah yang dimanfaatkan), melainkan seluruh limbah yang dihasilkan dilakukan pengelolaan berdasarkan jenis limbah dengan bekerjasama dengan pihak ketiga. Jumlah limbah yang dihasilkan beserta mekanisme pengelolaannya adalah sebagai berikut: [GRI 306-3, 306-4, 306-5] [OJK F.13, F.14]

Waste generated from IIGF's operational activities consists of hazardous and toxic waste (B3) and non-B3 waste. Types of IIGF hazardous waste are batteries generated from electronic devices and office equipment such as clocks, microphones, computer equipment, mice, telephones used in administrative and operational activities. IIGF's non-B3 waste types are paper generated from administrative activities such as printing documents, reports and correspondence, and plastic generated from product packaging, beverage bottles, and other plastic materials used in office operations. [GRI 306-1]

In 2023, the B3 waste generated by the Company amounted to 7.65 kg, decreased by 55.70% compared to 2022, which was 17.27 kg. This is IIGF's success in reducing the amount of waste generation through various waste reduction programs. In 2023, the Company generated 2,075.20 kg of non-B3 waste, increased by 539.31% from 2022, which was 324.60 kg. This increase was due to the following factors: [GRI 306-3, 306-4, 306-5] [OJK F.13, F.14]

- Easing COVID-19-related restrictions: in 2021 and 2022, work from office (WFO) restrictions were implemented to reduce the spread of COVID-19. Most employees worked from home (WFH), thus office water consumption was relatively low. In 2023, with the easing of restrictions, the employees returned to the office, causing the volume of paper and plastic consumption to increase significantly;
- Increase in the number of employees: in 2023, IIGF's employees increased, which directly contributed to the increase in the use of paper and plastic materials for various daily operational purposes; and
- Intensification of operations: With employees returning to the office and the increase in the number of employees, operations were more intensive. Increased frequency and scale of daily activities, such as meetings, events, and other routine office activities caused the increased in paper and plastic consumption.

IIGF is yet to have a waste (paper and plastic) recycling program, thus there is no amount of waste diverted from final disposal (waste utilized). However, all waste generated is managed based on the type of waste in collaboration with third parties. The amount of waste generated and its management mechanism are as follows: [GRI 306-3, 306-4, 306-5] [OJK F.13, F.14]



Volume Limbah yang dihasilkan

Volume of Waste Generated

[GRI 306-3, 306-5] [QJK F.13, F.14]

Jenis Limbah Type of Waste	Metode Pengelolaan Limbah Waste Management Method	Kategori Cara Pembuangan Limbah Category Waste Disposal Methods	Jumlah (Kg) Amount (Kg)		
			2023	2022	2021
Limbah B3 Toxic and Hazardous Material (B3) Waste					
Baterai Battery	Dilakukan pengangkutan limbah B3 bekerja sama dengan pihak ketiga pengangkut limbah B3 yang lengkap memiliki izin* [GRI 306-2] Transportation of B3 waste is conducted in collaboration with a third party transporting B3 waste, who has complete permits* [GRI 306-2]	Di luar (offsite): dikirim ke fasilitas pengelolaan limbah B3 yang terdaftar dan berizin untuk pembuangan atau daur ulang di luar lokasi perusahaan. Offsite: sent to a registered and licensed B3 waste management facility for offsite disposal or recycling.	7,65	17,27	7,30
Jumlah Limbah B3 Total B3 Waste			7,65	17,27	7,30
Limbah Non B3 Non-B3 Waste					
Kertas Paper	Dilakukan pengangkutan sampah untuk dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Garbage is transported to be sent to the Landfill (TPA) in collaboration with the Environmental Office	Di luar (offsite): dikumpulkan dan diangkut ke fasilitas daur ulang atau pembuangan yang tidak terletak di lokasi perusahaan. Offsite: collected and transported to a recycling or disposal facility not located on the company premises.	1.364,30	317,50	220,00
Plastik (AMDK) Plastic (AMDK)			710,90	7,10	5,90
Jumlah Limbah Non B3 Total Non B3 Waste			2.075,20	324,60	225,90

- * Dalam proses penentuan pihak ketiga untuk pengelolaan limbah, PT PII memastikan bahwa pihak ketiga yang mengelola limbah mengikuti kewajiban kontraktual dan peraturan melalui: [GRI 306-2]
- Verifikasi Izin: Memeriksa bahwa pihak ketiga memiliki izin yang valid untuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan regulasi yang berlaku
 - Pengecekan Kewajiban Kontraktual: Menyusun kontrak yang mencantumkan kewajiban pengelolaan limbah dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan
 - Pemantauan Rutin: Melakukan pemantauan berkala terhadap pihak ketiga untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan limbah memenuhi standar kontraktual dan peraturan yang berlaku

Proses pengumpulan dan pemantauan data limbah PT PII adalah sebagai berikut: [GRI 306-2, 306-3]

- Pencatatan Data Limbah: Menggunakan logbook limbah untuk mencatat jenis, volume dan metode pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional
- Pelaporan Rutin: Menyusun laporan berkala mengenai data limbah, termasuk informasi tentang pengelolaan dan pembuangan limbah
- Verifikasi Data: Melakukan pemantauan dan verifikasi data limbah untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar pelaporan internal dan eksternal

- * In the process of selecting a third party for waste management, IIGF ensures that the third party managing the waste follows contractual and regulatory obligations through: [GRI 306-2]
- License Verification: Checking that the third party has a valid license for hazardous waste management in accordance with applicable regulations
 - Contractual Obligation Checking: Develop contracts that include waste management obligations and compliance with environmental regulations
 - Routine Monitoring: Conduct periodic monitoring of third parties to ensure that waste management practices meet contractual standards and applicable regulations

IIGF's waste data collection and monitoring process is as follows: [GRI 306-2, 306-3]

- Waste Data Logging: Utilizes a waste logbook to record the type, volume and management method of waste generated from operational activities
- Routine Reporting: Prepare periodic reports on waste data, including information on waste management and disposal
- Data Verification: Monitoring and verification of waste data to ensure accuracy and compliance with internal and external reporting standards

Pelestarian Keanekaragaman Hayati Biodiversity Conservation

Dalam rangka mencegah dampak negatif dan menghadirkan keberlanjutan lingkungan, PT PII juga senantiasa mengintegrasikan aspek lingkungan yakni dalam hal ini melakukan pelestarian keanekaragaman hayati dalam proses penjaminan. Hal ini didasari karena aktivitas proyek seperti pembangunan infrastruktur jalan tol, pembangunan pelabuhan, pengeboran minyak dalam laut, pembangunan bendungan dan pembangunan infrastruktur lainnya, berpotensi mengganggu dan mengancam keanekaragaman hayati yang ada di tanah (*terrestrial*) dan di perairan, menyebabkan hilangnya biota darat dan air serta menurunkan fungsi biodiversitas

IIGF integrates environmental aspects, i.e., biodiversity conservation management in the guarantee process, to prevent negative impacts and provide environmental sustainability. This is based on the fact that project activities such as toll road infrastructure development, port development, deep sea oil drilling, dam construction, and other infrastructure development, have the potential to disturb and threaten biodiversity on land (terrestrial) and in waters, cause loss of land and water biota, and reduce the function of biodiversity as a support for human life. Therefore, IIGF encourages project managers to reduce the



sebagai penopang kehidupan manusia. Untuk itu, PT PII senantiasa mendorong pengelola proyek untuk mengurangi dampak kegiatan infrastruktur terhadap keanekaragaman hayati darat dan di bawah air dengan cara penyusunan rencana, perlindungan, dan pelestarian, melakukan kajian alternatif untuk menghindari atau meminimalisir kawasan yang dilintasi *trase* atau menggunakan desain teknis *elevated*, koridor satwa atau pendekatan teknis lainnya, serta patuh dan melaksanakan segala jenis peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelestarian keanekaragaman hayati. [OJK F.9, F.10]

Adapun kantor PT PII tidak berada di dekat atau di dalam daerah konservasi atau daerah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam melestarikan keanekaragaman hayati, PT PII melaksanakan beberapa program TJSL yang berfokus pada pelestarian lingkungan hidup yang memberikan kontribusi dalam mengurangi emisi karbon sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, yang juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi lokal. Program pelestarian keanekaragaman hayati Perseroan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut: [OJK F.9, F.10]

impact of infrastructure activities on terrestrial and underwater biodiversity by preparing plans, protection, and preservation, conducting alternative studies to avoid or minimize areas crossed by the trajectory or using elevated technical designs, animal corridors, or other technical approaches, and complying with and applying all laws and regulations in terms of biodiversity conservation. [OJK F.9, F.10]

IIGF's office is not located near or in a conservation area or an area with high biodiversity value. As a form of the Company's commitment to preserving biodiversity, IIGF implements several CSR programs that focus on environmental preservation to contribute to reducing carbon emissions to mitigate climate change, which also makes a significant contribution to enhancing local economy. The Company's biodiversity conservation program in 2023 is as follows: [OJK F.9, F.10]

Pemulihan Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Citarum Watershed Ecosystem Restoration

Pemulihan Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum untuk mewujudkan Sungai Citarum Bersih, Sehat dan Lestari melalui penanaman pohon di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 2.290 pohon Kopi Arabika telah ditanam dengan luas area 4,58 hektare yang dimulai sejak Oktober 2022 hingga Oktober 2023.

Citarum Watershed Ecosystem Restoration is a program to create a Clean, Healthy, and Sustainable Citarum River through tree planting in Bandung Regency, West Java. 2,290 Arabica Coffee trees were planted in an area equivalent to 4.58 hectares from October 2022 to October 2023.

Penanggulangan Lahan Kritis di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Critical Land Management in Dieng Plateau

Bersama Geo Dipa dan Pemerintah Daerah Banjarnegara melaksanakan program penanggulangan lahan kritis di Kawasan Dataran Tinggi Dieng melalui penanaman 15.000 pohon yang dimulai pada 6 Januari 2023 dan dilanjutkan hingga 12 Februari 2023.

The Company, together with Geo Dipa and the Banjarnegara Government, conducted a critical land management program in Dieng Plateau Area by planting 15,000 trees, from 6 January 2023 until 12 February 2023.

Penanaman Pohon Mangrove Mangrove Tree Planting

Penanaman 1.000 bibit pohon mangrove di kawasan konservasi alam mangrove Angke Kapuk, Jakarta Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Perseroan mendukung konservasi mangrove sebagai pelindung pantai, penyerap karbon dan habitat biota yang bernilai ekonomis, seperti ikan, kepiting, dan udang. Penanaman mangrove sebagai bagian dari peringatan HUT PT PII ke-14 sekaligus kegiatan *Employee Volunteerism Program* (EVP) ini dilaksanakan pada 16 Desember 2023.

Planting 1,000 mangrove tree seedlings at Angke Kapuk mangrove nature conservation, North Jakarta. This activity is part of the Company's efforts to support mangrove conservation as a coastal protection, carbon sink, and habitat for economically valuable biota, such as fish, crabs, and shrimp. Mangrove planting as part of the 14th IIGF anniversary, and Employee Volunteerism Program (EVP) carried out on 16 December 2023.



Menangani Pengaduan Lingkungan

Handling Environmental Complaints

[GRI 2-27, 3-3] [OJK F.16]

Sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap pemangku kepentingan, PT PII menyediakan layanan pengaduan lingkungan sebagai upaya untuk memperoleh dan menangani masukan, keluhan, atau pertanyaan dari pemangku kepentingan terkait isu lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan operasional Perseroan. Pengaduan lingkungan ini dapat disampaikan secara langsung kepada Perseroan melalui sarana/media secara lisan dan tertulis yang kemudian akan ditindaklanjuti secara responsif oleh Perseroan.

As a form of the Company's responsibility to stakeholders, IIGF provides environmental complaint services as an effort to gain and handle input, complaints, or questions from stakeholders regarding environmental issues resulting from the Company's operations. These environmental complaints can be submitted directly to the Company through oral and written means/media, which will then be followed up responsively by the Company.

Secara Lisan Verbally



Menghubungi *Call Center* di **+62 21 5795 0550** atau mengunjungi kantor pusat PT PII yang beralamat di Capital Place Lt. 7 dan 8, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18 Kuningan Barat, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710 – Indonesia.
Contacting the *Call Center* at **+62 21 5795 0550**, or visiting IIGF's head office at Capital Place Lt. 7 and 8, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18 West Kuningan, South Jakarta, Special Capital Region of Jakarta, 12710, Indonesia.

Secara Tertulis In writing



- Menyampaikan *email* ke alamat **info@iigf.co.id**
- Menyampaikan *form* keluhan yang tercantum dalam situs *website* PT PII ataupun melalui media sosial Perseroan
- Sending an email to **info@iigf.co.id**
- Submitting a complaint form, available at IIGF's website or through the Company's social media

Dengan pengelolaan lingkungan yang dilakukan secara efektif, sepanjang tahun 2023 PT PII tidak menerima pengaduan dari pemangku kepentingan terkait lingkungan sehingga tidak terdapat denda ataupun sanksi lingkungan yang ditanggung oleh Perseroan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait lingkungan.

With effective environmental management, in 2023, IIGF did not receive complaints from stakeholders regarding the environment. Thus, there were no fines or environmental sanctions borne by the Company for non-compliance with environmental laws and regulations.



GRAND LAUNCHING / PERK

RUMAH

Oleff-Ole



SOSIAL
SOCIAL



Memperluas Dampak Bagi Pembangunan Sosial

Expanding Social
Development Impact



Memperluas Dampak dengan Produk dan Layanan Berkelanjutan yang Inovatif

Expanding Impact with Innovative Sustainable Products and Services

Melalui perluasan pengusahaan penjaminan, PT PII berupaya untuk dapat terus memperbesar kebermanfaatan Perusahaan bagi masyarakat Indonesia dengan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam. Dengan strategi ini PT PII tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

Through the expansion of the guarantee business, IIGF strives to expand the Company's benefits to the Indonesian people by supporting the acceleration of sustainable infrastructure development that can provide greater social and environmental benefits to the society welfare and the nature preservation. With this strategy, IIGF not only contributes to national economic growth, but also creates a more sustainable and prosperous future for all Indonesian.



Pendekatan Manajemen Topik Portofolio Produk dan Layanan Berkelanjutan

Management's Approach to Sustainable Products and Services Portfolio
[GRI 3-3] [OJK F.17]

PENGLOLAAN DAMPAK [GRI 2-27, 3-2]



IMPACT MANAGEMENT [GRI 2-27, 3-2]

Pengelolaan risiko proyek menjadi alat untuk Perseroan dalam mengukur dan mengelola dampak yang timbul atas portofolio produk dan layanan Perseroan. Pengelolaan dampak dilakukan melalui proses appraisal penjaminan dengan salah satu faktor yang dievaluasi berupa dampak dan risiko potensial terhadap aspek lingkungan dan sosial dari setiap proyek yang akan memperoleh jaminan. Sebagai contoh, proses appraisal penjaminan mensyaratkan adanya kegiatan yang berorientasi lingkungan seperti konservasi atau pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan lingkungan sebagai wujud dari pengelolaan aspek lingkungan pada proyek. Sementara itu pada aspek sosial, Perseroan memastikan terlaksananya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di setiap lokasi proyek.

Melalui upaya tersebut, PT PII meyakini bahwa dampak lingkungan dan sosial yang timbul dari pembangunan proyek dapat diminimalisir dan dicegah sehingga dampak negatif potensial seperti perubahan iklim yang berdampak pada manusia dan lingkungan sekitar seperti kekeringan, kenaikan permukaan air laut, banjir, degradasi kualitas air dan ekosistem, konflik dengan masyarakat sekitar, hingga terganggunya eksistensi flora dan fauna yang mampu mempengaruhi kesehatan dan kehidupan manusia dapat diminimalisir dan dicegah.

Project risk management is a tool for the Company to assess and manage impacts arising from the Company's product and service portfolio. Impact is managed through a guarantee appraisal process. One of the factors evaluated is the potential impacts and risks to the environmental and social aspects of each project to be guaranteed. For example, the guarantee appraisal process requires environmentally oriented activities, such as conservation of biodiversity and environmental management as a form of environmental management of the project. Meanwhile, in terms of social aspect, the Company ensures the community development and empowerment programs implementation at each project location.

By managing these impacts, IIGF understands that the environmental and social impacts arising from project development can be minimized and prevented, so that potential negative impacts, i.e., climate change impact on humans and the surrounding environment, such as drought, sea level rise, floods, degradation of water quality and ecosystems, conflicts with the surrounding community, and threats to the existence of flora and fauna that affect the human health and life shall be minimized and prevented.



KEBIJAKAN YANG TELAH DIKEMBANGKAN SECARA KHUSUS



SPECIFICALLY DEVELOPED POLICIES

Kebijakan PT PII terkait Portofolio Produk Berkelanjutan

- > Pedoman Kode Etik 2023
- > Dokumen Acuan Alokasi Risiko
- > Operation Manual

Kebijakan PT PII terkait Portofolio Produk Berkelanjutan mengacu pada Ketentuan Umum

- > Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
- > Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
- > Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana diubah dengan PMK No.8/PMK.08/2016
- > Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.170/PMK.08/2018

IIGF's Policy regarding Sustainable Product Portfolio

- > 2023 Code of Conduct
- > Risk Allocation References
- > Operation Manual

IIGF's policy for Sustainable Product Portfolio refers to the General Provisions

- > Presidential Regulation No. 38 of 2015 on Public Private Partnership in Infrastructure Provisions
- > Presidential Regulation No. 78 of 2010 on Government Guarantees on Public Private Partnership Infrastructure Projects
- > Minister of Finance Regulation No. 260/PMK.011/2010 on Guidelines for Implementing Government Guarantees in Infrastructure Public Private Partnership Projects, as amended by PMK No. 8/PMK.08/2016
- > Minister of Finance Regulation No. 223/PMK.011/ 2012 on Viability Gap Fund Provisions for Construction Partial Costs in Public Private Partnership in Infrastructure Provision, as amended by Minister of Finance Regulation No. 170/PMK.08/2018

KOMITMEN



COMMITMENT

- > Melakukan pengembangan dan inovasi produk dan layanan berkelanjutan untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
- > Menghadirkan produk dan layanan yang mampu memberikan manfaat sosial bagi masyarakat
- > Menghadirkan produk dan layanan yang berorientasi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan
- > Memberikan layanan terbaik kepada pelanggan

- > Carrying out sustainable product and service development and innovation to encourage the achievement of sustainable development goals
- > Presenting products and services that socially benefits the community
- > Providing products and services that are oriented towards protecting and preserving the environment
- > Providing the best service to customers

TUJUAN/TARGET



OBJECTIVES/TARGETS

- > Memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya bagi masyarakat dan lingkungan
- > Meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan para pemangku kepentingan khususnya investor dan pelanggan

- > Providing the best benefits for society and the environment
- > Increasing the stakeholders' trust and comfort, specifically investors and customers

EVALUASI DAN EFEKTIVITAS TINDAKAN UNTUK MENGELOLA DAMPAK



EVALUATION AND EFFECTIVENESS OF IMPACT MANAGEMENT MEASURES

Melakukan evaluasi, kajian relevansi, efisiensi, efektifitas dan dampak atas program inovasi pengembangan produk dan layanan berkelanjutan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta melakukan strategi usaha sesuai dengan perkembangan/perubahan faktor eksternal dan internal yang terjadi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Evaluating, studying the relevance, efficiency, effectiveness, and impact of sustainable product and service innovation development programs, in accordance with the objectives to be achieved, and conducting business strategies in line with developments/changes in external and internal factors that occur pursuant to the prevailing regulations.



PENANGGUNG JAWAB

PERSON IN CHARGE

- > Direktorat Bisnis berkoordinasi dengan divisi terkait lainnya

- > Business Directorate in coordination with other relevant divisions

AKUMULASI NILAI INVESTASI PROYEK

ACCUMULATED PROJECT INVESTMENT VALUE

Hingga tahun 2023, Perseroan telah memberikan penjaminan dengan estimasi nilai proyek sebesar Rp497 triliun.

By 2023, the Company provided project guarantee with an estimated value of Rp497 trillion.

KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN DAMPAK

STAKEHOLDERS' ENGAGEMENT IN MANAGING IMPACT

Pemerintah/Regulator

- > Mendorong adanya regulasi yang transparan terkait pengembangan produk dan layanan berkelanjutan yang dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan produk dan layanan Perseroan
- > Mendorong Perseroan untuk mendukung pencapaian SDGs melalui pengembangan produk dan layanan yang berkelanjutan

Divisi Bisnis

- > Melakukan kajian terhadap pengembangan produk dan layanan yang berkelanjutan
- > Melakukan kajian untuk peningkatan portofolio produk dan layanan yang berkelanjutan

Pelanggan (PJK, BUP, BUMN Terjamin)

- > Mendukung pencahangan dan pengembangan proyek-proyek yang berorientasi berkelanjutan
- > Melakukan pembangunan atau rencana pembangunan proyek-proyek yang berorientasi berkelanjutan

Government/Regulator

- > Encouraging the existence of transparent regulations in terms of sustainable products and services development, which can be referred to as guidelines to develop the Company's products and services
- > Stimulating the Company to support the SDGs achievement through sustainable product and service development

Business Development Division

- > Carrying out studies on sustainable product and service development
- > Carrying out studies to enhance the sustainable product and service portfolio

Customers (GCA, SPV, Guaranteed SOEs)

- > Supporting the launch and development of sustainability-oriented projects
- > Developing or planning development for sustainable projects

Skema Penjaminan yang Dilakukan Perseroan

The Company's Guarantee Scheme

[OJK F.27, F.28]

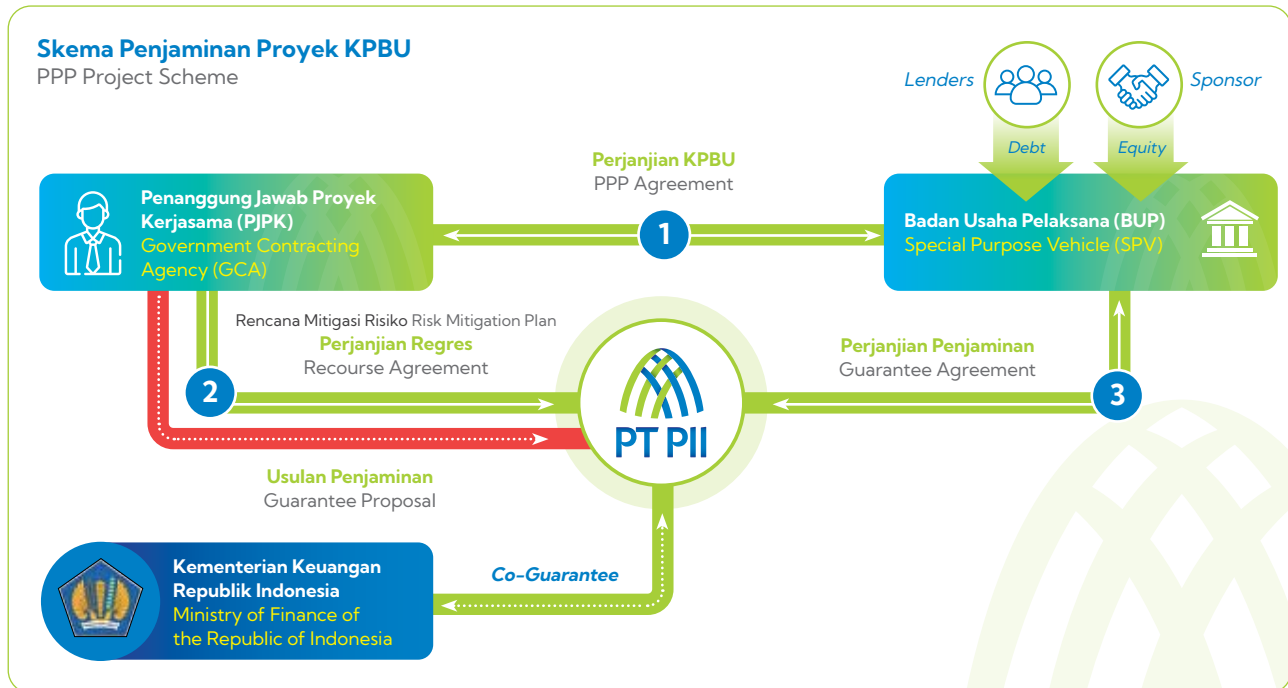
Dalam menjalankan praktik bisnisnya, PT PII memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kelayakan kredit (*credit worthiness*) dari proyek infrastruktur dengan memberikan penjaminan berdasarkan kerangka penilaian (*appraisal framework*) dan acuan alokasi risiko yang jelas. Peran penting Perseroan dalam memberikan penjaminan infrastruktur pada akhirnya meningkatkan kepercayaan investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah proyek yang dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui skema pembiayaan alternatif.

In carrying out its business, IIGF has the objective to increase the credit worthiness of infrastructure projects by providing guarantees based on an appraisal framework and clear risk allocation references. The Company's important role in providing infrastructure guarantees increases investors' confidence to participate in infrastructure development in Indonesia. This is reflected by the increase in the number of projects gradually through alternative financing schemes.



Penjaminan Proyek KPBU

PPP Project Guarantee



Penjaminan Pinjaman Langsung (Non KPBU)

Direct Loan Guarantee (Non PPP)

Selain melalui skema KPBU, PT PII juga dapat memberikan penjaminan terhadap risiko gagal bayar terhadap BUMN yang melakukan pinjaman dan/atau penerbitan obligasi untuk membiayai penyediaan infrastruktur ("Penjaminan Pinjaman Langsung") sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2018. Melalui peraturan tersebut, PT PII menerima penugasan untuk melakukan penjaminan bersama dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Perseroan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan melakukan penilaian kelayakan ekonomi dan finansial proyek infrastruktur yang menjadi jaminan pinjaman, serta penilaian kelayakan terhadap kondisi keuangan dan kemampuan membayar BUMN.

Perseroan juga melakukan pemantauan pengelolaan risiko yang dilakukan BUMN selaku pihak yang dijamin bersama dengan Kementerian Keuangan berdasarkan dokumen rencana mitigasi risiko yang telah disepakati.

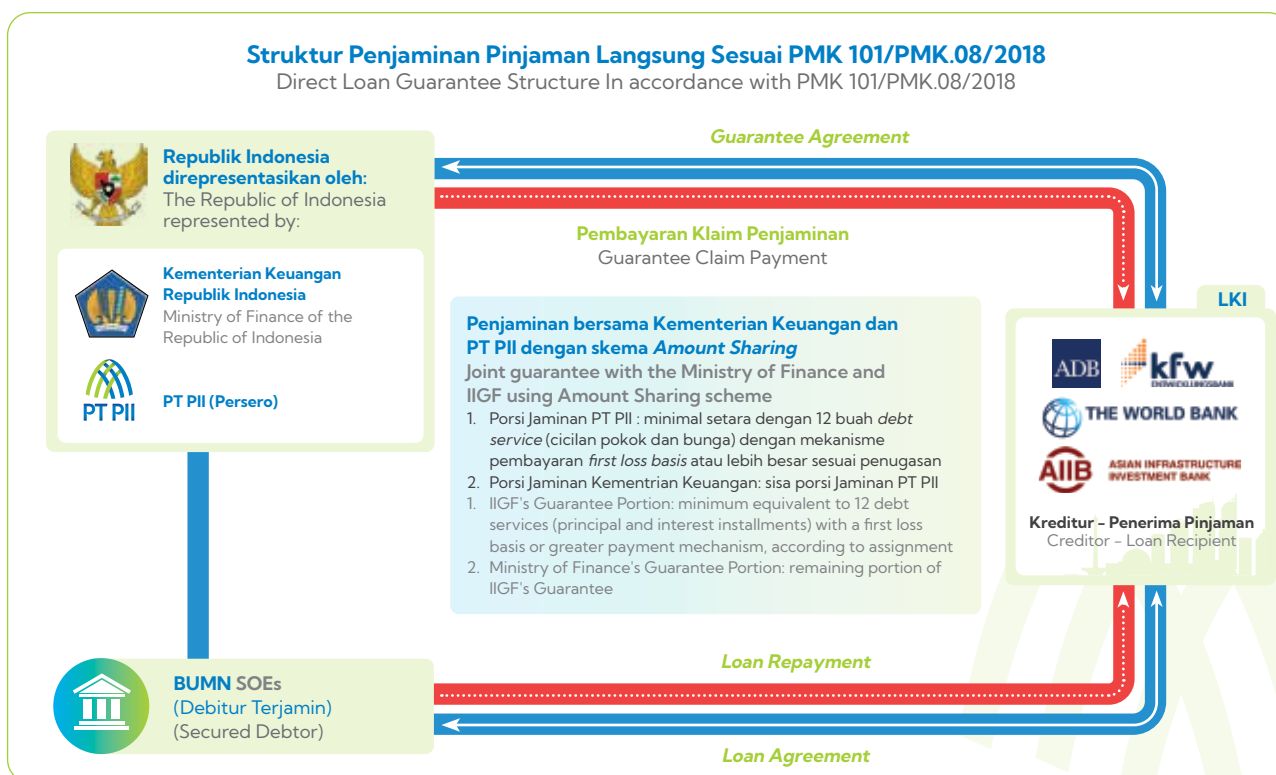
In addition to PPP scheme, IIGF also provides guarantees against the risk of default for SOEs that borrows and/or issue bonds to finance infrastructure provision ("Direct Loan Guarantee") in accordance with Minister of Finance Regulation No. 101 of 2018. By means of this regulation, IIGF received an assignment to carry out joint guarantees from the government through the Ministry of Finance. The Company collaborates with the Ministry of Finance to assess the economic and financial feasibility of infrastructure projects as loan collateral, as well as assessing the feasibility of the SOEs' financial condition and ability to pay.

The Company also monitors the risk management carried out by SOEs as the guaranteed party, in collaboration with the Ministry of Finance, based on the agreed risk mitigation plan document.



Struktur Penjaminan Pinjaman Langsung Sesuai PMK 101/PMK.08/2018

Direct Loan Guarantee Structure In accordance with PMK 101/PMK.08/2018



Portofolio Kegiatan Usaha Berkelanjutan

Sustainable Business Portfolio

[OJK F.26]

Sesuai mandatnya sebagai SMV Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT PII berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan pemerataan pembangunan di Indonesia, serta berperan aktif dalam mendukung pemerintah mewujudkan program SDGs untuk pembangunan yang lebih baik di seluruh negeri.

Salah satu upaya yang dilakukan PT PII dalam mendukung pencapaian SDGs adalah dengan mengembangkan portofolio produk dan layanan berkelanjutan, seperti Kegiatan Usaha yang Berwawasan Lingkungan (KUBL), untuk meningkatkan proyek-proyek yang bersifat green and sustainable. Selain itu, PT PII juga mengembangkan portofolio pada proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial yang lebih besar kepada masyarakat. Upaya ini sejalan dengan inisiatif pemerintah dalam menggalakkan implementasi keuangan berkelanjutan.

Sejak didirikan pada tahun 2009, PT PII telah memberikan penjaminan terhadap 50 proyek yang terdiri dari 41 proyek penjaminan infrastruktur dan 9 penjaminan non infrastruktur dengan total nilai investasi proyek yang dijamin sebesar Rp497 triliun dan total nilai investasi sebesar Rp497 triliun. Selain itu, PT PII juga telah menerbitkan 27 sertifikat penjaminan korporasi dalam rangka PEN dan penjaminan korporasi

In accordance with its mandate as the SMV of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, IIGF is committed to supporting sustainable infrastructure development and equitable development in Indonesia, as well as having an active role in supporting the government to actualize SDGs program for better development in the country.

One of the efforts made by IIGF in supporting the SDGs achievement is by developing a portfolio of sustainable products and services, such as Environmentally Sound Green Business Activities (KUBL), to increase green and sustainable projects. In addition, IIGF develops portfolios on projects that provide greater social benefits to the community. This effort is in line with the government's initiative in promoting the sustainable finance.

Since its establishment in 2009, IIGF has guaranteed 50 projects consisting of 41 infrastructure guarantee projects and 9 non-infrastructure guarantees with a total guaranteed project investment value of Rp497 trillion, and a total investment value of Rp497 trillion. In addition, IIGF has also issued 27 corporate guarantee certificates for PEN and corporate guarantees amounted to Rp2.5 trillion. Specifically in 2023, IIGF signed



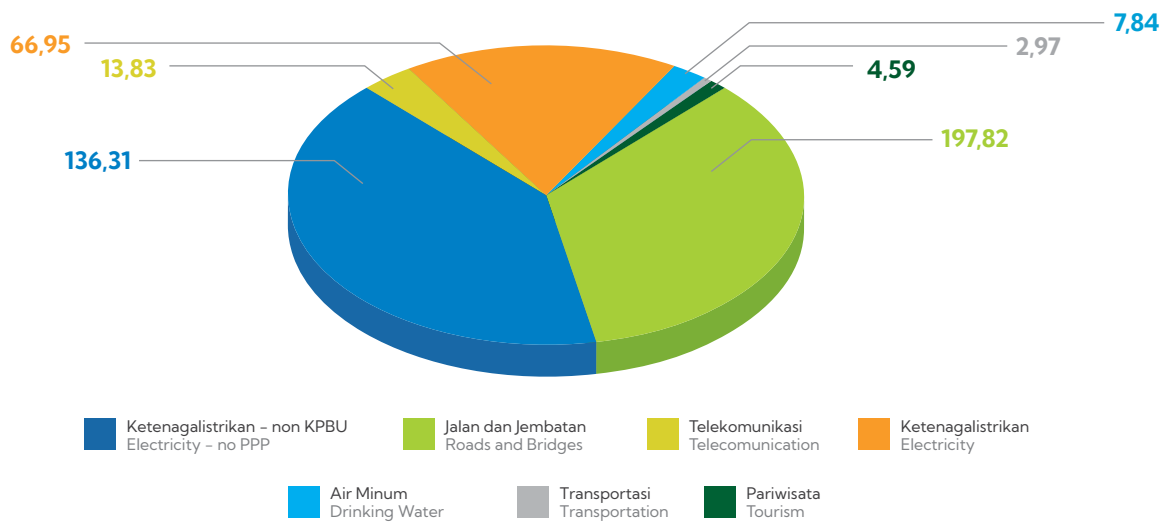
senilai Rp2,5 triliun. Khususnya pada tahun 2023, PT PII telah menandatangani Perjanjian Penjaminan terhadap 3 (tiga) proyek infrastruktur dan 1 proyek non infrastruktur, yaitu:

1. Proyek Tol Akses Patimban pada tanggal 24 Januari 2023;
2. Proyek PJU Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 12 Oktober 2023;
3. Proyek Tol JORR Elevated Cikunir – Ulujami pada tanggal 17 Oktober 2023; dan
4. Proyek Cadangan Pangan Pemerintah pada tanggal 4 September 2023.

Guarantee Agreements for three (3) infrastructure projects and 1 non infrastructure project:

1. Patimban Access Toll Project on 24 January 2023;
2. West Lombok Regency Street Lighting project on 12 October 2023;
3. JORR Elevated Cikunir-Ulujami Toll Project on 17 October 2023; and
4. Government Food Reserve Project on 4 September 2023.

Nilai Proyek Infrastruktur KPBU dan Non-KPBU Menurut Sektor Usaha yang Dilayani
Value of PPP and Non-PPP Infrastructure Projects by Business Sector



Sektor Penjaminan Proyek dan Nama Proyek Project Guarantee and Project Name	Nilai Proyek (Rp Triliun) Project Value (Rp Trillion)
Portofolio Penjaminan Proyek Infrastruktur – KPBU Infrastructure Project Guarantee Portfolio – PPP	
Sektor Jalan dan Jembatan Roads and Bridges	
Jalan Tol Batang-Semarang Batang-Semarang Toll Road	13,97
Jalan Tol Pandaan-Malang Pandaan-Malang Toll Road	6,36
Jalan Tol Manado-Bitung Manado-Bitung Toll Road	4,95
Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Balikpapan-Samarinda Toll Road	11,99
Jalan Tol Jalan Layang Sheikh Mohamed Bin Zayed (Jakarta – Cikampek II <i>Elevated</i>) Sheikh Mohamed Bin Zayed Flyover Toll Road (Jakarta – Cikampek II Elevated)	16,23
Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar Krian-Legundi-Bunder-Manyar Toll Road	12,93
Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan Jalan Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Road	8,41
Tol Probolinggo-Banyuwangi Probolinggo-Banyuwangi toll road	23,39
Tol Serang-Panimbang Serang-Panimbang Toll Road	8,57
Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Jakarta-South Cikampek II Toll Road	14,69
Jalan Tol Semarang-Demak Semarang-Demak Toll Road	5,44
Jalan Non Tol Lintas Timur Sumatra di Provinsi Sumatra Selatan (Jalintim Sumsel) East Sumatra Non-Toll Road in South Sumatra Province (Jalintim Sumsel)	0,98
Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Toll Road	26,64



Sektor Penjaminan Proyek dan Nama Proyek Project Guarantee and Project Name	Nilai Proyek (Rp Triliun) Project Value (Rp Trillion)
Jalan Tol Yogyakarta–Bawen Yogyakarta–Bawen Toll Road	14,26
Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatra di Provinsi Riau East Sumatra Cross Road Preservation in Riau Province	0,53
Jembatan Callender Hamilton Hamilton Callender Bridge	2,2
Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Patimban Port Access Toll Road	5,02
Jalan Tol JORR Elevated Cikunir Ulujami JORR Elevated Cikunir Ulujami Toll Road	21,26
Total Nilai Proyek sektor Jalan dan Jembatan Total Project Value for Roads and Bridges	197,82
Sektor Telekomunikasi Telecommunications	
Palapa Ring Paket Barat West Palapa Ring Package	1,23
Palapa Ring Paket Tengah Central Palapa Ring Package	1,09
Palapa Ring Paket Timur East Palapa Ring Package	5,09
Satelit Multifungsi Pemerintah Government's Multifunction Satellite	6,42
Total Nilai Proyek Sektor Telekomunikasi Total Project Value for Telecommunications	13,83
Sektor Ketenagalistrikan Electricity	
PLTU Batang Jawa Tengah SPP Batang Central Java	66,76
Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Madiun Public Street Light (PJU) in Madiun Regency	0,10
Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Lombok Barat Public Street Light (PJU) in Wes Lombok Regency	0,09
Total Nilai Proyek Sektor Ketenagalistrikan Total Project Value for Electricity	66,95
Sektor Air Minum Drinking Water	
SPAM Umbulan–Jawa Timur SPAM Umbulan East Java	2,06
SPAM Kota Bandar Lampung SPAM Bandar Lampung	0,75
SPAM Semarang Barat SPAM West Semarang	0,42
SPAM Pekanbaru SPAM Pekanbaru	0,5
SPAM Regional Jatiluhur I SPAM Region Jatiluhur I	1,68
SPAM Regional Karian Serpong SPAM Region Karian Serpong	2,43
Total Nilai Proyek Sektor Air Minum Total Project Value for Drinking Water	7,84
Sektor Transportasi Transportation	
Kereta Api Makassar–Parepare Makassar–Parepare Train	0,99
Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi Proving Ground Roadworthiness Testing and Motor Vehicle Certification (BPLJSKB) in Bekasi	1,98
Total Nilai Proyek Sektor Transportasi Total Project Value for Transportation	2,97
Portofolio Penjaminan Proyek Infrastruktur – Non-KPBU Infrastructure Project Guarantee Portfolio – Non-PPP	
Sektor Pariwisata Tourism	
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Mandalika Special Economic Zone (SEZ)	4,59
Total Nilai Proyek Sektor Pariwisata Total Project Value for Tourism	4,59
Sektor Ketenagalistrikan – non KPBU Electricity – no PPP	
Hydropower Programme	6,90
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng 2 & Patuha 2 Geothermal Power Plant (GPP) Dieng 2 & Patuha 2	6,95
Pembangunan Jaringan Distribusi Kalimantan dan Maluku–Papua dengan Skema <i>Result-Based Lending</i> (RBL–KMP) Construction of the Kalimantan and Maluku–Papua Distribution Network with the Result-Based Lending Scheme (RBL–KMP)	30,61
Pengembangan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan Skema <i>Result-Based Lending</i> (RBL–SNT) Construction of Sulawesi and Nusa Tenggara Distribution with the Result-Based Lending Scheme (RBL–SNT)	29,79
Pengembangan Jaringan Distribusi di Jawa Timur dan Bali Construction of East Java and Bali Distribution Network	17,47



Sektor Penjaminan Proyek dan Nama Proyek Project Guarantee and Project Name	Nilai Proyek (Rp Triliun) Project Value (Rp Trillion)
Pengembangan Jaringan Transmisi dan Distribusi di Jawa Bagian Barat dan Jawa Bagian Tengah Transmission and Distribution Network Development in Western and Central Java	40,87
Pembangunan PLTU Timor-1 (2x50 MW) Construction of SPP Timor-1 (2x50 MW)	3,72
Total Nilai Proyek Sektor Ketenagalistrikan - non KPBU Total Project Value for Electricity - non PPP	136,31
Total Portofolio Penjaminan Proyek Infrastruktur - KPBU dan Non-KPBU Total Infrastructure Project Guarantee Portfolio - PPP and Non-PPP	430,3

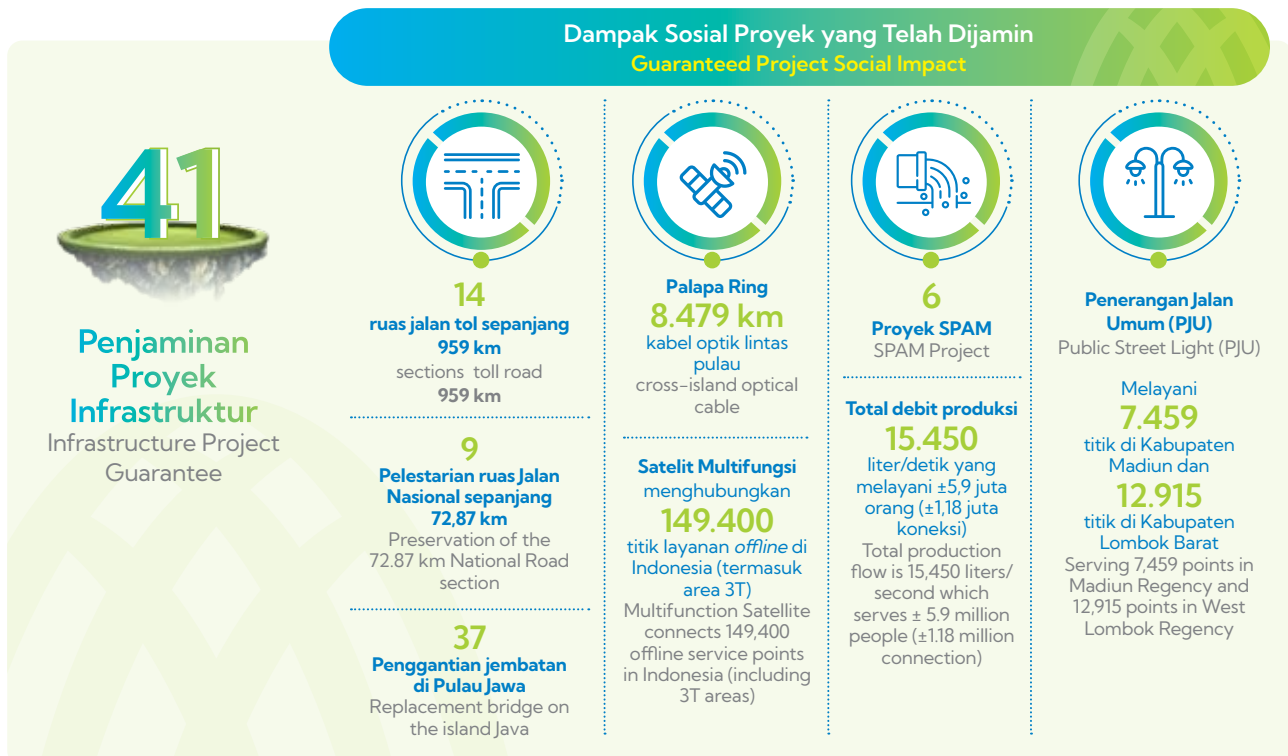
Memperluas Dampak Kebermanfaatan Sosial Melalui Penjaminan Proyek

Expanding the Social Benefit Impact through Project Guarantee

[GRI 203-2] [OJK F.26, F.28]

PT PII memainkan peran penting untuk akselerasi pembangunan sejumlah infrastruktur strategis. Kehadiran PT PII mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan inovatif dan *sustainable*, untuk mempercepat pembangunan proyek strategis nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini didukung dengan berbagai strategi dan program PT PII di tahun 2023, khususnya dalam arah pengembangan Perseroan untuk melakukan *enhancement* dan diversifikasi bisnis dengan memperluas perusahaan penjaminan termasuk pada sektor infrastruktur sosial untuk memperbesar dampak kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

IIGF has a vital role in accelerating the development of several strategic infrastructures. IIGF's presence encourages private participation in infrastructure development through innovative and sustainable financing, to accelerate the development of national strategic projects for the greatest prosperity of the people. This is supported by IIGF's various strategies and programs in 2023, especially in the direction of the Company's development to conduct business enhancement and diversification by expanding the guarantee business, including the social infrastructure sector to increase the impact of community welfare through sustainable infrastructure development.





Pembangunan infrastruktur yang dijamin oleh PT PII memberikan dampak sosial yang sangat besar dan positif bagi berbagai sektor di Indonesia. Pada sektor jalan dan jembatan, proyek-proyek yang dijamin PT PII meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempermudah akses transportasi, dan mendukung distribusi barang serta mobilitas penduduk. Hal ini tidak hanya mengurangi waktu tempuh dan biaya transportasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi.

Pada sektor telekomunikasi, PT PII menjamin proyek-proyek yang memperluas akses internet dan komunikasi, terutama di daerah terpencil. Ini meningkatkan akses informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan, serta mendukung perkembangan ekonomi digital. Di sektor transportasi, proyek-proyek yang dijamin, seperti pembangunan bandara, pelabuhan, dan sistem transportasi massal, meningkatkan efisiensi dan kapasitas transportasi, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan kenyamanan serta keselamatan perjalanan.

Pada sektor air minum, proyek-proyek yang dijamin PT PII menyediakan akses air bersih kepada ribuan rumah tangga, yang berdampak langsung pada peningkatan kesehatan masyarakat dan penurunan penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih. Sektor pariwisata juga mendapatkan manfaat dari penjaminan PT PII, di mana proyek-proyek pembangunan infrastruktur pariwisata meningkatkan daya tarik destinasi wisata, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, fokus PT PII juga diarahkan kepada penjaminan *small scale* KPBU yang menjadi proyek percontohan guna mengembangkan pembangunan infrastruktur yang potensial di setiap daerah. Beberapa penjaminan *small scale* KPBU yaitu PJU Madiun dan Lombok Barat serta perusahaan KPBU daerah di 31 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Secara keseluruhan, dampak sosial dari pembangunan infrastruktur yang dijamin oleh PT PII mencakup peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan ekonomi, pengurangan kesenjangan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek-proyek ini tidak hanya memperkuat infrastruktur fisik tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

IIGF guaranteed infrastructure development that has a huge and positive social impact on various sectors in Indonesia. In terms of road and bridge sector, IIGF-guaranteed projects improve connectivity between regions, facilitate access to transport, and support the distribution of goods and population mobility. This not only reduces traveling time and transport costs, but also opens up new economic opportunities in previously isolated areas.

In the telecommunications sector, IIGF guarantees projects that expand the internet and communication access, especially in remote areas. This improves access to information, education, and health services, and supports the digital economy development. In terms of transportation, the guaranteed projects include the construction of airports, ports, and mass transport systems, increase transport efficiency and capacity, reduce congestion, and improve travel comfort and safety.

In the drinking water sector, IIGF-guaranteed projects provide access to clean water to thousands of households, which directly improves public health and reduces diseases caused by unclean water. The tourism sector also benefits from IIGF's guarantee, where tourism infrastructure development projects increase the attractiveness of tourist destinations, create jobs, and drive local economic growth.

In addition, IIGF's focus is also directed towards small scale PPP guarantees which are pilot projects to develop potential infrastructure development in each region. Some of the small scale PPP guarantees are PJU Madiun and West Lombok also regional PPP business in 31 regencies/cities in Indonesia.

Overall, IIGF guaranteed the infrastructure development with the social impacts that include improved quality of life, economic empowerment, reduced social disparities, and improved community welfare. These projects not only strengthen physical infrastructure but also establish a strong foundation for a more sustainable and inclusive future.



Memperluas Dampak Kebermanfaatan Melalui Penjaminan Proyek/Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan

Expanding Beneficial Impacts by Guaranteeing Green Business Activities

[GRI 203-2] [OJK F.26, F.28] [S1-33c]

PT PII telah menetapkan arah strategis tahun 2023 sesuai dengan RJPP Perseroan yaitu memperluas kebermanfaatan dalam berbagai sektor maupun dalam tahapan proyek infrastruktur. Sesuai arah strategis tersebut, pada tahun 2023 PT PII berfokus pada penguatan keberlangsungan *pipeline* dalam mandat eksisting serta perluasan sektor penjaminan KPBU terutama terkait sektor yang mendukung upaya transisi energi dan menghadapi tantangan perubahan iklim (*climate change*).

Dalam memberikan penjaminan terhadap proyek-proyek, PT PII menerapkan prinsip LST mengacu pada *framework* Kementerian Keuangan. Hingga tahun 2023, PT PII telah melakukan penjaminan terhadap proyek yang berkaitan dengan energi terbarukan seperti *hydropower*, *renewable energy access*, serta *electric vehicle charging* serta proyek berkaitan dengan konservasi energi untuk penerangan jalan umum di beberapa wilayah di Jawa Timur dan Lombok Barat. Proyek Penerangan Jalan Umum di Lombok Barat menjadi salah satu proyek percontohan sistem pencahayaan hemat energi, yakni meningkatkan penggunaan teknologi lampu hemat energi (LED) yang dapat mengurangi emisi GRK.

IIGF has set a strategic direction for 2023, in line with the Company's RJPP, i.e., expanding benefits in various sectors and in various stages of infrastructure projects. In accordance with this strategic direction, in 2023, IIGF focused on strengthening the sustainability of the pipeline in the existing mandate and expanding the PPP guarantee sector, especially related to sectors that support energy transition efforts and face the challenges of climate change.

In providing guarantees for projects, IIGF implemented ESG principles based on the Ministry of Finance framework. As of 2023, IIGF has underwritten the project that related to renewable energy such as hydropower, renewable energy access, and electric vehicle charging as well as projects related to energy conservation for public street lighting in several areas in East Java and West Lombok. West Lombok Street Lighting Project is one of the pilot projects for energy-efficient lighting systems, which increases the use of energy-efficient lighting technology (LED) to be able to reduce greenhouse GHG.

Realisasi Penjaminan Proyek Pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)

Realization of Project Guarantee for Green Business Activities (KUBL)

Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) Green Business Activities (KUBL)	Sektor Sector	Nama Proyek Project Name	Nilai Proyek (Rp Triliun) Project Value (RpTrillion)
Energi Terbarukan Renewable Energy	Sektor Energi Energy Sector	<i>Hydropower Programme</i>	6,90
		Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng 2 & Patuha 2 Geothermal Power Plant (GPP) Dieng 2 & Patuha 2	6,95
Efisiensi Energi Energy Efficiency	Sektor Konservasi Energi Energy Conservation Sector	Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Madiun Madiun Public Street Light (PJU) Project	0,10
		Proyek Penerangan Jalan Umum di Lombok Barat West Lombok Public Street Lighting	0,09
Pencegahan dan Pengendalian Polusi Pollution Prevention and Control	Sektor Ketenagalistrikan Electricity	Proyek Pengembangan Jaringan Transmisi dan Distribusi di Jawa Bagian Barat dan Jawa Bagian Tengah (<i>Sustainable and Reliable Energy Access Program (SREAP)</i>) Transmission and Distribution Network Development Project in Western and Central Java (Sustainable and Reliable Energy Access Program/SREAP)	44,30
Total Nilai Proyek Penjaminan Pada KUBL Total Value of Project Guarantee for KUBL			58,34



Proyek Penjaminan Pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) Project Guarantee for Green Business Activities (KUBL)

[OJK F.26, F.28]

Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Madiun dan Lombok Barat Public Street Light (PJU) Project in Madiun and West Lombok



- Pembangunan baru (tanpa retrofit), pengoperasian dan pemeliharaan terhadap 7.458 titik yang tersebar di Jalan Nasional, Jalan Kabupaten Utama dan Jalan Perkotaan di Madiun
- Pembangunan 12.915 titik pada 200 ruas jalan sepanjang 545,1 KM di Kabupaten Lombok Barat
- Mendukung proyek-proyek konservasi energi dengan adanya manfaat penghematan energi
- Menjadi Proyek KPBU *small scale* yang dijamin oleh pemerintah melalui Perseroan selaku Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) untuk mendukung akselerasi pembangunan sekaligus menunjukkan komitmen dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
- Memberikan dampak signifikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun, Jawa Timur antara lain menciptakan berbagai kegiatan ekonomi baru, meminimalisir tingkat kriminalitas pada malam hari dan menurunkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh kurangnya visibilitas jalan.
- New construction (without retrofit), operation and maintenance of 7,458 points across National Roads, Main Regency Roads, and Urban Roads at Madiun
- Construction of 12,915 points on 200 roads along 545.1 KM in West Lombok Regency
- Supporting energy conservation projects with energy saving benefits
- Being a small-scale PPP project guaranteed by the government through the Company as an Infrastructure Guarantee Business Entity (BUPI) to support development acceleration while reflecting the commitment to supporting the acceleration of infrastructure development in Indonesia.
- Providing significant impacts to the community, especially in Madiun Regency, East Java, including creating various new economic activities, minimizing crime rates at night, and reducing the risk of traffic accidents due to lack of road visibility.

Hydropower Programme



- Bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2019–2027 dan bagian dari program 35.000 MW pemerintah dengan sub proyek utama pada PLTA Bakaru I dan II di *Tranche 1* dan PLTM Kalibumi serta PLTM Lapai 1 di *Tranche 2*.
- Mendukung proyek penyediaan listrik melalui pendayagunaan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- Ramah lingkungan karena tidak menimbulkan pencemaran yang bisa berdampak pada perubahan iklim
- Meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atas Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
- Menurunkan Biaya Pokok Produksi (BPP) atas penggunaan bahan bakar fosil baik pada saat *base load* dan terutama pada saat beban puncak serta peningkatan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) kepada pelanggan di sistem terkait
- Part of the 2019–2027 Electricity Supply Business Plan (RUPTL) and part of the government's 35,000 MW program with the main sub-project at HPP Bakaru I and II on *Tranche 1* and MHPP Kalibumi as well as MHPP Lapai 1 on *Tranche 2*.
- Supporting electricity supply projects by utilizing New Renewable Energy (NRE)
- Environmentally friendly because it does not cause pollution which could affect climate change
- Increasing the electrification ratio in Central and Eastern Indonesia with the construction of Hydroelectric Power Plants (HPP) over Mini-Hydro Power Plants (MHPP)
- Reducing the Electricity Generation Cost (BPP) for the fossil fuel consumption, both at base load and specifically during peak load, and increasing the Service Quality Level (TMP) to customers in the related system



Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng 2 & Patuha 2 Geothermal Power Plant (GPP) Dieng 2 & Patuha 2



- Mendukung program pemerintah dalam penyediaan listrik sebesar 35.000 MW dengan masing-masing kapasitas terpasang pada unit Dieng-2 dan Patuha-2 sebesar 2 x 55 MW
- Mendukung proyek penyediaan listrik melalui pendayagunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) panas bumi
- Ramah lingkungan karena tidak menimbulkan pencemaran yang bisa berdampak pada perubahan iklim
- Meningkatnya rasio elektrifikasi akan menciptakan "multiplier effect" bagi perekonomian Indonesia

- Supporting the government's program to provide 35,000 MW of electricity with each installed capacity of Dieng-2 and Patuha-2 units of 2 x 55 MW
- Supporting electricity supply projects by utilizing geothermal New Renewable Energy (NRE)
- Environmentally friendly because it does not cause pollution which could affect the climate change
- Increasing the electrification ratio, which shall create a "multiplier effect" for the Indonesian economy

Proyek Sustainable and Reliable Energy Access Program (SREAP) di Jawa Bagian Barat dan Jawa Bagian Tengah Sustainable and Reliable Energy Access Program (SREAP) at Western Java and Central Java



- Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis *green-energy* Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara bertahap untuk fasilitas *charging station* kendaraan listrik.
- Mendukung visi pemerintah untuk peningkatan energi terbarukan, di antaranya dengan program konversi energi sisi pelanggan, khususnya pada penggunaan peralatan rumah tangga dan kendaraan bertenaga listrik.
- Meningkatkan efisiensi dan keandalan operasional distribusi diantaranya dengan penambahan jaringan tegangan menengah serta penambahan jumlah atau kapasitas transformator distribusi dan gardu induk.
- Pengembangan kapasitas *resources* terhadap pengembangan teknologi baru dalam pemanfaatan energi.
- Peningkatan pengelolaan limbah B3 dengan memiliki *warehouse* berizin dan memenuhi standar peraturan yang berlaku.

- Increasing the construction of green-energy Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU) infrastructure for electric vehicles' charging station.
- Supporting the government's vision to increase renewable energy, including customer-side energy conversion programs, specifically for the use of household appliances and electric vehicles.
- Improving the efficiency and reliability of distribution operations, including by adding medium voltage networks and increasing the number or capacity of distribution transformers and switch yards.
- Development of resource capacity towards the development of new technologies in energy utilization.
- Improving the hazardous (B3) waste management by having a licensed warehouse and fulfilling prevailing regulatory standards.



Memperluas Dampak Kebermanfaatan Melalui Penjaminan Pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Expanding the Impact of Benefit by Guaranteeing the National Economic Recovery Program (PEN)
[OJK F.26, F.28]

Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Program ini diluncurkan oleh pemerintah untuk mendukung kebijakan keuangan negara dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional.

The PEN Program has the objective to protect, maintain, and improve the economic capabilities of entrepreneurs from the real sector and the financial sector in running their businesses. This program was launched by the pemerintah to support state financial policies to save the national economy.

Portofolio Penjaminan BUMN Pada Program PEN SOE Guarantee Portfolio in the PEN Program

Merujuk kepada peraturan Menteri keuangan (PMK) No. 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 22 Desember 2020, PT PII dapat berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan untuk memberikan Jaminan Pemerintah kepada BUMN yang terdampak pandemi Covid-19 dan/atau mendapatkan penugasan dalam rangka program PEN. Sampai dengan 31 Desember Tahun 2023, PT PII telah menandatangani di antaranya 9 proyek terkait penjaminan BUMN dalam rangka Program PEN dan penjaminan dalam rangka Cadangan Pangan Pemerintah.

With reference to the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 211/PMK.08/2020 on Procedures for Providing Government Guarantees for State-Owned Enterprises to Implement the National Economic Recovery Program dated 22 December 2020, PT PII shall collaborate with the Ministry of Finance to provide Government Guarantees to SOEs affected by the COVID-19 pandemic and/or be assigned within the framework of PEN program. As of 31 December 2023, IIGF signed 9 projects related to SOE guarantees for the PEN Program and guarantees for the Government Food Reserves.

Portofolio Penjaminan BUMN dalam rangka Pelaksanaan Program PEN SOEs Guarantee Portfolio in the PEN Program Implementation

Portofolio Penjaminan Guaranteed Portfolio	Nilai obligasi dan Sukuk (Rp Triliun) Bond and sukuk value (Rp Trillion)	Nilai Pinjaman (Rp Triliun) Loan Value (Rp Trillion)
Obligasi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk Bond III of PT Waskita Karya (Persero) Tbk	1,77	-
Pinjaman PT Waskita Karya (Persero) Tbk Loan of PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-	8,08
Obligasi IV dan Sukuk Midharabab I PT Waskita Karya (Persero) Bond IV and Sukuk Midharabab I of PT Waskita Karya (Persero)	obligasi Rp2,13 triliun dan sukuk Rp1,15 triliun Bond of Rp2.13 trillion and sukuk Rp1.15 trillion	-
Pinjaman Bus Listrik PT Industri Kereta Api (Persero) Electric Bus Loan of PT Industri Kereta Api (Persero)	-	0,15
Pinjaman Perum DAMRI Loan to Perum DAMRI	-	0,97
Pinjaman PT Len Industri (Persero) Loan of PT Len Industri (Persero)	-	Eqv. 2,64
Pinjaman PT Pertamina (Persero) Loan of PT Pertamina (Persero)	-	47,19
Total	5,05	59,03

Portofolio Penjaminan BUMN Dalam Rangka Cadangan Pangan Pemerintah

Guna menunjang penyelenggaraan CPP untuk menjaga stock dalam rangka stabilitas harga pangan, PT PII dan PT RNI menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan atas pinjaman PT RNI sebesar Rp1,5 triliun.

To support the CPP implementation to maintain stocks for the food price stability, IIGF and PT RNI signed a Guarantee Agreement for PT RNI's loan of Rp1.5 trillion.

Portofolio Penjaminan Korporasi Padat Karya Pada Program PEN
Labor-Intensive Corporate Guarantee Portfolio in the PEN Program

Sejak tahun 2020, PT PII sebagai salah satu SMV Kementerian Keuangan mendapatkan perluasan mandat untuk dapat lebih berkontribusi dalam program PEN melalui skema penjaminan untuk pelaku usaha korporasi, atau juga disebut korporasi padat karya. Menyikapi PMK 27/PMK.08/2022 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, PT PII melanjutkan program-program PEN untuk melakukan penjaminan korporasi padat karya yang sebelumnya telah berakhir pada tahun 2021 melalui PMK 32/PMK.08/2021. Penugasan kembali Perseroan pada tahun 2023 ini mengalami perluasan dari yang sebelumnya hanya berfokus pada sektor infrastruktur, menjadi di sektor-sektor lain di luar infrastruktur.

Since 2020, IIGF, as one of the Ministry of Finance's SMVs, has been assigned an extended mandate, to contribute more to the PEN program through a guaranteed scheme for corporate entrepreneurs, or work-intensive corporations. In response to PMK 27/PMK.08/2022 on the Procedures for Government Guarantees for Corporate Entrepreneurs through Guarantee Business Entities Appointed to Implement the National Economic Recovery Program, IIGF continues the PEN programs by carrying out work-intensive corporate guarantees, which previously ended in 2021 pursuant to PMK 32/PMK.08/2021. The Company's reassignment in 2023 expanded compared to the previous assignment, focusing on the infrastructure sector and also other sectors in addition to the infrastructure.

Untuk sektor usaha penjaminan korporasi padat karya, Perseroan bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai penyokong utama penjaminan korporasi padat karya. Hingga 31 Desember 2023, nilai penjaminan yang diberikan sebesar Rp2,86 triliun dengan cakupan penjaminan sebesar Rp2,17 triliun termasuk cakupan porsi penjaminan bersama PT PII sebesar Rp987 miliar dari total transaksi sebanyak 27 penjaminan terdiri dari 11 Bank dan 27 terjamin yang telah berpartisipasi serta disetujui untuk diberikan dukungan *loss limit* oleh Perseroan.

For the labor-intensive corporate guarantee business sector, the Company cooperated with the Indonesian Export Financing Agency (LPEI) as the main supporter of labor-intensive corporate guarantees. As of 31 December 2023, the guarantee value provided amounted to Rp2.86 trillion, with coverage of Rp2.17 trillion, including coverage of IIGF's joint guarantee of Rp987 billion from a total of 27 guarantee transactions, consisting of 11 Banks and 27 Guarantees, who have participated and approved by the Company to have loss limit support.

Dukungan dan Langkah Awal Perseroan Dalam Menangani Tantangan Keberlanjutan dan Perubahan Iklim

The Company's Support and Early Phases in Addressing Sustainability and Climate Change Challenges

[GRI 201-2] [S2-14a, 25.a, 25.b, 25.c]

Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keadilan bagi masyarakat. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, pembangunan ini berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Dampak negatif tersebut dapat diminimalkan dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, menjaga keseimbangan ekologi dan kelestarian lingkungan, serta melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dan desain proyek. Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai, membawa manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.

Infrastructure development has the objective to increase economic growth and justice for the community. However, without proper management, the development may cause significant environmental and social impacts. Such negative impacts can be minimized by managing natural resources, maintaining ecological balance and environmental sustainability, and involving communities in the planning and design phases of the projects. Thus, sustainable development can be achieved, providing long-term benefits to the environment and society.



Pembangunan Development



VS



Keberlanjutan Sustainability



VS



Pertumbuhan Ekonomi vs Keseimbangan Ekologi dan Kesehatan Lingkungan

Economic Growth vs
Ecological Balance and
Environmental Health

- Polusi (udara, air, tanah, dll) yang muncul dari kegiatan konstruksi dan operasi dapat mengakibatkan penurunan kualitas udara, air dan tanah yang mengakibatkan penurunan kesehatan masyarakat dan gangguan biota air, tumbuhan dan hewan. Dampak ini dapat dimitigasi dengan penerapan teknologi dan pengelolaan bahan pencemar yang dirancang sejak perencanaan proyek.
- Kelayakan ekonomi proyek tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial yang dianggap *sunk cost* sehingga mengabaikan pengelolaan yang tepat.
- Belum mempertimbangkan biaya pengelolaan lingkungan dan sosial sehingga sering menimbulkan penolakan masyarakat terdampak.
- Pollution (air, water, land, etc.) arising from construction and operations that can result in a decrease in air, water, and land quality, which will result in a decline in public health and disturbance of aquatic biota, plants, and animals. This impact can be mitigated by applying technology and managing pollutants designed since the planning of the project.
- The project's economic feasibility without considering environmental and social aspects is considered as sunk costs, thereby ignoring proper management.
- Not considering the costs of environmental and social management, which often results in rejection by the affected communities.



VS



Keanekaragaman Hayati vs Pembangunan

Biodiversity vs Development

- Pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi keanekaragaman hayati ketika trase melintasi kawasan bernilai keanekaragaman hayati tinggi. Hal ini dapat dimitigasi dengan melakukan kajian alternatif untuk menghindari atau meminimalisir kawasan yang dilintasi trase atau menggunakan desain teknis *elevated*, koridor satwa atau pendekatan teknis lainnya.
- Konflik antara satwa liar dengan manusia yang seringkali menyebabkan perburuan terhadap satwa liar tersebut.
- Perdagangan satwa liar yang didorong oleh kebutuhan ekonomi dan hilangnya habitat karena terjadi perubahan tata guna lahan hutan.
- Infrastructure development, such as toll roads, has the potential to have a negative impact on biodiversity when the route crosses areas with high biodiversity value. This can be mitigated by conducting alternative studies to avoid or minimize areas crossed by the trail, or using elevated technical designs, animal corridors, or other technical approaches.
- Conflict between wild animals and humans, often leads to these wild animals' hunting.
- The trading of wild animals is driven by economic needs and loss of habitat due to changes in forest land utilization.



VS



Pembangunan vs Keadilan Sosial

Development vs
Social Justice

- Pembangunan yang bersifat eksklusif dapat mengakibatkan kecemburuan dan kesenjangan sosial. Hal ini dapat dimitigasi dengan melibatkan masyarakat dalam konsultasi publik, melakukan kajian sosial ekonomi dan budaya serta mempertimbangkan kesetaraan *gender*, sehingga pembangunan diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan.
- Ketimpangan pembangunan antar wilayah, contoh wilayah perkotaan dengan pelosok.
- Akuisisi lahan masyarakat dengan tekanan dan paksaan sehingga menimbulkan trauma dan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat.
- Exclusive development may result in social envy and inequality. This can be mitigated by involving the community in public consultations, conducting socio-economic and cultural studies, and considering gender equality, thereby the development can be beneficial for all.
- Unequal development between regions, for example urban and remote areas.
- Land acquisition from the community through pressure and coercion that cause trauma and suffering for the community.



Selaras dengan misi pemerintah, PT PII berkomitmen untuk memastikan dilakukannya pengelolaan aspek lingkungan dan sosial pada proyek-proyek yang diberikan penjaminan dengan membuat kerangka evaluasi proyek yang memuat Prinsip Perlindungan Lingkungan Sosial, yang menjadi acuan kerja dalam penilaian kelayakan proyek. Pengelolaan yang dilakukan PT PII tersebut bertujuan untuk memastikan proyek memenuhi kriteria kelayakan penjaminan dari aspek lingkungan dan sosial dengan memastikan potensi dampak dan risiko lingkungan sosial dan iklim dari proyek telah diidentifikasi, dikaji dan disiapkan rencana mitigasinya.

Sebagai tahap awal, PT PII telah melakukan pendekatan identifikasi risiko fisik dan transisi. Risiko iklim ini mencakup potensi dampak bencana alam, perubahan pola cuaca, dan kenaikan permukaan air laut. Sedangkan risiko transisi yang terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah terkait pengurangan emisi karbon dan teknologi rendah karbon. Setelah mengidentifikasi dan menilai risiko tersebut, PT PII memprioritaskan tindakan mitigasi yang diperlukan untuk memastikan risiko-risiko tersebut dapat diminimalkan dan dihilangkan.

In line with the government's mission, IIGF is committed to ensuring that environmental and social aspects are managed in projects with guarantees by creating a project evaluation framework that contains the Social Environmental Protection Principles, which is a working reference in assessing project feasibility. IIGF manages these aspects to ensure that the project meets the guarantee eligibility criteria from environmental and social aspects by ensuring that the project's potential social environmental and climate impacts and risks have been identified, studied, and mitigated.

As an initial stage, IIGF has approached the identification of physical and transitional risks. These climate risks include the potential impact of natural disasters, changes in weather patterns, and sea level rise. While the transition risk associated with changes in government policies related to reducing carbon emissions and low-carbon technologies. After identifying and assessing such risks, IIGF prioritizes the necessary mitigation actions to ensure that these risks can be minimized and eliminated.





Untuk memantau risiko dan peluang ini secara efektif, PT PII menggunakan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework/ESMF*) yang telah disusun. ESMF memastikan bahwa semua risiko lingkungan, sosial dan iklim dikelola dengan baik, dengan fokus pada kelayakan ekonomi, finansial, dan lingkungan. Dengan demikian, PT PII tidak hanya melindungi nilai investasi tetapi juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, serta menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Sebagai dukungan dan inisiatif PT PII dalam mengelola risiko iklim serta memitigasi isu di tataran korporasi dan proyek infrastruktur, PT PII melakukan beberapa hal dan inisiatif yang dilakukan sepanjang tahun 2023 yakni:

IIGF uses the Environmental and Social Management Framework (ESMF) that has been formulated to effectively monitor these risks and opportunities. ESMF ensures that all environmental, social, and climate risks are properly managed, with a focus on economic, financial, and environmental feasibility. Thus, IIGF not only protects the value of investment but also contributes to sustainable and environmentally sound infrastructure development, supports climate change mitigation efforts, and creates long-term benefits for society and the environment.

As IIGF's support and initiatives in managing climate risks and mitigating issues at the corporate and infrastructure project levels, IIGF implemented several initiatives in 2023:





Inisiatif Dukungan PT PII Untuk Pengendalian Perubahan Iklim
IIGF's Support Initiatives for Climate Change Control
[GRI 201-2]

Nama Program Program	Deskripsi Description
ESG Benchmark dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) di Sydney ESG Benchmark with Indonesia Australia Partnership for Infrastructure (KIAT) in Sydney	- Menindaklanjuti penerbitan ESG Framework dan Manual oleh Kementerian Keuangan di tahun 2022 serta arahan untuk mengimplementasikan aspek LST dalam pemberian dukungan fiskal oleh Kementerian Keuangan dan SMV Kementerian Keuangan, termasuk PT PII sebagai <i>single window</i> penjaminan KPBU; - PT PII melakukan <i>enhancement</i> proses bisnis agar sesuai dengan kebijakan penerapan LST oleh Kementerian Keuangan, dengan memperkuat pengetahuan dan keahlian tentang aspek LST melalui pelatihan atau <i>capacity building</i>; - Memahami dan berbagi pengalaman implementasi LST di sektor infrastruktur oleh Pemerintah Australia dan pihak swasta; - Berbagi potensi investasi di sektor infrastruktur dengan implementasi LST oleh Pemerintah Indonesia untuk mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan. - Following up on the issuance of the ESG Framework and Manual by the Ministry of Finance in 2022 and the direction to implement ESG aspects in the provision of fiscal support by the Ministry of Finance and the Ministry of Finance's SMVs, including IIGF as a single window for PPP guarantees; - IIGF enhances business processes to comply with the Ministry of Finance's ESG policy, by strengthening knowledge and expertise on ESG aspects through training or capacity building; - Understanding and sharing experiences of ESG in the infrastructure sector by the Australian Government and private parties; - Sharing potential investment in the infrastructure sector with ESG by the Government of Indonesia to encourage sustainable infrastructure development.
ESG Workshop Bersama Stakeholder ESG Workshop with Stakeholders	PT PII mendukung implementasi LST dengan menggelar <i>workshop</i> "Kebijakan Implementasi ESG dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan" pada 12 Desember 2023. <i>Workshop</i> ini merupakan tindak lanjut dari proses implementasi LST untuk penyediaan infrastruktur dan dukungan pemerintah. Selain itu, PT PII juga menyiapkan SDM melalui <i>ESG Learning Program</i>, melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Bappenas, dan LKPP, dengan dukungan dari Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) guna memperkuat implementasi LST. IIGF supports the ESG implementation by holding "ESG Implementation Policy in Encouraging Sustainable Infrastructure Development" on 12 December 2023. This workshop is a follow-up to the ESG process for infrastructure provision and government support. In addition, IIGF prepares HR through ESG Learning Program, involving the Ministry of Finance, Ministry of PUPR, Bappenas, and LKPP, with support from the Indonesia Australia Partnership for Infrastructure (KIAT) to strengthen ESG implementation.





Manajemen Risiko Keberlanjutan

Sustainability Risk Management

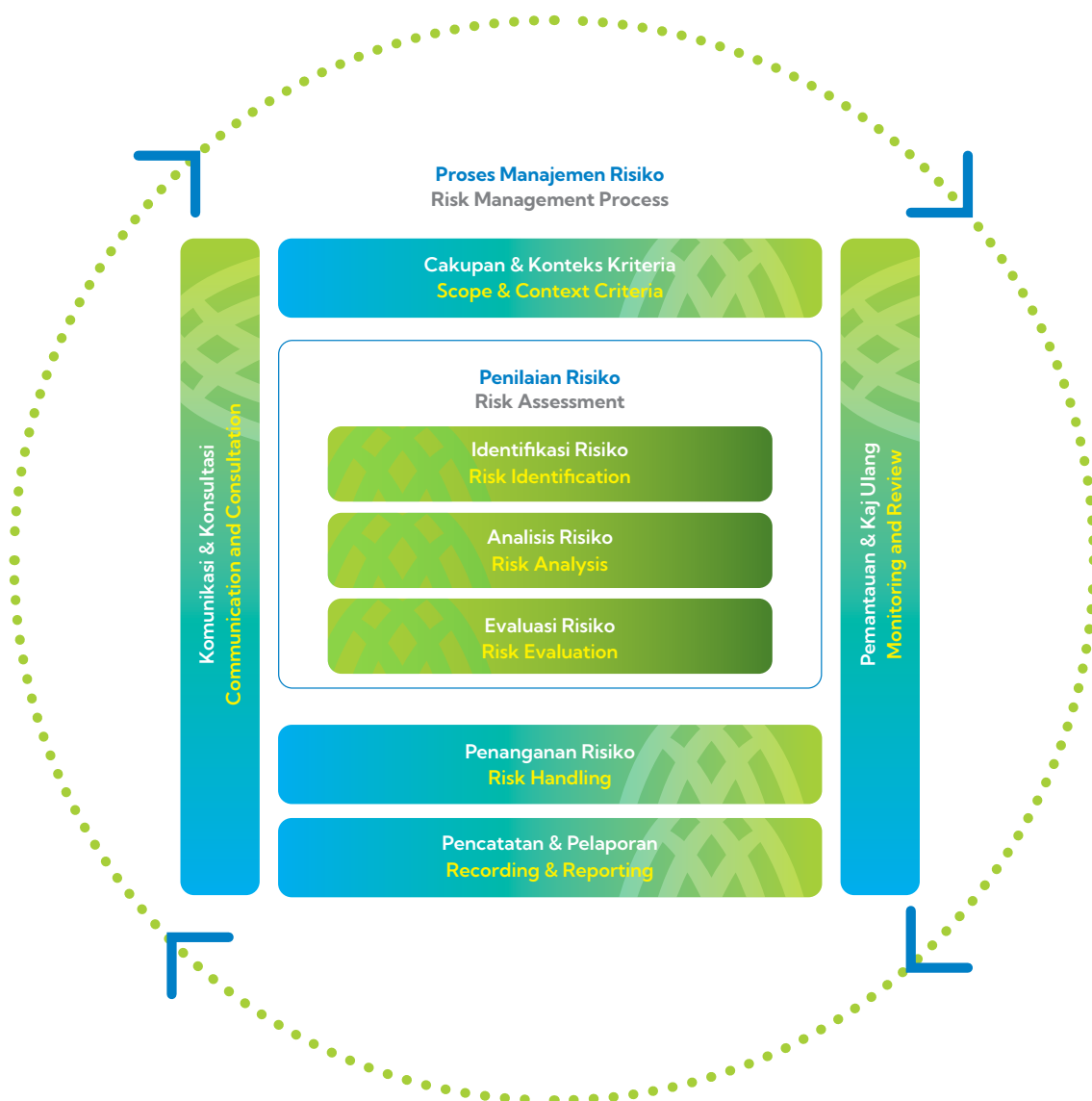
[GRI 2-25] [OJK E.3] [S1-44a, 44b] [S2-25a, 25b, 25c]

Dalam mengemban mandat-mandatnya, Perseroan menghadapi perkembangan bisnis yang semakin dinamis. Oleh karena itu, Perseroan memperkuat penerapan manajemen risiko baik dalam pelaksanaan proyek-proyek maupun dalam pengelolaan korporasi.

Dalam penerapan manajemen risiko korporasi, Perseroan memiliki Kerangka Kerja Manajemen Risiko Perseroan (*Enterprise Risk Management/ERM Framework*) yang disusun secara holistik dan terintegrasi dengan strategi dan proses bisnis yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan manajemen risiko secara efektif dan efisien. Hal ini diterapkan guna mendukung Perseroan dalam mengantisipasi, memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham, mengelola modal secara komprehensif, serta memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

In carrying out its mandate, the Company faced increasingly dynamic business developments. Therefore, the Company strengthens risk management, both in project implementation and corporate management.

In implementing corporate risk management, the Company has an Enterprise Risk Management (ERM) Framework that is prepared holistically and integrated with strategies and business processes as a reference in implementing risk management activities effectively and efficiently. This is implemented to support the Company in anticipating, maximizing added value for shareholders, managing capital comprehensively, and ensuring profitability and sustainable business growth.





Pengelolaan risiko Perseroan dilakukan oleh Divisi Risk Management yang secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas manajemen risiko korporat melalui pengawasan dan pemantauan pergerakan tingkat risiko dalam profil risiko Perseroan. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Perseroan kemudian melakukan analisis terhadap efektivitas perencanaan pengelolaan risiko yang sudah dirumuskan dan diterapkan. Hasil laporan profil risiko ini disampaikan kepada Direksi dan Komisaris secara berkala.

Dewan Komisaris juga telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi penerapan manajemen risiko serta memberikan masukan dan saran terkait efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan. Kemudian, secara berkala diadakan rapat dan diskusi bersama antara Divisi Risk Management dan Komite Pemantau Risiko guna membahas penerapan dan program kerja terkait manajemen risiko dan tindak lanjut atas masukan yang disampaikan. [GRI 2-12]

Informasi terkait manajemen risiko Perseroan secara lengkap sudah dijelaskan pada Laporan Tahunan PT PII Tahun 2023 Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Manajemen Risiko Perseroan halaman 401.

The Company's risk management is conducted by the Risk Management Division, which periodically evaluates the effectiveness of corporate risk management through supervision and monitoring of risk level movements in the Company's risk profile. Based on the results, the Company then analyses the effectiveness of the risk management plan that has been formulated and implemented. The results of this risk profile report are submitted to the Board of Directors and the Board of Commissioners regularly.

The Board of Commissioners established a Risk Monitoring Committee to assist the Board of Commissioners in supervising risk management as well as providing input and advice regarding the effectiveness of risk management in the Company. Periodically, joint meetings and discussions are held between the Risk Management Division and the Risk Monitoring Committee to discuss the implementation and work programs related to risk management and follow-up on the inputs submitted. [GRI 2-12]

Information related to the Company's risk management is elaborated in 2023 Annual Report of IIGF in the Corporate Governance chapter of the Company's Risk Management page 401.

Manajemen Risiko pada Aspek Lingkungan & Sosial pada Proyek Infrastruktur Perseroan

Risk Management on Environmental & Social Aspects of the Company's Infrastructure Projects

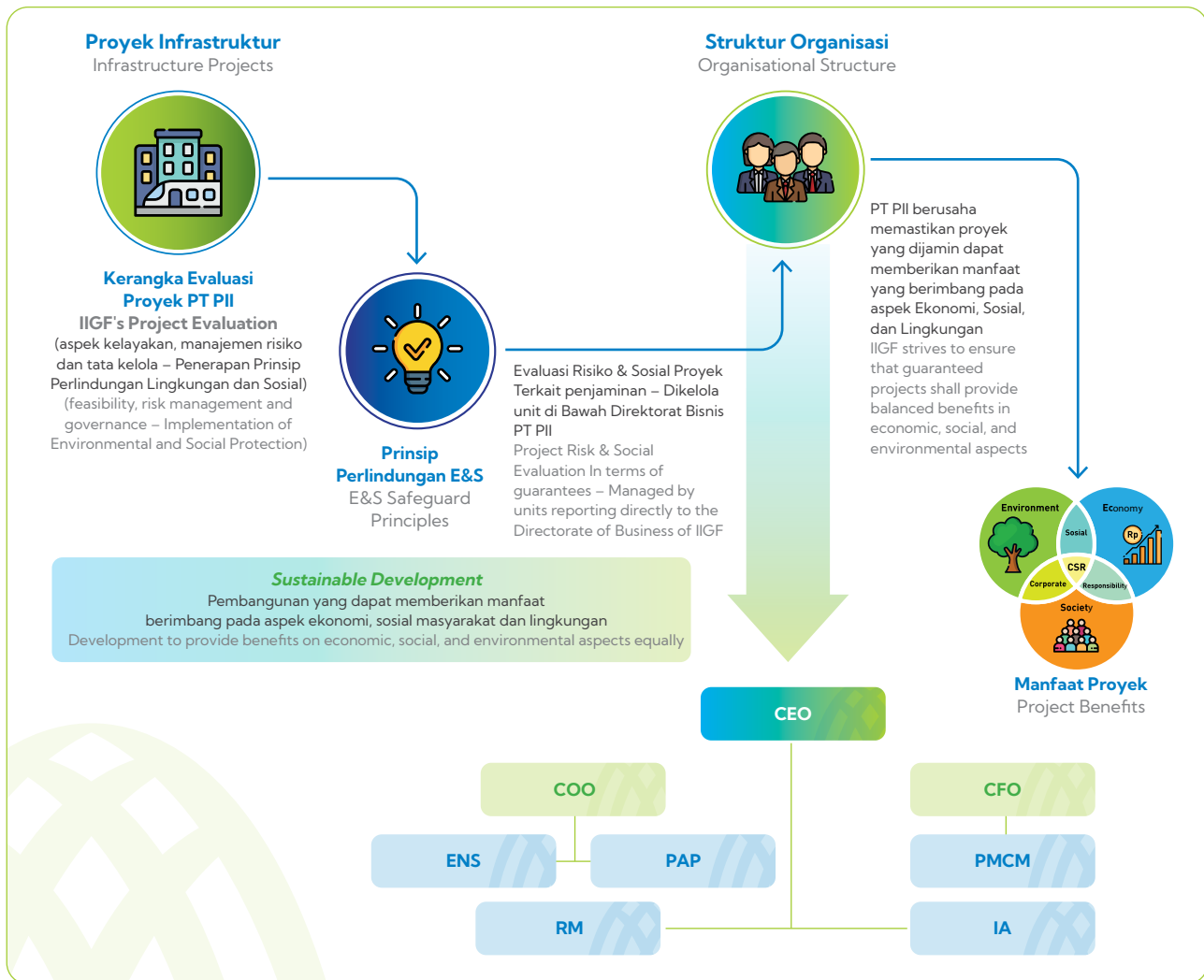
[GRI 2-23, 2-24 2-25] [OJK E.3] [S1-44c]

Kerangka kerja manajemen risiko Perseroan diturunkan pada kebijakan dan/atau prosedur yang mengatur proses bisnis Perseroan. Pada proses penjaminan KPBU dan non-KPBU, identifikasi, analisis atau evaluasi, dan mitigasi risiko menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis baik pada tahapan pra-penandatanganan perjanjian penjaminan maupun pasca-penandatanganan perjanjian, yaitu dalam proses *monitoring* sepanjang berjalannya proyek. Berdasarkan PMK No. 260/PMK.011/2010 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Perseroan menyusun Acuan Alokasi Risiko yang menjadi acuan Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dalam proyek KPBU dalam mengalokasikan risiko kepada pihak yang tepat, serta menyusun rencana mitigasi risiko dalam rangka penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dokumen Acuan Alokasi Risiko telah diterbitkan dan dimutakhirkan secara berkala serta dapat diakses oleh publik melalui situs *website* resmi Perseroan (<https://www.ptpii.co.id/alokasi-risiko>).

Pada pengelolaan aspek sosial dan lingkungan, PT PII menyusun dan menerapkan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) sebagai pedoman untuk memastikan risiko lingkungan dan sosial (*Environment & Social/E&S*) proyek dikelola dengan baik. ESMF berisi panduan dalam melakukan manajemen risiko E&S terkait proyek infrastruktur yang akan dijamin oleh PT PII, serta aspek kesehatan dan keselamatan tenaga kerja pada proyek yang akan mendapatkan fasilitas penjaminan dari PT PII.

The Company's risk management framework is derived from policies and/or procedures governing the Company's business processes. In the PPP and non-PPP guarantee processes, identification, analysis or evaluation, and mitigation of risks are the basis for strategic decision making at the pre-signing guarantee agreement stage and post-signing of the agreement, i.e., in the monitoring process throughout the progress of the project. Based on the PMK No. 260/PMK.011/2010 in 2010 concerning Guidelines for the Implementation of Infrastructure Guarantee in Government Cooperation Projects with Business Entities (PPP), the Company prepares Risk Allocation Guidelines which serve as a reference for the Person in Charge of Cooperation Projects (PJPK) in PPP projects in allocating risks to the right parties, and preparing risk mitigation plans in order to provide infrastructure in accordance with the needs of the community. The Risk Allocation Reference Document has been issued and updated regularly, and can be accessed by the public through the Company's official website (<https://www.ptpii.co.id/alokasi-risiko>).

In terms of social and environmental aspects management, IIGF prepares and implements the Environmental and Social Management Framework (ESMF) as a guideline to ensure that the project's Environmental and Social (E&S) risks are well managed. ESMF contains guidelines in conducting E&S risk management related to infrastructure projects to be guaranteed by IIGF, as well as occupational health and safety aspects on projects that will obtain guarantee facilities from IIGF.



PT PII memperkuat Kerangka ESMF dengan merujuk pada peraturan perlindungan lingkungan dan sosial Pemerintah Indonesia serta Prinsip-Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial PT PII yang berfungsi sebagai dasar baru untuk melakukan penilaian kelayakan lingkungan dan sosial selama proses penyaringan dan penilaian proyek.

IIGF strengthens the ESMF Framework with reference to the Government of Indonesia's environmental and social protection regulations and IIGF's Environmental and Social Safeguards Principles as a new basis for conducting environmental and social feasibility assessments during the project screening and appraisal process.

Dokumen ESMF PT PII telah mengalami beberapa kali revisi, dengan revisi terakhir pada tahun 2019 yang disetujui oleh tiga Direksi senior, yaitu Direktur Utama, Direktur Eksekutif Bisnis, dan Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan bagi PT PII dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, dengan tujuan untuk mematuhi peraturan pemerintah Indonesia dan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial, serta menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengukur, memantau, dan memitigasi risiko lingkungan dan sosial secara memadai. Uji tuntas dilakukan melalui prosedur penapisan proyek dan penilaian aspek kelayakan lingkungan dan sosial proyek yang akan dijamin. Dokumen ESMF tersedia dalam *website* PT PII dan dapat diakses pada tautan berikut: https://www.ptpii.co.id/cfind/source/files/marketing-tools/esmf-pt-pii_2019_final_sign.pdf

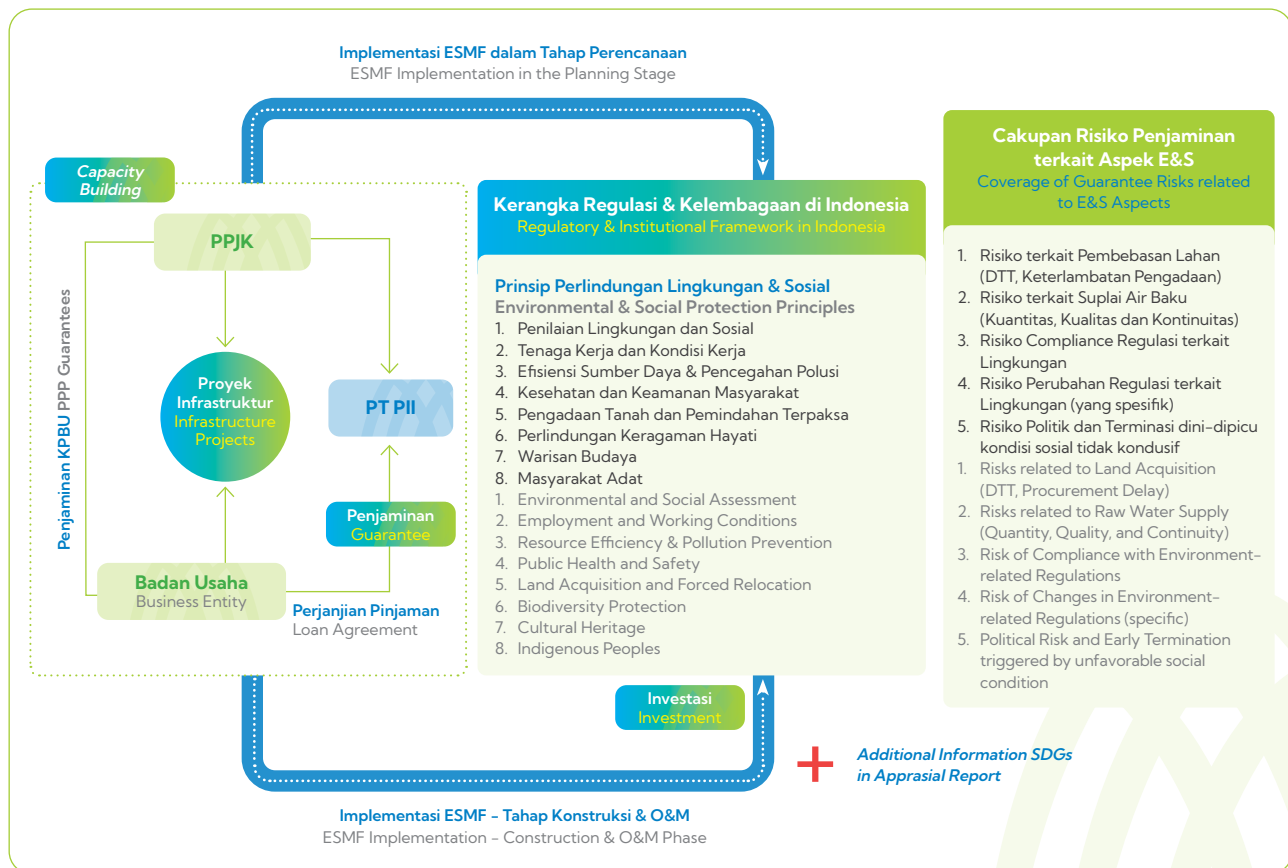
IIGF's ESMF document has undergone several revisions, with the latest revision in 2019 approved by three senior Directors, namely the President Director, Executive Director of Business, and Executive Director of Finance and Project Appraisal. This document serves as a reference for IIGF in carrying out its business activities, with the aim of complying with Indonesian government regulations and environmental and social protection principles, as well as applying the precautionary principle to adequately measure, monitor, and mitigate environmental and social risks. Due diligence is conducted through project screening procedures and assessment of the environmental and social feasibility aspects of the project to be guaranteed. The ESMF document is available on the IIGF website and can be accessed at the following link: https://www.ptpii.co.id/cfind/source/files/marketing-tools/esmf-pt-pii_2019_final_sign.pdf



ESMF merinci kebijakan, prosedur, struktur kelembagaan, dan alur kerja yang digunakan oleh PT PII untuk memastikan bahwa risiko lingkungan dan sosial dari proyek yang dijamin dapat diminimalisir atau dimitigasi. Dokumen ini tersedia di situs web PT PII dan telah disosialisasikan kepada pekerja dan mitra bisnis melalui berbagai forum, termasuk *workshop* dan publikasi di media sosial seperti Instagram. ESMF juga menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan proyek KPBU.

The ESMF details the policies, procedures, institutional structures, and workflows used by IIGF to ensure that the environmental and social risks of the guaranteed project are minimized or mitigated. This document is available on IIGF's website and has been socialized to employees and business partners through various forums, including workshops and publications on social media such as Instagram. The ESMF is also an important guideline in the implementation of PPP projects.

Implementasi Framework ESMF ESMF Implementation Framework [S1-44a, 44c]



Dokumen ESMF ditinjau secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun sekali atau setiap kali diperlukan. Selanjutnya dalam pembangunan dan pengoperasian proyek infrastruktur, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan Badan Usaha Pelaksana (BUP) berkewajiban untuk memenuhi seluruh peraturan dan persyaratan yang terkait dengan perlindungan sosial dan pelestarian lingkungan sesuai dengan alokasi risiko yang telah ditentukan.

ESMF documents are reviewed regularly, at least once every three (3) years or whenever necessary. Further, in the construction and operation of infrastructure projects, the Government Contracting Agency (GCA) and the Implementing Business Entity (BUP) shall fulfill all regulations and requirements related to social protection and environmental preservation in accordance with the predetermined risk allocation.



Alokasi risiko yang transparan dan terukur menjadi pondasi dan elemen utama yang mendasari kontrak kerja sama bagi para pihak yang terlibat dan berkontribusi terhadap kesuksesan penyelesaian proyek di masa konstruksi hingga operasi. Mitigasi dan alokasi risiko yang optimum di antara para pihak diharapkan semakin meningkatkan keyakinan bagi pihak swasta dan lembaga pembiayaan dalam berinvestasi dan memberikan pembiayaan pada proyek infrastruktur Indonesia.

Transparent and measurable risk allocation is the foundation and main element as the basis of cooperation contract for the parties involved and contribute to the successful completion of the project, from construction up to operation. Optimum risk mitigation and allocation between the parties shall further increase confidence for the private sector and financing institutions in investing and providing financing for Indonesian infrastructure projects.

Layanan Setara untuk Pelanggan

Equal Service for Customers

[OJK F.17]

Pelanggan merupakan salah satu pemangku kepentingan utama bagi PT PII. Hal ini mendorong Perseroan untuk terus memberikan produk dan layanan terbaik dan setara kepada seluruh pelanggan. Saat ini, PT PII telah memberikan penjaminan kepada 22 kategori sektor dalam rangka akselerasi pembangunan infrastruktur Indonesia. Dalam memberikan produk dan layanan, PT PII berupaya memenuhi kebutuhan dari berbagai segmen pelanggan dengan memastikan bahwa setiap calon proyek yang akan dijaminakan diperlakukan secara profesional dan berintegritas. Perseroan berkomitmen menjunjung kesetaraan dalam pelayanan yang adil, konsisten, dan berkualitas pada semua jenis penjaminan yang diberikan, tanpa memandang perbedaan atau diskriminasi terhadap pelanggan. Melalui pendekatan ini, PT PII memastikan terwujudnya hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan, baik dari sisi badan usaha maupun pemerintah.

[OJK F.17]

Customers are one of IIGF's main stakeholders. This encourages the Company to keep providing the best and equal products and services to all customers. To date, IIGF has provided guarantees to 22 sector categories to accelerate Indonesia's infrastructure development. In providing products and services, IIGF strives to fulfill the needs of various customer segments by ensuring that each prospective project to be guaranteed is treated professionally and with integrity. The Company is committed to upholding fairness, consistency, and quality of services in all types of services provided without discriminating the customers. With this approach, IIGF ensures the actualization of mutually beneficial and sustainable relationships, both for business entities and the government. [OJK F.17]

Survei Kepuasan Pelanggan

Customer Satisfaction Survey

[OJK F.30]

PT PII secara berkala melaksanakan survei kepuasan pelanggan berupa *stakeholders survey* kepada vendor/rekanan Perseroan guna memperoleh feedback terkait kinerja Perseroan. Survei ini dilaksanakan PT PII sebagai upaya perseroan untuk memahami pandangan terhadap layanan yang diberikan. Melalui interaksi terstruktur ini, PT PII mampu mengidentifikasi area perbaikan, mengukur tingkat kepuasan, serta meningkatkan kualitas keseluruhan produk dan layanan yang diberikan.

Pada tahun 2023, rata-rata persepsi kinerja PT PII di mata *existing stakeholder* sebesar 4,50 dan masuk dalam kategori "Sangat Teredukasi". Sementara itu rata-rata persepsi kinerja PT PII di mata *potential stakeholders* sebesar 4,02 atau masuk dalam kategori "Sangat Positif". Jika dirangkum, maka indeks pengetahuan dan persepsi kinerja dari para *stakeholder* baik eksisting maupun potensial PT PII adalah sebesar 4,26 dari skala 5 yang berada pada level "Satisfactory".

IIGF regularly conducts customer satisfaction survey in the form of stakeholder surveys to the Company's vendors/partners to obtain feedback regarding the Company's performance. IIGF conducts the survey as its effort to understand the feedback to the services provided. Through this structured interaction, IIGF can identify areas of improvement, assess satisfaction levels, and improve the overall quality of the products and services provided.

In 2023, the existing stakeholders assessed IIGF's performance at 4.50, or "Very Educated". Meanwhile, the potential stakeholders assessed PT PII's performance at 4.02, or "Very Positive". In summary, the knowledge index and perceived performance of IIGF from existing and potential stakeholder is 4.26 out of 5, or "Satisfactory".



Memperluas Dampak, Menghadirkan Potensi Sumber Daya Manusia Unggul

Expanding Impact, Unveiling Excellent Human Resources Potential

Membangun potensi sumber daya manusia merupakan langkah strategis yang dilakukan PT PII untuk mendorong kontribusi optimal dalam meraih kesuksesan Perseroan. Melalui berbagai program inisiasi seperti berinvestasi pada program pelatihan dan pengembangan karyawan secara konsisten, kepedulian atas peningkatan kesejahteraan karyawan dan terus memastikan terciptanya lingkungan serta budaya kerja yang positif, PT PII optimis dapat membentuk tim yang solid dan adaptif sehingga Perseroan siap menghadapi tantangan dan perubahan dalam dunia industri ke depannya.

Building human resource potential is a strategic step taken by IIGF to encourage optimal contribution to achieving the Company's success. Through various initiation programs, such as investing in employee training and development programs consistently, providing enhancement of employee welfare and ensuring the creation of a positive working environment and culture, IIGF is optimistic that the Company shall establish a solid and adaptive team so that the Company is ready to face challenges and dynamics in the industrial world in the future.



Pendekatan Manajemen Topik Sumber Daya Manusia

Management's Approach to Human Resources
[GRI 3-3]

PENGELOLAAN DAMPAK



IMPACT MANAGEMENT

PT PII telah melakukan pengelolaan dampak terkait pengelolaan SDM untuk meminimalkan dampak negatif potensial berupa *overwork*, remunerasi yang tidak sesuai, maupun diskriminasi yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pencapaian target Perseroan. Untuk mencegah dampak negatif tersebut, PT PII telah melakukan manajemen dampak terkait ketenagakerjaan dengan menerapkan manajemen talenta berbasis data, pengoptimalan *engagement management* serta secara terus menerus melakukan perbaikan dan penyesuaian proses bisnis. Dengan pengelolaan dampak yang dilakukan ini, Perseroan berhasil menghadirkan dampak positif kepada karyawan seperti peningkatan produktivitas karyawan, reputasi perusahaan terus terjaga dengan baik, serta peningkatan kompetensi karyawan yang berdampak pada peningkatan kinerja individu dan perseroan. [GRI 2-23, 2-27] [GRI 3-3]

IIGF carried out impact management related to HR management to minimize potential negative impacts in the form of *overwork*, inappropriate remuneration, and discrimination, which can indirectly affect the Company's target achievement. IIGF carried out impact management related to employment by implementing data-based talent management, optimizing engagement management, and continuously improving and adjusting business processes to prevent these negative impacts. Under such impact management, the Company succeeded in bringing positive impacts to employees, such as enhanced employee productivity, well-maintained company reputation, and increased employee competence, which has an impact on improving individual and company performance. [GRI 2-23, 2-27] [GRI 3-3]

KEBIJAKAN YANG TELAH DIKEMBANGKAN SECARA KHUSUS



SPECIFICALLY DEVELOPED POLICIES

Kebijakan PII terkait Ketenagakerjaan

- > Peraturan Perusahaan Tahun 2022-2024;
- > Kebijakan Pengelolaan Kegiatan *Human Capital*;
- > Surat Keputusan Direksi tentang Program Pelatihan Bagi Karyawan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);

IIGF's policies on Employment

- > 2022-2024 Company Regulation;
- > Human Capital Activity Management Policy;
- > The Board of Directors' Decree on Training Programs for Employees of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);



- › Surat Keputusan Direksi tentang Fasilitas Kesehatan dan Asuransi Jiwa/Kecelakaan Karyawan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
- › Surat Keputusan tentang Fasilitas Makan Siang

Kebijakan PII terkait Ketenagakerjaan mengacu pada Ketentuan Umum:

- › Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- › Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023

- › The Board of Directors' Decree on Health Benefits and Life/Accident Insurance for Employees of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
- › Decree on Meal Facilities

IIGF's policies on Employment refer to the General Provisions:

- › Law No. 6 of 2023 on the Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation
- › Minister of Manpower Regulation No. 18 of 2022 on the Minimum Wage Determination for 2023

KOMITMEN



COMMITMENT

- › Memastikan pengelolaan SDM dijalankan dengan fokus yang baik agar dapat mendukung tercapainya tujuan Perseroan
- › Memastikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak karyawan sesuai dengan aturan dan peraturan berlaku di Indonesia
- › Menjalankan sistem rekrutmen secara adil, wajar dan konsisten berdasarkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dijalankan
- › Menerapkan sistem remunerasi karyawan yang kompetitif dan memenuhi ketentuan tingkat upah minimum yang berlaku
- › Meningkatkan produktivitas karyawan dengan pemberian kesejahteraan yang baik
- › Meningkatkan kompetensi dan karir karyawan untuk mencapai kinerja yang *excellence*
- › Memberikan kesempatan pengembangan diri yang sama bagi setiap karyawan
- › Menjalankan sistem promosi dan pengembangan karir secara adil, wajar dan konsisten berdasarkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dijalankan

- › Ensuring HR management is focused to support the achievement of Company's objective
- › Ensuring the protection and fulfillment of employee rights in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia
- › Conducting a fair, reasonable, and consistent competency-based recruitment system in accordance with the business' needs
- › Having a competitive employee remuneration system and complying with applicable minimum wage
- › Enhancing employees' productivity by providing good welfare
- › Improving employees' competency and career to achieve excellent performance
- › Providing equal opportunities for self-development of every employee
- › Conducting a fair, reasonable, and consistent promotion system and career development based on competency in accordance with the business' needs

TUJUAN/TARGET



OBJECTIVES/TARGETS

- › Menjalankan pengelolaan karyawan secara baik untuk meningkatkan *engagement* karyawan
- › Pengelolaan karyawan selaras dengan strategi Perseroan, tentunya untuk meningkatkan kinerja Perseroan dan meningkatkan kompetensi karyawan
- › Mengembangkan karyawan untuk mencapai tujuan karir yang diharapkan dan atau direncanakan
- › Pelatihan dan pendidikan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi karyawan sesuai dengan level kompetensi yang dipersyaratkan dan dapat menunjang kinerja yang maksimal
- › Pelatihan dan pendidikan juga ditujukan untuk mengembangkan karyawan sesuai dengan *Individual Development Plan* yang telah disusun sebelumnya
- › Peningkatan kinerja karyawan

- › Implementing good employee management to increase employee engagement
- › Employee management is in line with the Company's strategy, to improve the Company's performance and improve employee competency
- › Developing employees to achieve expected and/or planned career goals
- › Training and education are carried out to enhance employee competence in accordance with the required level of competence to support maximum performance
- › Training and education also have the objective to develop employees in accordance with the prepared Individual Development Plan
- › Improved employee performance



EVALUASI DAN EFEKTIVITAS TINDAKAN UNTUK MENGELOLA DAMPAK

- Efektivitas pengelolaan topik ini ditinjau melalui pelaksanaan *Salary Survey* dan juga *Employee Engagement Survey*
- Efektivitas pengelolaan pelatihan dan pendidikan ditinjau melalui pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan Divisi Human Capital and Organization Development atas kegiatan pembelajaran melalui *employee portal* yang dilaporkan karyawan setelah selesai melaksanakan pengembangan dan pelatihan



EVALUATION AND EFFECTIVENESS OF IMPACT MANAGEMENT MEASURES

- The effectiveness of this topic's management is reviewed through the Salary Survey and Employee Engagement Survey
- The effectiveness of training and education management is reviewed through the monitoring and evaluation implemented by the Human Capital and Organizational Development Division on learning activities through the employee portal, which are reported by employees after completing training and development

PENANGGUNG JAWAB

- Divisi Human Capital and Organization Development di bawah Direktur Keuangan



PERSON IN CHARGE

- Human Capital and Organization Development Division reporting directly to the Finance Director

ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran biaya keseluruhan manajemen SDM tahun 2023 adalah sebesar Rp172,84 miliar dari target Perseroan sebesar Rp164,39 miliar. Selain itu, PT PII telah mengalokasikan anggaran untuk investasi pelatihan dan pendidikan karyawan tahun 2023 sebesar Rp4,01 miliar dari target Perseroan sebesar Rp4,66 miliar



BUDGET ALLOCATION

The budget allocation for the total cost of HR management in 2023 was Rp172.84 billion from the Company's target of Rp164.39 billion. In addition, IIGF allocated Rp4.01 billion for investment in employee training and education in 2023 out of the Company's target of Rp4.66 billion

KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN DAMPAK

Pemerintah

- Membuat kebijakan terkait dengan ketenagakerjaan sebagai acuan dalam penetapan sistem kepegawaian yang akan digunakan di lembaga/instansi/ Perseroan

Badan Tata Kelola

- Menetapkan kebijakan kesetaraan dan memastikan implementasinya di seluruh organisasi
- Menetapkan struktur remunerasi yang adil dan kompetitif
- Menetapkan visi dan anggaran untuk program pelatihan dan pengembangan

Divisi HCOD PT PII

- Melakukan *review* dan perbaikan terkait dengan kebijakan pengelolaan kepegawaian di Perseroan
- Melakukan *review*, analisa dan perbaikan terhadap sistem yang berjalan

Karyawan PT PII

- Memberikan masukan dan *feedback* terkait dengan pengelolaan kepegawaian di Perseroan



STAKEHOLDERS' ENGAGEMENT IN MANAGING IMPACT

Government

- Establishing policies related to employment as a reference to determine staffing system in institutions/agencies/Companies

Governance Body

- Establish an equality policy and ensure its implementation across the organization
- Establish a fair and competitive remuneration structure
- Establish a vision and budget for training and development programs

IIGF HCOD Division

- Reviewing and conducting improvements related to employment management policies in the Company
- Reviewing, analyzing, and improving the established system

IIGF's employees

- Providing input and feedback related to employment management in the Company



Menerapkan Budaya Keberlanjutan

Implementing Sustainability Culture

[OJK F.1]

Perseroan memiliki budaya kerja InTIME (*Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust dan Excellence*) yang wajib diterapkan oleh seluruh Insan Perseroan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Untuk memastikan bahwa kesesuaian nilai-nilai budaya organisasi selalu tercipta dalam upaya perwujudan pencapaian Perseroan jangka panjang, Perseroan senantiasa melakukan internalisasi nilai-nilai budaya dalam setiap kesempatan seperti kegiatan *townhall meeting, gathering* dan aktivitas kebersamaan lainnya.

Selain menerapkan budaya InTIME sebagai *mandatory things* yang harus terimplementasi pada setiap kegiatan yang dijalankan, budaya keberlanjutan pada PT PII juga tergambar dari adanya Persatuan Istri Karyawan PT PII (PERIKAPI) yang merupakan kelompok perempuan beranggotakan karyawan dan istri-istri karyawan PT PII. PERIKAPI dipimpin oleh istri Direktur Utama PT PII dengan berbagai kegiatan yang dilakukan meliputi bidang organisasi, kesejahteraan, pendidikan dan sosial budaya. Pada kegiatan bidang organisasi, PERIKAPI senantiasa memberikan program penghargaan untuk anak-anak karyawan yang berprestasi dengan tujuan untuk terus meningkatkan semangat belajar anak-anak karyawan PT PII. Pada bidang kesejahteraan PERIKAPI senantiasa menyelenggarakan kegiatan sosial dengan memberikan santunan ke panti asuhan dan masjid sekitar. Untuk terus meningkatkan wawasan seluruh anggota PERIKAPI, pada bidang pendidikan, PERIKAPI turut menyelenggarakan kegiatan *talkshow* atau kelas-kelas yang banyak memberikan manfaat bagi anggota PERIKAPI. Seluruh kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh PERIKAPI setiap tahunnya.

Pada sektor lingkungan, budaya keberlanjutan PT PII juga diterapkan melalui Program *Reduce Waste to Landfill* yang merupakan program pemilahan sampah dengan membuang sampah sesuai dengan kategorinya yaitu sampah kertas, sampah plastik dan *food waste* (sisa makanan). Adapun hasil dari program pengelolaan sampah ini berupa terciptanya produk bermanfaat seperti pakan maggot dan kompos yang berasal dari sampah organik serta flakes plastik, kertas daur ulang dan serbuk kaca yang berasal sampah non organik.

The Company has InTIME work culture (*Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust, and Excellence*), which must be implemented by all Company's personnel in carrying out daily activities. The Company internalizes cultural values on every occasion, such as townhall meetings, gatherings, and other joint activities to ensure that the suitability of organizational cultural values is always instilled to actualize the Company's long-term achievements.

In addition to implementing mandatory InTIME culture in every activity carried out, the sustainability culture at IIGF is also reflected in IIGF Employee's Wife Association (PERIKAPI)'s presence, which is a women's group consisting of employees and wives of IIGF's employees. PERIKAPI is chaired by the wife of the IIGF's President Director, with various activities, including in the fields of organizational, welfare, educational and socio-cultural. In the organizational sector, PERIKAPI provides award programs for the children of employees who excel with the aim of continuing to increase the enthusiasm for learning of the children of IIGF's employees. In terms of welfare, PERIKAPI organizes social activities by providing donations to orphanages and mosques in the surrounding. In terms of education, PERIKAPI organizes talk shows or classes that provide many benefits for PERIKAPI's members to improve the knowledge of all PERIKAPI's members. All of these activities are regularly implemented by PERIKAPI every year.

In terms of the environment, IIGF's culture of sustainability is implemented through the Reduce Waste to Landfill Program, a waste sorting program by disposing of waste according to its category, i.e., paper, plastic, and food waste. The waste management program generates the creation of useful products, such as maggot feed and compost from organic waste and plastic flakes, recycled paper, and glass powder from non-organic waste.

Menerapkan Prinsip Kesetaraan dan Keberagaman

Implementing Equality and Diversity Principles

Hingga akhir tahun 2023, kegiatan operasional PT PII didukung oleh 164 orang karyawan yang terdiri dari karyawan tetap sebanyak 149 orang dan karyawan tidak tetap sebanyak 15 orang dengan keseluruhan karyawan berlokasi di Kantor PT PII di DKI Jakarta. Adapun klasifikasi jumlah karyawan tersebut berdasarkan *gender* terdiri dari 88 orang (53,66%) karyawan laki-laki dan 76 orang (46,34%) karyawan perempuan. Jumlah

As of the end of 2023, IIGF's operations are supported by 164 employees consisting of 149 permanent employees and 15 non-permanent employees, and all employees are located at the IIGF's Office in the Special Capital Region of Jakarta. The number of employees by gender consists of 88 (53.66%) male employees and 76 (46.34%) female employees. This number increased by 7.89% compared to the number of employees in



ini meningkat 7,89% dibandingkan jumlah karyawan tahun 2022 yaitu sebanyak 152 orang karyawan. Dalam penyajian data karyawan, metodologi dan asumsi yang digunakan adalah dengan menghitung keseluruhan jumlah tenaga kerja selama tahun 2023. Perhitungan ini mencakup tiga kategori tenaga kerja, yaitu karyawan tetap atau purna waktu yang bekerja sepanjang tahun 2023, tenaga kontrak atau *outsourc*e yang bekerja selama tahun 2023, serta karyawan magang yang bekerja selama tahun 2023 meskipun tidak dalam periode satu tahun penuh. Data keseluruhan ini kemudian dikumpulkan dan ditarik pada akhir periode, yakni tanggal 31 Desember 2023. Selain itu, adanya selisih jumlah antara karyawan laki-laki dan perempuan yang tidak berbeda jauh pada PT PII ini menandakan bahwa Perseroan turut memperhatikan kesetaraan *gender* dan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dengan mengutamakan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. [GRI 2-7, 2-8, 405-1] [OJK C.3.b, F.18]

Terkait dengan kepentingan pengambilan keputusan dan pengawasan operasional Perseroan, PT PII juga didukung oleh sebanyak 43 orang manajemen senior pada pangkat VP – EVP (26%) dari total 164 orang karyawan) yang seluruhnya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di area Jabodetabek. [GRI 202-2]

2022, which was 152 employees. In presenting employee data, the methodology and assumptions used are to calculate the total workforce for the year 2023. This calculation includes three categories of labor, namely permanent or full-time employees who worked throughout 2023, contract or outsourced personnel who worked during 2023, and interns who worked during 2023 even though it was not a full year period. This overall data is then collected and pulled at the end of the period, which is December 31, 2023. In addition, the male and female employees in IIGF were almost balanced, which indicates that IIGF takes into account gender equality and provides equal opportunities for men and women by prioritizing their capacities and abilities. [GRI 2-7, 2-8, 405-1] [OJK C.3.b, F.18]

In the Company's decision-making and operational supervision, IIGF is supported by 43 senior management at the rank of VP-EVP (26%) of the total 164 employees, all of whom are Indonesian Citizens (WNI) domiciled in the Jabodetabek area. [GRI 202-2]

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

Number of Employees by Employment Status and Gender

[GRI 2-7, 2-8] [OJK C.3.b]

Status Kepegawaian Employment Status	2023			2022			2021		
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total
Karyawan Tetap Permanent Employees	81	68	149	72	64	136	73	58	131
Karyawan Tidak Tetap Temporary Employees	7	8	15	9	7	16	6	6	12
Jumlah Total	88	76	164	81	71	152	79	64	143

Catatan:
Keseluruhan karyawan berlokasi di Kantor PT PII di DKI Jakarta.

Note:
All employees are located at the IIGF's Office in the Special Capital Region of Jakarta.

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Number of Employees by Gender and Education Level

[OJK C.3.b]

Tingkat Pendidikan Education	2023			2022			2021		
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total
Doktoral Doctorate	2	1	3	2	-	2	3	-	3
Pasca Sarjana Master	42	12	54	38	13	51	38	12	50
Sarjana 4-yr-Bachelor	43	60	103	40	54	94	37	48	85
Diploma	1	3	4	1	4	5	1	4	5
Jumlah Total	88	76	164	81	71	152	79	64	143



Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia

Number of Employees by Gender and Age Group

[QJK C.3.b]

Rentang Usia Age Group	2023			2022			2021		
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total
41 – 56 tahun years old	27	13	40	26	10	36	23	8	31
31 – 40 tahun years old	41	35	76	38	36	74	42	33	75
20 – 30 tahun years old	20	28	48	17	25	42	14	23	37
Jumlah Total	88	76	164	81	71	152	79	64	143

Jumlah Badan Tata Kelola dan Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Level Jabatan

Number of Governance Agencies and Employees by Gender and Position

[QJK C.3.b] [GRI 405-1]

Keterangan Description	2023			2022			2021		
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total
Pengurus Perusahaan Company's Management									
Dewan Komisaris Board of Commissioners	1	2	3	2	1	3	2	1	3
Direksi Board of Directors	3	-	3	3	-	3	3	-	3
Komite Committee	6	1	7	6	1	7	6	1	7
EVP	4	3	7	3	2	5	4	2	6
VP-SVP	25	11	36	21	9	30	21	9	30
DSM-AVP	21	13	34	20	10	30	18	7	25
AM-M	27	34	61	24	34	58	24	31	55
Staff	11	15	26	13	16	29	12	15	27
Jumlah Total	98	79	177	92	73	165	90	66	156

Jumlah Badan Tata Kelola dan Karyawan Berdasarkan Usia dan Level Jabatan

Number of Governance Agencies and Employees by Age and Position

[QJK C.3.b] [GRI 405-1]

Keterangan Description	2023				2022				2021			
	<30 tahun years old	30 – 50 tahun years old	>50 tahun years old	Total	<30 tahun years old	30 – 50 tahun years old	>50 tahun years old	Total	<30 tahun years old	30 – 50 tahun years old	>50 tahun years old	Total
Pengurus Perusahaan Company's Management												
Dewan Komisaris Board of Commissioners	-	-	3	3	-	-	3	3	-	-	3	3
Direksi Board of Directors	-	2	1	3	-	2	1	3	-	1	2	3
Komite Committee	1	5	1	7	1	5	1	7	1	6	-	7
EVP	-	3	4	7	-	2	3	5	-	3	3	6
VP-SVP	-	28	8	36	-	22	8	30	-	23	7	30
DSM-AVP	-	32	2	34	-	29	1	30	-	24	1	25
AM-M	14	47	-	61	8	50	-	58	6	49	-	55
Staff	22	4	-	26	21	9	-	30	16	11	-	27
Jumlah Total	37	121	19	177	30	119	17	166	23	117	16	156



Melalui tabel informasi diatas, diketahui keberagaman karyawan Perseroan dapat dilihat dari jumlah karyawan berdasarkan level jabatan, dimana sebanyak 57,14% karyawan laki-laki menduduki level jabatan EVP, 69,44% menduduki posisi VP-SVP, 61,76% menduduki posisi DSM-AVP, 44,26% menduduki posisi AM-M dan 42,31% menduduki posisi *Staff*. Sedangkan untuk karyawan perempuan, sebanyak 42,86% karyawan menduduki level jabatan EVP, 30,56% menduduki posisi VP-SVP, 38,24% menduduki posisi DSM-AVP, 55,74% menduduki posisi AM-M dan 57,69% menduduki posisi *Staff*. Jika dilihat dari kelompok usia, karyawan PT PII pada kelompok usia <30 tahun dan 31-50 tahun didominasi oleh level jabatan *staff* yaitu sebesar 61,11%, sedangkan pada kelompok usia >50 tahun didominasi oleh level jabatan SVP yaitu sebesar 4,8% dan EVP 2,4%. [GRI 405-1]

Keberagaman komposisi karyawan juga terjadi pada badan tata kelola (governansi) PT PII, dimana pada tahun 2023 jumlah anggota badan tata kelola dewan komisaris diduduki oleh sebanyak 33,33% pria dan 66,67% wanita. Pada posisi Direksi diduduki oleh sebanyak 100% pria sedangkan pada posisi komite diduduki oleh sebanyak 85,71% pria dan 14,29% wanita. Jika dilihat dari kelompok usia, badan tata kelola Perseroan, 50% berada pada kelompok usia 31-50 tahun dan 50% berada pada kelompok usia >50 tahun. [GRI 405-1]

Based on the table above, the diversity of the Company's employees is reflected in the number of employees based on the position level, in which 57.14% of male employees occupied the EVP position, 69.44% occupied the VP-SVP position, 61.76% occupied the DSM-AVP position, 44.26% occupied the AM-M position, and 42.31% occupied the Staff position. 42.86% of female employees occupied the EVP position, 30.56% occupied the VP-SVP position, 38.24% occupied the DSM-AVP position, 55.74% occupied the AM-M position, and 57.69% occupied the Staff position. In terms of the age group, IIGF employees in the <30 years and 31-50 years age groups are dominated by the staff position, which was 61.11%. The >50 years age group is dominated by the SVP position level of 4.8% and EVP of 2.4% [GRI 405-1]

IIGF's governance body is also very diverse. In 2023, the number of members of the governance body of the Board of Commissioners is occupied by 33.33% men and 66.67% women, the Board of Directors of 100% men, and the committee is occupied by 85.71% men and 14.29% women. In terms of age group, the Company's governance bodies consist of 50% in the 31-50 years age group and 50% in the >50 years age group. [GRI 405-1]

Pekerja yang Bukan Karyawan/Pekerja Langsung

Non-Employees/Direct Workers

[GRI 2-7, 2-8]

Pekerja yang Bukan Karyawan/Pekerja Langsung PT PII

Workers who are not IIGF's employees/direct employees

Status Kepegawaian Employment Status	2023	2022	2021
Karyawan Alih Daya/ <i>Outsourcing</i> Outsourced Employees	35	32	27
Magang Internship	2	4	8

Selain mempekerjakan karyawan tetap dan tidak tetap, PT PII juga mempekerjakan pekerja dengan status alih daya dan juga magang untuk membantu Perseroan menjalankan aktivitas usahanya. Adapun jenis pekerjaan yang paling umum dilakukan oleh pekerja dengan status alih daya di PT PII meliputi pekerjaan administrasi pekerjaan kebersihan, keamanan dan pelayanan pelanggan. Karyawan alih daya dipekerjakan PT PII melalui perusahaan penyedia jasa *outsourcing* dengan kontrak kerja antara perusahaan penyedia jasa dan PT PII. Pekerja alih daya ini bukan merupakan pegawai PT PII, dan hubungan kontrak mereka diatur oleh perjanjian kerja antara penyedia jasa *outsourcing* dan karyawan tersebut.

Fluktuasi dalam jumlah pekerja yang bukan pekerja langsung selama periode pelaporan menunjukkan adanya perubahan kebutuhan dan strategi Perseroan dalam mengelola tenaga kerja seperti penggunaan tenaga kerja alih daya untuk memenuhi kebutuhan operasional yang spesifik atau proyek jangka pendek yang memerlukan keahlian tertentu tanpa perlu menambah karyawan tetap dan penyesuaian pada program magang. [GRI 2-8]

In addition to hiring permanent and non-permanent employees, IIGF also employs outsourced workers and interns to help the Company carry out its business activities. The most common types of work performed by outsourced workers at IIGF include administrative work, cleaning, security and customer service. Outsourced employees are employed by IIGF through an outsourcing service provider company with a work contract between the service provider company and IIGF. These outsourced workers are not employees of IIGF, and their contractual relationship is governed by a work agreement between the outsourcing service provider and the employee.

Fluctuations in the number of workers who are not direct employees during the reporting period indicate changes in the Company's needs and strategies in managing the workforce such as the use of outsourcing to meet specific operational needs or short-term projects that require certain expertise without the need to add permanent employees and adjustments to the apprenticeship program. [GRI 2-8]



Adapun beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja alih daya meliputi:

Some types of work performed by outsourced workers include:

Jenis Pekerja Type of Worker	Jenis Pekerjaan yang dilakukan Type of Work Performed	
General Service (Office Boy/Girl)	- Membersihkan seluruh area kantor, ruang kerja, dan ruang <i>meeting</i> PT PII - Mendistribusikan dokumen antar karyawan/internal - Membantu <i>fotocopy</i> dan jilid dokumen - Dan lain sebagainya	- Cleaning all office areas, workspaces, and meeting rooms of IIGF - Distribute documents between employees/internally - Assist in photocopying and binding documents - And so on
Kurir Courier	- Mendistribusikan dokumen/barang di luar area kerja PT PII (Jakarta) - Membantu pengurusan administrasi ke bank - Membantu tim General Service (GS) atau tugas lain yang dibutuhkan PT PII	- Distribute documents/goods outside IIGF work area (Jakarta) - Assist with administration to the bank - Assist the General Service (GS) team or other tasks required by IIGF
Internal Service (Security)	- Menjaga keamanan lingkungan kerja PT PII - Mengawasi kelayakan ruang rapat dan sistem perangkat pendukungnya - Menyiapkan kebutuhan ruangan rapat, berkoordinasi dengan resepsionis dan tim GS - Dan lain sebagainya	- Maintain the security of IIGF work environment - Supervise the feasibility of the meeting room and its supporting device system - Prepare meeting room needs, coordinate with receptionist and GS team - And so on
Receptionist	- Menyambut tamu perusahaan dengan ramah dan sopan - Meminta tamu untuk registrasi demi pendataan - Menerima telepon dengan ramah dan sopan, serta menyambungkannya sesuai tujuan - Dan lain sebagainya	- Welcoming company guests in a friendly and polite manner - Ask guests to register for data collection - Receive telephone calls in a friendly and courteous manner, and connect them to their destination - And so on
Pengemudi (Driver) Driver	- Mengantarkan dan menjemput dari/ke lokasi tujuan - Membersihkan kendaraan operasional agar tampak layak dan representatif - Memeriksa kendaraan operasional dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk perawatan kendaraan jika sudah masuk waktunya - Dan lain sebagainya	- Delivering and picking up from/to the destination location - Cleaning operational vehicles to make them look decent and representative - Inspect operational vehicles and report to the authorized party for vehicle maintenance if it is time to enter - And so on
IT Support	- Kegiatan rutin seperti pemeliharaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> - Mengidentifikasi serta membantu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan <i>hardware</i>, <i>software</i>, serta jaringan internet - Pemeliharaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> - Dan lain sebagainya	- Routine activities such as hardware and software maintenance - Identify and help solve problems related to hardware, software, and internet networks. - Maintenance of hardware and software - And so on
Office Support	- Mendukung kebutuhan <i>audio video</i> di ruang <i>meeting</i> atau area PT PII - Membantu <i>monitor</i> area ruang <i>meeting</i> agar tetap berfungsi dengan baik - Memastikan area <i>meeting</i> siap digunakan	- Support audio video needs in meeting rooms or IIGF area - Help monitor the meeting room area to keep it functioning properly - Ensure the meeting area is ready for use
Bartender	- Menyajikan minuman, baik kopi, teh, atau lainnya, kepada karyawan dan <i>stakeholder</i> PT PII - Memberikan pelatihan tentang ilmu racik minuman kepada staf OS dan juga karyawan - Memantau stok kebutuhan minuman selama satu bulan dan menentukan stok minimum bahan baku	- Serve drinks, whether coffee, tea, or other, to IIGF employees and stakeholders - Provide training on the science of drink mixing to OS staff and employees - Monitor the stock of beverage needs for one month and determine the minimum stock of raw materials
Administrasi Administration	Membantu proses permintaan perjalanan dinas karyawan dan dokumen pendukung seperti: - Surat perjalanan dinas; - Sewa kendaraan; - Dan lain sebagainya	Assist in processing employee business trip requests and supporting documents such as: - Official travel letter; - Vehicle rental; - And so on
Supervisor	- Mengawasi kegiatan tenaga kerja OS yang bertugas di PT PII - Menjadi penghubung antara PT PII dengan vendor tenaga kerja OS - Melaksanakan tugas dengan sikap dan perilaku yang baik, ramah, jujur, sigap, tegas, mengayomi, dan berwibawa - Dan lain sebagainya	- Supervise the activities of OS labor on duty at IIGF - Become a liaison between IIGF and OS labor vendors - Carry out tasks with a good attitude and behavior, friendly, honest, alert, firm, nurturing, and authoritative - And so on



Terkait dengan ruang lingkup pekerja dengan status magang, setiap pekerja magang memiliki ruang lingkup pekerjaan berbeda-beda yang disesuaikan dengan area penempatan dari divisi masing-masing. Dengan demikian maka jenis pekerjaan yang dilakukan antara karyawan magang dan karyawan *outsourcing* berbeda.

Regarding the scope of workers with apprentice status, each apprentice has a different scope of work that is tailored to the placement area of each division. Thus, the types of work performed between interns and outsourced employees are different.

Inklusivitas Dalam Rekrutmen dan Pergantian (*Turnover*) Karyawan

Inclusiveness in Employee Recruitment and Turnover

Dalam menghadapi tantangan bisnis masa depan yang kompleks dan memerlukan adaptasi cepat, PT PII membutuhkan dukungan dari talenta yang kompeten untuk mendukung perkembangan organisasi. Oleh karena itu, pada tahun 2023 PT PII kembali melakukan proses rekrutmen untuk mengisi kekosongan posisi pada Perseroan.

In facing future business challenges that are complex and require rapid adaptation, IIGF needs the support of competent talents to support organizational development. Therefore, in 2023, IIGF conducted a recruitment process to fill vacant positions in the Company.

Selama proses rekrutmen, PT PII memprioritaskan kualitas dan kapabilitas calon karyawan tanpa membedakan *gender*, suku, agama, ras atau golongan sebagai bagian dari komitmen Perseroan terhadap prinsip anti-diskriminasi. Perseroan juga memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk batas usia pekerja untuk menghindari praktik pekerja anak dan memastikan jam kerja sesuai dengan peraturan guna menghindari kerja paksa. Komitmen ini tercermin dalam kepatuhan Perseroan terhadap regulasi ketenagakerjaan, khususnya dengan menetapkan usia minimal 18 tahun bagi calon karyawan. [OJK F.18, F.19]

During the recruitment process, IIGF prioritizes the quality and capabilities of prospective employees without distinguishing gender, ethnicity, religion, race, or class as part of the Company's commitment to the anti-discrimination principle. The Company also pays attention to Human Rights (HAM), including the age limit for employees, to avoid the practice of child labor, and stipulates working hours in accordance with the provisions to avoid forced labor practices. This commitment is reflected in the Company's compliance with employment regulations, particularly by setting a minimum age of 18 years for prospective employees. [OJK F.18, F.19]

Selama tahun 2023, Perseroan berhasil merekrut 16 orang karyawan baru dengan tingkat rekrutmen sebesar 10,13% dari seluruh karyawan, baik yang berstatus *pro-hire* maupun *fresh graduates*. [GRI 401-1]

In 2023, the Company succeeded in recruiting 16 new employees, or equivalent with 10.13% recruitment rate, both under professional hired and fresh graduates' status. [GRI 401-1]

Jumlah dan Tingkat Rekrutmen Karyawan Baru PT PII

Number and Recruitment Rate of IIGF's New Employees

[GRI 401-1]

Keterangan Description	2023		2022		2021	
	Jumlah Total	Tingkat Rekrutmen Recruitment Rate	Jumlah Total	Tingkat Rekrutmen Recruitment Rate	Jumlah Total	Tingkat Rekrutmen Recruitment Rate
Jenis Kelamin Gender						
Pria Male	7	4,43%	8	5,29%	14	9,79%
Wanita Female	9	5,70%	9	5,96%	9	6,29%
Jumlah Total	16	10,13%	17	11,18%	23	16,08%
Usia Age						
< 30 tahun years old	9	5,70%	9	5,96%	10	6,99%
30 – 50 tahun years old	6	3,80%	7	4,64%	12	8,39%
> 50 tahun years old	1	0,63%	1	0,58%	1	0,70%
Jumlah Total	16	10,13%	17	11,18%	23	16,08%
Wilayah Operasi Operational Area						
DKI Jakarta Special Capital Region of Jakarta	16	10,13%	17	11,18%	23	16,08%
Jumlah Total	16	10,13%	17	11,18%	23	16,08%



PT PII melakukan pemantauan dan penekanan tingkat pergantian/*turnover* karyawan melalui pelaksanaan kegiatan *employee engagement* dengan penerapan strategi inisiasi efektif seperti menciptakan iklim kerja yang adil, nyaman, mendukung dan penuh apresiasi. Hal ini merupakan komitmen Perseroan dalam menghadirkan lingkungan kerja yang *supportif* dan sehat bagi karyawan secara optimal.

IIGF monitors and suppresses employee turnover by implementing employee engagement activities through effective initiation strategies, such as creating a fair, comfortable, supportive, and appreciative work climate. This is the Company's commitment to providing a supportive and healthy working environment for employees optimally.

Pada akhir tahun 2023, tercatat bahwa PT PII berhasil menjaga *turnover* sebesar 3,17% dari total keseluruhan karyawan sebanyak 164. [GRI 401-1]

As of the end of 2023, IIGF had managed to maintain a turnover rate of 3.17% of the total 164 employees. [GRI 401-1]

Jumlah dan Tingkat Pergantian/ Turnover Karyawan PT PII

Number and Turnover Rate of IIGF's Employees

[GRI 401-1]

Keterangan Description	2023		2022		2021	
	Jumlah Total	Tingkat Turnover Turnover Rate	Jumlah Total	Tingkat Turnover Turnover Rate	Jumlah Total	Tingkat Turnover Turnover Rate
Jenis Kelamin Gender						
Pria Male	1	0,63%	6	4,07%	7	4,96%
Wanita Female	4	2,54%	3	2,03%	5	3,10%
Jumlah Total	5	3,17%	9	6,10%	12	8,06%
Usia Age						
< 30 tahun years old	1	0,63%	1	0,68%	4	2,48%
30 – 50 tahun years old	3	1,91%	8	5,42%	6	4,34%
> 50 tahun years old	1	0,63%	-	0%	2	1,24%
Jumlah Total	5	3,17%	9	6,10%	13	8,06%
Wilayah Operasi Operational Area						
DKI Jakarta Special Capital Region of Jakarta	5	3,17%	9	6,10%	12	8,06%
Jumlah Total	5	3,17%	9	6,10%	12	8,06%

Turnover Karyawan Tahun 2020 – 2023

Employee Turnover in 2020–2023

[GRI 401-1]

Keterangan Description	2023	2022	2021
Jumlah karyawan awal tahun Number of employees at the beginning of the year	152	143	130
Jumlah rekrutmen karyawan baru New employee recruitment	16	17	23
Jumlah karyawan pensiun Number of retired employees	1	-	-
Jumlah karyawan yang meninggal dunia Number of employees who passed away	-	-	1
Jumlah karyawan yang mengundurkan diri Number of resigned employees	4	9	12
Jumlah karyawan yang diberhentikan (PHK) Number of employees terminated (termination of employment)	-	-	-
Jumlah karyawan akhir tahun Number of employees at the end of the year	164	152	143
Tingkat perputaran karyawan Employee turnover rate	3,17%	6,10%	8,06%



Inklusivitas Pengembangan Karir Karyawan

Inclusiveness in Employees' Career Development

Program pengembangan karier senantiasa diberikan PT PII kepada para karyawannya dengan memperhatikan kebutuhan dan kesesuaian tugas tanggung jawab karyawan dengan target kinerja individu, divisi dan Perseroan. Untuk memastikan bahwa setiap program pengembangan karier karyawan terlaksana dengan tepat sasaran serta kinerja karyawan Perseroan tetap terjaga, PT PII turut melakukan *monitoring* berupa *review* kinerja tengah tahun untuk seluruh karyawan, mengoptimalkan budaya *coaching* melalui Divisi Human Capital and Organization Development sebagai bagian dari program pengembangan SDM serta secara berkala menyempurnakan kebijakan dan praktik ketenagakerjaan.

Selain *review* kinerja yang dilakukan oleh Divisi Human Capital and Organization Development, penilaian kinerja karyawan juga dilakukan oleh atasan langsung dari setiap karyawan dengan menggunakan metode *Key Performance Indicators* (KPI) berbasis *Balanced Score Card* (BSC). Adapun hasil dari penilaian ini akan digunakan Perseroan untuk mempertimbangkan pemberian program pengembangan, pelatihan, penempatan karyawan, *reward* and *punishment*, remunerasi dan perencanaan peningkatan jabatan karyawan.

Hingga akhir tahun 2023, seluruh karyawan PT PII dengan masa kerja minimal 3 (tiga) bulan sepenuhnya (100%) baik laki-laki maupun perempuan di setiap jenjang jabatan telah mendapatkan penilaian dan evaluasi kinerja dan pengembangan karier. Dari hasil dari penilaian kinerja tersebut, sebanyak 42 karyawan atau 25,61% dari total karyawan mendapatkan promosi jabatan. [GRI 404-3]

IIGF provides career development programs to its employees with due regards to the needs and suitability of employee responsibility with individual, divisional, and Company performance targets. To ensure that each employee's career development program is implemented on target and the performance of the Company's employees is maintained, IIGF conducts monitoring in the form of mid-year performance reviews for all employees, optimizes the coaching culture from the Human Capital and Organization Development Division as part of the HR development program and regularly enhances improves employment policies and practices.

In addition to performance reviews conducted by the Human Capital and Organization Development Division, employee performance are also evaluated by the direct supervisor of each employee using the Key Performance Indicators (KPI) based on the Balanced Score Card (BSC). The results of the assessment will be used by the Company to consider the provision of development programs, training, employee placement, reward and punishment, remuneration, and employee promotion plan.

As of the end of 2023, all IIGF's employees (100%) with at least three (3) months of tenure, both male and female employees, at each level, have received performance assessment and evaluation and career development. From the results of the performance assessment, 42 employees, or 25.61% of the total employees, were promoted. [GRI 404-3]

Persentase Karyawan yang Menerima Pengembangan Karir

Percentage of Employees Receiving Career Development

[GRI 404-3]

Keterangan Description	2023			2022			2021		
	Jumlah Karyawan yang Mendapat Promosi Jabatan (orang) Total Employees Promoted (person)	Jumlah Total Karyawan (orang) Total Employees (person)	Persentase Karyawan yang Mendapat Promosi Jabatan (%) Percentage of Employees Promoted (%)	Jumlah Karyawan yang Mendapat Promosi Jabatan (orang) Total Employees Promoted (person)	Jumlah Total Karyawan (orang) Total Employees (person)	Persentase Karyawan yang Mendapat Promosi Jabatan (%) Percentage of Employees Promoted (%)	Jumlah Karyawan yang Mendapat Promosi Jabatan (orang) Total Employees Promoted (person)	Jumlah Total Karyawan (orang) Total Employees (person)	Persentase Karyawan yang Mendapat Promosi Jabatan (%) Percentage of Employees Promoted (%)
Jenis Kelamin Gender									
Pria Male	23	88	26,14	20	81	24,69	21	79	26,58
Wanita Female	19	76	25,00	20	71	28,16	13	64	20,31
Jumlah Total	42	164	25,61	40	152	26,32	34	143	23,78



Keterangan Description	2023			2022			2021		
	Jumlah Karyawan yang Mendapat Promosi Jabatan (orang) Total Employees Promoted (person)	Jumlah Total Karyawan (orang) Total Employees (person)	Presentase Karyawan yang Mendapat Promosi Jabatan (%) Percentage of Employees Promoted (%)	Jumlah Karyawan yang Mendapat Promosi Jabatan (orang) Total Employees Promoted (person)	Jumlah Total Karyawan (orang) Total Employees (person)	Presentase Karyawan yang Mendapat Promosi Jabatan (%) Percentage of Employees Promoted (%)	Jumlah Karyawan yang Mendapat Promosi Jabatan (orang) Total Employees Promoted (person)	Jumlah Total Karyawan (orang) Total Employees (person)	Presentase Karyawan yang Mendapat Promosi Jabatan (%) Percentage of Employees Promoted (%)
Kategori karyawan Employee Category									
EVP	-	7	-	3	5	60,00	-	6	-
VP-SVP	6	36	16,67	2	30	6,67	8	30	26,67
DSM-AVP	10	34	29,41	8	30	26,67	8	25	32,00
AM-M	16	61	26,23	22	58	37,93	12	55	21,82
Staff	10	26	38,46	5	29	17,24	6	27	22,22
Jumlah Total	42	164	25,61	40	152	26,32	34	143	23,78

Meningkatkan Kompetensi SDM

Enhancing HR Competencies

[GRI 404-2] [OJK F.22]

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian karyawan, PT PII memberikan program pengembangan kompetensi baik kompetensi teknis maupun kompetensi non-teknis dengan disesuaikan pada *Individual Development Plan* karyawan. Setiap karyawan berhak dan memiliki kesempatan untuk mengikuti program pengembangan kompetensi dengan mengajukan diri sebagai peserta pelatihan dengan turut menyertakan persetujuan dari atasan yang telah mempertimbangkan kebutuhan tugas dan rencana pengembangan kompetensi. Perseroan menjamin perlakuan yang adil dan jujur tanpa diskriminasi berdasarkan potensi, kemampuan, pengalaman, dan keterampilan masing-masing karyawan. Adapun topik pengembangan kompetensi yang dapat diikuti oleh karyawan PT PII meliputi:

To enhance employee competence and expertise, IIGF provides competency development programs for technical and non-technical competence in accordance with the employee's Individual Development Plan. Every employee has the right and opportunity to participate in competency development programs by submitting themselves as training participants which included approval from supervisors with due regards to the tasks and competency development plans. The Company guarantees fair and honest treatment without discrimination based on each individual's potential, ability, experience, and skills. IIGF's employees shall participate in the following topics of competence development:



Topik Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Employee Education and Training [OJK F.22]



Perseroan mempercayakan Divisi Human Capital and Organization Development untuk menyelenggarakan program pengembangan kompetensi yang dikategorikan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu *inhouse training*, *public training* dan *knowledge sharing*. Adapun jumlah program pengembangan kompetensi karyawan yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebanyak 55 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

The Company entrusts the Human Capital and Organization Development Division to organize competency development programs, which are classified into three (3) categories, i.e., in-house training, public training, and knowledge sharing. The total employee competency development programs that have been successfully implemented in 2023 was 55 activities as follows:

Program pengembangan kompetensi karyawan Employee competency development program [GRI 404-2]

Keterangan Description	Jumlah Kegiatan Pelatihan Training	Peserta Participants
<i>In House Training</i>	12	145
<i>Public Training</i>	40	64
<i>Knowledge Sharing</i>	3	191

Selama tahun 2023, Perseroan telah menginvestasikan dana untuk program pendidikan dan pelatihan sebesar Rp4,3 miliar. Jumlah tersebut meningkat 290% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1,1 miliar. Peningkatan biaya ini terjadi terutama karena pada tahun 2023, kegiatan pelatihan sudah berjalan normal kembali sejak pandemi berakhir sehingga aktivitas pelaksanaan *public training* dalam kota, luar kota maupun luar negeri sudah banyak dilaksanakan.

In 2023, the Company invested Rp4.3 billion for education and training programs. This amount increased by 290% compared to 2022, i.e., Rp1.1 billion. The increase in costs occurred mainly because in 2023, training was conducted normally since the pandemic ended. Thus, many public training are carried out in the city, outside the city, and internationally.

Pada tahun 2023, jumlah jam pelatihan karyawan Perseroan mencapai 3,678 jam dengan rata-rata jam pelatihan per karyawan mencapai 22 jam/orang. [GRI 404-1]

In 2023, the training hours for the Company's employees reached 3,678 hours, with an average of training hours of 22 hours/employee. [GRI 404-1]



Rata-Rata Jam Pelatihan Karyawan

Average Employee Training Hours

[GRI 404-1] [OJK F.22]

Keterangan Description	2023			2022			2021		
	Jumlah Karyawan (Orang) Total Employees (Person)	Jumlah Jam Pelatihan (Jam) Total Training Hours (Hours)	Rata-rata Jam Pelatihan per Karyawan (Jam/Orang) Average of Training Hours per Employee (Hours/Person)	Jumlah Karyawan (Orang) Total Employees (Person)	Jumlah Jam Pelatihan (Jam) Total Training Hours (Hours)	Rata-rata Jam Pelatihan per Karyawan (Jam/Orang) Average of Training Hours per Employee (Hours/Person)	Jumlah Karyawan (Orang) Total Employees (Person)	Jumlah Jam Pelatihan (Jam) Total Training Hours (Hours)	Rata-rata Jam Pelatihan per Karyawan (Jam/Orang) Average of Training Hours per Employee (Hours/Person)
Jenis Kelamin Gender									
Pria Male	84	2.215	14	81	1.931	13	79	3.811	27
Wanita Female	80	1.463	9	71	1.025	7	64	2.578	18
Jumlah Total	164	3.678	22	152	2.956	19	143	6.389	45
Kategori karyawan Employee Category									
EVP	7	249	2	5	96	1	6	377	3
VP-SVP	37	941	6	30	599	4	30	1.335	9
DSM-AVP	37	607	4	30	555	4	25	1.111	8
AM-M	59	1.473	9	58	1.090	7	55	2.612	18
Staff	24	408	2	29	616	4	27	954	7
Jumlah Total	164	3.678	22	152	2.956	19	143	6.389	45

Inklusivitas Program Kesejahteraan Karyawan

Inclusiveness of the Employee Welfare Program

Remunerasi

Remuneration

PT PII memberikan besaran remunerasi kepada seluruh karyawannya secara adil dengan mempertimbangkan klasifikasi jabatan, masa kerja, beban kerja, lokasi dan prestasi kerja tiap individu tanpa membedakan antara karyawan perempuan dan laki-laki sehingga pemberian gaji pokok dan remunerasi sesuai dengan kinerja masing-masing dengan rasio pemberian 1:1 karyawan perempuan dibandingkan laki-laki pada setiap level jabatan yang sama. [GRI 405-2]

Remunerasi karyawan dipastikan telah memenuhi ketentuan upah minimum dan peraturan ketenagakerjaan. Selain itu, Perseroan senantiasa melakukan *benchmarking* dengan organisasi sejenis dan menetapkan standar penggajian berdasarkan pemeringkatan karyawan dan jenjang jabatan, dengan mengacu pada *salary survey* dalam industri sejenis serta mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Upah Minimum Provinsi (UMP).

IIGF provides fair remuneration to all its employees with due regards to the classification of positions, length of service, workload, location, and work performance of each individual, without discriminating between female and male employees, thus the basic salary and remuneration are granted in accordance with each individual's performance, with a ratio of 1:1 of female to male in the same position level. [GRI 405-2]

Employee remuneration shall meet the minimum wage requirements and employment regulations. In addition, the Company also performs benchmarking with similar organizations and sets payroll standards based on employee rankings and positions, with reference to salary surveys in similar industries, and in compliance with Employment Law and Provincial Minimum Wage Regulations (UMP).



Komitmen Perseroan untuk memberikan upah yang melebihi ketentuan pemerintah ini juga berlaku untuk karyawan *outsourcing*, dimana para pekerja *outsourcing* PT PII menerima gaji yang melebihi Upah Minimum Regional (UMR). Hal ini mencerminkan komitmen PT PII untuk memastikan bahwa setiap karyawan termasuk *outsourcing* mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan tanggung jawab dan peran mereka di perusahaan. Dengan memberikan remunerasi di atas standar minimum, PT PII menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan *outsourcing* dan berupaya mendukung mereka dalam menjalankan tugas dengan baik serta berkontribusi secara optimal bagi perusahaan. [GRI 202-1]

Teruntuk pekerja bukan karyawan PT PII dengan status magang, Perseroan memberikan remunerasi berupa bantuan uang saku sebesar Rp150.000/hari dan uang makan sebesar Rp30.000/hari yang akan didapatkan peserta magang dengan memberikan bukti pendukung berupa *form* dan absensi kehadiran. Adapun pemberian remunerasi untuk peserta magang pada PT PII telah sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. [GRI 202-1]

IIGF's commitment to provide wages that exceed government regulations also applies to outsourced employees, where IIGF outsourced workers receive salaries that exceed the Regional Minimum Wage (UMR). This reflects IIGF's commitment to ensure that every employee, including outsourcing, is compensated in accordance with their responsibilities and roles in the company. By providing remuneration above the minimum standard, IIGF shows concern for the welfare of outsourced employees and seeks to support them in performing their duties well and contributing optimally to the company. [GRI 202-1]

For non-employee workers of IIGF which is internship status, the Company provides remuneration in the form of pocket money assistance of Rp150,000/day and meal allowance of Rp30,000/day which will be obtained by interns by providing supporting evidence in the form of attendance forms. The provision of remuneration for apprentices at IIGF is in accordance with the Minister of Manpower Regulation Number 6 of 2020 concerning the Implementation of Domestic Apprenticeships. [GRI 202-1]

Perbandingan Gaji Karyawan Golongan Terendah Dengan Upah Minimum

Comparison of Lowest Position Employee Salary with Minimum Wage
[GRI 202-1] [QJK F.20]

Tahun Year	Wilayah Operasi PT PII IIGF's Operational Area	Gaji Karyawan Golongan Terendah/Entry Level (Rp) Lowest Position/Entry Level Employee Salary (Rp)	Upah Minimum Minimum Wage	Rasio Gaji Karyawan Golongan Terendah/Entry Level Dibandingkan Upah Minimum Ratio of Lowest Position/Entry Level Employee Salary to Minimum Wage
2023	DKI Jakarta	6.400.000	4.900.798	130,59%
2022	DKI Jakarta	6.400.000	4.641.854	137,88%
2021	DKI Jakarta	6.010.000	4.416.186	136,09%
2020	DKI Jakarta	5.510.000	4.276.349	128,85%

Selain berupa gaji, Perseroan juga memberikan remunerasi lain dalam bentuk tunjangan jabatan, perumahan, komunikasi, transportasi, keagamaan dan lain sebagainya. Jenis remunerasi diluar gaji ini diberikan Perseroan dengan menyesuaikan pada status kepegawaian dengan rincian sebagai berikut:

In addition to salaries, the Company provides other remuneration in the form of allowances for positions, housing, communication, transport, religious allowances, etc. This type of remuneration in addition to the salary is provided by the Company by adjusting to the employment status under the following details:



Perbedaan Komponen Tunjangan Berdasarkan Status Kepegawaian

Differences in Allowance Components by Employment Status

[GRI 401-2]

Uraian Description	Status Kepegawaian Employment Status			
	Karyawan Tetap Permanent Employees	Karyawan Tidak Tetap Temporary Employees	Karyawan Alih Daya/ Outsourcing Outsourced Employees	Karyawan Magang Intern Employees
Tunjangan Tetap (Bulanan) Fixed Allowance (Monthly)				
Tunjangan Jabatan** Position Allowance**	√	√	√	x
Tunjangan Perumahan Housing Allowances	√	√	x	x
Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	√	√	√	x
Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	√	√	√	x
Tunjangan Tidak Tetap (Bulanan) Non-Fixed Allowance (Monthly)				
Lembur/Kelebihan Jam Kerja* Overtime*	√	√	√	x
Uang Makan* Meal Allowance*	√	√	√	√
Uang Saku*** Allowance***	x	x	x	√
Uang Perjalanan Dinas Business Trip Allowance	√	√	√	x
Tunjangan Pajak Penghasilan Income Tax Allowance	√	√	√	x
Tunjangan Tahunan Annual Allowance				
Insentif Kinerja Performance Incentives	√	√	x	x
Tunjangan Cuti Leave Allowance	√	√	x	x
Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	√	√	√	x
Tunjangan Profesional Professional Allowance	√	√	√	x
Benefit				
Layanan Fasilitas Kesehatan Health Benefits	√	√	√	x
BPJS Kesehatan BPJS Health	√	√	√	x
BPJS Ketenagakerjaan BPJS Employment	√	√	√	x
Dana Pensiun/PPIP Pension Fund/PPIP	√	x	x	x
Tunjangan akhir kontrak End of contract allowance	x	√	√	x

* Hanya untuk karyawan tetap dan tidak tetap di junior level (Staff - AM)

** Hanya untuk karyawan tetap ataupun tidak tetap dari level AM

*** Hanya untuk karyawan magang

* Only for permanent and non-permanent employees at junior level (Staff - AM)

** Only for permanent or non-permanent employees starting from AM level

*** Only for interns



Rasio Kompensasi Total Tahunan

Annual Compensation Ratio

Rasio kompensasi total tahunan di PT PII merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan gaji dan tunjangan yang diterima oleh para senior manajemen dalam hal ini Deputy Direktur dengan gaji tertinggi di Perseroan dengan nilai tengah dari total kompensasi tahunan yang dibayarkan Perseroan untuk seluruh karyawan (tidak termasuk individu dengan bayaran tertinggi). Perseroan berkomitmen untuk senantiasa memastikan bahwa kompensasi selalu diberikan secara proporsional dengan kinerja Perseroan dan secara adil dengan mencerminkan kontribusi karyawan terhadap pencapaian kinerja Perseroan.

Pada tahun 2023, dengan membandingkan pendapatan tertinggi Deputy Direktur Perseroan dan rata-rata pendapatan seluruh karyawan, didapati rasio kompensasi total tahunan karyawan adalah 5,03 : 1. Adapun rasio persentase kenaikan pada kompensasi total tahunan bagi karyawan dengan bayaran tertinggi di Perseroan terhadap nilai tengah persentase total kenaikan kompensasi tahunan untuk seluruh karyawan adalah sebesar 1:0.97. [GRI 2-21]

The ratio of total annual compensation at IIGF is used to measure the comparison of salaries and benefits received by senior management, in this case, the Deputy Director, with the highest salary in the Company, with the median value of the total annual compensation paid by the Company to all employees (excluding individuals with high salaries). The Company is committed to always ensuring that compensation shall be given proportionally to the Company's performance, and fairly by assessing the employee's contribution to the Company's performance achievements.

In 2023, by comparing the highest income of the Company's Deputy Director and the average income of all employees, the employee's total annual compensation ratio is 5.03: 1. The ratio of the percentage increase of total annual compensation for highest paid employees in the Company to the median of percentage increase of total annual compensation of all employees is 1:0.97. [GRI 2-21]

Cuti Melahirkan

Maternity Leave

Komitmen PT PII untuk menjaga kesejahteraan karyawan dilakukan Perseroan dengan salah satunya menghormati hak dan memberikan lingkungan kerja yang mendukung untuk setiap karyawan menjalankan perannya sebagai orang tua. Oleh karena itu, PT PII memberikan cuti melahirkan (*maternity leave*) kepada karyawan perempuan yang akan memasuki masa melahirkan selama 90 hari serta izin meninggalkan pekerjaan (*paternity leave*) kepada karyawan laki-laki selama 2 (dua) hari untuk mendampingi istrinya melahirkan.

Sepanjang tahun 2023, terdapat sebanyak 2 (dua) karyawan perempuan yang menggunakan hak cuti melahirkan (*maternity leave*) dan 6 (enam) karyawan laki-laki yang menggunakan hak *paternity leave* dimana seluruhnya (100%) kembali bekerja dan diterima kembali oleh Perseroan setelah masa cuti berakhir. [GRI 401-3]

IIGF implements its commitment to maintaining employee welfare by respecting the rights and providing a supportive working environment for each employee to perform their role as parents. Therefore, IIGF enforces maternity leave for female employees who are about to give birth for 90 days, and paternity leave for male employees to accompany their wives in childbirth for two (2) days.

In 2023, two (2) female employees exercised their right to take maternity leave, and six (6) male employees exercised their right to paternity leave, all of whom (100%) returned to work and were accepted back by the Company after the leave period ended. [GRI 401-3]



Realisasi Maternity dan Paternity Leave Tahun 2023

Maternity and Paternity Leave in 2023

[GRI 401-3]

Uraian Description	Karyawan Employee	
	Perempuan Female (Maternity Leave)	Laki-laki Male (Paternity Leave)
Jumlah karyawan yang berhak mendapatkan hak cuti Number of employees entitled to leave entitlements	2	6
Jumlah karyawan yang menggunakan hak cuti Number of employees who exercise their leave entitlements	2	6
Jumlah karyawan yang kembali bekerja setelah masa cuti berakhir Number of employees returning to work after the leave period ends	2	6
Jumlah karyawan yang kembali bekerja setelah masa cuti berakhir, yang masih dipekerjakan kembali 12 bulan setelah kembali bekerja Number of employees returning to work after the leave period ended, who were still working 12 months after their return	3	7
Tingkat karyawan yang menggunakan hak cuti yang kembali bekerja (%) Employees who exercised their leave entitlements and returned to work (%)	100%	100%
Tingkat karyawan yang kembali setelah masa cuti berakhir, yang masih dipekerjakan kembali 12 bulan setelah kembali bekerja Rate of employees returning to work after the leave period ended, who were still working 12 months after their return	100%	100%

Program Pensiun

Pension Program

Perseroan telah memiliki kebijakan atau peraturan terkait pensiun yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Tentang Surat Keputusan Masa Persiapan Pensiun Karyawan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan berdasarkan Peraturan Perusahaan Periode 2022-2024 Pasal 18 tentang Pensiun dan Pasal 44 tentang Jaminan Hari Tua/Program Pensiun.

Peraturan Perusahaan Periode 2022-2024 Pasal 42 tentang Jaminan Sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dimana Perseroan mengikutsertakan karyawan dalam program wajib BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Kemudian Pasal 44 tentang Jaminan Hari Tua/Program Pensiun dimana Perseroan menyelenggarakan program pensiun bagi karyawan tetap dengan menunjuk DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) sebagai pengelolanya.

Perseroan memiliki program pensiun bagi seluruh karyawan dengan ketentuan-ketentuan di bawah ini:

1. Usia pensiun karyawan ditetapkan 56 tahun, dengan waktu kerja terakhir jatuh pada akhir bulan saat karyawan berusia 56 tahun.
2. Dalam menjaga efisiensi dan efektivitas bisnis Perseroan atau dalam rangka memberikan kesempatan untuk pengembangan potensi diri karyawan, maka Perseroan dapat menentukan dan memberhentikan karyawan dengan hak pensiun.

The Company has policies or regulations related to pensions, as stipulated in the Board of Directors' Decree on the Letter of Pension Preparation Period for Employee of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), and based on the 2022-2024 Company's Regulation Article 18 on Pensions and Article 44 on Provident Fund Benefit/Pension Program.

The 2022-2024 Company's Regulation Article 42 on Social Security via the Social Security Administrative Body (BPJS), whereby the Company enrolls employees in the mandatory BPJS Employment program, i.e., Death Benefit, Work Accident Benefit, Provident Fund Benefit, and Pension Benefit. In addition, pursuant to Article 44 on Provident Fund Benefit/Pension Program, the Company holds a pension program for permanent employees by appointing DPLK (Financial Institution Pension Fund) as the manager.

The Company has a pension program for all employees under the following conditions:

1. The employee retirement age is set forth at 56 years, with the last working month in the month when employee turns 56 years old.
2. To maintain the efficiency and effectiveness of the Company's business or to provide opportunities for developing the employees' personal potential, the Company can determine and dismiss employees with retirement rights.

Perseroan akan memberikan besaran remunerasi sehubungan dengan masa pensiun karyawan sesuai dengan ketentuan pada tiap-tiap program pensiun dengan manfaat dan iuran pasti yang diikuti oleh karyawan, seperti: [GRI 201-3]

1. Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS dengan kontribusi Perseroan 3,7% dari total pendapatan karyawan, dan kontribusi karyawan sebesar 2% dari total pendapatan karyawan.
2. Program Jaminan Pensiun (JP) kontribusi Perseroan adalah 3% dari total pendapatan karyawan.
3. Program DPLK kontribusi Perseroan adalah 7% dari gaji pokok karyawan, dan kontribusi karyawan adalah 3% dari gaji pokok karyawan.

Pada tahun 2023, PT PII menyalurkan liabilitas imbalan pensiun dan pascakerja lainnya sebesar Rp24.549,28 juta yang meningkat sebesar 74,11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp14.099,91 juta. Adapun asumsi utama yang digunakan PT PII dalam menentukan kewajiban imbalan pensiun dan pascakerja lainnya pada tahun 2023 adalah: **[GRI 201-3]**

The Company shall provide the amount of remuneration in relation to employee retirement in accordance with the provisions of each benefit and pay as you go pension plan participated by the employees, such as: [GRI 201-3]

1. Provident Fund Benefit (JHT) from BPJS, with the Company's contribution of 3.7% of total employee income, and employee contribution of 2% of total employee income.
2. Pension Guarantee Program (JP), with the Company's contribution of 3% of the employee's total income.
3. DPLK Program, with the Company's contribution of 7% of total employee income, and employee contributions of 3% of total employee income.

In 2023, IIGF disbursed pension and other post-employment benefits obligations amounting to Rp24,549.28 million which increased by 74.11% compared to the previous year of Rp14,099.91 million. The principal assumptions used in determining pension and other post-employment benefits obligation in 2023 as follows: [GRI 201-3]

Asumsi/Skema Penentuan Kewajiban Imbalan Pensiun atau Pascakerja
Assumptions/Scheme for Determining Pension or Post-employment Benefit Obligations
 [GRI 201-3]

Usia pensiun normal Retirement age	56 tahun 56 years
Tingkat diskonto Discount rate	6.80%
Tingkat mortalitas Mortality rate	TMI 4 (2019)
Tingkat kenaikan gaji Salary increment rate	10.00%
Tingkat pengunduran diri Resignation rate	5% sampai usia 25 tahun dan menurun secara linear ke 1% di usia 45 tahun dan seterusnya 5% up to age 25 and reducing linearly to be 1% at age 45 and thereafter

Selain memberikan bekal finansial kepada para purnabakti, PT PII turut mengikutsertakan para karyawan yang akan memasuki masa purnabakti pada program pelatihan Masa Persiapan Pensiun (MPP). Program MPP ini meliputi pembekalan pada aspek kesehatan, manajemen keuangan, kewirausahaan, psikologi dan motivasional. Sepanjang tahun 2023, jumlah karyawan PT PII yang pensiun adalah sebanyak 1 (satu) orang dimana 1 (satu) orang karyawan tersebut diberikan kesempatan oleh PT PII untuk dapat mengikuti kegiatan pelatihan MPP dengan topik *training* atau *workshop* yang dapat disesuaikan dengan bidang yang hendak ditekuni ketika pensiun. [GRI 404-2]

In addition to providing financial provisions to retirees, IIGF also ensures such employees participated in the Pension Preparation Training (MPP) program for employees who will enter retirement. MPP program includes provisions on health, financial management, entrepreneurship, psychology, and motivational aspects. In 2023, one (1) employee of IIGF retired and was given the opportunity to participate in MPP training, with training topics or workshops that could be adjusted to the field they wanted to pursue when retiring. [GRI 404-2]



Menjaga Hubungan Industrial yang Baik Maintaining Good Industrial Relations

Dalam rangka menjaga hubungan industrial yang telah terjalin dengan baik antara karyawan dengan Perseroan, PT PII memastikan terpenuhinya setiap hak dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku. Hak karyawan untuk berserikat dan berkumpul turut dijamin Perseroan melalui tersedianya fasilitas komunikasi dan forum diskusi bagi karyawan untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan maupun penyampaian aspirasi. PT PII berkomitmen untuk merespon setiap isu maupun keluhan karyawan secara serius dan bertanggung jawab melalui berbagai pendekatan seperti *townhall meeting* dan *Focus Group Discussion*.

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dengan masa berlaku mulai 2022 hingga 2024 yang didalamnya terdapat penjelasan terkait kebebasan berpendapat yang diberikan Perseroan kepada karyawan. PP ini kemudian dijadikan sebagai pedoman baik oleh Perseroan maupun karyawan dalam menjaga hubungan ketenagakerjaan dan hubungan industrial. PP melindungi seluruh (100%) karyawan. [GRI 2-30]

Sebagai upaya membangun hubungan yang harmonis antara Perseroan dengan karyawan, sepanjang tahun 2023 PT PII melaksanakan program inisiasi sebagai berikut:

1. *Company Gathering*
2. *Townhall Meeting*
3. Kegiatan dalam rangka Perayaan HUT Perseroan
4. *Employee Engagement Survey*
5. *WFO Treat*
6. TJSJ yang melibatkan karyawan (*Employee Voluntary Program*)
7. Kegiatan tematik (Kartini, perayaan 17 Agustus, Ramadhan, dsb).

IIGF ensures the fulfillment of every right and responsibility to maintain a well-established industrial relationship between employees and the Company, in accordance with the Company's Regulations and prevailing laws. The right of employees to associate and assemble is guaranteed by the Company through the availability of communication facilities and discussion forums for employees to discuss employment issues and convey aspirations. IIGF is committed to responding to every issue and employee complaint seriously and responsibly through various approaches, such as town hall meetings and Focus Group Discussions.

The Company has a Company's Regulation (PP) with a validity period from 2022 to 2024, which stipulates the freedom of speech provided by the Company to employees. PP is referred to as a guideline by both the Company and employees in maintaining employment relations and industrial relations. The PP protects all (100%) employees. [GRI 2-30]

In an effort to establish a harmonious relationship between the Company and employees, in 2023, IIGF implemented the following initiation programs:

1. Company Gathering
2. Townhall Meeting
3. Activities to Celebrate the Company's Anniversary
4. Employee Engagement Survey
5. WFO Treat
6. CSR involving employees (*Employee Voluntary Program*)
7. Thematic activities (Kartini, Independence Day celebration, Ramadhan, etc.)

Menjaga Keselamatan dan Kesehatan Karyawan Maintaining Employee Health and Safety

[OJK F.21]

Keselamatan dan kesehatan karyawan menjadi prioritas utama bagi PT PII sejalan dengan upaya pencapaian visi dan misi Perseroan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan kerja yang baik dioptimalkan Perseroan dengan turut memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan karyawan. Berbagai peralatan dan fasilitas penunjang keamanan maupun kesehatan diberikan PT PII sesuai Surat Keputusan Direksi tentang Fasilitas Kesehatan dan Asuransi Jiwa/Kecelakaan Karyawan seperti tersedianya tenaga ahli dokter yang dipekerjakan oleh Perseroan untuk menyediakan layanan konsultasi kesehatan, pemantauan kondisi kesehatan serta membantu Perseroan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan.

Employee health and safety is IIGF's top priority, in line with efforts to achieve the Company's vision and mission. Therefore, the Company optimizes the management of a good working environment with due regards to the employees' health and safety. IIGF provides various equipment and facilities to support health and safety, in accordance with the Board of Directors' Decree on Employee Health Facilities and Life/Accident Insurance, such as the availability of expert doctors employed by the Company to provide health consultation services, monitor health conditions, and assist the Company in raising awareness of the importance of maintaining health.

Dalam rangka meningkatkan budaya keselamatan dan kesehatan pada diri karyawan, PT PII melalui Divisi Human Capital and Organization Development menyediakan fasilitas dokter Perseroan, psikolog dan menyelenggarakan berbagai kegiatan olahraga karyawan sebagai tindakan preventif dan membiasakan diri untuk hidup sehat.

Perseroan juga secara berkelanjutan melakukan *monitoring* kesehatan karyawan melalui kegiatan *Medical Check Up* (MCU). Lebih lanjut, Perseroan juga memiliki program *work life balance* kepada seluruh karyawan dengan menyediakan ruang ibu menyusui bagi karyawan perempuan, mendukung pelaksanaan kegiatan yang melibatkan PERIKAPI serta memberikan fasilitas *hybrid working* dimana karyawan diminta ke kantor minimal 3 hari dari 5 hari kerja.

Sebagai respon atas adanya risiko yang mengancam keselamatan karyawan di lingkungan kerja berupa gedung tinggi, Perseroan melakukan kegiatan identifikasi risiko sebagai tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan atas risiko terkait dengan cara selalu diterapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) Siaga Tanggap Darurat yang mencakup proses pelaporan keadaan darurat, proses evakuasi serta jenis-jenis keadaan darurat. SOP tanggap darurat Perseroan meliputi keadaan gempa, kerusakan atau gangguan sipil, kebakaran, kegagalan ventilasi, proses evakuasi gedung, serta keadaan darurat lainnya.

To improve the culture of health and safety in employees, IIGF, via its Human Capital and Organization Development Division, provides facilities, such as the Company's doctors and psychologists, and organizes various employee sports activities as a preventive measure and to adapt to healthy living.

The Company monitors employee health through the Medical Check Up (MCU) activities. Further, the Company has a work-life balance program for all employees by providing a nursing room for female employees, supporting PERIKAPI's activities, and providing hybrid working facilities where employees are required to come to the office at least 3 days out of 5 working days.

In response to the risks that threaten the employees' safety in the working environment at high-rise buildings, the Company conducts risk identification activities as a preventive measure and preparedness for related risks, by always implementing the Standard Operating Procedure (SOP) Emergency Response Standby, which includes the emergency report process, the evacuation process, and types of emergencies. The Company's Emergency Response SOP includes earthquakes, riots or civil disturbances, fires, ventilation failures, building evacuation processes, and other emergencies.

Jumlah Kecelakaan Kerja
Number of Work Accidents

Jenis Type	2023	2022	2021
Ringan Mild	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Sedang Moderate	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Berat Portion	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Jumlah Total	Nihil None	Nihil None	Nihil None

Survei Keterikatan Karyawan

Employee Engagement Survey

PT PII menyadari bahwa karyawan memegang peranan krusial dalam kelancaran kelangsungan usaha dan pertumbuhan bisnis. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir PT PII secara konsisten mengukur tingkat komitmen karyawan terhadap produktivitas dan kualitas pekerjaan mereka untuk memahami sejauh mana keterikatan karyawan terhadap Perseroan. Pada tahun 2023, Survei Keterikatan Karyawan diikuti oleh 154 karyawan dengan hasil survei keterikatan didapati sebesar 79. Hasil survei ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil survei pada tahun 2022 yaitu skor 77. Hal ini menandakan adanya peningkatan kearah yang lebih baik terkait pengelolaan aspek ketenagakerjaan oleh Perseroan.

IIGF understands that employees have a key role in business sustainability and growth. Therefore, in recent years, IIGF consistently assessed the level of employee commitment to the productivity and quality of their work to understand employee engagement with the Company. In 2023, the Employee Engagement Survey was participated in by 154 employees with a score of 79. The result is higher when compared to the survey results in 2022, which was 77. This reflects an improvement towards better management of the Company's employment aspects.



Evaluasi Pengelolaan SDM dan Penanganan Pengaduan

HR Management Evaluation and Complaint Handling

[GRI 2-27]

Untuk menjaga hubungan harmonis dengan karyawan, PT PII secara terbuka menerima setiap pengaduan dan keluhan karyawan dan menindaklanjutinya dengan baik yang dapat disampaikan melalui *Whistleblowing System* atau melalui:

To maintain a harmonious relationship with employees, IIGF openly accepts every employee complaint, and follows up on it properly. The complaints can be submitted through a Whistleblowing System or:

Saluran Pengaduan Pelanggaran Whistleblowing Channel

Capital Place Lantai 7-8,
Jl. Gatot Soebroto Kav. 18, Jakarta 12710



<https://ptpii.co.id/pelaporan-pelanggaran>

pelaporan@iigf.co.id



(021) 57950550

Hingga akhir tahun 2023, PT PII tidak menerima pengaduan dari karyawan terkait ketidakpatuhan Perseoran terhadap hukum dan peraturan terkait pengelolaan ketenagakerjaan Perseroan.

As of the end of 2023, IIGF received no complaints from employees in terms of the Company's non-compliance with laws and regulations related to the Company's employment management.



Memperluas Dampak Bagi Pembangunan Masyarakat Berkelanjutan

Expanding Impact for Sustainable Community Development

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menjadi wujud nyata komitmen dan kepedulian PT PII dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat. Melalui program TJSL, PT PII tidak hanya menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, tetapi juga mitra pembangunan yang aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan dan menjadi agen perubahan yang berdaya guna yang mampu menciptakan nilai dan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan.

The Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR) program is a tangible manifestation of IIGF's commitment and concern in developing the environment and society. Through CSR program, IIGF is not only a socially and environmentally responsible company, but also an active development partner in enhancing social and environmental welfare and becoming an effective agent of change that shall be able to create value and positive impact on society and the environment sustainably.



Pendekatan Manajemen Topik Masyarakat Lokal

Management Approach to Local Community
[GRI 3-3]

PENGELOLAAN DAMPAK



IMPACT MANAGEMENT

PT PII telah melakukan pengelolaan dampak terhadap masyarakat lokal dengan tujuan untuk meminimalkan potensi dampak negatif yang timbul yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan. Dampak negatif tersebut dapat mencakup potensi konflik sosial dengan masyarakat yang dapat mengganggu kelancaran operasional, respon negatif dari pemangku kepentingan yang berpotensi merusak reputasi dan hubungan Perseroan, serta risiko pengalokasian dana TJSL yang tidak tepat sasaran hingga tuntutan hukum, denda atau sanksi lainnya.

Untuk mencegah dampak negatif tersebut, PT PII telah melaksanakan berbagai strategi dan upaya berkelanjutan, salah satunya dengan merealisasikan program TJSL. Program ini meliputi berbagai kegiatan seperti pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan, kesehatan dan sosial keagamaan. PT PII meyakini bahwa melalui berbagai strategi dan upaya tersebut, dampak positif dapat diciptakan, termasuk peningkatan reputasi Perseroan, keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat dan pemangku kepentingan dalam program Perseroan, serta peningkatan ekonomi, kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di wilayah di mana Perseroan beroperasi.

IIGF conducted impact management on local community with the objective of minimizing the potential negative impacts that arise that may affect the Company's operations. Such negative impacts may include potential social conflicts with communities that may disrupt smooth operations, generate negative responses from stakeholders which may damage the Company's reputation and relationships, as well as wrongly allocate CSR funds that are not on target, and expose the Company to lawsuits, fines, or other sanctions.

IIGF implemented various strategies and sustainable efforts to prevent these negative impacts, one of which is by realizing the CSR program. This program includes various activities, such as environmental preservation, community empowerment, education, health, and social religious affairs improvement. IIGF understands that with various strategies and efforts, positive impacts can be created, including enhancing the Company's reputation, ensuring greater involvement of the community and stakeholders in the Company's programs, as well as improving the economy, welfare, and quality of life of the communities in the areas where the Company operates.



KEBIJAKAN YANG TELAH DIKEMBANGKAN SECARA KHUSUS



SPECIFICALLY DEVELOPED POLICIES

Kebijakan PT PII terkait Masyarakat Lokal:

- › Anggaran Dasar Perseroan
- › Surat Keputusan Direksi tentang Besaran Penyaluran Dana Sponsorship dan Dana Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
- › Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
- › Pedoman dan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Kebijakan PT PII terkait Masyarakat Lokal mengacu pada Ketentuan Umum:

- › Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- › Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- › Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

IIGF's policies regarding Local Community:

- › Company's Articles of Association
- › The Board of Directors' Decree on the Fund Disbursement for Sponsorship, and Corporate Social and Environmental Responsibility
- › The Board of Directors' Decree on the Guidelines for Corporate Social Responsibility Implementation
- › Standard Operational Procedures and Guidelines for Corporate Social Responsibility Implementation

IIGF's policies regarding Local Community refer to the General Provisions:

- › Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended by Law No. 11 of 2020 on Job Creation
- › Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, as amended by Law No. 11 of 2020 on Job Creation
- › Government Regulation No. 47 of 2012 on Limited Liability Company's Social Responsibility

KOMITMEN



COMMITMENT

- › Melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam rangka mengadopsi konsep Menciptakan Nilai Bersama (*Creating Shared Value/CSV*)
- › Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan
- › Membina hubungan yang harmonis dan sinergis dengan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan

- › Implementing the Corporate Social Responsibility (CSR) program to adopt the concept of Creating Shared Value (CSV)
- › Improving the community's quality of life to achieve sustainable development
- › Fostering a harmonious and synergistic relationship with community leaders and stakeholders

TUJUAN/TARGET



OBJECTIVES/TARGETS

- › Memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya bagi masyarakat dan lingkungan
- › Memperkuat reputasi Perseroan dan menciptakan citra positif di mata pemangku kepentingan
- › Memberikan nilai tambah bagi Perseroan, pemangku kepentingan dan masyarakat

- › Providing the best benefits for society and the environment
- › Strengthening the Company's reputation and creating a positive image in terms of the stakeholders' perspective
- › Providing added value to the Company, stakeholders, and the community

EVALUASI DAN EFEKTIVITAS TINDAKAN UNTUK MENGELOLA DAMPAK



EVALUATION AND EFFECTIVENESS OF IMPACT MANAGEMENT MEASURES

- › Studi kelayakan terhadap dampak dari kegiatan penjaminan infrastruktur, mencakup penilaian atas manfaat dan risiko kerugian yang dapat timbul
- › Laporan *monitoring* program
- › Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program TJSL
- › Laporan evaluasi program TJSL

- › Feasibility study on the impact of infrastructure guarantee activities, including an assessment of the benefits and risks of losses that may arise
- › Program monitoring report
- › Responsibility report for the CSR program
- › CSR program evaluation report

PENANGGUNG JAWAB



PERSON IN CHARGE

Corporate Secretary and Communication di bawah Direktur Utama berkoordinasi dengan divisi terkait lainnya

Corporate Secretary and Communications reporting directly to the President Director, coordinating with other related divisions



ALOKASI ANGGARAN



BUDGET ALLOCATION

Perseroan telah mengalokasikan dana sebesar Rp7,3 miliar dengan tingkat penyerapan sebesar 61% atau dengan realisasi sebesar Rp4,43 miliar dari total alokasi anggaran TJSL di tahun 2023

The Company has budgeted Rp7.3 billion, with an actual expenditure of 61% or Rp4.43 billion of the total CSR budget in 2023

KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN DAMPAK



STAKEHOLDERS' ENGAGEMENT IN MANAGING IMPACT

Badan Tata Kelola Tertinggi

- Menyetujui dan menetapkan program TJSL selama setahun dengan turut menetapkan tujuan dan sasaran setiap program yang diinisiasi sehingga program terlaksana dengan hasil optimal

Divisi Corporate Secretary & Communication

- Merancang, melaksanakan, memonitor serta mengevaluasi program TJSL serta melaporkan program-program yang telah terlaksana beserta pencapaiannya.

Mitra Program

- Mendukung PT PII dalam pelaksanaan program TJSL termasuk dalam proses persiapan, sosialisasi, pendampingan, monitoring dan pelaporan program

Penerima Manfaat

- Berpartisipasi dalam pelaksanaan program TJSL sebagai peserta program dengan target dan klasifikasi yang telah dicanangkan Perseroan dan mitra program

Karyawan PT PII

- Berpartisipasi dalam program *Employee Voluntary Program* (EVP) yang telah dicanangkan oleh Perseroan

Supreme Governance Body

- Approving and determining yearly CSR activities by setting goals and objectives for each program initiated to provide optimal results on the implemented programs

Corporate Secretary & Communication Division

- Designing, implementing, monitoring, and evaluating CSR programs and reporting the programs that have been implemented and their achievements

Program's Partners

- Supporting IIGF in implementing CSR program, including in the process of preparation, socialization, assistance, monitoring, and reporting

Beneficiaries

- Participating in CSR programs as participants with targets and classifications set forth by the Company and program's partners

IIGF's employees

- Participate in the Employee Voluntary Program (EVP) program launched by the Company

Pedoman Pelaksanaan TJSL

CSR Guidelines

[GRI 413-1]

Dalam menjalankan setiap program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PT PII berpedoman pada sejumlah peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan baik secara internal maupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman Pelaksanaan TJSL termasuk dalam hal ini adalah peraturan dan kebijakan internal yang mencakup:

- Anggaran Dasar Perseroan
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Surat Keputusan Direksi Perseroan tentang Besaran Penyaluran Dana *Sponsorship*, Donasi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
- Surat Keputusan Direksi Perseroan tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan
- Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

In carrying out each Social Responsibility (CSR) program, IIGF refers to several regulations and policies that have been established internally and in accordance with prevailing laws and regulations. CSR Implementation Guidelines include internal regulations and policies which include:

- Company's Articles of Association
- Government Regulation No. 47 of 2012 on the Corporate Social Responsibility of Limited Liability Companies
- The Board of Directors' Decree on the Fund Disbursement for Sponsorship, Donation, Corporate Social Responsibility
- The Board of Directors' Decree on the Guidelines for Corporate Social Responsibility Implementation
- Standard Operating Procedure for Corporate Social Responsibility Implementation.



Prinsip Dasar Pelaksanaan TJSL

Basic Principles of CSR Implementation

[GRI 413-1]

Terintegrasi Integrated

01

Program TJSL dilaksanakan berdasarkan analisa kebermanfaatan, risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan

CSR programs are implemented based on analysis of benefits, risks, and business processes that relate to the stakeholders

Terarah Targeted

02

Program TJSL memiliki arah dan target yang jelas untuk mencapai tujuan Perseroan

CSR programs have clear direction and targets to achieve the Company's objectives

Terukur Measured

03

Program TJSL memiliki dampak sosial dan lingkungan serta memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan Perseroan

CSR programs have social and environmental impacts and provide benefits that generate change or added value for stakeholders and the Company

Akuntabel Accountable

04

Pelaksanaan Program TJSL dapat dipertanggungjawabkan sehingga memitigasi potensi penyalahgunaan dan penyimpangan

CSR programs can be accounted for, thus mitigating the potential for misuse and irregularities

Berkelanjutan Sustainable

05

Pelaksanaan TJSL mempertimbangkan aspek kebermanfaatan secara berkelanjutan bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan serta kontribusi dalam pembangunan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung

CSR considers aspects of sustainable benefits for the community and stakeholders, as well as contributions to economic development, both directly and indirectly

Transparan Transparent

06

Pelaksanaan kegiatan TJSL bersifat terbuka dan diungkapkan dalam pelaporan kegiatan Perseroan secara berkala kepada pemangku kepentingan serta pihak terkait lainnya

The CSR activities is implemented openly and is disclosed in the Company's regular reports to stakeholders and other related parties

Perencanaan dan Pelaksanaan Program TJSL

CSR Program Planning and Implementation

[GRI 413-1]

Perencanaan dan pelaksanaan program TJSL Perseroan dilakukan oleh Divisi Corporate Secretary & Communication selaku divisi yang ditunjuk Perseroan untuk merancang sekaligus mengawasi keberhasilan pelaksanaan program TJSL. Proses perencanaan program TJSL juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai divisi lain di Perseroan serta pihak eksternal seperti institusi pemerintah, akademisi, lembaga kemanusiaan dan komunitas masyarakat setempat. Tujuan utama dari keterlibatan berbagai pihak ini adalah untuk memperoleh masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan yang terlibat atau terdampak oleh aktivitas operasional Perseroan. Dengan demikian, diharapkan hasil akhir dari program TJSL yang disusun adalah program yang unggul dan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat setempat.

The Company's CSR planning and implementation is carried out by the Corporate Secretary & Communication Division as the division appointed by the Company to design and supervise the successful implementation of CSR programs. CSR program's planning process involves collaboration with various other divisions in the Company and external parties, such as government institutions, academics, humanitarian agencies, and local communities. The main objective of involving these various parties is to obtain input and aspirations from stakeholders who are involved or affected by the Company's operations. Thus, the final result of the CSR program shall be excellent programs that can have a significant positive impact on the environment and local communities.



Dalam proses perencanaan program TJSL, Perseroan bersama mitra program melakukan proses pemetaan dengan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yang terkait melalui audiensi, FGD dan diskusi langsung termasuk dengan Pemerintah Daerah atau Dinas terkait. Koordinasi ini dilakukan guna, diantaranya untuk mengetahui kebutuhan kegiatan, penentuan calon penerima manfaat termasuk penentuan target program. Termasuk dalam penilaian dampak program, Perseroan dibantu mitra program mengukur dampak program dengan penilaian sebelum dan sesudah program baik menggunakan *pre test* dan *post test* termasuk dengan *interview* secara langsung dengan penerima manfaat program.

Pelaksanaan program TJSL PT PII mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh internal Perseroan dengan mempertimbangkan berbagai aspek; efektivitas, efisiensi dan masukan dari pemangku kepentingan. Ketentuan TJSL Perseroan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan serta evaluasi dan tindak lanjut.

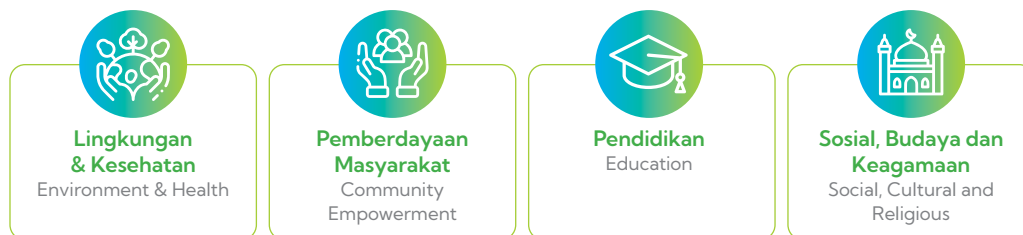
Setiap kegiatan program TJSL didasarkan pada komitmen Perseroan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan mendukung program pemerintah dengan berbasis pada prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST), serta kegiatan yang dianggap mampu memberikan kesejahteraan dan manfaat jangka panjang kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat. Beberapa kategori bidang Program TJSL PT PII meliputi:

In the CSR program planning process, the Company together with program partners conducts a mapping process by coordinating with relevant stakeholders through hearings, FGDs and direct discussions including with the Regional Government or related agencies. This coordination is carried out to, among others, determine the needs of the activities, determine potential beneficiaries including the determination of program targets. Included in the program impact assessment, the Company assisted by program partners measures the impact of the program by assessing before and after the program both using pre tests and post tests including by direct interviews with program beneficiaries.

IIGF's CSR program follows the provisions set forth by the Company internally by considering various aspects; effectiveness, efficiency, and input from Stakeholders. The Company's CSR provisions include planning, implementation, monitoring, reporting and evaluation, and follow-up.

Each CSR program is based on the Company's commitment to supporting the Sustainable Development Goals (SDGs) achievement and government programs based on the Environment, Social, and Governance (ESG) principles, as well as activities that are considered capable of providing welfare and long-term benefits to all stakeholders, especially the community. Some categories of IIGF's CSR Program include:

Fokus Utama Bidang Penyaluran Program TJSL PT PII Main Focus of IIGF's CSR Program Distribution



Pada tahun 2023, PT PII belum melaksanakan analisis *Social Return on Investment* (SROI) untuk program TJSL yang dijalankan. Meskipun demikian, Perseroan tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap program TJSL memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. [GRI 203-2]

In 2023, PT PII has not conducted a Social Return on Investment (SROI) analysis for the CSR program implemented. Nevertheless, the Company remains committed to ensuring that every CSR program has a significant positive impact on society and the environment. [GRI 203-2]

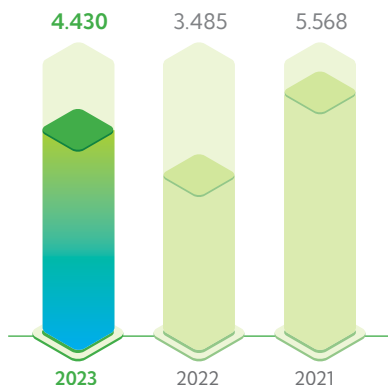


Penyaluran Dana Program TJSL CSR Fund Disbursement

Pada tahun 2023, PT PII menyalurkan dana sebesar Rp4,43 miliar, meningkat dibanding penyaluran tahun 2022 sebesar Rp3,48 miliar. Dana ini disalurkan untuk lima fokus bidang program TJSL PT PII.

In 2023, IIGF distributed a total of Rp4.43 billion of CSR fund, increased compared to the disbursement in 2022 of Rp3.48 billion. These funds were disbursed to five focus areas of IIGF's CSR program.

Realisasi Penyaluran Dana TJSL (Rp Juta) CSR Fund Disbursement Realization (Rp Million)



Realisasi Penyaluran Dana Program TJSL (Rp Juta)

CSR Program Fund Disbursement (Rp Million)

[OJK F.23]

Bidang Program TJSL CSR Program Sector	2023	2022	2021
Lingkungan & Kesehatan Environment & Health	825,64	949,62	1.270,44
Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment	987,84	887,96	1.734,34
Pendidikan Education	937,62	389,18	1.485,29
Sosial, Budaya dan Keagamaan Social, Cultural and Religious	1.678,69	1.258,28	1.077,95
Total	4.429,79	3.485,04	5.568,02

Realisasi Program TJSL Tahun 2023

CSR Program in 2023

[GRI 203-2, 413-1, 413-2] [OJK F.23, F.25]

Rp4,43

Miliar **Billion**



**Total Realisasi Penyaluran
Dana Program TJSL**
Total CSR Fund Disbursement
Realization

17.903

Orang **Person**



**Total Masyarakat Penerima
Manfaat Program TJSL**
Total Beneficiaries of CSR Programs

40

Wilayah **Area**



**Total Wilayah Penerima
Manfaat TJSL**
Total Areas Benefiting from CSR

PT PII memiliki program TJSL prioritas yang difokuskan pada dua bidang utama: pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua bidang ini menjadi fokus utama pemerintah dalam mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dengan tujuan menciptakan kesejahteraan yang dapat mendukung percepatan pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, program TJSL Prioritas PT PII dilaksanakan melalui berbagai inisiatif, termasuk dukungan dalam percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia serta program ekonomi masyarakat melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan kewirausahaan.

IIGF has prioritized CSR areas focusing on two main sectors, i.e., environmental preservation and community empowerment. These two areas are the Government's main focus to actualize the Sustainable Development Goals (SDGs) by creating prosperity, which is considered to be capable of supporting accelerated development and improving the people's economy. In terms of community empowerment, IIGF's Flagship CSR Program is implemented to support the acceleration of Indonesia's infrastructure development as well as through the community economic program through Micro, Small, and Medium Entrepreneurs (MSMEs) by providing entrepreneurship education and training programs.

Program TJSL Prioritas Tahun 2023

Flagship CSR Program in 2023

[GRI 203-2, 413-1, 413-2] [OJK F.25]

Program WE CARE (Waste Management for Circular Economy)

WE CARE (Waste Management for Circular Economy) Program



Dukungan terhadap Pencapaian SDGs:

Support for SDGs Achievement:



Keberlanjutan Program

Program Sustainability





Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diwakili oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban meresmikan Program TJSL berupa pengelolaan sampah berbasis sirkular ekonomi sinergi enam SMV Kemenkeu bertajuk "WE CARE" di Yogyakarta pada 28 November 2023. Program WE CARE merupakan salah satu program *flagship* TJSL PT PII yang fokus pada pengelolaan sampah baik organik maupun anorganik melalui 2 inisiatif:

1. Pengelolaan sampah organik melalui budidaya BSF (*Black Soldier Fly*)/maggot di kota Yogyakarta

Program ini merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pengelolaan sampah organik yang berfokus pada pengembangan Kandang Maggot Jogja (KMJ). Kemudian pada tahun 2023 ini, program berfokus pada pengembangan plasma maggot di 6 lokasi (Kelurahan Karangwaru, Bumijo, Winongo Asri, Bener, Wirobrajan, dan Badran) yang meliputi: studi pendahuluan dan 5 tahap *capacity building*, yaitu pemahaman mengenai BSF secara umum; teknis operasional dan *workshop* kelembagaan dan peraturan; keuangan, bisnis model, ekspor; serta *branding*. Program WE CARE dilaksanakan sejak Oktober 2023 hingga Desember 2023, dan akan dilanjutkan pada tahun 2024.

2. Optimalisasi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Dewanata Dieng Kulon, Banjarnegara

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah Desa Dieng Kulon yang bertanggung jawab dari segi 5 aspek persampahan (kelembagaan, teknis operasional, keuangan, peraturan dan peran serta masyarakat) di TPST Dewanata. Pada 2023, ruang lingkup program ini meliputi studi pendahuluan, 3 *training capacity building* pengelola TPST yang mencakup kelembagaan, teknis operasional, keuangan, serta evaluasi implementasi *training*.

Minister of Finance, Sri Mulyani Indrawati, represented by the Director General of State Assets, Rionald Silaban, inaugurated the CSR Program, i.e., waste management for circular economy based on the synergy of six Ministry of Finance's SMVs entitled "WE CARE" at Yogyakarta on 28 November 2023. The WE CARE program is one of IIGF's CSR flagship programs that focuses on managing both organic and inorganic waste through 2 initiatives:

1. Organic waste management using BSF (*Black Soldier Fly*)/maggot cultivation in Yogyakarta

This program is a continuation of the organic waste management program with a focus on Maggot Cages in Jogja, i.e., Kandang Maggot Jogja (KMJ). Further, in 2023, the program focused on developing maggot plasma in 6 locations (Karangwaru, Bumijo, Winongo Asri, Bener, Wirobrajan, and Badran villages) which include preliminary studies and 5 phases of capacity building, i.e., general understanding of BSF; technical operations and workshops; institutions and regulations; finance, business model, exports; and branding. WE CARE program has been implemented since October 2023 up to December 2023, and will be continued in 2024.

2. Optimization of the Integrated Waste Disposal Site (TPST) at Dewanata Dieng Kulon, Banjarnegara.

This program has the objective of optimizing responsible waste management of Dieng Kulon Village in 5 aspects of waste (institutional, technical operations, finance, regulations, and community participation) at TPST Dewanata. In 2023, the program's scope includes a preliminary study, 3 capacity building for TPST managers, covering institutional, technical operations, finance, and evaluation of training.

Proyeksi Dampak Program Program Impact Projection

- > Penyerapan sampah organik sebesar 153,6 ton per tahun
Organic waste absorption of 153.6 tons per year
- > Produksi maggot *fresh* sebesar 59,6 ton per tahun
Fresh maggot production of 59.6 tons per year
- > Produksi kasgot sebesar 38,4 ton per tahun
Kasgot (BSF residual) production of 38.4 tons per year
- > Pendapatan ekonomi dari hasil penjualan maggot *fresh* dan kasgot sebesar Rp472,69 juta per tahun
Economic income from the sale of fresh maggot and kasgot amounted to Rp472.69 million per year



Bidang Lingkungan dan Kesehatan Environment & Health



Penyaluran Dana program TJSL Bidang Lingkungan dan Kesehatan
CSR Fund Disbursement for the Environment & Health

Rp825,64 Juta
Million



1. Program Pemulihan Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum

Yaitu program yang bertujuan untuk mewujudkan Sungai Citarum Bersih, Sehat dan Lestari melalui penanaman pohon di wilayah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 2.290 pohon Kopi Arabika telah ditanam dengan keluasan setara 4,58 hektare yang dimulai sejak Oktober 2022 hingga Oktober 2023.

2. Program Penanggulangan Lahan Kritis Dataran Tinggi Dieng

PT PII bersama PT Geo Dipa Energi dan Pemerintah Daerah Banjarnegara melaksanakan program penanaman 15.000 pohon yang bertujuan untuk mendukung upaya penanggulangan lahan kritis di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Program penanaman pohon ini dimulai sejak 6 Januari hingga 12 Februari 2023.

3. Program Revitalisasi Akses Air Bersih & Management Pengelolaan Berbasis Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT

PT PII berkomitmen untuk mendukung ketersediaan air bersih di daerah pedalaman Indonesia, salah satunya di daerah Nusa Tenggara Timur. Di Desa Tliu Kabupaten Timor Tengah Selatan, PT PII bekerjasama dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah mendukung sarana pendukung akses air bersih berbasis masyarakat dan manajemen pengelolaannya yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari serta geliat ekonomi warga Desa Tliu. Adapun pelaksanaan program meliputi:

1. Citarum Watershed Ecosystem Restoration Program

This is a program with the objective to create a Clean, Healthy, and Sustainable Citarum River through tree planting in Bandung Regency, West Java Province. 2,290 Arabica Coffee trees were planted in an area equivalent to 4.58 hectares from October 2022 to October 2023.

2. Dieng Plateau Critical Land Restoration Program

IIGF, in collaboration with PT Geo Dipa Energi and the Banjarnegara Government planted 15,000 tree planting program with the objective to support efforts to reduce critical land in Dieng Plateau Area. The tree planting program was conducted from 6 January to 12 February 2023.

3. Clean Water Access Revitalization & Community-Based Management Program, Timor Tengah Selatan Regency, East Nusa Tenggara

IIGF is committed to supporting the availability of clean water in rural areas of Indonesia, one of which is at East Nusa Tenggara. In Tliu Village, Timor Tengah Selatan Regency, IIGF, in collaboration with the Muhammadiyah Community Empowerment Council (MPM) supported community-based clean water access facilities and management that are beneficial for the daily lives and economic development of Tliu villagers. The program implementation includes:



- Sosialisasi program pembangunan bak penampung air sumur Tliu, atap/ sumur Tliu, instalasi pipa air, instalasi listrik, *workshop* pengelolaan air berbasis masyarakat
- Pengadaan bak penampung utama air sumur Tliu
- Pengadaan instalasi pipa air bersih dengan jenis pipa PN 16 SDR sepanjang 250 meter yang dapat dirasakan oleh warga Tliu sekitar 250 keluarga.
- Pengadaan atap (penutup) air sumur Tliu
- *Workshop* tata kelola kelembagaan air bersih berbasis masyarakat (Pamsimas) Desa Tliu
- Konsultasi dan pendampingan pengelolaan air bersih (Pamsimas Desa Tliu)
- Pengadaan kendaraan operasional pengelolaan air bersih (Pamsimas)
- *Monitoring* dan evaluasi program peningkatan akses air bersih dan manajemen pengelolaan air bersih berbasis masyarakat

- Socialization of the construction program of the Tliu well water reservoir, Tliu roof/well, water pipe installation, electrical installation, community-based water management workshop
- Procurement of the main reservoir of Tliu well water
- Procurement of clean water pipe installation with PN 16 SDR pipe of 250 meters, beneficial for Tliu villagers of approximately 250 families.
- Procurement of roof (cover) of Tliu water well
- Workshop on institutional governance of community-based clean water (Pamsimas) in Tliu Village.
- Consultation and mentoring on clean water management (Pamsimas Tliu Village)
- Procurement of operational vehicles for clean water management (Pasimas)
- Monitoring and evaluation of program to improve access to clean water and management of community-based clean water management

4. Program Pengembangan Kapasitas Kader Sehat dan Peningkatan Gizi dengan Beras Nutrizinc

PT PII mendukung upaya penurunan angka *stunting* di Indonesia melalui Intervensi gizi spesifik, yakni intervensi yang berhubungan dengan peningkatan asupan karbohidrat dan protein untuk peningkatan gizi dan kesehatan. Melalui program pelatihan pertanian produk pertanian padi lokal unggulan beras nutrizinc yang telah dijalankan sebelumnya, PT PII telah memiliki sebuah produk beras, nutrizinc, hasil kolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Karawang yang dimana beras ini memiliki kadar *zinc* tinggi untuk pencegahan gizi buruk maupun *stunting*. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader sehat termasuk terkait pentingnya gizi keluarga ini meliputi:

- Edukasi/penyuluhan kepada kader sehat yang berada di 13 Desa lainnya dengan target total peserta adalah 390 kader sehat posyandu. Peserta pelatihan (Kader Sehat/ Posyandu) secara berkelanjutan memberikan edukasi untuk masyarakat minimal target 10% dari jumlah penduduk yang tercatat di kecamatan Klari yakni total 195.489 jiwa, khususnya untuk remaja, ibu hamil, ibu sedang menyusui, serta ibu-ibu dan remaja dengan kondisi anemia.

4. Healthy Cadre Capacity Building and Nutrition Improvement Program with Nutrizinc Rice

IIGF supported efforts to reduce *stunting* in Indonesia through specific nutrition interventions, i.e., interventions related to increasing carbohydrate and protein intake to enhance nutrition and health. By using the local nutrizinc rice product from agricultural training program that has been carried out, IIGF has a rice product, nutrizinc, in collaboration with the Ministry of Agriculture and the Karawang Regency Government, which has high zinc levels for the prevention of malnutrition and *stunting*. The program has the objective to increase the capacity of healthy cadres including the importance of family nutrition, including:

- Education/counseling to healthy cadres in 13 other villages with a total target of 390 Integrated Health Service Post healthy cadres. Training Participants (Healthy Cadres/ Integrated Health Service Post) continuously provide education for the community with a minimum target of 10% of the total population recorded in Klari Sub-District, with a total of 195,489 people, especially for adolescents, pregnant women, breastfeeding mothers, as well as mothers and adolescents with anemia.



- Penyaluran 3.550 paket gizi sehat yang berisi karbohidrat yang didapat dari beras nutrizinc and protein hewani untuk balita dan anak, perempuan dengan kondisi anemia, perempuan hamil, serta ibu yang memiliki anak balita usia sekolah

- Distribution of 3,550 healthy nutrition packages containing carbohydrates from nutrizinc rice and animal protein for toddlers and children, women with anemia, pregnant women, and mothers who have children under five school age.

5. Program BERAksi (Bergerak Atasi Stunting) Jakarta

PT PII mendukung Pemerintah Kota Jakarta Pusat dalam upaya menurunkan angka *stunting* khususnya di Kelurahan Johar Baru melalui program BERAksi (Bergerak Atasi Stunting). Program ini dilaksanakan dengan pemberian makanan sehat bergizi untuk 16 anak dengan kategori *underweight*, *wasting* dan *stunting* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi, memenuhi kecukupan protein, serta menambah berat badan dan tinggi anak. Program Jakarta BERAksi dilaksanakan selama 90 hari, sedangkan untuk anak yang mengalami *underweight* dilaksanakan selama 14 hari. Melalui program ini, orang tua juga diberikan edukasi tentang pentingnya makanan bergizi untuk tumbuh kembang anak.

5. BERAksi (Change to Overcome Stunting) Program in Jakarta

IIGF supported the Central Jakarta City Government to reduce stunting rates, especially in Johar Baru Village using the BERAksi (Change to Overcome Stunting) program. This program provided nutritious healthy food for 16 children with underweight, wasting, and stunting categories, with the objective to fulfill nutritional needs, meet protein adequacy, and increase children's weight and height. Jakarta BERAksi program is implemented for 90 days, while it was carried out for 14 days for underweight children. Through this program, parents are also educated about the importance of nutritious food for children's growth and development.

6. Donasi Sarana Tempat Sampah Premier di Bogor

PT PII memberikan bantuan berupa 40 tempat sampah di 40 lokasi berbeda di Kota Bogor.

6. Donation of Premier Trash Can Facilities in Bogor

IIGF provided assistance in the form of 40 trash bins in 40 different locations in Bogor City.

7. Pengelolaan Sampah Organik dan Residu Biomassa di Gunung Geulis Sumedang

PT PII bersinergi dengan alumni ITB melaksanakan bakti sosial di Gunung Geulis, Sumedang, Jawa Barat, dengan fokus pada pengolahan sampah organik dan residu biomassa menjadi bahan bakar terbarukan untuk *co-firing* dan kompor biomassa.

7. Organic Waste and Biomass Residue Management at Gunung Geulis Sumedang

IIGF in synergy with ITB alumni carried out social services at Gunung Geulis, Sumedang, West Java, focusing on processing organic waste and biomass residues into renewable fuels for *co-firing* and biomass stoves.

8. Donasi MCK di Situbondo

PT PII mendukung kebersihan dan kesehatan masyarakat Desa Curah Cottok, Situbondo, dengan membangun 5 bilik MCK untuk memenuhi kebutuhan mandi dan buang air yang sebelumnya dilakukan di ruang terbuka.

8. MCK Donation in Situbondo

IIGF supports the cleanliness and health of the people of Curah Cottok Village, Situbondo, by building 5 MCK cubicles to meet the needs of bathing and defecation that were previously carried out in open spaces.

9. Donasi Sarana Prasarana Kontainer Portabel Sampah di Yogyakarta

PT PII membantu pengadaan 10 container portable yang akan digunakan sebagai lokasi pengumpulan sampah organik di lokasi Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) terdekat.

9. Donation of Portable Waste Container Infrastructure in Yogyakarta

IIGF helped procure 10 portable containers that will be used as organic waste collection locations at the nearest Public Open Space (RTHP) location.



Bidang Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment

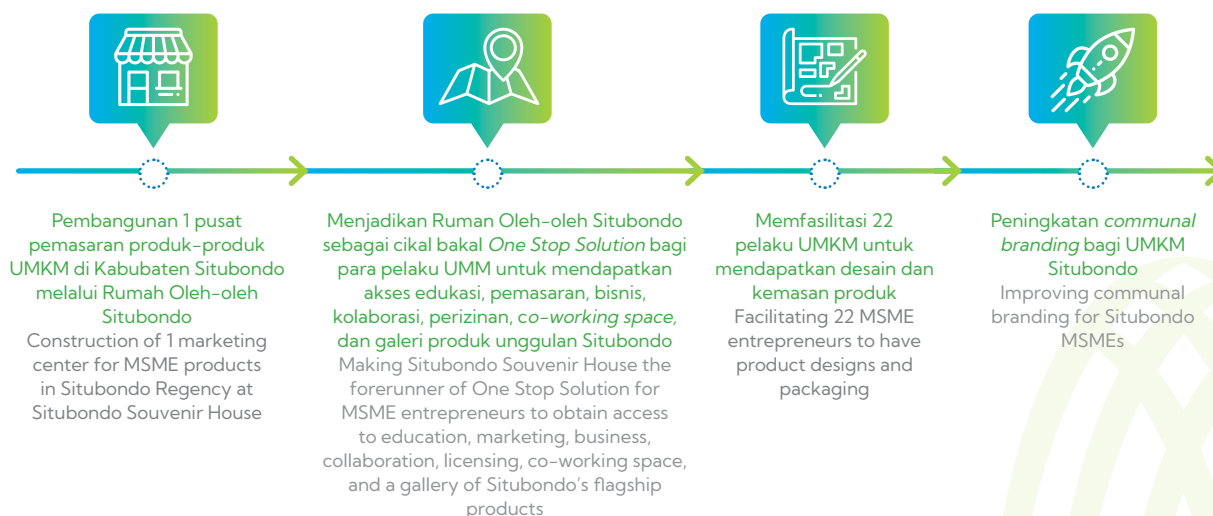


Penyaluran Dana program TJSL Bidang Pemberdayaan Masyarakat
CSR Fund Disbursement for the Community Empowerment

Rp987,84 Juta
Million



Pencapaian Program Tahun 2022-2023 Program Achievements in 2022-2023



1. Program Pemberdayaan UMKM "Rumah Oleh-oleh Situbondo"

PT PII berkomitmen untuk turut andil mendukung program pengembangan UMKM Indonesia, terutama yang berada di wilayah sekitar proyek yang dijamin. Salah satunya adalah wilayah Situbondo, Jawa Timur yang dilalui proyek Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi. Di Situbondo, PT PII bekerjasama dengan mitra program yakni Tiga Langkah untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM Situbondo. Pelaksanaan program ini merupakan kelanjutan program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022.

1. Situbondo Souvenir House" MSME Empowerment Program

IIGF is committed to participating in supporting the Indonesian MSMEs development program, especially those in the area around the guaranteed project. One of them is Situbondo, East Java, which is traversed by the Probolinggo–Banyuwangi Toll Road project. In Situbondo, IIGF, in collaboration with Tiga Langkah program partner, carried out a community empowerment program by developing Situbondo MSMEs. The program is implemented as a continuation of the MSME empowerment program carried out since 2022.



2. Program Pemberdayaan UMKM “Rumah Kemas Maros”

PT PII bekerjasama dengan Baznas mendirikan Rumah Kemas bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Rumah Kemas merupakan fasilitas perbaikan kemasan dan tempat kemas otomatis yang diharapkan dapat menjadi pusat informasi dan pelayanan kemasan bagi para pelaku UMKM, yang dapat membantu mereka memecahkan permasalahan kemasan yang dihadapinya, menjadi unit konsultasi mengenai kemasan dan menjadi tempat pelayanan pengemasan yang dapat diakses oleh pelaku UMKM serta dapat menyediakan kemasan sesuai dengan yang diperlukan. Dalam pelaksanaan program pembangunan Rumah Kemas ini, PT PII dan Baznas menargetkan kurang lebih 50 pelaku UMKM.

Adapun target dan sasaran program ini adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan standar kualitas produk yang lebih higienis dan sesuai standar permintaan pasar;
- Menyediakan sarana pembinaan khusus di bidang pengemasan;
- Menyediakan berbagai layanan dan fasilitas serta informasi terkait kemasan produk agar para pelaku UMKM dapat meningkatkan mutu, penampilan, nilai jual dan daya saing produknya;
- Meningkatkan permintaan pasar atas produk UMKM binaan tidak hanya pasar lokal, tapi bisa masuk pada pasar ekspor;
- Mendukung keberlanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

3. Program Pemberdayaan UMKM “Gerai Zmart Madiun”

PT PII bekerjasama dengan Baznas melaksanakan program pengembangan Zmart, yaitu program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk dukungan sarana-prasarana usaha ritel mikro dengan meningkatkan eksistensi dan kapasitas untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Adapun pelaksanaan program meliputi:

- Modal usaha, dukungan sarana-prasarana warung, renovasi, dan penguatan *branding* warung kepada 32 penerima manfaat;
- Pendampingan usaha berbasis kelompok (pertemuan kelompok) dilaksanakan 2 pekan sekali;
- Pendampingan personal dilakukan untuk memastikan penerima manfaat mengaplikasikan materi yang diberikan pada saat pendampingan kelompok;
- Peningkatan manajemen *stock* barang dan pelayanan.

2. “Maros Packaging House” MSME Empowerment Program

IIGF, in collaboration with Baznas, formed a Packaging House for MSME entrepreneurs at Maros Regency, South Sulawesi. Packaging House is an automatic packaging and repair facility that shall be a packaging information and service center for MSMEs, assisting MSMEs in solving packaging problems they face, being a consulting place regarding packaging, and being a packaging service place accessible to MSME entrepreneurs, and providing packaging as needed. In implementing this Packaging House construction program, IIGF and Baznas targeted approximately 50 MSME entrepreneurs.

The program’s targets and objectives are as follows:

- Improving product quality standards that are more hygienic and in accordance with market demand standards;
- Providing specialized coaching facilities in the packaging sector;
- Providing various services and facilities as well as information related to product packaging so that MSME entrepreneurs can improve the quality, appearance, selling value, and competitiveness of their products;
- Increasing market demand for assisted MSME products, not only in the domestic market but also in the export market;
- Supporting sustainability and creating added value for the community.

3. “Madiun Zmart Stall” MSME Empowerment Program

IIGF, in collaboration with Baznas, implemented the Zmart development program, which is an economic empowerment program in the form of support for micro retail business facilities by enhancing the presence and capacity to overcome poverty in urban areas. The program implementation includes:

- Business capital, stall infrastructure support, renovation, and stall branding strengthening to 32 beneficiaries;
- Group-based business assistance (group meetings) held every 2 weeks;
- Personal mentoring is carried out to ensure that the relevant beneficiary implements the material provided during group mentoring;
- Improved stock management and service.



4. Program Pemberdayaan UMKM “Bedah Warung Kerek Jakarta Selatan”

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas UMKM khususnya di sekitar kantor Perseroan, PT PII bekerjasama dengan Baznas DKI Jakarta melakukan program Bedah Warung Kerek untuk 4 pelaku UMKM kuliner yang meliputi;

- Renovasi warung dan peningkatan *branding*nya;
- Perbaikan alat kerek makanan termasuk higienitas tempat makan;
- Penambahan opsi sistem pembayaran.

5. Program Peningkatan Produksi Pertanian Padi Nutrizinc dan Pengembangan Pemasaran Produk

PT PII terus berkomitmen untuk mengembangkan sektor pertanian di Indonesia sebagai bagian dari dukungan pada ketahanan pangan nasional melalui Program Peningkatan Produk Pertanian Padi Nutrizinc dan Pengembangan Pemasaran Produk yang dilaksanakan di Klari, Karawang. Dalam program ini, PT PII memberikan program pelatihan kepada petani, kader posyandu dan siswa-siswi pelajar SMK terkait.

4. “South Jakarta Crane Stall Renovation” MSME Empowerment Program

To build the capacity of MSMEs, especially around the Company’s office, IIGF, in collaboration with Baznas of Special Capital Region of Jakarta, provided Crane Stall Renovation program for 4 culinary MSME entrepreneurs, which included:

- Shop renovation and branding improvement;
- Improvement of food crane equipment, including the hygiene;
- Additional payment system options.

5. Nutrizinc Rice Agricultural Production Improvement Program and Product Marketing Development

IIGF strives to commit to developing the agricultural sector in Indonesia as part of its support for national food security through the Nutrizinc Rice Agricultural Production Improvement and Product Marketing Development Program at Klari, Karawang. In this program, IIGF provides training programs to farmers, Integrated Health Service Post’s cadres, and related vocational high school students.



30 petani mengikuti pelatihan pengelolaan lahan, pengenalan padi Nutrizinc, dan diskusi hambatan dalam budidaya padi Nutrizinc

30 farmers attended training on land management, introduction to Nutrizinc rice, and discussion of obstacles in Nutrizinc rice cultivation



30 Kader Posyandu dari 13 Desa di Kecamatan Klari mendapat pelatihan tentang gizi seimbang dan manfaat beras Nutrizinc untuk mengatasi *stunting*
30 Integrated Health Service Post’s cadres from 13 villages in Klari Sub-District received training on balanced nutrition and the benefits of Nutrizinc rice to overcome *stunting*



Pelatihan 30 pelajar SMK mengenai peningkatan kualitas beras Nutrizinc, pengembangan jaringan pemasok, dasar menjadi distributor, pemasaran melalui *e-commerce*, manajemen keuangan, pengemasan produk, dan dukungan perlengkapan pengemasan

30 Vocational High School (SMK) students are trained on improving the quality of Nutrizinc rice, developing supplier networks, the basics of becoming a distributor, marketing through *e-commerce*, financial management, product packaging, and packaging equipment support



***Demo Farm* yang mencakup penggarapan lahan, penanaman benih padi Inpari Nutrizinc, pemupukan, penyemaian dan pemantauan secara intensif**

Demo Farm includes land cultivation, planting of Inpari Nutrizinc rice seeds, fertilization, seeding, and intensive monitoring



Seremonial program sekaligus pemanenan
Ceremony and harvesting

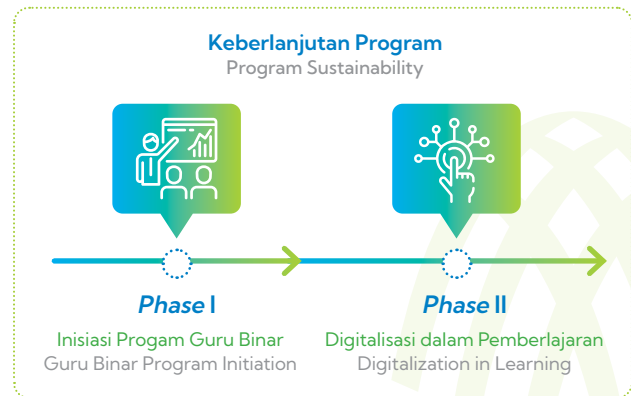
Bidang Pendidikan

Education



Penyaluran Dana program TJSL Bidang Pendidikan
CSR Fund Disbursement for the Education

Rp937,61 Juta
Million



1. Program Peningkatan Inovasi Pembelajaran Guru Melalui "Guru Binar"

PT PII bekerjasama dengan Poetra Sampoerna Foundation mengadakan kegiatan Guru Binar dengan tema "Digitalisasi dalam Pembelajaran Phase II" yang dilaksanakan di Buleleng, Bali. Program ini merupakan kelanjutan dari program *phase I* sebelumnya, yang dilaksanakan pada tahun 2022. Program ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kompetensi para guru dalam perancangan media pembelajaran berbasis *digital* dan dapat mendiseminasikan pengetahuan dan keterampilannya secara kontekstual dalam kerangka kurikulum merdeka.

Pada program *Phase II* yang dilakukan secara *hybrid* ini, PT PII menyasar 50 guru SD dan SMP yang telah melalui proses seleksi untuk diberikan *live coaching* mengenai media belajar *digital* serta pelatihan dan pendampingan untuk dapat menjadi Diseminator Profesional. Setelah *live coaching*, 50 guru penerima manfaat diminta untuk mengembangkan media pembelajaran kontekstual berbasis teknologi dan instrumen penilaian sesuai prinsip kurikulum merdeka, serta mendiseminasikan ilmu yang telah diberikan kepada 350 guru lainnya di wilayah Bali, sehingga imbas dari program yang diberikan berdampak luas.

2. Program Beasiswa PT PII untuk Mahasiswa Indonesia Timur

PT PII menginisiasi pemberian beasiswa pendidikan kepada 75 mahasiswa berprestasi Indonesia Timur yang sedang menempuh pendidikan di 3 Universitas, yakni 25 mahasiswa di Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado, Sulawesi Utara, 25 mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, Sulawesi Selatan, 25 mahasiswa Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon, Maluku.

1. Teacher Education Improvement Program through "Guru Binar"

IIGF, in collaboration with Poetra Sampoerna Foundation, held a Guru Binar activity with the theme 'Digitalization in Learning Phase II' which was held in Buleleng, Bali. This program is a follow up on phase I, which was carried out in 2022. This program was implemented with the objective of increasing the competence of teachers in designing digital-based learning media and being able to disseminate their knowledge and skills contextually within the framework of the independent curriculum.

In this hybrid Phase II program, IIGF targeted 50 elementary and junior high school teachers who have been selected and given live coaching on digital learning media, as well as training and mentoring to become Professional Disseminators. After the live coaching, the 50 beneficiary teachers are requested to develop technology-based contextual learning media and assessment instruments according to the independent curriculum principles, and disseminate the knowledge that has been given to 350 other teachers in the Bali. Thus, the program has a broad impact.

2. IIGF's Scholarship Program for Eastern Indonesian Students

IIGF provided educational scholarships to 75 outstanding Eastern Indonesian students who are studying at 3 universities, i.e., 25 students at Sam Ratulangi University (UNSRAT) Manado, North Sulawesi, 25 students at Hasanuddin University (UNHAS) Makassar, South Sulawesi, and 25 students at Pattimura University (UNPATTI) Ambon, Maluku.



Beasiswa ini ditujukan kepada para mahasiswa dari keluarga pra sejahtera yang sedang menempuh perkuliahan minimal semester 2 memiliki potensi akademik dan non akademik yang baik, serta mendapatkan rekomendasi dari pihak Dekanat atau Rektorat. Beasiswa diberikan dalam bentuk tunjangan biaya hidup dan pendidikan selama 6 bulan dan akan ditransfer kepada para penerima beasiswa setiap bulannya. Program pemberian beasiswa ini telah berjalan dari 2023 dan akan berakhir pada 2024.

Selain pemberian dana pendidikan bulanan, program beasiswa ini juga dilengkapi dengan beberapa aktivitas untuk para penerimanya, diantaranya program *capacity building* para penerima beasiswa melalui kegiatan *Student Gathering and Seminar*, yaitu program pendamping yang bertujuan untuk meningkatkan *soft skill* mahasiswa melalui pemberian materi *leadership & communication* dengan mengundang *trainer* profesional. Selain itu paguyuban penerima beasiswa di setiap universitas juga didorong untuk aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan melalui program *community development* yang digagas oleh para penerima beasiswa untuk masyarakat sekitar.

This scholarship is intended for students from pre-prosperous families who are studying at least in the 2nd semester have good academic and non-academic potential, and have recommendations from the Dean or Rector. The scholarship is provided in the form of a 6-month living and education allowance and would be transferred to the scholarship recipients monthly. The scholarship program has been running since 2023 and will end in 2024.

In addition to the monthly education fund, this scholarship also provided several activities for the recipients, including a capacity building program for scholarship recipients through Student Gathering and Seminar activities, which is a companion program with the objective to improve students' soft skills by providing leadership & communication materials by inviting professional trainers. In addition, the association of scholarship recipients in each university is also encouraged to be active in social activities through community development programs initiated by the scholarship recipients for the surrounding community.

3. Program Pelatihan Keterampilan Anak Tidak/Putus Sekolah di Provinsi Riau

PT PII bekerja sama dengan Yayasan Sigap Kerlip Indonesia (YSKI) melaksanakan program 'Magang Efektif jadi Pribadi Unik dan Mandiri (Medium) Kriya Limpah Kumandang' bagi 50 Anak Tidak/Putus Sekolah Usia Produktif dari 13 Desa di Provinsi Riau guna meningkatkan kapasitas mereka agar dapat memiliki keterampilan dan hidup mandiri.

Sejak bulan Oktober 2023 PT PII dan YSKI telah melakukan pendataan Jumlah ATS/APS di Kabupaten Kampar yang akan mengikuti program ini, dan pada bulan November program 'Medium Kriya Limpah Kumandang' resmi dimulai. Adapun program ini dilaksanakan dalam jangka waktu 4 bulan dengan rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3. Capacity Building for Out of School Children at Riau Province

IIGF, in collaboration with Yayasan Sigap Kerlip Indonesia (YSKI), conducted the 'Kriya Limpah Kumandang Effective Apprenticeship to become an Unique and Independent Person (Medium)' program for 50 Productive Out-of-School Children from 13 Villages in Riau Regency, to enhance their capacity to have skills and live independently.

Since October 2023, IIGF and YSKI have collected data on the number of Out-of-School Children at Kampar Regency who would take part in this program. In November, the 'Medium Kriya Limpah Kumandang' program officially began. The program was implemented over a period of 4 months with a series of activities as follows:



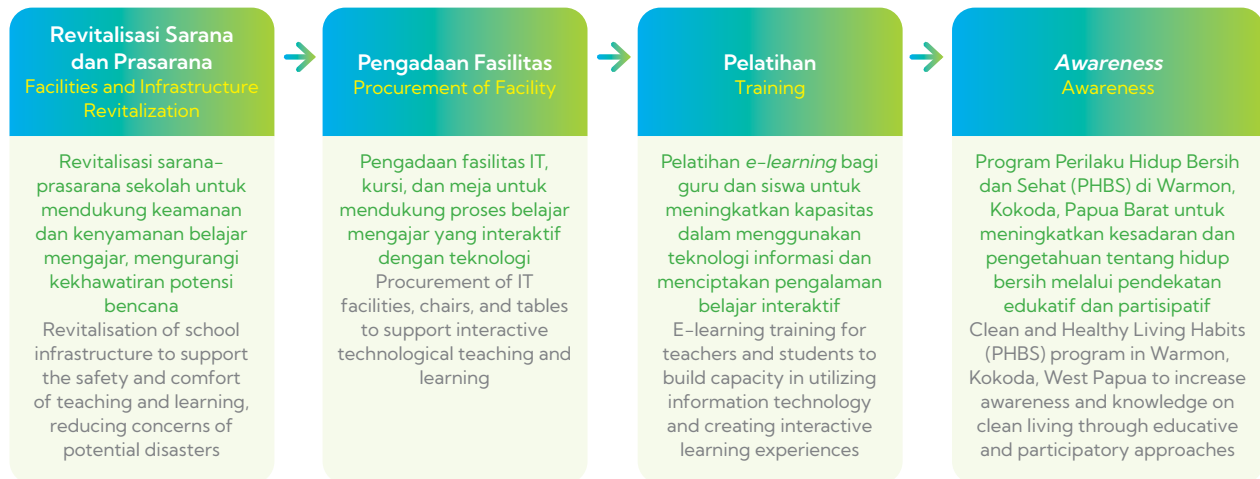


4. Program Revitalisasi Sarana Pendidikan & Edukasi Pola Hidup Sehat untuk Masyarakat Suku Kokoda Papua Barat

PT PII bekerja sama dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah melaksanakan program revitalisasi sarana – prasarana sekolah dan pendidikan pola hidup sehat untuk masyarakat Kokoda di Papua Barat. Program ini dilaksanakan dengan menginisiasi beberapa kegiatan, diantaranya:

4. Revitalization of Educational Facilities & Healthy Lifestyle Education Program for Kokoda Tribe of West Papua

IIGF, in collaboration with the Muhammadiyah Community Empowerment Council (MPM), implemented a revitalization program for school facilities and healthy lifestyle education for the Kokoda community in West Papua. This program was implemented by initiating several activities, including:



5. Renovasi Tempat Kegiatan Belajar Mengajar Mandiri di Tangerang Selatan

PT PII mendukung revitalisasi gedung TKBM SMP Terbuka Diponegoro 2 di Jombang, Ciputat, yang menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera. Pada 2023, PT PII memberikan dana donasi untuk kebutuhan mekanikal elektrik sekolah tersebut.

5. Renovation of Independent Teaching and Learning Center in South Tangerang

IIGF supported the revitalization of Diponegoro 2 Open Junior High School in Jombang, Ciputat, which provides free education for children from pre-prosperous families. In 2023, IIGF provided donation funds for the school's mechanical and electrical needs.

Bidang Sosial, Budaya & Keagamaan Social, Cultural and Religious



Penyaluran Dana program TJSL Bidang Sosial, Budaya & Keagamaan
CSR Fund Disbursement for the Social, Cultural and Religious



Rp1,68 Miliar
Billion

1. Program Berbagi Berkah Ramadhan

Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1445H/2024 M, PT PII menyelenggarakan donasi berbagi berkah bulan Ramadhan melalui dukungan berbagai inisiatif sosial keagamaan, baik di lingkungan sekitar Perseroan maupun lingkungan sekitar tempat tinggal karyawan. Donasi berbagi berkah bulan Ramadhan pada tahun 2023 diberikan kepada sekitar 28 Yayasan/DKM/Pesantren/Komunitas keagamaan lainnya guna mendukung kegiatan keagamaan seperti santunan kepada panti asuhan, kaum dhuafa, pembangunan dan renovasi masjid dan mushola serta kegiatan sosial keagamaan lainnya, yang merupakan rekomendasi dari karyawan.

1. Ramadhan Blessing Sharing Program

To welcome the holy month of Ramadhan 1445H in 2024, IIGF organized a donation to share the Ramadhan blessings by supporting various social and religious initiatives, both in the vicinity of the company and the environment around the employees' residence. The donations to share the Ramadhan blessings in 2023 were provided to approximately 28 foundations/DKM/Islamic Boarding Schools/other religious communities, to support religious activities, such as donations to orphanages, the poor, construction and renovation of mosques and prayer rooms, and other social religious activities, as recommended by the employees.



2. Program Semua Bisa Makan

Pada bulan suci Ramadhan 1445H/2024 M, PT PII kembali menyalurkan donasi paket makanan siap saji guna mendukung program Semua Bisa Makan untuk masyarakat kurang mampu di sekitar kantor Perseroan. Paket makanan yang terdistribusikan sebanyak 2.500 porsi ini juga sebagai upaya mendukung 10 pelaku usaha warung makan yang berperan dalam menyiapkan makanan siap saji.

3. Program Berbagi Daging Qurban

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1444H / 2023 serta sebagai bentuk kepedulian sosial, PT PII menyalurkan 250 kaleng daging hewan kurban untuk masyarakat yang membutuhkan di sekitar area kantor Perseroan.

4. Program Bantuan Pembangunan Rumah Korban Bencana Kebakaran di Langkat, Sumatera Utara

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana kebakaran di Langkat Sumatera Utara pada 2022, PT PII membantu para korban dengan membantu pembangunan 6 unit rumah tipe 30 yang berlokasi di Kampung Darussalam, Desa Telaga Said, Sei Lekan, Langkat. Bantuan ini bertujuan agar para korban dapat memiliki rumah yang layak huni kembali dan dapat beraktivitas normal seperti sebelumnya.

5. Donasi Sembako Ramadhan di Jawa Timur

Penyaluran 1.750 paket sembako (beras 3kg dan minyak goreng 2 liter) untuk masyarakat di Sampang, Ngawi, Malang Raya, Banyuwangi, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, dan Probolinggo.

2. Everyone Can Eat Program

In the holy month of Ramadan 1445H in 2024, IIGF distributed donations of ready-to-eat food packages to support the Everyone Can Eat Program for underprivileged communities around the Company's office. The 2,500 staple food packages were distributed as an effort to support 10 food stall enterprises that play a role in preparing ready-to-eat meals.

3. Qurban Sharing (Sacrificial Meat) Program

To welcome Eid al-Adha 1444H in 2023, and as a form of social care, IIGF distributed 250 cans of sacrificial meat to people in need around the Company's office area.

4. House Construction for Fire Disaster Victims in Langkat, North Sumatra

As a form of care for the people affected by the fire in Langkat, North Sumatra, in 2022, IIGF assisted the victims in the construction of 6 units of type 30 houses located in Kampung Darussalam, Telaga Said Village, Sei Lekan, Langkat. This program has the objective to enable the victims to have a livable home again and be able to carry out normal activities as per before fire.

5. Ramadan Food Donation in East Java

Distribution of 1,750 food packages (3kg rice and 2 liters cooking oil) for people in Sampang, Ngawi, Malang Raya, Banyuwangi, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, and Probolinggo.

Employee Voluntary Program 2023



Dukungan terhadap Pencapaian SDGs: Support for SDGs Achievement:



Program Konservasi Alam Mangrove Jakarta Utara

Sebagai bagian dari peringatan HUT PT PII ke-14 sekaligus kegiatan *Employee Voluntary Program* (EVP), PT PII melaksanakan program penanaman 1.000 bibit pohon mangrove di kawasan konservasi alam mangrove Angke Kapuk, Jakarta Utara. Kegiatan yang dilaksanakan pada 16 Desember 2023 ini merupakan bagian dari upaya Perseroan mendukung konservasi mangrove sebagai pelindung pantai, penyerap karbon dan habitat biota yang bernilai ekonomis, seperti ikan, kepiting, dan udang. Mangrove merupakan ekosistem penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Program tersebut bertujuan untuk membantu keanekaragaman hayati laut dan melindungi pesisir dari abrasi pantai serta bencana alam seperti tsunami dan badai. Pada program "Penanaman Mangrove di Pantai Indah Kapuk", pegawai PT PII yang ikut serta dalam kegiatan *Employee Voluntary Program* (EVP) melakukan penanaman bibit pohon mangrove yang dilakukan oleh perwakilan dari kelompok-kelompok yang telah ditentukan oleh *Human Capital* (HC). Hal ini selaras dengan tujuan PT PII untuk ikut serta dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dimana mangrove memiliki kemampuan besar dalam menyerap karbon dioksida dari udara dan dapat mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, sehingga membantu dalam mitigasi perubahan iklim.

Kunjungan dan Buka Pusa Bersama Karyawan

Pada bulan Ramadhan, segenap karyawan PT PII melakukan kunjungan dan buka puasa bersama para Anak Yatim, Dhuafa dan Lansia di Panti Asuhan Putra Utama 3 Tebet, Panti Asuhan Muhammadiyah Tanah Abang dan Panti Werdha Budhi Mulia 1. Program ini merupakan bagian dari kegiatan *Employee Voluntary Program* (EVP) yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, diantaranya pemeriksaan kesehatan pada lansia, serta pemeriksaan mata dan gigi untuk anak-anak Panti.

North Jakarta Mangrove Nature Conservation Program

As part of the 14th anniversary of IIGF simultaneously with the *Employee Voluntary Program* (EVP), IIGF planted 1,000 mangrove tree seedlings at Angke Kapuk mangrove nature conservation, North Jakarta. This activity, carried out on 16 December 2023, was part of the Company's efforts to support mangrove conservation as a coastal protection, carbon sink, and habitat for economically valuable biota, such as fish, crabs, and shrimp. Mangroves are important ecosystems that maintain environmental balance. The program has the objective to assist marine biodiversity and protect coastal areas from coastal abrasion and natural disasters, such as tsunamis and storms. In PIK Mangrove Planting program, IIGF's employees who participated in the *Employee Voluntary Program* (EVP) planted mangrove tree seedlings, carried out by representatives from groups determined by the Human Capital (HC) division. This is in line with IIGF's objective to participate in reducing Greenhouse Gas (GHG) emissions, in which Mangroves have a great ability to absorb carbon dioxide in the air and reduce the concentration of greenhouse gases in the atmosphere, thus assisting in mitigating climate change.

Visit and Iftar with Employees

In the month of Ramadhan, all IIGF's employees visited and broke the fast with Orphans, Dhuafa, and the Elderly at Putra Utama 3 Tebet Orphanage, Muhammadiyah Tanah Abang Orphanage, and Budhi Mulia 1 Nursing Home. This program is part of the *Employee Voluntary Program* (EVP) carried out with various activities, including health checks on the elderly, as well as eye and dental checks for the orphans.



Pengelolaan Dampak Operasional terhadap Masyarakat Lokal

Management of Operational Impact on Local Communities

[GRI 413-1, 413-2] [OJK F.23, F.28]

Kegiatan operasional PT PII sejatinya tidak memberikan dampak substansial terhadap lingkungan dan sosial, namun Perseroan tetap berkomitmen untuk melakukan pengelolaan dampak negatif yang muncul terhadap masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial yang diterapkan dalam memberikan penjaminan Proyek. PT PII memastikan setiap proyek yang dijamin telah memenuhi Prinsip Perlindungan, dengan mengevaluasi manfaat dan risiko kerugian yang mungkin timbul. Proses penilaian proyek yang komprehensif juga mencakup evaluasi terhadap aspek lingkungan dan sosial proyek, serta pembentukan rencana mitigasi untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko lingkungan dan operasional yang mungkin terjadi selama pengerjaan proyek.

IIGF's operations actually do not have a substantial impact on the environment and social, but the Company remains committed to managing the negative impacts that arise in the community. This is actualized in the Environmental and Social Protection Policy applied in providing Project's guarantees. IIGF ensures that each guaranteed project has fulfilled the Protection Principles, by evaluating the benefits and risks of losses that may arise. The comprehensive project appraisal process includes an evaluation of the project's environmental and social aspects, as well as the mitigation plan to identify and reduce environmental and operational risks that may occur during the project's work.

Upaya Pengelolaan Dampak Operasi terhadap Masyarakat Lokal

Efforts to Manage the Operational Impact on Local Communities

Tahapan Kegiatan Operasi Phase of Operations	Dampak Negatif Aktual dan Potensial yang Timbul Actual Negative and Potential Impacts that Arise	Upaya Penanggulangan Dampak Countermeasure
Proses konstruksi Construction process	Terdapat potensi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas Potential for traffic jams and accidents	• Memasang rambu dan marka jalan pada titik lokasi yang bersimpangan dengan proyek • Menyusun dan menerapkan <i>Traffic Management Plan</i> • Installing road signs and markings at locations intersecting with the project • Preparing and implementing a Traffic Management Plan
	Terdapat potensi kecelakaan terhadap warga sekitar akibat proses konstruksi proyek Potential for accidents for the locals due to the project construction process	• Menerapkan metode keselamatan kerja sesuai standar SMK3 • Memberikan edukasi mengenai keselamatan kerja • Implementing occupational safety methods in compliance with OHSMS standards • Providing education regarding occupational safety
Proses operasi Operations	Terdapat potensi gangguan sosial budaya akibat interaksi pekerja pendatang dengan penduduk lokal dan gangguan lingkungan sosial akibat kegiatan operasional proyek Potential for socio-cultural disturbances due to the interaction of migrant workers with the locals and social environmental disturbances due to project operations	• Menerapkan program pengembangan masyarakat yang <i>people oriented</i> dan menghargai adat istiadat masyarakat setempat • Mensosialisasikan kepada tenaga kerja agar menjaga sikap dan nilai-nilai etika yang sesuai dengan budaya lokal • Membuka mekanisme penanganan keluhan masyarakat terkait dengan dampak sosial, budaya dan lingkungan akibat kegiatan operasional proyek • Implementing community development programs that are people-oriented and respect local customs • Disseminating to the workforce to maintain ethical attitudes and values that are in accordance with local culture • Providing a mechanism for handling community complaints related to social, cultural, and environmental impacts resulting from project operations



Penanganan Pengaduan Masyarakat

Public Complaint Handlings

[GRI 2-27, 3-3, 413-1] [OJK F.24]

Masyarakat dapat menyampaikan saran, kritik dan pengaduan atas dampak kegiatan operasional Perseroan maupun atas pelaksanaan program TJSL melalui saluran pengaduan berikut:

The public may submit suggestions, criticisms, and complaints on the impact of the Company's operations and the CSR program implementation through the following complaint channels:

Saluran Pengaduan PT PII IIGF Complaint Channel



+62 21 5795 0550



info@iigf.co.id



www.iigf.co.id



PT PII-Persero



@pii_persero



@PII_Persero

Setiap pengaduan yang masuk akan diproses dan ditindaklanjuti oleh tim divisi terkait. Pada tahun 2023, PT PII tidak menerima pengaduan dan sanksi terkait ketidakpatuhan terhadap masyarakat maupun terkait program TJSL yang dilaksanakan, serta tidak terdapat insiden pelanggaran terkait hak-hak masyarakat adat yang dilakukan Perseroan.

Every incoming complaint shall be processed and followed up by the relevant division. In 2023, IIGF did not receive complaints and sanctions related to non-compliance with the community or the CSR program implemented. There were no incidents of violations related to the rights of indigenous peoples by the Company.





Risk Identification & Allocation In PPP Projects

Government Guarantee for Risks Arising from the GCA side



Risk Identification	Availability Payment		User Charge	
	GCA	Private	GCA	Private
Location / Land	✓		✓	
Licensing	✓		✓	
Technical Design		✓		✓
Project Financing		✓		✓
Construction		✓		✓
Operations and Maintenance		✓		✓
Government Action/No Action	✓		✓	
Demand	✓			✓
Income (AP Payment)	✓			✓
Force Majeur Conditions	✓	✓	✓	✓
Early Termination	✓	✓	✓	✓

Government Guarantee may be provided

IGF's Role for Investors & Lenders

Ensure PPP projects have technical and financial feasibility acceptable to Investors & Lenders

Availability of risk allocation studies early to be used and can help the financial close process

Provide comfort for Business Entities in terms of long-term cooperation with PJPN

© 2014 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) All Rights Reserved

TATA KELOLA
GOVERNANCE



Menghadirkan Tata Kelola (Governansi) Keberlanjutan

Providing Sustainability
Governance



Untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, PT PII berkomitmen untuk menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai salah satu fondasi utama dalam menjalankan bisnis Perseroan. GCG dijadikan landasan untuk dapat mengintegrasikan aspek bisnis Perseroan termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam menjalankan kegiatan operasional dengan harapan agar mampu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan mendukung pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang.

IIGF is committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) practices as one of the main foundations in carrying out the Company's business to ensure sustainable growth. GCG is the foundation to integrate all aspects of the Company's business, including economic, social, and environmental, in carrying out the operations, with the expectation to be able to enhance the stakeholders' trust and support the Company's long-term growth.

Struktur Tata Kelola Perseroan

Corporate Governance Structure

[GRI 2-9]

Perseroan telah memiliki Struktur Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur organ-organ utama Perseroan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu organ pendukung yakni Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko. Sementara itu, Direksi dibantu oleh organ pendukung yaitu Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, dan Manajemen Risiko.

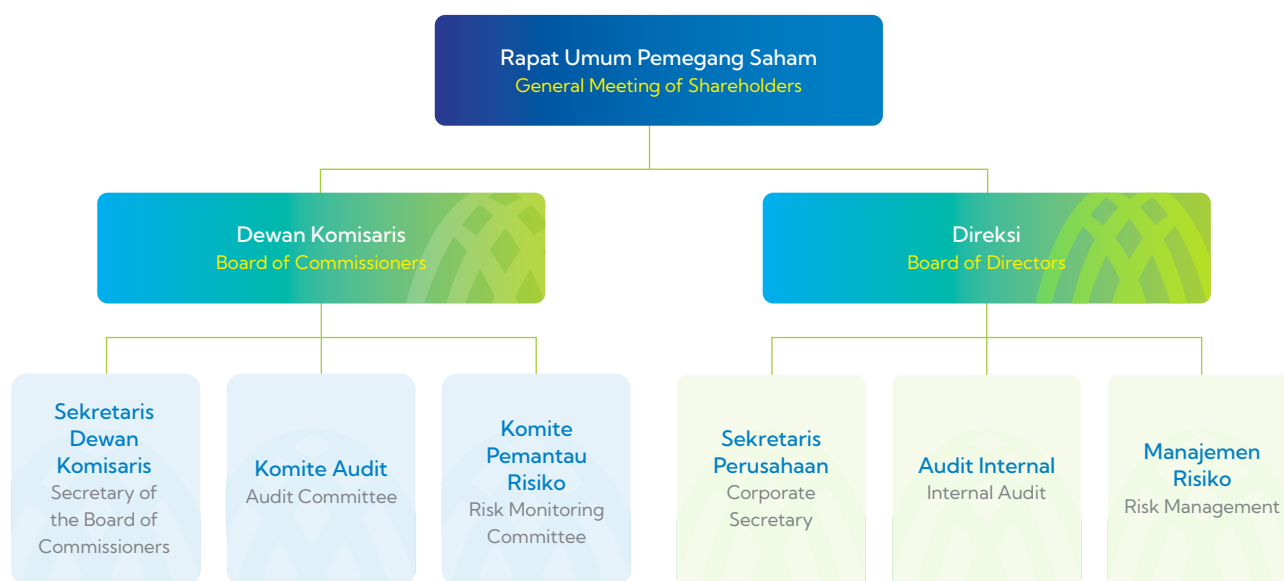
The Company has a Corporate Governance Structure in accordance with the provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, that stipulates the Company's main organs, consisting of General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors.

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is assisted by the supporting organs, i.e., the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Risk Monitoring Committee. Meanwhile, the Board of Directors is assisted by supporting organs, i.e., the Corporate Secretary, Internal Audit, and Risk Management.

Struktur Tata Kelola Perseroan

Corporate Governance Structure

[GRI 2-9]





Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

[GRI 2-9]

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan badan tata kelola dengan kewenangan tertinggi dalam proses pengambilan keputusan penting yang memprioritaskan kepentingan Perseroan serta dilakukan secara wajar dan transparan. Kewenangan RUPS tidak didelegasikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas-batas yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi dan Dewan Komisaris merupakan dua organ penting dalam Perseroan dengan fungsi yang berbeda: Direksi mengelola operasional sehari-hari, sementara Dewan Komisaris mengawasi kinerja Direksi dan memberikan nasihat. Untuk menjaga independensi dan efektivitas, tidak diperbolehkan adanya rangkap jabatan antara anggota Direksi dan Dewan Komisaris, guna menghindari konflik kepentingan dan memastikan pengawasan yang objektif. [GRI 2-11]

Penyelenggaraan RUPS terbagi menjadi dua yakni, RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan diadakan setiap tahun meliputi Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Persetujuan Laporan Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Informasi lebih lengkap mengenai penyelenggaraan RUPS selama tahun 2023 dapat dilihat pada Laporan Tahunan PT PII Tahun 2023 di bab Tata Kelola Perusahaan pada bagian Rapat Umum Pemegang Saham.

In accordance with the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority organ in the process of making important decisions that priorities the Company's interests and is conducted in a fair and transparent manner. The authority of the GMS is not delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits stipulated in the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations. The Board of Directors and the Board of Commissioners are two important organs in the Company with different functions: The Board of Directors manages day-to-day operations, while the Board of Commissioners oversees the performance of the Board of Directors and provides advice. To maintain independence and effectiveness, no concurrent positions are allowed between members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, to avoid conflicts of interest and ensure objective supervision. [GRI 2-11]

The GMS is organized into two categories, i.e., Annual GMS and Extraordinary GMS. Annual GMS is held every year, including the General Meeting of Shareholders regarding the Approval of the Annual Report and the General Meeting of Shareholders regarding the Approval of the Company's Work Program and Budget. Extraordinary General Meeting of Shareholders, i.e., General Meeting of Shareholders held at any time based on the need for the Company's interests. Further information regarding the holding of the GMS in 2023 can be seen in the 2023 IIGF Annual Report in the Corporate Governance chapter in the General Meeting of Shareholders section.

Direksi

Board of Directors

[GRI 2-9]

Direksi merupakan badan tata kelola yang salah satu tugasnya adalah memperhatikan isu keberlanjutan dalam memformulasikan strategi Perseroan, menentukan, mengawasi sekaligus memantau pengelolaan faktor-faktor LST yang penting bagi Perseroan. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip keberlanjutan dan GCG. [GRI 2-11, 2-12] [OJK E1]

The Board of Directors is governance body, with one of the duties to take into account the sustainability issues in formulating the Company's strategy, determining, supervising, and monitoring the management of ESG factors that are important to the Company. The Board of Directors is collectively responsible for the Company's management for the benefit of the Company, in accordance with the Company's goals and objectives, the Articles of Association, prevailing Laws and regulations, as well as the sustainability and GCG principles. [GRI 2-11, 2-12] [OJK E.1]



Direktur Utama memastikan kepemimpinan yang terpusat dan terkoordinasi dalam mengelola kegiatan operasional Perseroan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, memungkinkan PT PII mengarahkan strategi dan kebijakan dengan konsisten dan responsif. Untuk menghindari benturan kepentingan, Direksi Perseroan harus mendeklarasikan kondisi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. [GRI 2-11]

Pada tahun 2023, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi. Berikut komposisi Direksi PT PII per 31 Desember 2023:

The President Director ensure a centralized and coordinated leadership in the Company's operation management. The objective is to create effectiveness and efficiency in the duties and responsibilities, to enable IIGF to direct the strategies and policies in a consistent and responsive manner. To avoid conflicts of interest, the Company's Board of Directors must declare any form of personal interest that could potentially lead to conflicts. [GRI 2-11]

In 2023, there was no change in the Board of Directors' composition. The following is the composition of IIGF's Board of Directors as of 31 December 2023:

Komposisi Direksi Periode Tahun 2023

Composition of the Board of Directors in 2023

[GRI 2-9, 2-10] [S1-27a.2] [S2-6a.2]

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Jabatan Position	Masa Jabatan Tenure	Independensi Independence	Jumlah Posisi/ Komitmen Signifikan lainnya (Penugasan Khusus) dalam Organisasi Other Significant Positions/ Commitments (Special Assignment) in the Organization	Kompetensi Relevan terkait dampak organisasi Relevant Competencies related to organizational impact	Perwakilan Pemangku Kepentingan Stakeholders' Representative
Muhammad Wahid Sutopo	Laki-laki Male	Direktur Utama President Director	- Periode ke 1: 29 November 2019 s.d 3 Desember 2022 - Periode ke 2: 4 Desember 2022 s.d. 3 Desember 2027 1st period: 29 November 2019 to 3 December 2022 2nd period: 4 December 2022 to 3 December 2027	√	-	Engineering di bidang elektro dan magister dalam manajemen Tersertifikasi dalam Cybersecurity for Critical Urban Infrastructure Engineering in electrical and master in management Certified in Cybersecurity for Critical Urban Infrastructure	-
Andre Permana	Laki-laki Male	Direktur Bisnis Business Director	23 Maret 2020 s.d. 22 Maret 2025 23 March 2020 to 22 March 2025	√	-	Manajemen proyek risk management Tersertifikasi Accredited Trainer CP3P Level Foundation dan Ahli Muda Teknik Sipil Project risk management Certified Accredited Trainer CP3P Foundation Level and Junior Expert in Civil Engineering	-
Donny Hamdani	Laki-laki Male	Direktur Keuangan Finance Director	17 Januari 2022 s.d. 16 Januari 2027 17 January 2022 to 16 January 2027	√	-	Memiliki kompetensi di bidang Akuntansi Competency in Accounting	-



Seluruh anggota Direksi Perseroan tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam Perseroan maupun di luar Perseroan dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan Pemegang Saham Perseroan. Seluruh anggota Direksi yang menjabat di tahun 2023 telah menyatakan independensinya dalam Pakta Integritas yang ditandatangani pada awal pengangkatan dan diperbaharui setiap awal tahun. Informasi lebih lengkap mengenai penandatanganan Pakta Integritas Direksi tahun 2023 dapat dilihat pada Laporan Tahunan PT PII Tahun 2023 di bab Tata Kelola Perusahaan pada bagian Independensi Direksi.

[GRI 2-15]

Dalam hal pelaporan berkelanjutan, Direksi bertanggung jawab untuk meninjau dan menyetujui informasi yang dilaporkan, termasuk pemilihan topik material dalam laporan keberlanjutan. Proses peninjauan laporan dilakukan melalui pelaporan langsung kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Persetujuan laporan ditandai secara resmi dengan tanda tangan dari Direksi yang menegaskan tanggung jawab dan dukungan penuh dari pihak pimpinan Perseroan terhadap isi laporan. Dengan demikian, proses peninjauan dan persetujuan laporan keberlanjutan tidak hanya menjadi bentuk verifikasi, tetapi juga simbol dari komitmen Perseroan dan jajaran manajemen terhadap praktik bisnis yang transparan dan berkelanjutan.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

[GRI 2-9]

Dewan Komisaris merupakan badan tata kelola yang mewakili Pemegang Saham dan bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan dan pengurusan pada umumnya serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Perseroan, termasuk memantau dan memastikan bahwa GCG diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023 terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris PT PII. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 33/KMK.06/2023 tanggal 31 Januari 2023, Pemegang Saham mengangkat Bapak Iqbal Islami dan memberhentikan Bapak Wahyu Utomo yang mengundurkan diri karena mendapat penugasan menjadi komisaris di perusahaan lain. Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 216 Tahun 2023 tanggal 19 Juni 2023, Pemegang Saham mengangkat Ibu Rina Widiyanti Wahyuningdyah dan memberhentikan Bapak Awan Nurmawan Nuh yang mengundurkan diri karena mendapat penugasan menjadi komisaris di perusahaan lain. Komposisi Anggota Dewan Komisaris PT PII per 31 Desember 2023 terdiri dari 3 (tiga) orang termasuk Komisaris Utama dengan susunan dan komposisi sebagai berikut:

All members of the Company's Board of Directors do not have concurrent positions both within the Company and outside the Company, and have no affiliation with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, or with the Company's Shareholders. All members of the Board of Directors who served in 2023 have declared their independence in the Integrity Pact signed at the beginning of their appointment and renewed at the beginning of each year. More complete information about the signing of the Integrity Pact of the Board of Directors in 2023 can be seen in the IIGF Annual Report Year 2023 in the Corporate Governance chapter in the Independence of the Board of Directors section.

[GRI 2-15]

In terms of sustainability reporting, the Board of Directors is responsible for reviewing and approving the reported information, including material topics in the sustainability report. The report review is processed through direct reporting to the Board of Directors and Board of Commissioners. The report is officially approved by having the Board of Directors' signature to confirm their full responsibility and supports for the contents from the Company's leader. Thus, the process of reviewing and approving the sustainability report is not only a form of verification, but also a symbol of the Company and its management's commitment to sustainable and transparent business practices.

[GRI 2-14]

The Board of Commissioners is a Company's organ with the duties to supervise and monitor the effectiveness of GCG implementation. The Board of Commissioners represents the Shareholders and has an independent position, in charge of supervising policies and management in general and providing advice to the Board of Directors in implementing the Company's activities, including monitoring and ensuring that GCG is implemented effectively and sustainably.

In 2023, there was a change in the composition of PT PII's Board of Commissioners. Based on the Minister of Finance Decree (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 33/KMK.06/2023 dated 31 January 2023, the Shareholders appointed Mr. Iqbal Islami, and dismissed Mr. Wahyu Utomo, who resigned because he was appointed as a commissioner in another company. Further, based on the Minister of Finance Decree (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 216 of 2023 dated 19 June 2023, the Shareholders appointed Mrs. Rina Widiyanti Wahyuningdyah, and dismissed Mr. Awan Nurmawan Nuh, who resigned because he was appointed as a commissioner in another company. As of 31 December 2023, IIGF's Board of Commissioners consists of three (3) people, including the President Commissioner, as follows:



Komposisi Dewan Komisaris Periode Tahun 2023

Composition of the Board of Commissioners in 2023

[GRI 2-9, 2-10] [S1-27a.2] [S2-6a.2]

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Jabatan Position	Masa Jabatan Tenure	Independensi Independence	Jumlah Posisi/ Komitmen Signifikan lainnya dalam Organisasi Other Significant Positions/ Commitments in the Organization	Kompetensi Relevan terkait dampak organisasi Relevant Competencies related to organizational impact	Perwakilan Pemangku Kepentingan Stakeholders' Representa- tive
Rina Widiyani Wahyuningdyah	Perempuan Female	Komisaris Utama President Commissioner	19 Juni 2023 – 18 Juni 2028 19 June 2023 to 18 June 2028	-	-	Memiliki keahlian di bidang hukum dan ekonomi Expertise in law and economics	√
Mariatul Aini	Perempuan Female	Komisaris Commissioner	- Periode ke 1: 21 Desember 2018 – 31 Desember 2019 - Periode ke 2: 19 Agustus 2019 – 18 Agustus 2024 - 1 st period: 21 December 2018 to 31 December 2019 - 2 nd period: 19 August 2019 to August 18, 2024	√	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee	- Memiliki keahlian di bidang bisnis dan administrasi - Tersertifikasi bidang pengadaan barang dan jasa dan pimpinan proyek - Proficiency in business and administration - Certified in procurement and project leadership	√
Iqbal Islami	Laki-laki Male	Komisaris Commissioner	31 Januari 2023 sampai 30 Januari 2028 31 January 2023 to 30 January 2028	-	Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman of Risk Monitoring Committee	Memiliki keahlian di bidang manajemen strategis, <i>Corporate Finance, Keuangan Negara, Corporate Governance</i> , Manajemen Risiko serta <i>Learning and Development</i> . Memiliki <i>Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA)</i> . Have expertise in strategic management, Corporate Finance, State Finance, Corporate Governance, Risk Management and Learning and Development. Have a Qualified Internal Auditor (QIA) Certification.	√

Seluruh Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Direksi. Adapun, pada 31 Desember 2023, terdapat 2 (dua) Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham melalui rangkap jabatan di Kementerian Keuangan. Pernyataan independensi Dewan Komisaris telah dinyatakan dalam Pakta Integritas Dewan Komisaris tahun 2023 yang ditandatangani pada awal pengangkatan dan diperbaharui setiap awal tahun. Informasi lebih lengkap mengenai penandatanganan Pakta Integritas Direksi tahun 2023 dapat dilihat pada Laporan Tahunan PT PII Tahun 2023 di bab Tata Kelola Perusahaan pada bagian Pernyataan Tentang Independensi Dewan Komisaris. [GRI 2-15]

All members of the Company's Board of Commissioners do not have affiliation with other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Meanwhile, as of December 31, 2023, there were 2 (two) Board of Commissioners of the Company who were affiliated with Shareholders through concurrent positions at the Ministry of Finance. The statement of independence of the Board of Commissioners has been stated in the Integrity Pact of the Board of Commissioners in 2023 which was signed at the beginning of the appointment and renewed at the beginning of each year. More complete information regarding the signing of the Integrity Pact of the Board of Directors in 2023 can be seen in the IIGF Annual Report Year 2023 in the Corporate Governance chapter in the section on the Statement on the Independence of the Board of Commissioners. [GRI 2-15]



Pencalonan dan Pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination and Selection of the Board of Commissioners and Board of Directors

[GRI 2-10]

Kebijakan pencalonan dan pemilihan anggota Dewan Komisaris yang berlaku di Perseroan dilaksanakan dengan merujuk pada PMK No. 197/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

Sementara itu, kebijakan terkait pencalonan dan tata cara pengangkatan Direksi Perseroan dilaksanakan dengan mengacu pada PMK No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PMK No. 135/PMK.06/2017 ("PMK 78/2015").

Secara sederhana, tahapan nominasi hingga pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dapat disampaikan di bawah ini.

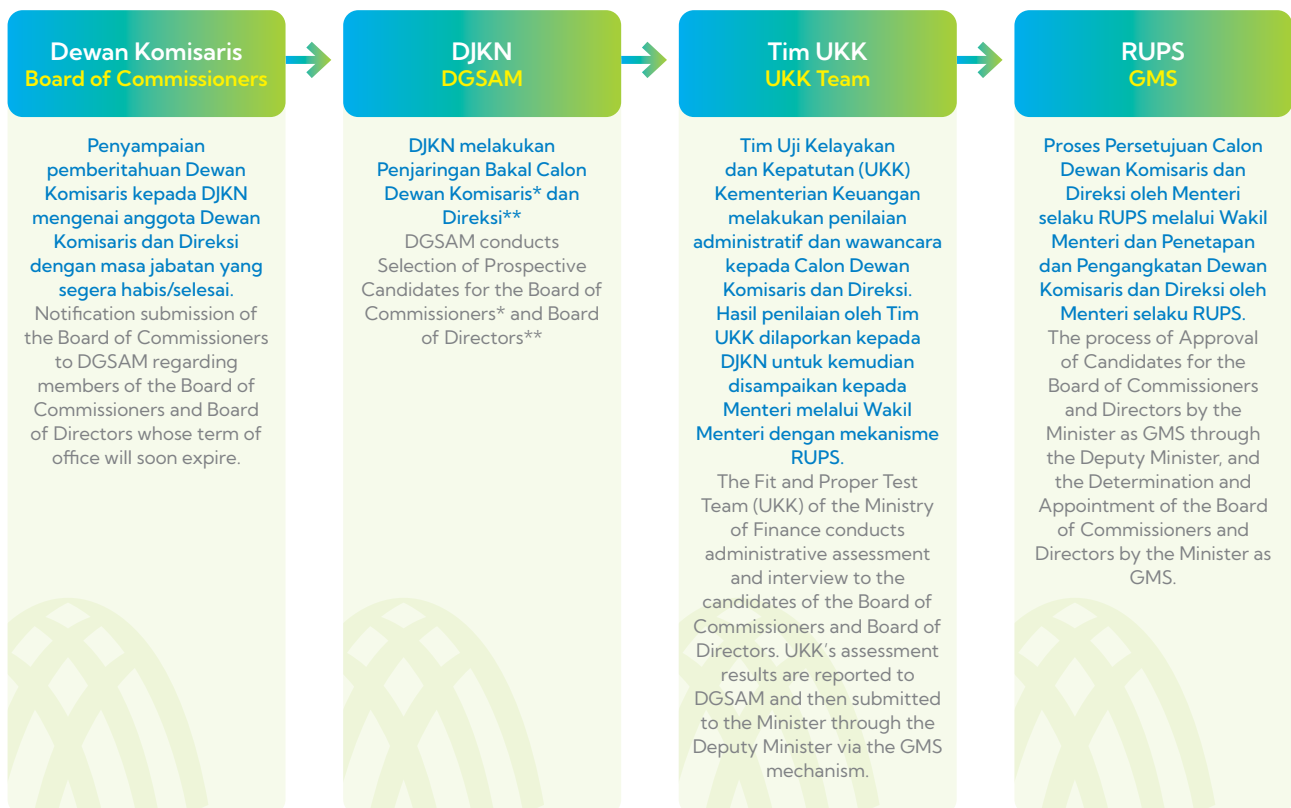
The nomination and selection policies for the Board of Commissioners members that apply in the Company are implemented with reference to PMK No.197/PMK.06/2019 on Procedures for Appointing and Dismissing Members of the Board of Commissioners of the Limited Liability Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance.

Meanwhile, nomination and appointment procedures of the Company's Board of Directors are implemented with reference to the PMK No. 78/PMK.06/2015 on Procedures for Appointing and Dismissing Members of the Board of Directors of the Limited Liability Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance, as amended several times, lastly by the PMK No. 135/PMK.06/2017 ("PMK 78/2015").

Simply put, the stages of nomination up to the appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors are as follows.

Tahapan dan Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Stages and Procedures for Nomination of the Board of Commissioners and Board of Directors

[GRI 2-10]





Proses pencalonan dan pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris PT PII dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria untuk memastikan kepemimpinan yang efektif dan berintegritas. PT PII memperhatikan pendapat pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, untuk memastikan dukungan yang luas dan representasi yang tepat. Keberagaman dalam *gender*, latar belakang profesional, dan pengalaman memperkaya perspektif, sementara independensi menjamin objektivitas dan menghindari benturan kepentingan. Kompetensi yang relevan terkait dengan infrastruktur dan bisnis Perseroan juga menjadi pertimbangan penting karena kesesuaian dengan fokus utama Perseroan. Selain itu, kompetensi terkait aspek LST sangat diperhatikan mengingat pentingnya prinsip-prinsip LST dalam operasional dan bisnis PT PII. [GRI 2-10]

The nomination and election process of IIGF's Board of Directors and Board of Commissioners is conducted by considering various criteria to ensure effective leadership with integrity. IIGF takes into account the opinions of stakeholders, including shareholders, to ensure wider support and appropriate representation. Diversity in gender, professional background, and experience enrich perspectives, while independence ensures objectivity and avoids conflicts of interest. Relevant competencies related to the Company's infrastructure and business are also vital as a conformity to the Company's main focus. In addition, competence related to ESG aspects is highly considered given the importance of ESG principles in IIGF's operations and business. [GRI 2-10]

Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam Pengawasan Risiko dan Peluang terkait Keberlanjutan dan Iklim

Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors in Sustainability and Climate Related Risk Monitoring and Opportunities

[S1-27a.1, S1-27a.3, 27a.4, 27a.5] [S2-6a.1, 6a.3, 6a.4, 6a.5, 25b]

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berperan penting dalam pengawasan risiko dan peluang terkait keberlanjutan dan iklim. Kedua organ ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Perseroan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum dan peraturan, tetapi juga mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam tata kelola keberlanjutan yang berdampak positif pada LST.

The Company's Board of Commissioners and Board of Directors have a crucial role in the supervision of sustainability and climate-related risks and opportunities. These two organs are responsible for ensuring that the Company not only fulfills its legal and regulatory obligations, but also adopts best practices in sustainability governance with a positive impact on ESG.

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan umum strategi, kebijakan dan kinerja Perseroan, termasuk manajemen risiko dan peluang yang terkait dengan keberlanjutan dan iklim serta memastikan bahwa Perseroan memiliki sistem manajemen risiko yang efektif yang mencakup identifikasi, evaluasi, mitigasi dan pemantauan risiko-risiko yang berkaitan dengan keberlanjutan dan iklim.

The Board of Commissioners is responsible for supervising the Company's strategy, policies, and performance, including the management of sustainability and climate-related risks and opportunities, and ensuring that the Company has an effective risk management system that includes the identification, evaluation, mitigation, and monitoring of sustainability and climate-related risks.

Sementara itu, Direksi memiliki peran langsung dalam mengeksekusi kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan strategi keberlanjutan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan memastikan bahwa setiap operasi Perseroan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Direksi juga bertanggung jawab atas pelaporan yang transparan kepada Dewan Komisaris dan para pemangku kepentingan mengenai risiko dan peluang terkait keberlanjutan dan iklim, serta kinerja Perseroan dalam mengelola aspek-aspek ini. Aspek lingkungan dan sosial menjadi bagian dari pembahasan pada Rapat Direksi terkait proyek (pembahasan rencana penjaminan, penerbitan IPA dan penandatanganan perjanjian penjaminan) serta Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris. Metode

On the other hand, the Board of Directors has a direct role in executing the established policies and strategies. The Board of Directors is responsible for implementing the sustainability strategy approved by the Board of Commissioners, and ensuring that the Company's operations are conducted with due regards to the environmental and social aspects. The Board of Directors is also responsible for transparent reporting to the Board of Commissioners and stakeholders on sustainability and climate-related risks and opportunities, as well as the Company's performance in managing these aspects. Environmental and social aspects are part of the discussion at project-related Board of Directors Meetings (discussion of guarantee plans, issuance of IPA and signing of guarantee agreements) as well as Joint Meetings of the Board of Directors



komunikasi dilakukan melalui penyampaian update *progress* terkait keberlanjutan proyek dan evaluasi kegiatan TJSL yang menjadi bagian dari materi laporan manajemen kepada Dewan Komisaris secara rutin setiap bulannya pada rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan frekuensi pelaksanaan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulannya. Selain itu, Direksi menerima pelaporan secara berkala dari Divisi/Bidang terkait atas aspek LST Perseroan yakni melalui pembahasan terkait proyek khususnya terkait *appraisal* dari sisi lingkungan. [GRI 2-13]

and Board of Commissioners. Communication methods are carried out through the delivery of progress updates related to project sustainability and evaluation of CSR activities as part of the management report material to the Board of Commissioners regularly every month at the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors with a frequency of implementation of at least 1 (one) time per month. In addition, the Board of Directors receives regular reporting from the relevant divisions/areas on the Company's ESG aspects through project-related discussions, especially related to environmental appraisal. [GRI 2-13]

Pendelegasian Wewenang Penanggungjawab Penerapan Prinsip Keberlanjutan Delegation of Authority for Sustainability

[GRI 2-13] [OJK E.1] [S1-27a.5, 27b.1, 27b.2] [S2-6a.5, 6b.1, 6b.2]

Dalam penerapan aspek keberlanjutan termasuk keuangan berkelanjutan, Direksi berperan dalam menetapkan dan menjalankan program-program keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam menjalankan program-program keberlanjutan ini, Direksi dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada jajaran struktur organisasi di bawahnya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing organ. Dalam hal ini, Direksi dapat memberikan wewenang kepada Deputy Direktur Bidang terkait untuk mengelola dan menjalankan aspek keberlanjutan yang secara rutin dilaporkan kepada Direksi. Pendelegasian wewenang ini juga menyesuaikan dengan kompetensi dan keahlian dari masing-masing bidang yang ditunjuk. Dewan Komisaris berperan untuk memberikan arahan, nasihat dan masukan sesuai kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya kepada Direksi dan seluruh jajaran PT PII terkait pelaksanaan kebijakan strategis dan tercapainya target-target kinerja yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi, tanggapan, arahan dan/atau pandangan Dewan Komisaris melalui surat tertulis, rapat Komite di bawah Dewan Komisaris dan kunjungan kerja Dewan Komisaris. [GRI 2-13] [OJK E.1]

In implementing sustainability aspects, which include sustainable finance, the Board of Directors has a role to determine and carry out sustainability programs that cover economic, social, and environmental aspects. In carrying out these sustainability programs, the Board of Directors may delegate some of their authority to the organizational structure reporting to them, in accordance with the provisions and authority of each organ. Therefore, the Board of Directors may delegate the authority to a related Deputy Director to manage and carry out the sustainability aspects, to be regularly reported to the Board of Directors. This delegation of authority also adjusts to the competence and expertise of each designated sector. The Board of Commissioners plays a role in providing direction, advice and input according to its capacity and capability to the Board of Directors and all levels of IIGF regarding the implementation of strategic policies and the achievement of performance targets set in the Company's Work Plan and Budget (RKAP), through joint meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors, responses, directions and / or views of the Board of Commissioners through written letters, Committee meetings under the Board of Commissioners and working visits of the Board of Commissioners. [GRI 2-13] [OJK E.1]

Adapun Bidang/Divisi khusus yang dimiliki PT PII untuk menangani isu-isu terkait topik ekonomi, lingkungan, dan sosial diantaranya yaitu *Environment and Social, Risk Management, Corporate Secretary & Communication, Corporate Strategy & Finance, dan Human Capital & Organization Development*. Adapun proses pelaporan Divisi terkait kepada Dewan Komisaris dan Direksi disampaikan secara sistematis dan berkala. Frekuensi pelaporan ini diatur secara bulanan dan/atau pada saat diperlukan, sehingga didapat laporan yang komprehensif mengenai berbagai dampak organisasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan. [GRI 2-13]

IIGF has special Sections/Divisions that handle issues related to economic, environmental, and social topics, i.e., Environment and Social, Risk Management, Corporate Secretary & Communication, Corporate Strategy & Finance, and Human Capital and Organization Development. The relevant Division reports to the Board of Commissioners and Directors systematically and periodically. The report is written monthly or as and when required, to obtain a comprehensive report on various organizational impacts to ensure transparency and accountability in the Company's management. [GRI 2-13]



Pengembangan Kompetensi Badan Tata Kelola terkait Keberlanjutan Competence Development of Governance Bodies related to Sustainability

[GRI 2-17] [OJK E.2] [S1-27a.2] [S2-6a.2]

Sebagai bagian dari komitmen PT PII terhadap keberlanjutan, Badan Tata Kelola Perseroan diberikan kesempatan untuk mengikuti program pelatihan dan seminar yang fokus pada topik LST. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kompetensi Badan Tata Kelola Perseroan dalam menerapkan prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan dan perumusan strategi. Dewan Komisaris dan Direksi ikut serta dalam diskusi terkait isu LST terkini, studi kasus praktis, serta strategi terbaik untuk mengintegrasikan LST dalam bisnis. Hal ini memperkaya pengetahuan Badan Tata Kelola Perseroan tentang pentingnya keberlanjutan dan memperkuat komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, terutama terkait isu perubahan iklim. Berikut daftar keikutsertaan Badan Tata Kelola Perseroan dalam program pengembangan kompetensi terkait LST selama tahun 2023:

As part of IIGF's commitment to sustainability, the Company's Governance Board has the opportunity to attend training programs and seminars that focus on ESG topics. These programs have the objective to enhance the understanding and competence of the Governance Body in applying sustainability principles in decision-making and formulating strategies. The Board of Commissioners and Board of Directors will engage in ESG discussions on current issues in practical case studies, as well as various best strategies to integrate ESG into the business. This enriched the Governance Board's knowledge of the importance of sustainability and strengthened its commitment to responsible business practices, especially in terms of climate change issues. The following is a list of governance bodies' participation in ESG-related competency development programs in 2023:

Keikutsertaan Badan Tata Kelola dalam Program Pengembangan Kompetensi terkait LST Tahun 2023

Participation of the Governance Body in 2023 ESG-related Competence Development Program in 2023

[GRI 2-17] [OJK E.2] [S1-27a.2] [S2-6a.2]

Peserta Participant	Judul Pelatihan Training	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Wahyu Utomo	<i>Climate change & Energy Policy making for longterm</i>	5-10 Maret 2023 5-10 March 2023	Harvard Kenedy School, Executive education admission
Direksi Board of Directors			
M. Wahid Sutopo	<i>Workshop of Water Innovative Finance Theme Side Event Road to the 10th World Water Forum 2024</i>	20 Maret 2023 20 March 2023	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Directorate General of Public Works and Housing Infrastructure Financing, Ministry of Public Works and Housing
Andre Permana	<i>Leading the Way In Sustainable Infrastructure</i>	21 Agustus 2023 21 August 2023	The Asset
	<i>The 7th Asia Urban Lighting Workshop</i>	19 – 21 September 2023 19 – 21 September 2023	The Asset
	<i>MDB Project Plaza 2023 – Leaping into a Green Beyond Global Crisis</i>	28 – 29 November 2023 28 – 29 November 2023	Ministry of Trade, Industry, and Energy & Ministry of Economy and Finance Korea
	<i>ESG Workshop: Kebijakan Implementasi ESG dalam mendorong Pembangunan Infrastruktur</i> ESG Workshop: ESG Policy Implementation in Encouraging Infrastructure Development	12 Desember 2023 12 December 2023	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Directorate General of Public Works and Housing Infrastructure Financing, Ministry of Public Works and Housing



Peserta Participant	Judul Pelatihan Training	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
Deputi Direktur Deputy Director			
Pratomo Ismujatmika	FGD Penerapan ESG pada BUMN FGD for ESG Implementation at SOEs	14 Agustus 2023 14 August 2023	DJKN Kementerian Keuangan DJKN of the Ministry of Finance
	<i>The ESG Learning Program for Infrastructure Development</i>	18–21 Oktober 2023 18–21 October 2023	KIAT (Indonesia Australia Partnership for Infrastructure)
	ESG Workshop: Kebijakan Implementasi ESG dalam mendorong Pembangunan Infrastruktur ESG Workshop: ESG Policy Implementation in Encouraging Infrastructure Development	12 Desember 2023 12 December 2023	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Directorate General of Public Works and Housing Infrastructure Financing, Ministry of Public Works and Housing
Organ Dewan Komisaris Board of Commissioners' Organ			
Ahmad Ghufro	ESG Workshop: Kebijakan Implementasi ESG dalam mendorong Pembangunan Infrastruktur ESG Workshop: ESG Policy Implementation in Encouraging Infrastructure Development	12 Desember 2023 12 December 2023	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Directorate General of Public Works and Housing Infrastructure Financing, Ministry of Public Works and Housing
Belis Siswanto	ESG Workshop: Kebijakan Implementasi ESG dalam mendorong Pembangunan Infrastruktur ESG Workshop: ESG Policy Implementation in Encouraging Infrastructure Development	12 Desember 2023 12 December 2023	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Directorate General of Public Works and Housing Infrastructure Financing, Ministry of Public Works and Housing

Kebijakan dan Proses Penentuan Remunerasi Badan Tata Kelola

Policy and Process to Determine the Governance Body's Remuneration

[GRI 2-19, 2-20]

Perseroan memberikan remunerasi kepada Direksi dengan mengacu pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara itu, besaran gaji dan tunjangan Direksi dirumuskan dan diajukan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS untuk dimintakan persetujuannya. Kewenangan tersebut dapat diberikan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 96 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Petunjuk teknis tentang kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/PMK.06/2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan ("PMK 200/2018"). Secara ringkas, prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

[S2-29g] [GRI 2-19]

The Company provides remuneration to the Board of Directors with reference to Article 96 paragraph (1) of the Law No. 40 of 2007 of the Republic of Indonesia on Limited Liability Companies. Meanwhile, the salary and allowances for the Board of Directors are formulated and submitted for approval by the Board of Commissioners to the GMS. This authority can be granted to the Board of Commissioners based on Article 96 paragraph 2 of Law No. 40 of 2007. Technical guidelines regarding the remuneration policies of the Board of Commissioners and Directors are further regulated in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 200/PMK.06/2018 on Guidelines for Determining the Income of Board of Directors and Board of Commissioners of a Limited Liability Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance ("PMK 200/ 2018"). In summary, the procedure to set the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors, is as follows: [S2-29g] [GRI 2-19]



Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Remuneration Determination Procedure for the Board of Commissioners and Board of Directors [GRI 2-20]



Pada tahun 2023, struktur dan komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan PMK 200/2018 terdiri dari:

In 2023, the structure and components of remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors based on PMK 200/2018 consist of:

Struktur dan Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Structure and Components of Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors [GRI 2-19]

Keterangan Description	Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners' Remuneration Structure	Struktur Remunerasi Direksi Board of Directors' Remuneration Structure
Struktur Remunerasi Jangka Pendek Short-Term Remuneration Structure	- Honorarium - Tunjangan - Fasilitas tantiem/insentif kinerja - Penghasilan lainnya - Honorarium - Allowances - Tantiem/Performance incentives - Other income	- Gaji - Tunjangan - Fasilitas tantiem/insentif kinerja - Penghasilan lainnya - Salary - Allowances - Tantiem/Performance incentives - Other income
Struktur Remunerasi Jangka Panjang Long-Term Remuneration Structure	Hingga akhir tahun 2023, Perseroan belum menerapkan remunerasi yang memperhitungkan kinerja Perseroan jangka panjang untuk Dewan Komisaris As of the end of 2023, the Company has not implemented remuneration that takes into account the Company's long-term performance for the Board of Commissioners	Hingga akhir tahun 2023, Perseroan belum menerapkan remunerasi yang memperhitungkan kinerja Perseroan jangka panjang untuk Direksi As of the end of 2023, the Company has not implemented remuneration that takes into account the Company's long-term performance for the Board of Directors

Benturan Kepentingan Conflict of Interest [GRI 2-15]

Direksi dan Dewan Komisaris merupakan dua organ penting dalam Perseroan dengan fungsi yang berbeda: Direksi mengelola operasional sehari-hari, sementara Dewan Komisaris mengawasi kinerja Direksi dan memberikan nasihat. Untuk menjaga independensi dan efektivitas, tidak diperbolehkan adanya rangkap jabatan antara anggota Direksi dan Dewan Komisaris, guna menghindari konflik kepentingan dan memastikan pengawasan yang objektif. [GRI 2-11]

The Board of Directors and the Board of Commissioners are two important organs in the Company with different functions: The Board of Directors manages day-to-day operations, while the Board of Commissioners oversees the performance of the Board of Directors and provides advice. To maintain independence and effectiveness, no concurrent positions are allowed between members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, to avoid conflicts of interest and ensure objective supervision. [GRI 2-11]



Selama tahun 2023, seluruh anggota Direksi tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Perseroan serta tidak memiliki rangkap jabatan yang dilarang. Direksi Perseroan memiliki komitmen untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun.

PT PII juga mencatat tidak ada benturan kepentingan dalam hubungan lintas Direksi dan Dewan Komisaris, serta kepemilikan saham lintas organisasi dengan pemasok/mitra usaha/vendor dan pemangku kepentingan Perseroan lainnya. Tidak adanya benturan kepentingan tercermin dalam kebijakan yang ketat dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kepemilikan saham lintas organisasi dengan pemasok/vendor/mitra usaha dan pemangku kepentingan tercermin dalam keterbukaan dan keterlibatan yang terus menerus dalam proses pengadaan dan kerja sama yang jujur dan transparan. Dengan demikian, PT PII menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan memastikan bahwa tidak ada benturan kepentingan yang merugikan pihak manapun dalam menjalankan operasionalnya. [GRI 2-15]

Perseroan memiliki kebijakan terkait benturan kepentingan yang tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Kebijakan Kode Etik. Kebijakan-kebijakan tersebut mengatur sebagai berikut:

- Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan dilarang mengambil keuntungan atau memiliki kepentingan pribadi dari setiap tindakan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan.
- Setiap transaksi yang dilakukan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan harus dilakukan untuk kepentingan Perseroan, dan bukan untuk kepentingan ekonomi pribadi.
- Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan wajib untuk menghindari situasi/kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan wajib mengungkapkan semua keadaan yang mungkin dapat menyebabkan munculnya benturan kepentingan dan tidak diperkenankan terlibat dalam setiap proses berkenaan dengan hal yang memiliki benturan kepentingan tersebut, dengan merujuk pada kebijakan terkait yang berlaku di Perseroan.

In 2023, all members of the Board of Directors had no conflicts of interest or potential conflicts of interest against the Company and had no prohibited concurrent positions. The Company's Board of Directors is committed to avoiding potential conflicts of interest at all times.

IIGF recorded no conflicts of interest in the Board of Commissioners and the Board of Directors relationships, as well as cross-organization shareholdings with suppliers/business partners/vendors and other stakeholders of the Company. The absence of conflicts of interest is reflected in strict policies and good corporate governance principles. Cross-organizational shareholdings with suppliers/vendors/partners and stakeholders are reflected in continuous transparency and involvement in the procurement processes, and honest and transparent cooperation. Thus, IIGF affirms its commitment to maintaining integrity and ensuring no conflict of interest that harms any party in performing its operations. [GRI 2-15]

The Company has policies related to conflict of interest as stated in the Good Corporate Governance Guidelines and Code of Ethics Policy. These policies stipulate the following:

- Members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, and Employees are prohibited from taking advantage of or having a personal interest in any action related to the interests of the Company.
- Every transaction carried out by Members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners and Employees must be carried out for the benefit of the Company, and not for personal economic interests.
- Members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners and Employees are obliged to avoid situations/conditions that may lead to conflicts of interest.
- Members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners and Employees are obliged to disclose all circumstances that may cause a conflict of interest to arise and are not allowed to be involved in any process regarding matters that have a conflict of interest, with reference to the relevant policies applicable in the Company.



Evaluasi Kinerja Badan Tata Kelola Tertinggi

Performance Evaluation of the Highest Governance Body

[GRI 2-18]

Dalam rangka memastikan tata kelola perusahaan yang efektif dan berkelanjutan, dan untuk meningkatkan kinerja masing-masing organ, maka Perseroan secara berkala melakukan pelaporan capaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan pada kebijakan Perseroan dan praktik tata kelola yang disepakati. Pelaporan capaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara berkala dengan periode triwulanan dan dilakukan oleh pihak independen. [GRI 2-18]

Penilaian kinerja Dewan Komisaris PT PII dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS, berdasarkan kebijakan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015, Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2017, dan Kebijakan Tata Laksana Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Perseroan. Penilaian ini menggunakan metode pengukuran kinerja yang terintegrasi, yang merupakan penerjemahan tugas, fungsi dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai sasaran strategis yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama, yang ditetapkan oleh RUPS setiap tahun.

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Penilaian Kinerja Kolegial Dewan Komisaris Board of Commissioners Collective Key Performance Index

Tercapai 104,57% dari target 100%
Achieved 104.57% of the target 100%

Sementara itu, penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015, Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2017 dan *Board Manual* Perseroan. Pengukuran kinerja Direksi menggunakan metode terintegrasi yang menerjemahkan visi, misi, dan strategi Perseroan ke dalam sasaran strategis, diukur melalui Indikator Kinerja Utama, baik secara individual maupun kolegial. Evaluasi kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada pemegang saham dan dibahas dalam RUPS.

Hasil penilaian kinerja Direksi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Penilaian Kinerja Korporasi Corporate Key Performance Index

100,70% dari target 100%
100.70% out of 100%

The Company assesses the reporting on achievements of the Board of Directors and the Board of Directors based on the Company's policies and agreed governance practices to ensure effective and sustainable corporate governance, and to enhance the performance of each organ. The reporting on achievements of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out periodically with a quarterly period and conducted by an independent party. [GRI 2-18]

The performance of IIGF's Board of Directors is assessed by the shareholders through the GMS, based on policies with reference to the Minister of Finance Regulation No. 88/PMK.06/2015, Minister of Finance Regulation No. 106/PMK.06/2017, and the Company's Work Procedure Policy for the Board of Commissioners and Directors (*Board Manual*). This assessment uses an integrated performance measurement method, which translates the duties, functions and responsibilities of the Board of Commissioners as strategic objectives measured through Key Performance Indicators, which are set by the GMS every year.

The following is the performance assessment of the Board of Commissioners in 2023:

Penilaian atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Assessment of GCG Implementation

91,03% (Sangat Baik) dari Target 87,50% (Sangat Baik)
91.03% (Very Good) of the target 87.50% (Very Good)

The performance assessment of the Board of Commissioners refers to the Minister of Finance Regulation No. 88/PMK.06/2015, the Minister of Finance Regulation No. 106/PMK.06/2017, and the Company's Board Manual. The performance measurement of the Board of Directors uses an integrated method that translates the Company's vision, mission, and strategy into strategic objectives, measured through Key Performance Indicators, both individually and collectively. The Board of Directors is evaluated by the Board of Commissioners before such result is submitted to the Shareholders and discussed in the GMS.

The following is the performance assessment of the Board of Directors in 2023:

Penilaian atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Assessment of GCG Implementation

93,85% (Sangat Baik) dari Target 87,50 (Sangat Baik)
93.85% (Very Good) of the target 87.50% (Very Good)



Hasil evaluasi penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi menjadi dasar untuk beberapa pengambilan keputusan seperti perbaikan dan pengembangan kompetensi, penyesuaian strategi dan kebijakan, peningkatan sistem pengawasan, penambahan atau perubahan komposisi badan tata kelola dan penerapan praktik organisasi baru untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Perubahan pada komposisi dan praktik organisasi dapat berupa restrukturisasi badan tata kelola, penguatan fungsi komite-komite, penerapan teknologi dan inovasi dan pengembangan budaya Perseroan. Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi badan tata kelola, pada tahun 2023, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris PT PII sehubungan dengan anggota Dewan Komisaris terkait diberikan penugasan lain. [GRI 2-18]

The evaluation results of the performance assessment of Board of Commissioners and Board of Directors serve as the basis for several decisions, such as competence improvement and development, strategy and policy adjustments, supervisory system improvement, addition or change to the composition of the governance body, and new organizational practices to improve operational effectiveness and efficiency. Changes to organizational composition and practices may include restructuring governance bodies, strengthening the committees' functions, applying technology and innovation, and developing corporate culture. In connection with the implementation of the governance body evaluation, in 2023, there is a change in the composition of the IIGF Board of Commissioners in connection with the relevant members of the Board of Commissioners being given other assignments. [GRI 2-18]

Skor Penilaian atas Penerapan GCG Perseroan GCG Assessment Score

Wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan GCG secara berkelanjutan, juga dibuktikan dengan hasil skor penilaian GCG pada tahun buku 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun buku 2022. Berikut hasil penilaian atas penerapan GCG dalam 5 (lima) tahun terakhir:

The Company's commitment to implementing GCG in a sustainable manner is also evidenced by the GCG assessment score in the 2023 fiscal year, which has increased compared to the previous year. The following are the GCG assessment results in the last five (5) years:

Tahun Year	Skor <i>Assessment</i> GCG GCG Assessment Score	Kualitas Quality	Pelaksana Penilai Assessor
2023	90,036	Sangat Baik Excellent	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Financial and Development Supervisory Agency
2022	88,170	Sangat Baik Excellent	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Financial and Development Supervisory Agency
2021	89,060	Sangat Baik Excellent	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Financial and Development Supervisory Agency
2020	89,120	Sangat Baik Excellent	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Financial and Development Supervisory Agency
2019	89,082	Sangat Baik Excellent	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Financial and Development Supervisory Agency



Tata Nilai dan Pedoman Perilaku

Core Values and Code of Conduct

[GRI 2-23, 2-24] [OJK F.1]

Sebagai bagian dari pelaksanaan praktik GCG, PT PII telah merumuskan Kode Etik yang mengikat seluruh insan PT PII, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris. Kode Etik ini diatur dalam Kebijakan Kode Etik PT PII yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang Pengesahan Kebijakan Kode Etik Perseroan tanggal 30 Desember 2022. Kebijakan ini berisi komitmen etika perilaku yang menjadi pedoman dalam bertindak berdasarkan prinsip kesadaran etis (*ethical sensibility*), berpikir etis (*ethical reasoning*) dan berperilaku etis (*ethical conduct*), untuk mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai Perseroan, termasuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang merujuk pada pedoman ISO 26000: *Social Responsibility*. Kode Etik ini telah memuat komitmen Perseroan dalam memberikan perlindungan terhadap karyawan (*stakeholders internal*) tanpa membedakan latar belakang jenis kelamin, agama, ras/suku dan sebagainya.

Pokok-pokok yang diatur dalam Pedoman Kode Etik meliputi:

1. Pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Nilai-nilai Perseroan;
3. Kepatuhan terhadap Hukum dan Perundangan;
4. Benturan Kepentingan;
5. Etika Profesional dalam Bekerja;
6. Etika dalam Berhubungan dengan Pemangku Kepentingan;
7. Keterlibatan dalam aktivitas politik;
8. Komitmen terhadap Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
9. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi;
10. Pelaporan keuangan;
11. Memberi dan menerima hadiah, jamuan dan sumbangan;
12. Komitmen terhadap Perlindungan Aset Perseroan dan Kerahasiaan Informasi;
13. Mekanisme penegakan Kebijakan Kode Etik Perusahaan; dan
14. Pelaporan dan sanksi atas pelanggaran.

Kebijakan Kode Etik Perseroan dikomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat dalam Perseroan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk teknologi informasi yang mudah diakses oleh semua karyawan setiap saat. Untuk karyawan baru, sosialisasi Kebijakan Kode Etik dilakukan melalui kegiatan pengenalan dan penyediaan materi tertulis yang dikirim via *email* atau dokumen elektronik lainnya. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan eksternal dilakukan melalui media sosial Perseroan, pengunggahan dokumen Kebijakan di *website* Perseroan (<https://ptpii.co.id/manual-kebijakan-perusahaan>), serta komunikasi langsung dengan mitra usaha atau pemangku kepentingan melalui media komunikasi yang ada atau melalui klausul dalam perjanjian/kontrak.

As part of the GCG practices, IIGF formulated a Code of Conduct that binds all IIGF's personnel, including the Board of Directors and Board of Commissioners. The Company's Code of Conduct is regulated in IIGF's Code of Conduct, which has been ratified via the Joint Decree of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners on the Ratification of the Company's Code of Conduct dated 30 December 2022. This policy contains a commitment to ethical behavior that serves as a guideline in the conduct based on the principles of ethical sensibility, ethical reasoning, and ethical conduct, to realize the Company's vision, mission, and values, this includes respect for human rights, which refers to the ISO 26000 guidelines: *Social Responsibility*. This Code of Conduct contains the Company's commitment to provide protection to employees (*internal stakeholders*) without discriminating against gender, religion, race/tribe and so on.

The key points regulated in the Code of Conduct include:

1. Statement of commitment of the Board of Directors and Board of Commissioners;
2. Corporate values;
3. Compliance with Laws and Regulations;
4. Conflict of Interest;
5. Professional Work Ethics;
6. Ethics in Engaging with Stakeholders;
7. Involvement in political activity;
8. Commitment to the Occupational Health and Safety and Environment;
9. Equal opportunity to get a job and promotion;
10. Financial reporting;
11. Giving and receiving gifts, entertainment, and donations;
12. Commitment to Protecting the Company's Assets and Confidentiality of Information;
13. Enforcement of the Company's Code of Conduct; and
14. Reporting and sanctions for violations.

The Company's Code of Conduct is disseminated to all parties in the Company through various communication channels, including by means of information technology accessible by all employees at any time. For new employees, the Code of Conduct is disseminated through induction and provision of written materials sent via email, or other electronic documents. Socialization to external stakeholders is conducted through the Company's social media, uploading the Policy on the Company's website (<https://ptpii.co.id/manual-kebijakan-perusahaan>), as well as direct communication with business partners or stakeholders through existing communication media or clauses in agreements/contracts.



Untuk mewujudkan perilaku Insan Perseroan yang berlandaskan etika bisnis, sejumlah inisiatif strategis dilakukan, antara lain komitmen Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sosialisasi Kebijakan Kode Etik dan program-program tata kelola kepada karyawan dan keteladanan pimpinan.

Penegakan Kode Etik dilakukan dengan penandatanganan Pakta Integritas setiap tahun, sosialisasi melalui saluran komunikasi Perseroan, pelaporan LHKPN dan daftar khusus kepemilikan saham Direksi, pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi kepada KPK, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, penyediaan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*), dan pemberian sanksi tegas bagi karyawan yang melanggar Kode Etik Perseroan.

PT PII secara proaktif juga mengintegrasikan Kode Etik ke dalam strategi, kebijakan operasional dan prosedur operasional Perseroan. Komitmen terhadap Kode Etik diintegrasikan dalam setiap aspek strategi Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip etika dan keberlanjutan yang menjadi dasar keputusan strategis. Kebijakan operasional dirancang untuk memastikan bahwa semua aktivitas Perseroan sejalan dengan Kode Etik, termasuk penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, prosedur operasional Perseroan dikembangkan dengan mempertimbangkan Kode Etik sebagai panduan dalam pelaksanaan sehari-hari, memastikan bahwa semua proses dan tindakan mencerminkan komitmen Perseroan terhadap integritas, transparansi dan tanggung jawab sosial.

Several strategic initiatives are carried out to implement the behavior of the Company's personnel based on business ethics, including the commitment of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as employees to implement Good Corporate Governance, socialization of the Code of Ethics Policy and governance programs to employees and leadership exemplary.

The Code of Conduct is enforced by signing the Integrity Pact every year, disseminating through the Company's communication channels, reporting the LHKPN and special list of share ownership of the Board of Directors, reporting the acceptance and/or rejection of gratification to KPK, establishing the Gratification Control Unit, providing Whistleblowing System, and imposing strict sanctions for employees who violate the Company's Code of Conduct.

IIGF also proactively integrates the Code of Conduct into the Company's strategy, operational policies and operational procedures. Commitment to the Code of Conduct is integrated into every aspect of the Company's strategy through the application of ethical and sustainability principles that inform strategic decisions. Operational policies are designed to ensure that all of the Company's activities are in line with the Code, including the application of good governance principles and compliance with applicable regulations. In addition, the Company's operational procedures are developed with the Code of Conduct in mind as a guide for daily operations, ensuring that all processes and actions reflect the Company's commitment to integrity, transparency and social responsibility.





Memperkuat Komitmen Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Strengthening Anti-Corruption Commitment and Gratification Control

[GRI 2-23, 2-24, 205-1, 205-2, 205-3]



Pendekatan Manajemen Topik Anti Korupsi

Management Approach to Anti-Corruption Topics

[GRI 3-3]



PENGLOLAAN DAMPAK



IMPACT MANAGEMENT

PT PII berkomitmen untuk mengelola dampak terkait topik anti korupsi dengan menerapkan berbagai kebijakan dan program. Dampak positif dari inisiatif anti korupsi ini termasuk mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya korupsi, meningkatkan reputasi PT PII di mata para pemangku kepentingan, regulator dan masyarakat, serta mendorong peningkatan kinerja PT PII dan memberikan rasa aman dalam lingkungan kerja. Selain itu, inisiatif ini meminimalisir risiko bagi PT PII akibat terjadinya pelanggaran, baik dari segi keuangan, operasi, hukum, maupun reputasi. Untuk mencapai ini, PT PII mengadopsi kebijakan anti korupsi yang komprehensif, melakukan pelatihan reguler bagi karyawan dan menerapkan sistem pelaporan pelanggaran yang aman. Penerbitan kebijakan terkait anti-korupsi telah disosialisasikan secara internal dan eksternal, disertai dengan program pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh Insan PT PII terkait prinsip-prinsip anti korupsi, serta menyediakan sarana pelaporan pelanggaran melalui WBS.

Namun, dampak negatif yang mungkin timbul meliputi peningkatan biaya untuk membangun sistem kontrol anti-korupsi, penurunan kemampuan PT PII untuk bersaing karena terlibat dalam praktik korupsi, dan timbulnya risiko hukum yang lebih besar atas terjadinya praktik korupsi. Untuk mengelola dampak negatif ini, PT PII fokus pada komunikasi yang efektif, melibatkan seluruh insan PT PII dalam program anti korupsi, dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak menghambat efisiensi operasional. Dengan pendekatan ini, PT PII berusaha menciptakan budaya perusahaan yang menjunjung tinggi integritas dan etika kerja, serta mengurangi risiko yang terkait dengan korupsi. [GRI 3-2]

IIGF is committed to managing impacts related to anti-corruption topics by implementing various policies and programs. These anti-corruption initiatives have positive impacts, i.e., reducing costs in dealing with the consequences of corruption, enhancing IIGF's reputation in the perspective of stakeholders, regulators, and the public, as well as encouraging improvements in IIGF's performance and providing a sense of security in the working environment. In addition, these initiatives minimize the risk to IIGF of a breach, in terms of finance, operations, legal, and reputation. To achieve this, IIGF adopted a comprehensive anti-corruption policy, conducted regular training for employees, and implemented a secure whistleblowing system. The issuance of policies related to anti-corruption has been disseminated internally and externally, accompanied by training and socialization programs for all IIGF's personnel on the anti-corruption principles, as well as providing a means of reporting violations through the WBS.

However, negative impact that may arise includes the increasing costs to establish an anti-corruption control system, decline of IIGF's ability to compete due to involvement in corrupt practices, and the existence of greater legal risks from the corrupt practices. To manage this negative impact, IIGF focused on effective communication, involving all IIGF's personnel in the anti-corruption program, and ensuring that the policies implemented do not obstruct the operational efficiency. With this approach, IIGF strives to create a corporate culture that upholds integrity and work ethics, and reduces the risks associated with corruption. [GRI 3-2]



KEBIJAKAN YANG TELAH DIKEMBANGKAN SECARA KHUSUS



SPECIFICALLY DEVELOPED POLICIES

Kebijakan PT PII terkait Anti Korupsi, diantaranya:

- > Kebijakan Pengendalian Gratifikasi
- > Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
- > Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)
- > Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- > Kebijakan Penyelesaian Kerugian Negara No. IA.003/KEP/V.03
- > Kebijakan Kode Etik
- > Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
- > Dan kebijakan lainnya yang relevan

Kebijakan PT PII terkait Anti Korupsi mengacu pada Ketentuan Umum, diantaranya:

- > Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- > Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- > Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- > Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- > Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelolaan Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan
- > Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi
- > Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
- > SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
- > Dan peraturan lainnya yang relevan

IIGF's policies related to Anti-Corruption:

- > Gratification Control Policy
- > Anti-Bribery Management System (SMAP)
- > Whistleblowing System
- > Good Corporate Governance Guidelines
- > State's Loss Settlement Policy No. IA.003/ KEP/V.03
- > Code of Conduct
- > State's Official Wealth Report (LHKPN) Guidelines
- > And other relevant policies

IIGF's policies on Anti-Corruption refer to General Provisions:

- > Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 1999 on the State Administrators who are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism
- > Law No. 20 of 2001, on the Amendment to Law No. 31 of 1999 on the Corruption Eradication
- > Law of the Republic of Indonesia No. 30 of 2002 on the Eradication of the Criminal Act of Corruption as amended several times, lastly by Law No. 19 of 2019 on the Second Amendment to Law No. 30 of 2002 on the Commission for the Eradication of the Criminal Act of Corruption
- > Law of the Republic of Indonesia No. 15 of 2006 on the Audit Board of the Republic of Indonesia
- > The Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 88/PMK.06/2015 on the Implementation of Good Corporate Governance in the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance
- > Corruption Eradication Commission Regulation No. 2 of 2019 on Gratification Reporting
- > The Minister of Finance Regulation No. 227/PMK.09/2021 on Gratification Control within the Ministry of Finance
- > Anti-Bribery Management System (SMAP) SNI ISO 37001:2016
- > And other relevant regulations

KOMITMEN



COMMITMENT

- > Menjamin tidak terlibat dalam kegiatan penyuapan ("*No Bribery*")
- > Menjamin tidak ada pemberian dan penerimaan komisi/imbal jasa yang tidak sah serta melanggar hukum dan peraturan yang berlaku ("*No Kickback*")
- > Menjamin tidak ada pemberian hadiah-hadiah, tanda terima kasih atau gratifikasi yang tidak patut dan bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ("*No Indecent Gift*")
- > Menjamin tidak ada pemberian dan permintaan layanan kemewahan dan keramahmatan yang berlebihan ("*No Luxurious Hospitality*")

- > Ensuring not to be involved in bribery ("*No Bribery*")
- > Ensuring that there is no giving or receiving commissions/ rewards that are not valid and violate prevailing laws and regulations ("*No Kickback*")
- > Ensuring that there are no gifts, tokens, or gratuities that are improper and contrary to the prevailing laws and regulations ("*No Indecent Gift*")
- > Ensuring that there is no gifts or requests of excessive luxury and hospitality services ("*No Luxurious Hospitality*")



TUJUAN/TARGET

- Tidak terjadi KKN maupun penyuapan di Perseroan (*Zero Tolerance*)
- Peningkatan pemahaman Insan PT PII terkait kebijakan anti korupsi di Perseroan melalui program pelatihan dan sosialisasi rutin
- Setiap insan Perseroan yang mengetahui adanya pelanggaran melaporkan pelanggaran tersebut kepada Perseroan melalui saluran yang telah disediakan
- Pelaksanaan pelaporan pemantauan dan koordinasi terkait pemeriksaan kerugian negara di lingkungan Perseroan berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pengelola Pelaporan Pelanggaran dan Tim Pemantauan Kerugian Negara melaksanakan tugas dan kewajiban secara objektif dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik



OBJECTIVES/TARGETS

- There shall be no Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) or bribery in the Company (*Zero Tolerance*)
- Increased understanding of IIGF's personnel regarding the Company's anti-corruption policies through regular training and socialization programs
- Every Company's personnel who is aware of a violation, shall report such violation to the Company through the provided channels
- The reporting, monitoring, and coordination related to the assessment of state losses within the Company is running well in accordance with the prevailing laws and regulations
- The Whistleblowing Reporting Manager and the State Loss Monitoring Team conduct their duties and obligations objectively and professionally, in accordance with the Good Corporate Governance principles

EVALUASI DAN EFEKTIVITAS TINDAKAN UNTUK MENGELOLA DAMPAK

- Audit ISO 37001:2016 SMAP pada ruang lingkup yang tersertifikasi, secara berkala 1 (satu) tahun sekali oleh Auditor Independen Lembaga Sertifikasi
- Evaluasi pengelolaan pelaporan pelanggaran
- Laporan Pemantauan Kerugian Negara
- Laporan pelaksanaan program pengendalian gratifikasi
- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
- *Assessment* penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)
- Penilaian Efektivitas serta Efisiensi Fungsi Audit Internal
- Penilaian atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal
- Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Tingkat Entitas



EVALUATION AND EFFECTIVENESS OF IMPACT MANAGEMENT MEASURES

- ISO 37001:2016 SMAP audit on certified scope, once a year by the Independent Auditor of the Certifying Body
- Evaluation of whistleblowing reporting management
- State Loss Monitoring Report
- Report on the gratification control program
- State Official Assets Report (LHKPN)
- Assessment of the Good Corporate Governance (GCG) implementation
- Assessment of the Effectiveness and Efficiency of the Internal Audit Function
- Assessment of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control
- Evaluation of the Entity Level Internal Control System

PENANGGUNG JAWAB

- Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
- Tim Pemantauan Kerugian Negara
- Unit Pengendalian Gratifikasi
- Unit Pengelola LHKPN
- Divisi Corporate Secretary & Communication
- Divisi Human Capital & Organizational Development
- Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)
- Fungsi Penerap SMAP
- Fungsi Audit Internal



PERSON IN CHARGE

- Whistleblowing Management Team
- State Loss Monitoring Team
- Gratification Control Unit
- LHKPN Management Unit
- Corporate Secretary & Communication Human Capital & Organizational Development
- Anti-Bribery Compliance Function (FKAP)
- SMAP Implementor
- Internal Audit Function

ALOKASI ANGGARAN

PT PII telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 juta dengan realisasi Rp Rp37,95 juta untuk mengelola topik anti korupsi



BUDGET ALLOCATION

PT PII has budgeted Rp100 million with a realization of Rp37,95 million to manage anti-corruption topics



KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN DAMPAK



STAKEHOLDERS' ENGAGEMENT IN MANAGING IMPACT

Pemerintah

- Mengeluarkan peraturan dan kebijakan terkait anti korupsi yang kemudian dijadikan pedoman oleh PT PII
- Melakukan pengawasan terhadap praktik anti korupsi

Badan Tata Kelola

- Menetapkan kebijakan anti korupsi dan penyuapan
- Memberikan contoh kepemimpinan yang etis dan transparan
- Mengawasi penerapan kebijakan dan memastikan integritas dalam operasional perusahaan

Karyawan PT PII

- Secara bertanggung jawab melakukan aktivitas dengan menerapkan pedoman anti korupsi
- Melaporkan apabila terdapat indikasi terjadinya praktik kecurangan atau korupsi di lingkungan PT PII

Mitra/Penyedia Barang dan Jasa

- Mematuhi Kebijakan dan Peraturan yang berlaku di Perseroan terkait dengan pengadaan barang dan/atau jasa, salah satunya dengan menandatangani Pakta Integritas Mitra Kerja
- Mendukung penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan
- Melaporkan apabila terdapat indikasi terjadinya praktik kecurangan atau korupsi di lingkungan PT PII

Government

- Issuing regulations and policies related to anti-corruption, which further are used as guidelines by IIGF
- Monitoring the anti-corruption practices

Governance Body

- Establish anti-corruption and bribery policies
- Model ethical and transparent leadership
- Oversee policy implementation and ensure integrity in company operations

IIGF's employees

- Responsibly conducting activities with due regards to anti-corruption guidelines
- Reporting if there are indications of fraudulent or corrupt practices within IIGF

Partners/Providers of Goods and Services

- Complying with prevailing policies and regulations in the Company related to the procurement of goods and/or services, one of which is by signing the Integrity Pact of Working Partners
- Implementing Anti-Bribery Management System (SMAP) SNI ISO 37001:2016 in the Company
- Reporting if there are indications of fraudulent or corrupt practices within IIGF

Penilaian Risiko Korupsi dan Penyuapan

Anti-Corruption and Bribery Risk Assessment

[GRI 205-1]

Sebagai bagian dari penerapan SMAP, PT PII telah melakukan identifikasi dan penilaian terhadap potensi risiko korupsi dan penyuapan yang mungkin terjadi. Perseroan melakukan identifikasi dan penilaian risiko pada setiap proses, divisi dan unit kerja yang terkait untuk menentukan jenis dan tingkat pengendalian risiko korupsi dan penyuapan yang akan diterapkan pada setiap kategori risiko. Hasil dari penilaian risiko ini diharapkan dapat merefleksikan risiko korupsi dan penyuapan aktual yang dihadapi oleh Perseroan, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang tepat dalam menangani dan mengendalikan risiko tersebut.

Penilaian dilakukan secara berkala setidaknya 1 (satu) tahun sekali terhadap unit kerja yang telah ditetapkan untuk melaksanakan program SMAP atau sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Divisi Risk Management dan melibatkan *risk owner* dari lingkup penilaian risiko yang dilakukan.

As part of the SMAP implementation, IIGF identified and assessed the potential risks of corruption and bribery that may occur. The Company identified and assessed risks in each process, division, and related working unit, to determine the type and level of corruption and bribery risk controls to be applied to each risk category. The risk assessment result shall reflect the actual bribery and corruption risks faced by the Company. Thus, appropriate steps shall be prepared in terms of handling and controlling these risks.

Assessment is carried out regularly, at least once a year, for work units that have been assigned to carry out the SMAP program, or as necessary. Such assessment is coordinated by the Risk Management Division and involves the risk owner from the scope of the risk assessment carried out.



Cakupan Bribery Risk Assessment Scope of Bribery Risk Assessment [GRI 205-1]

Cakupan Bribery Assessment Bribery Assessment Scope

Pertimbangan Risiko Penyuaan Secara Umum General Bribery Risks

Implementasi Pengendalian & Residual Risk Control Implementation & Residual Risk

Area Pengadaan Barang dan Jasa
(Tinggi)
Procurement of Goods and Services
(High)

- Secara umum melibatkan sumber daya keuangan (frekuensi transaksi dan nilai keuangan yang tinggi) yang signifikan serta melibatkan banyak pihak ketiga dan personil Perseroan lintas divisi sehingga berpotensi terdapat benturan kepentingan yang menguntungkan pihak tertentu
- Memiliki dampak keuangan dan reputasi yang signifikan
- Generally involves significant financial resources (frequency of transactions and high financial value) and involves many third parties and Company personnel across divisions so that there is a potential conflict of interest in favor of certain parties
- Has a significant financial and reputational impact

- Residual Risk: Rendah**
- Persetujuan dan penerimaan hasil pengadaan melalui pejabat berwenang
 - Proses tender & pembentukan tim pengadaan
 - Pakta Integritas terkait penyuaan
 - Penambahan klausul SMAP pada perjanjian
 - Uji Kelayakan sesuai kriteria
- Residual Risk: Low**
- Approval and acceptance of procurement results through authorized officials
 - Tender process & procurement team formation
 - Integrity Pact on bribery
 - Addition of SMAP clause to the agreement
 - Due diligence according to criteria

Area Bisnis Penjaminan dan
Penugasan (Menengah)
Business Guarantee and
Assignment (Moderate)

Area
Keuangan
dan Treasury
(Menengah)
Finance and
Treasury
(Moderate)

- Secara umum melibatkan sumber daya keuangan yang signifikan (frekuensi transaksi dan nilai keuangan yang tinggi) yang melibatkan pemangku kepentingan
- Memiliki dampak keuangan dan reputasi yang cukup signifikan
- Generally involves significant financial resources (high frequency of transactions and financial value) involving stakeholders
- Has significant financial and reputational impact

- Residual Risk: Rendah**
- Mekanisme tender/lelang
 - Evaluasi kelayakan penjaminan secara *independent* & melalui Rapat Direksi
 - *Compliance checklist* pemenuhan dokumen
 - Penugasan berdasarkan KMK
- Residual Risk: Low**
- Tender mechanism
 - Independent evaluation of underwriting eligibility & BoD meeting
 - Compliance checklist for document fulfillment
 - Assignment based on KMK

Area SDM dan Ketenagakerjaan
(Rendah)
HR and Employment
(Low)

Area Tata Kelola, Manajemen Risiko dan
Pengendalian (Rendah)
Governance, Risk Management, and
Control (Low)

Area Fungsi Pendukung Lainnya
(Rendah)
Other Support Functions
(Low)

- Secara umum melibatkan sumber daya keuangan (frekuensi transaksi dan nilai keuangan) yang tidak signifikan (dengan pengecualian area SDM), namun potensi untuk penyuaan adalah rendah
- Generally involves insignificant financial resources (frequency of transactions and financial value) (with the exception of the HR area), but the potential for bribery is low.

- Residual Risk: Rendah**
- Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terpusat oleh Unit Kerja Procurement
 - Pembatasan dalam pemberian hadiah/jaminan
 - Pakta Integritas karyawan dan kode etik
 - Sosialisasi secara berkelanjutan
- Residual Risk: Low**
- Procurement of goods and services is carried out centrally by the Procurement Unit.
 - Restrictions on gifts/guarantees
 - Employee Integrity Pact and code of ethics
 - Continuous socialization
 - Assignment based on KMK

Pada tahun 2023, secara garis besar terdapat 6 (enam) area yang diidentifikasi risiko *fraud* yang terkait dengan penyuaan. Dari keenam area tersebut, 1 (satu) area atau 16% dengan tingkat risiko inheren tinggi yakni Area Pengadaan Barang dan Jasa serta 2 (dua) area atau 33% dengan tingkat risiko inheren menengah yakni Area Bisnis Penjaminan dan Penugasan serta Area Keuangan dan *Treasury*. Sedangkan 3 (tiga) area lainnya (50%) berada di tingkat risiko Rendah yakni Area SDM dan

In 2023, there were 6 (six) areas identified as fraud risks related to bribery. Of the six areas, 1 (one) area or 16% with a high inherent risk level, namely the Goods and Services Procurement Area and 2 (two) areas or 33% with a medium inherent risk level, namely the Guarantee and Assignment Business Area and the Finance and Treasury Area. While the other 3 (three) areas (50%) are at the Low risk level, namely the HR and Employment Area, Governance, Risk Management and



Ketenagakerjaan, Area Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian dan Area Fungsi Pendukung lainnya. Atas hasil analisis tersebut, PT PII telah menetapkan mitigasi risiko, evaluasi dan beberapa kebijakan Perseroan beserta sumber daya yang diperlukan untuk memitigasi risiko penyuapan dan korupsi yang teridentifikasi. Namun, hal tersebut harus selalu dimonitor agar mitigasi tersebut dapat berjalan dengan efektif sehingga risiko tersebut dapat dihilangkan, dikurangi, atau dipertahankan pada level keberterimaan risiko Perseroan. [GRI 205-1]

Control Area and other Support Function Areas. Based on the analysis, IIGF has established risk mitigation, evaluation, and several Company policies, in line with resources necessary to mitigate the bribery and corruption risks identified. However, this shall always be monitored to ensure that the mitigation runs effectively, in order to eliminate, reduce or maintain such risks at an acceptable risk level of the Company. [GRI 205-1]

Komunikasi, Sosialisasi dan Pelatihan Anti Korupsi dan Penyuapan kepada Pihak Internal

Anti-Corruption and Bribery Communication, Dissemination, and Training

[GRI 205-2]

Pada tahun 2023, PT PII telah melaksanakan serangkaian program anti korupsi, yang mencakup berbagai inisiatif seperti sosialisasi, pembelajaran, kolaborasi dan diseminasi topik-topik anti korupsi melalui berbagai media seperti *e-mail*, media sosial, *banner*, *gathering* dan lain sebagainya. Sehingga selama tahun 2023, seluruh anggota Badan Tata Kelola dan karyawan (100%) di wilayah operasional yakni DKI Jakarta telah dikomunikasikan mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi. Langkah-langkah ini menegaskan komitmen Perseroan dalam memerangi korupsi dan memastikan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang baik. [GRI 205-2]

In 2023, IIGF implemented a series of anti-corruption programs, which include various initiatives, such as socialization, learning, collaboration, and dissemination of anti-corruption topics through various media, such as e-mail, social media, banners, gatherings, etc. In 2023, all members of the governance bodies and employees (100%) in the operational area, namely DKI Jakarta have been informed about the anti-corruption policies and procedures. These measures emphasize the Company's commitment to preventing corruption and ensuring business practices are in line with sustainability and good governance principles. [GRI 205-2]

Sosialisasi Anti Korupsi yang telah dilakukan oleh Perseroan kepada karyawan dan organ tata kelola Perseroan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. *Sharing Session* SMAP tentang WBS dan penerapan SMAP sebagai upaya pencegahan suap yang dilaksanakan pada 15 Maret 2023 dan dihadiri oleh karyawan Perseroan, Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris
2. Sosialisasi Kebijakan Kode Etik pada tanggal 13 Juni 2023 yang dihadiri oleh seluruh karyawan dan jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT PII;
3. Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Pelaporan Pelanggaran tanggal 12 Oktober 2023, dihadiri oleh karyawan PT PII, jajaran Direksi dan Dewan Komisaris;
4. *Talkshow* Forum GRC dalam rangka perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tanggal 4 Desember 2023, dihadiri oleh karyawan PT PII, jajaran Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Diseminasi Gratifikasi/Anti Korupsi pada tahun 2023:
 - Rilis Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran Tahun 2023 melalui *email blast* kepada seluruh karyawan PT PII;
 - Penyampaian pesan larangan penerimaan gratifikasi hari raya melalui email blast kepada seluruh karyawan PT PII;
 - Diseminasi materi pengendalian gratifikasi dan anti korupsi melalui media email kepada karyawan.

The Anti-Corruption Socialization that has been conducted by the Company to employees and governance organs of the Company during 2023 is as follows:

1. SMAP Sharing Session on WBS and the implementation of SMAP as an effort to prevent bribery was held on March 15, 2023 and was attended by employees of the Company, Directors, Board of Commissioners and Board of Commissioners Organs.
2. On 13 June 2023, the Company disseminated the Code of Conduct, which was attended by all employees and IIGF's Board of Directors and Board of Commissioners;
3. Socialization of Gratification Control Policy and Whistleblowing System on 12 October 2023, attended by IIGF's employees, the Board of Directors, and the Board of Commissioners;
4. GRC Forum Talk Show to celebrate the World Anti-Corruption Day (Hakordia) on 4 December 2023, attended by IIGF's employees, the Board of Directors, and the Board of Commissioners;
5. The dissemination of Gratification/Anti-Corruption in 2023:
 - Issuance of Gratification Control and Whistleblowing System Policy in 2023 by emailing all IIGF's employees;
 - Submission of a message prohibiting the acceptance of holiday gratuities by emailing all IIGF's employees;
 - Dissemination of gratification control and anti-corruption materials through email media to employees.



Selain komunikasi dan sosialisasi topik anti korupsi, PT PII juga membekali karyawan dan badan tata kelola dengan melakukan pelatihan anti korupsi. Pada tahun 2023, PT PII menyelenggarakan pelatihan dalam bentuk *workshop* pada tanggal 4 Desember 2023 pada acara Forum *Governance Risk and Compliance* (GRC) 2023. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh (100%) badan tata kelola dengan total keseluruhan peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 104 orang atau 63% dari total jumlah karyawan yang mewakili unit kerja dan fungsi di wilayah kerja PT PII di DKI Jakarta. Adapun rincian peserta pelatihan ini terdiri dari 3 orang Direksi, 3 orang Dewan Komisaris, 1 orang komite, 4 karyawan berstatus EVP, 26 karyawan VP-SVP, 17 karyawan DSM-AVP, 35 karyawan AM-M dan 15 karyawan berstatus *staff*. [GRI 205-2]

In addition to communication and socialization of anti-corruption topics, IIGF also equips employees and governance bodies by conducting anti-corruption training. In 2023, IIGF organized training in the form of a workshop on December 4, 2023 at the Governance Risk and Compliance (GRC) Forum 2023. This training was attended by all (100%) governance bodies with a total of 104 participants or 63% of the total number of employees representing work units and functions in PT PII's work area in DKI Jakarta. The details of the training participants consisted of 3 Directors, 3 Commissioners, 1 committee, 4 employees with EVP status, 26 VP-SVP employees, 17 DSM-AVP employees, 35 AM-M employees and 15 employees with staff status. [GRI 205-2]

Komunikasi dan Sosialisasi Anti Korupsi kepada Pihak Eksternal

Anti-Corruption Communication and Socialization to External Parties

[GRI 205-2]

Selain menekankan pembekalan kepada internal, PT PII juga turut menerapkan ketentuan yang ditujukan pada *awareness* dan sosialisasi anti korupsi dan penyuluhan pada mitra usaha Perseroan dan kepada masyarakat secara luas. *Awareness* dan sosialisasi untuk mitra usaha dan masyarakat ini juga dikomunikasikan pada setiap proses pengadaan barang dan jasa atau melalui media lainnya sesuai kebutuhan. Sehingga, PT PII dapat memastikan bahwa vendor/mitra bisnis/*supplier* Perseroan telah seluruhnya dikomunikasikan mengenai kebijakan anti korupsi Perseroan.

In addition to emphasizing training for employees, IIGF also applies provisions aimed at anti-corruption and bribery awareness and socialization to the Company's business partners and the public. Awareness and socialization for business partners and the public are communicated in every procurement process of goods and services or through other media as needed. Thus, IIGF ensures that 100% of the Company's vendors/business partners/suppliers have been fully communicated about the Company's anti-corruption policy.

Pada tahun 2023, Perseroan telah melaksanakan sosialisasi anti korupsi terkait materi sistem manajemen anti penyuluhan, larangan pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan dan hiburan kepada seluruh insan Perseroan dan sosialisasi WBS pada kegiatan *vendor gathering* yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023 maupun dalam proses pengadaan barang dan/jasa yang dilakukan sepanjang tahun khususnya pada tahap *aanwijzing*. Kegiatan *vendor gathering* dihadiri oleh 90 vendor/mitra usaha Perseroan dan kegiatan *aanwijzing* dihadiri oleh seluruh calon vendor yang mengikuti proses pengadaan. Dengan demikian PT PII telah mensosialisasikan kebijakan anti korupsi kepada seluruh vendor/mitra usaha Perseroan di seluruh Indonesia. [GRI 205-2]

In 2023, the Company carried out anti-corruption awareness and socialization related to anti-bribery management system material, prohibition of giving and receiving gifts, banquets, and entertainment, to all the Company personnel, and WBS socialization at the vendor gathering on 25 July 2023 as well as in the procurement process of goods and/or services carried out throughout the year, especially at the *aanwijzing* stage. Vendor gathering activities were attended by 90 vendors / business partners of the Company and *aanwijzing* activities were attended by all prospective vendors who participated in the procurement process. Thus IIGF has socialized anti-corruption policies to all vendors / business partners of the Company throughout Indonesia. [GRI 205-2]

Insiden Korupsi Teridentifikasi dan Penanganannya

Corruption Incidents Identified and Addressed

[GRI 205-3]

Selama tahun 2023, Perseroan tidak menemukan adanya insiden korupsi yang melibatkan insan Perseroan maupun mitra kerja, sehingga tidak ada karyawan yang diberhentikan atau dihukum karena korupsi dan tidak terdapat kontrak mitra bisnis yang diakhiri atau tidak diperbarui karena pelanggaran terkait korupsi. Perseroan juga mencatat tidak ada kasus hukum terkait korupsi yang diajukan oleh publik terhadap Perseroan atau karyawannya selama periode pelaporan. Sehingga dapat dikatakan bahwa segala upaya dan program yang diterapkan telah mampu bekerja secara efektif untuk menekan dan menghilangkan risiko insiden korupsi dan penyuluhan yang terjadi di lingkungan Perseroan. [GRI 205-3]

In 2023, the Company did not have any incidents of corruption involving the Company's personnel or business partners. Thus, no employees were dismissed or convicted due to corruption and no business partners' contracts were terminated or not renewed due to corruption-related offenses. The Company also recorded no legal cases related to corruption filed by the public against the Company or its employees during the reporting period. Therefore, all the efforts and programs implemented have worked effectively to suppress and eliminate the risk of incidents of corruption and bribery that may occur within the Company. [GRI 205-3]



Pelibatan Pemangku Kepentingan

Stakeholders' Involvement

[GRI 2-29] [OJK E.4]

Bagi PT PII, pemangku kepentingan merupakan entitas atau individu yang terpengaruh oleh kegiatan, produk, dan jasa Perseroan. Bagi PT PII, keberadaan mereka dapat mendukung keberhasilan Perseroan dalam menerapkan strategi maupun mencapai tujuan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Perseroan senantiasa berupaya untuk membangun hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, yang dijalankan melalui berbagai forum pertemuan yang digelar, baik secara berkala maupun insidental sesuai dengan kebutuhan Perseroan atau atas permintaan pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui siapa saja pemangku kepentingan yang berpengaruh dan terpengaruh akibat kegiatan operasional Perseroan, PT PII telah melakukan pemetaan pemangku kepentingan yang berdasarkan pada keterikatan, *proximity* dan keterkaitan langsung dan tidak langsung dengan keberlanjutan usaha, proses bisnis dan aktivitas operasional Perseroan.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Perseroan, berikut pemangku kepentingan dan metode pelibatan yang dilakukan selama tahun pelaporan:

IIGF considers stakeholders as the entities or individual who is affected by the Company's activities, products, and services. IIGF considers the stakeholders' presence can support the Company's success in implementing strategies and achieving goals. Based on these considerations, the Company endeavors to establish harmonious relationships with stakeholders, which are conducted through various meeting forums held, both periodically and incidentally based on the Company's needs or at the request of stakeholders.

To understand the stakeholders who are influential and affected by the Company's operations, IIGF has conducted stakeholder mapping based on attachment, proximity, and direct and indirect involvement with the Company's business continuity, business processes, and operations.

Based on the Company's mapping, the following stakeholders and engagement methods were conducted during the reporting year:

Pelibatan Pemangku Kepentingan

Stakeholders' Involvement

[GRI 2-29] [OJK E.4]

Kategori Pemangku Kepentingan Category of Stakeholders	Metode Pelibatan Method of Engagement	Frekuensi Frequency	Topik Pembahasan Topics
Pemegang Saham (Kementerian Keuangan RI) Shareholders (Ministry of Finance of the Republic of Indonesia)	1. RUPST Laporan Tahunan 2. RUPST RKAP 3. RUPSLB 1. Annual GMS Annual Report 2. RKAP Annual GMS 3. EGMS	1. Satu tahun sekali 2. Satu tahun sekali 3. Sesuai kebutuhan Perseroan 1. Once a year 2. Once a year 3. As needed by the Company	1. Persetujuan Laporan Tahunan 2. Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 3. Persetujuan rencana strategis yang tidak diputuskan dalam RUPS Tahunan 1. Approval of the Annual Report 2. Approval of the Company's Work Program and Budget 3. Approval of strategic plans not decided at the Annual GMS
Pemerintah Pusat, Daerah dan Badan Legislatif terkait Central Government, Local Governments, and related Legislative Bodies	1. Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku 2. Tata kelola perusahaan yang baik 3. Kerja sama program TJSL 1. Compliance with prevailing regulations 2. Good Corporate Governance 3. CSR program collaboration	Sesuai kebutuhan As necessary	1. Melakukan evaluasi secara berkala sebagai alat ukur efektivitas kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku 2. Implementasi program terkait tata kelola 3. Sinkronisasi kerja sama program-program TJSL 1. Evaluating periodically as a measure of the effectiveness of compliance with prevailing regulations. 2. Governance program implementation 3. Synchronization of CSR program collaboration



Kategori Pemangku Kepentingan Category of Stakeholders	Metode Pelibatan Method of Engagement	Frekuensi Frequency	Topik Pembahasan Topics
Badan Usaha Pelaksana (BUP) Implementing Business Entity (BUP)	1. <i>Capacity building</i> 2. <i>Site visit</i> 3. <i>Stakeholder engagement survey</i>	1. Sesuai kebutuhan 2. Sesuai kebutuhan 3. Satu tahun sekali 1. As necessary 2. As necessary 3. Once a year	1. Implementasi program <i>capacity building</i> terkait mandat Perseroan serta proses bisnis penjaminan 2. Progres proyek serta kendala yang dihadapi 3. Pelayanan yang diberikan oleh Perseroan 1. Capacity building programs related to the Company's mandate and guarantee business process 2. Projects' progress and obstacles faced 3. The Company's provided services
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Government Contracting Agency	1. <i>Capacity building</i> 2. <i>Site visit</i> 3. <i>Stakeholder engagement survey</i>	1. Sesuai kebutuhan 2. Sesuai kebutuhan 3. Satu tahun sekali 1. As necessary 2. As necessary 3. Once a year	1. Implementasi program <i>capacity building</i> terkait mandat Perseroan serta proses bisnis penjaminan 2. Progres proyek serta kendala yang dihadapi 3. Pelayanan yang diberikan oleh Perseroan 1. Capacity building programs related to the Company's mandate and guarantee business process 2. Projects' progress and obstacles faced 3. The Company's provided services
Karyawan Employee	1. <i>Town hall meeting</i> 2. <i>Sharing session</i> 3. Kegiatan olahraga & kesenian 4. <i>Company gathering</i> 5. <i>Employee engagement survey</i> 1. Town hall meeting 2. Sharing Session 3. Sports & arts activities 4. Company gathering 5. Employee engagement survey	1. Dilakukan secara berkala 2. Dilakukan secara berkala 3. Dilakukan secara berkala 4. Satu tahun sekali 5. Satu tahun sekali 1. Conducted periodically 2. Conducted periodically 3. Conducted periodically 4. Once a year 5. Once a year	1. Pengembangan kompetensi dan karier 2. Evaluasi kinerja 3. Hak dan kewajiban Perseroan 4. Meningkatkan efektivitas hubungan manajemen dan karyawan 1. Competency and career development 2. Performance evaluation 3. Company's rights and obligations 4. Improving the effectiveness of relationship between management and employees
Masyarakat Lokal Local Community	Relasi sosial dan pelaksanaan program TJSL Social relationship and CSR program	Sepanjang tahun Year round	Menjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan serta menciptakan hubungan yang harmonis dan berkontribusi positif terhadap kehidupan ekonomi dan sosial Establishing harmonious and mutually beneficial relationships, and creating harmonious relationships that contribute positively to economic and social life
Akademisi Academics	1. Kolaborasi riset 2. Publikasi 3. Konsultasi 4. Kunjungan langsung 5. <i>Stakeholder engagement survey</i> 1. Research collaboration 2. Publication 3. Consultation 4. Direct visit 5. Stakeholder engagement survey	1. Sesuai kebutuhan 1. As necessary	1. Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat 2. Kolaborasi dalam riset dan publikasi serta kajian sektor proyek 1. Education, research, and community service 2. Collaboration on research and publications and project sector assessments
Pemasok/Vendor/ Supplier Vendor/Supplier	1. <i>Vendor gathering</i> 2. Penilaian kinerja Pemasok/ Vendor/<i>Supplier</i> 1. Vendor gathering 2. Vendor/Supplier performance assessment	1. Satu tahun sekali 1. Once a year	1. Proses pengadaan barang dan jasa yang adil dan transparan 2. Seleksi dan evaluasi kandidat mitra bisnis yang objektif 3. Prosedur administrasi yang mudah dimengerti dan akurat 4. Hubungan kerja sama yang baik dan berkesinambungan 1. Fair and transparent process of procuring goods and services 2. Objective selection and evaluation of potential business partners 3. Easily understood and accurate administrative procedures 4. Good and continuous cooperation relationship



Kategori Pemangku Kepentingan Category of Stakeholders	Metode Pelibatan Method of Engagement	Frekuensi Frequency	Topik Pembahasan Topics
Media	1. <i>Press Release</i> 2. <i>Media Gathering</i> 3. <i>Site Visit</i> 4. <i>Media Monitoring</i>	1. Sesuai kebutuhan Perseroan 2. Satu tahun sekali 3. Sesuai kebutuhan Perseroan 4. Sesuai kebutuhan Perseroan 1. As needed by the Company 2. Once a year 3. As needed by the Company 4. As needed by the Company	1. Kinerja Perseroan 2. Penyampaian informasi yang jelas dan transparan terkait kegiatan yang dijalankan Perseroan 3. Keterbukaan informasi yang akurat dan terkini 1. Company's Performance 2. Submission of clear and transparent information related to the Company's activities 3. Disclosure of accurate and up-to-date information

Untuk mengelola hubungan dan meningkatkan efektivitas pelibatan pemangku kepentingan, PT PII rutin melakukan survei tahunan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang kredibel. Pada tahun 2023, rata-rata persepsi kinerja PT PII di mata pemangku kepentingan eksisting adalah 4,50 (kategori "Sangat Teredukasi"). Sementara itu, rata-rata persepsi kinerja PT PII di mata pemangku kepentingan potensial adalah 4,02 (kategori "Sangat Positif"). Secara keseluruhan, indeks pengetahuan dan persepsi kinerja PT PII dari pemangku kepentingan eksisting dan potensial adalah 4,26 dari skala 5 (level "Satisfactory").

IIGF regularly conducts annual surveys assisted by credible third parties to manage relationships and improve the effectiveness of stakeholder engagement. In 2023, the average of IIGF's performance as perceived by the existing stakeholders was 4.50 ("Very Educated"). Meanwhile, the potential stakeholders assessed IIGF's performance at 4.02 ("Very Positive"). Overall, IIGF's knowledge and performance perception index from existing and potential stakeholders was 4.26 out of 5 ("Satisfactory").





Whistleblowing System

[GRI 2-16, 2-25, 2-26]

Perseroan mengembangkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) sebagai bagian dari kebijakan untuk memberantas korupsi, suap dan praktik kecurangan lainnya, serta memperkuat komitmen manajemen terhadap implementasi GCG dan budaya pelaporan penyimpangan (*fraud*). Perseroan telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran, yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 19 September 2023.

WBS memungkinkan insan PT PII dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan berbagai permasalahan kritis yang dapat mengakibatkan kerugian finansial atau non-finansial terhadap Perseroan termasuk pelanggaran peraturan perundang-undangan seperti pemalsuan tanda tangan, penggelapan, *mark-up*, penggunaan narkoba, dan perusakan barang. Selain itu, WBS juga mencakup pelanggaran terhadap Kebijakan Kode Etik Perseroan, prinsip akuntansi dan sistem pengendalian internal yang dapat menyebabkan salah saji laporan keuangan, kebijakan dan prosedur operasional, serta tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja.

The Company developed a Whistleblowing System (WBS) as part of its policy to combat corruption, bribery, and other fraudulent practices, as well as to strengthen management's commitment to GCG and a culture of fraud reporting. The Company formulated and established a Whistleblowing System Policy, which was signed by the Board of Directors and the Board of Commissioners on 19 September 2023.

WBS allows IIGF personnel and other stakeholders to report critical issues that may result in financial or non-financial losses to the Company including violations of laws and regulations such as signature forgery, embezzlement, mark-ups, drug use, and destruction of goods. In addition, the WBS also covers violations of the Company's Code of Conduct Policy, accounting principles and internal control systems that could lead to misstatement of financial statements, operational policies and procedures, and actions that endanger occupational safety and health.

Media Pelaporan WBS

WBS Reporting Media

[GRI 2-16]

Para pelapor dapat menggunakan berbagai sarana pelaporan seperti pengiriman *e-mail* ke alamat resmi pelaporan WBS Perseroan, pengiriman surat, serta pelaporan melalui *website* untuk menyampaikan pengaduannya. Langkah-langkah ini menjadi bagian integral dari komitmen dalam menjaga kejujuran, transparansi dan integritas dalam setiap aspek operasionalnya.

Whistleblowers may use various means of reporting such as sending *e-mail* to the Company's official WBS address, contact via telephone or short message, as well as the website to submit their complaints. These steps are an integral part of the Company's commitment to maintaining honesty, transparency, and integrity in every aspect of its operations.

Media Pelaporan Pelanggaran melalui WBS Violation Reporting Media through WBS



<https://ptpii.co.id/pelaporan-pelanggaran>



PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Gedung Capital Place, Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18 , Jakarta 12710 – Indonesia

Ditujukan kepada:
Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
Diserahkan melalui Kotak Surat Masuk TP3 di lingkungan Perseroan



pelaporan@iigf.co.id

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Capital Place Building, 7th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Kav.18, Jakarta 12710, Indonesia

Addressed to:
Whistleblower Management Team
Submitted through the TP3 Inbox within the Company



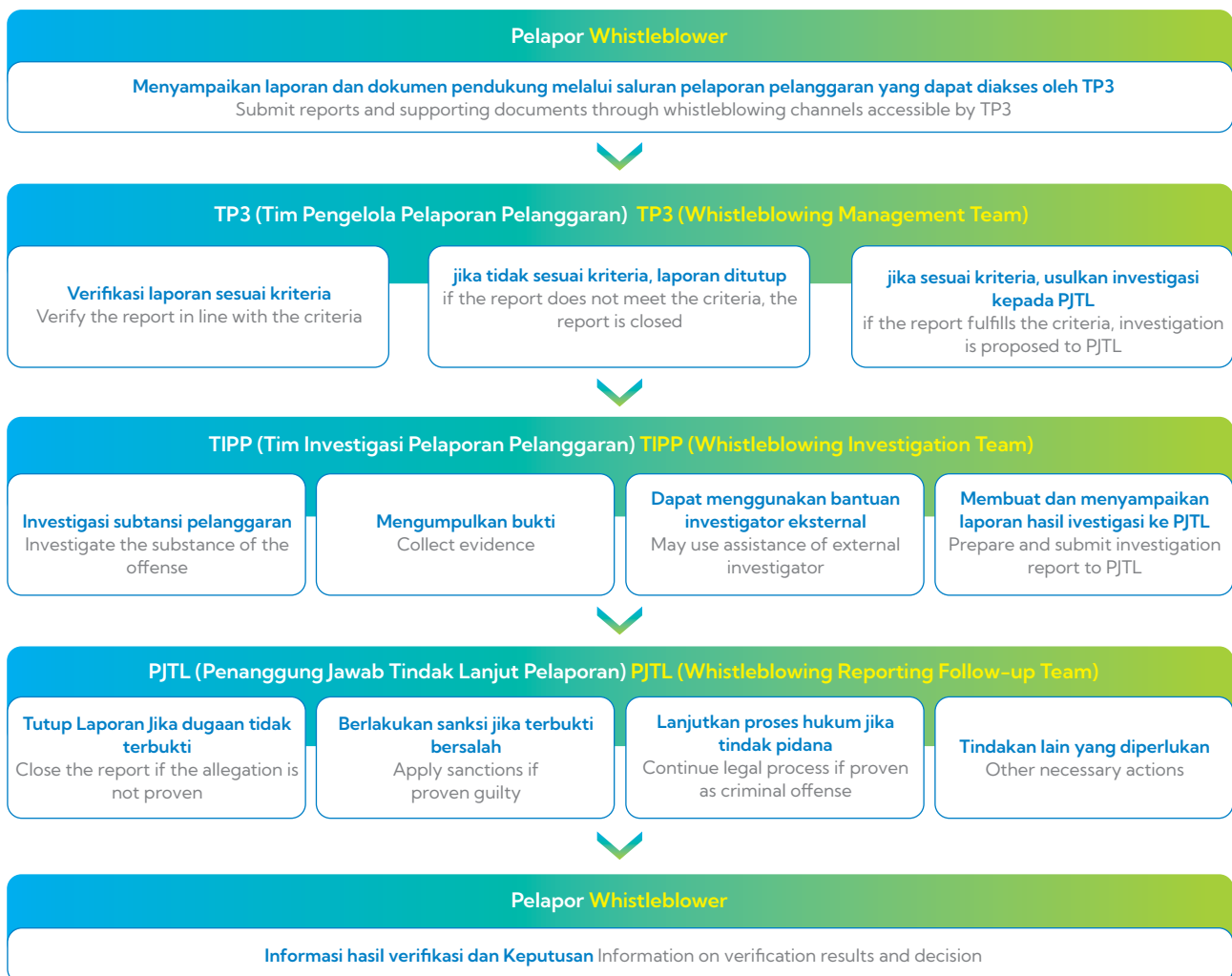
WBS dikelola oleh Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3), Penanggung Jawab Tindak Lanjut Pelaporan (PJTL), dan Tim Investigasi Pelaporan Pelanggaran (TIPP). TP3 bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan WBS, dengan keanggotaan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris. PJTL terdiri dari Direktur Utama jika terlapor adalah karyawan, Komisaris Utama jika terlapor adalah anggota Direksi atau Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris selain Komisaris Utama jika terlapor adalah Komisaris Utama. TIPP bertugas melakukan investigasi pelaporan pelanggaran, dengan keanggotaan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi atau Dewan Komisaris.

WBS is managed by the Whistleblowing Management Team (TP3), the Person in Charge of Reporting Follow-up (PJTL), and the Whistleblowing Investigation Team (TIPP). TP3 is responsible for the management and implementation of the WBS policy, with membership determined through a Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners. The PJTL consists of the President Director if the reported party is an employee, the President Commissioner if the reported party is a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners, and the Board of Commissioners other than the President Commissioner if the reported party is the President Commissioner. TIPP is tasked with investigating the reporting of violations, with membership determined through a Decree of the Board of Directors or the Board of Commissioners.

Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Laporan

Complaint Reporting and Handling Mechanism

[GRI 2-16, 2-26]





Jumlah Laporan dan Penanganannya

Total Reports and Handling

[GRI 2-16, 2-26, 2-25]

Secara keseluruhan, selama tahun 2023, tidak terdapat masalah kritis yang disampaikan kepada badan tata kelola serta tidak terdapat laporan yang masuk atas dugaan pelanggaran baik yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan/standar terkait dan peraturan internal Perseroan yang masuk melalui WBS.

Overall, in 2023, there were no critical issues were raised to the governance body and no incoming reports on alleged violations categorized as acts that violate laws and regulations, related regulations/standards, and the Company's internal regulations through the WBS.

Laporan WBS dan Penanganannya

WBS Report and Handling

[GRI 2-16, 2-26, 2-25]

Uraian Description	2023	2022
Jumlah pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir Number of complaints received in the last fiscal year	Nihil None	Nihil None
Jumlah pengaduan yang diproses pada tahun buku terakhir Number of complaints processed in the last fiscal year	Nihil None	Nihil None
Jumlah pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku terakhir Number of complaints settled in the last fiscal year	Nihil None	Nihil None
Jumlah pengaduan yang belum selesai diproses Total complaints under the follow-up process	Nihil None	Nihil None

PT PII memastikan mekanisme WBS berfungsi efektif dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam perancangan, peninjauan dan perbaikannya melalui konsultasi berkala dan dialog terbuka. Masukan dari pemangku kepentingan diintegrasikan ke dalam revisi kebijakan dan prosedur WBS. Perseroan juga melacak efektivitas mekanisme pengaduan melalui analisis data laporan, waktu penyelesaian dan audit internal. Laporan efektivitas disampaikan kepada manajemen dan pemangku kepentingan, yang kemudian memberikan umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut, memastikan WBS berfungsi sebagai alat yang menjaga integritas dan kepercayaan operasional Perseroan.

IIGF ensures that the WBS mechanism functions effectively by involving stakeholders in its design, review and improvement through periodic consultation and open dialog. Input from stakeholders is integrated into the revision of WBS policies and procedures. The Company also tracks the effectiveness of the grievance mechanism through analysis of report data, turnaround time and internal audits. Effectiveness reports are presented to management and stakeholders, who then provide feedback for further improvement, ensuring the WBS serves as a tool that maintains the integrity and trustworthiness of the Company's operations.

PT PII berkomitmen untuk menangani dan meremediasi dampak negatif yang berpotensi timbul dari kegiatan operasional Perseroan. Proses remediasi ini mencakup beberapa langkah utama yakni identifikasi dan penilaian yang melibatkan pemangku kepentingan seperti masyarakat, komunitas lokal dan pemerintah setempat. Selanjutnya, Perseroan juga dapat memberikan kompensasi finansial maupun nonfinansial, seperti ganti rugi dan bantuan medis apabila terbukti adanya dampak negatif yang merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Lebih lanjut, PT PII juga tunduk pada sanksi hukum, baik pidana maupun administratif, termasuk pembayaran denda dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. [GRI 2-25]

IIGF is committed to addressing and remediating potential negative impacts arising from the Company's operational activities. This remediation process includes several main steps, namely identification and assessment involving stakeholders such as the community, local community and local government. Furthermore, the Company can also provide financial and non-financial compensation, such as compensation and medical assistance if there are proven negative impacts that harm the community and the surrounding environment. Furthermore, IIGF is also subject to legal sanctions, both criminal and administrative, including payment of fines and compliance with applicable regulations. [GRI 2-25]



Permasalahan dan Tantangan terhadap Penerapan Bisnis Berkelanjutan

Problems and Challenges towards Sustainable Business Implementation

[OJK E.5]

Sebagai badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, PT PII menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam menerapkan bisnis yang berkelanjutan, terutama dalam konteks perubahan iklim. Tantangan utama termasuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam proyek-proyek yang dijamin oleh Perseroan, yang mencakup memastikan bahwa proyek-proyek tersebut mematuhi standar LST yang berlaku serta mempertimbangkan risiko perubahan iklim. Penyesuaian terhadap berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah terkait perubahan iklim dan keberlanjutan juga menjadi tantangan, di mana PT PII harus memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur mematuhi semua peraturan lingkungan yang relevan dan mengikuti kebijakan serta standar yang berlaku.

Meningkatkan kesadaran dan kapasitas internal serta eksternal terkait keberlanjutan dan perubahan iklim, termasuk pelatihan karyawan dan kolaborasi dengan pihak terkait lainnya, juga merupakan tantangan tersendiri. Selain itu, membangun sistem yang efektif untuk evaluasi dan pelaporan dampak lingkungan dari proyek-proyek infrastruktur merupakan tantangan lain, dimana PT PII perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kinerja keberlanjutan proyek-proyek yang dijamin. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, PT PII terus berinovasi, beradaptasi dengan kondisi yang berubah, serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi dampak perubahan iklim.

As a business entity established by the government to support the infrastructure development acceleration in Indonesia, IIGF faced various issues and challenges in implementing sustainable business, especially in terms of climate change. Key challenges include integrating sustainability aspects into the projects guaranteed by the Company, which includes ensuring that projects comply with prevailing ESG standards, and consider climate change risks. Adjusting to various government regulations and policies related to climate change and sustainability is also another challenge, in which IIGF shall ensure that infrastructure projects comply with all relevant environmental regulations and follow prevailing policies and standards.

Another challenge is raising internal and external awareness and capacity on sustainability and climate change, including employee training and collaboration with other stakeholders. In addition, establishing an effective system for evaluation and reporting of environmental impacts of infrastructure projects is also another challenge, and IIGF shall ensure transparency and accountability in reporting on the sustainability performance of guaranteed projects. In facing these challenges, IIGF strives to innovate, adapt to changing conditions, and increase collaboration with various parties to achieve sustainable development goals and address the impacts of climate change.

Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan

Compliance with Laws and Regulations

[GRI 2-27]

Sebagai perusahaan yang mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi, PT PII berupaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum selama proses operasional Perseroan. Pada tahun 2023, tidak terdapat permasalahan hukum, perburuhan/ketenagakerjaan, konsumen/kepailitan/komersial/persaingan atau lingkungan yang dihadapi oleh Perseroan, sehingga tidak ada informasi terkait dengan pokok perkara, status penyelesaian, pengaruh terhadap Perseroan, nilai nominal tuntutan dan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Perseroan.

As a company that prioritizes compliance with rules and regulations, IIGF strives to prevent legal violations during the Company's operational processes. In 2023, there were no legal, labor/employment, consumer/bankruptcy/commercial/competition or environmental issues faced by the Company. Therefore, there was no information related to the subject matter, status of settlement, impact on the Company, the nominal value of claims and administrative sanctions imposed on the Company.





Lampiran

Attachment





Indeks Konten GRI Standards

GRI Standards Content Index

[GRI 1]

Pernyataan penggunaan Statement of use

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah menyusun laporan sesuai dengan GRI Standards untuk periode 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) has reported in accordance with the GRI Standards for the period January 1, 2023 to December 31, 2023

GRI 1 yang digunakan GRI 1 used

GRI 1: Landasan 2021
GRI 1: Foundation 2021

Standar Sektor GRI yang berlaku Applicable GRI Sector Standard

-

Standar GRI/ Sumber Lain GRI Standard/ Other Source	Pengungkapan Disclosure	Lokasi/ Halaman/ Location/ Page	Yang Tidak Dicantumkan Omission			No. Rujukan Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.	
			Persyaratan yang Tidak Dicantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation		
Pengungkapan Umum General Disclosure							
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 General Disclosure 2021	Organisasi dan praktik pelaporan The organization and its reporting practices						
	GRI 2-1	Rincian organisasi Organizational details	40, 46	-	-	-	-
	GRI 2-2	Entitas yang dimasukkan dalam pelaporan keberlanjutan organisasi Entities included in the organization's sustainability reporting	57, 58	-	-	-	-
	GRI 2-3	Periode, frekuensi, dan titik kontak pelaporan Reporting period, frequency and contact point	28, 52, 60	-	-	-	-
	GRI 2-4	Penyajian kembali informasi Restatements of information	57	-	-	-	-
	GRI 2-5	Penjaminan eksternal External assurance	56	-	-	-	-
	Aktivitas dan pekerja Activities and workers						
	GRI 2-6	Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya Activities, value chain and other business relationships	40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 58	-	-	-	-
	GRI 2-7	Tenaga kerja Employees	139, 141	-	-	-	-
	GRI 2-8	Pekerja yang bukan pekerja langsung Workers who are not employees	139, 141	-	-	-	-
	Tata Kelola Governance						
	GRI 2-9	Struktur dan komposisi tata kelola Governance structure and composition	44, 180-184	-	-	-	-
	GRI 2-10	Pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi Nomination and selection of the highest governance body	182, 184, 185, 186	-	-	-	-



Standar GRI/ Sumber Lain GRI Standard/ Other Source	Pengungkapan Disclosure	Lokasi/ Halaman/ Location/ Page	Yang Tidak Dicantumkan Omission			No. Rujukan Standar GRI GRI Sector Standard Ref. No.
			Persyaratan yang Tidak Dicantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
GRI 2-11	Ketua badan tata kelola tertinggi Chair of the highest governance body	181, 182, 190	-	-	-	-
GRI 2-12	Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi manajemen dampak Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts	42, 67, 131, 181	-	-	-	-
GRI 2-13	Delegasi tanggung jawab untuk mengelola dampak Delegation of responsibility for managing impacts	187	-	-	-	-
GRI 2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan Role of the highest governance body in sustainability reporting	183	-	-	-	-
GRI 2-15	Konflik kepentingan Conflicts of interest	183, 184, 190, 191	-	-	-	-
GRI 2-16	Komunikasi masalah penting Communication of critical concerns	206, 207, 208	-	-	-	-
GRI 2-17	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi Collective knowledge of the highest governance body	188	-	-	-	-
GRI 2-18	Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi Evaluation of the performance of the highest governance body	192-193	-	-	-	-
GRI 2-19	Kebijakan remunerasi Remuneration policies	189, 190	-	-	-	-
GRI 2-20	Proses untuk menentukan remunerasi Process to determine remuneration	189, 190	-	-	-	-
GRI 2-21	Rasio kompensasi total tahunan Annual total compensation ratio	151	-	-	-	-
Strategi, kebijakan, dan praktik Strategy, policies and practices						
GRI 2-22	Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan Statement on sustainable development strategy	18, 42	-	-	-	-
GRI 2-23	Komitmen kebijakan Policy commitments	34, 42, 131, 135, 194, 196	-	-	-	-
GRI 2-24	Menanamkan komitmen kebijakan Embedding policy commitments	18, 131, 194, 196	-	-	-	-
GRI 2-25	Proses untuk memperbaiki dampak negatif Processes to remediate negative impacts	130, 131, 206, 208	-	-	-	-
GRI 2-26	Mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah Mechanisms for seeking advice and raising concerns	206, 207, 208	-	-	-	-
GRI 2-27	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Compliance with laws and regulations	109, 112, 135, 156, 177, 209	-	-	-	-



Standar GRI/ Sumber Lain GRI Standard/ Other Source	Pengungkapan Disclosure	Lokasi/ Halaman/ Location/ Page	Yang Tidak Dicantumkan Omission			No. Rujukan Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
			Persyaratan yang Tidak Dicantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
	GRI 2-28 Keanggotaan asosiasi Membership associations	51	-	-	-	-
Keterlibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder engagement						
	GRI 2-29 Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan Approach to stakeholder engagement	203	-	-	-	-
	GRI 2-30 Perjanjian perundingan kolektif Collective bargaining agreements	154	-	-	-	-
Topik Material Material Topic						
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	GRI 3-1 Proses untuk menentukan topik material Process to determine material topics	55, 56, 57	-	-	-	-
	GRI 3-2 Daftar topik material List of material topics	57, 58, 59, 112, 196	-	-	-	-
Ekonomi Economic						
Kinerja Ekonomi Economic Performance						
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	GRI 3-3 Manajemen topik material Topic management disclosures	58, 64	-	-	-	-
	GRI 201-1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan Direct economic value generated and distributed	72, 73	-	-	-	-
	GRI 201-2 Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim Financial implications and other risks and opportunities due to climate change	125, 129	-	-	-	-
	GRI 201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya Defined benefit plan obligations and other retirement plans	153	-	-	-	-
	GRI 201-4 Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah Financial assistance received from government	73	-	-	-	-
Keberadaan Pasar Market Presence						
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	GRI 3-3 Manajemen topik material Topic management disclosures	58	-	-	-	-
GRI 202: Keberadaan Pasar 2016 Market Presence 2016	GRI 202-1 Rasio standar upah pegawai entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage	149	-	-	-	-
	GRI 202-2 Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal Proportion of senior management hired from the local community	139	-	-	-	-



Standar GRI/ Sumber Lain GRI Standard/ Other Source	Pengungkapan Disclosure	Lokasi/ Halaman/ Location/ Page	Yang Tidak Dicantumkan Omission			No. Rujukan Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
			Persyaratan yang Tidak Dicantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impacts						
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	GRI 3-3	Manajemen topik material Topic management disclosures	58, 64	-	-	-
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016 Indirect Economic Impacts 2016	GRI 203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan Infrastructure investments and services supported	74	-	-	-
	GRI 203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan Significant indirect economic impacts	74, 76, 77, 119, 121, 161-177	-	-	-
Anti Korupsi Anti - Corruption						
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	GRI 3-3	Manajemen topik material Topic management disclosures	58, 196	-	-	-
GRI 205: Anti Korupsi 2016 Anti - Corruption 2016	GRI 205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi Operations assessed for risks related to corruption	196, 199, 200, 201	-	-	-
	GRI 205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi Communication and training about anti-corruption policies and procedures	196, 201, 202	-	-	-
	GRI 205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil Confirmed incidents of corruption and actions taken	196, 202	-	-	-
Lingkungan Environment						
Energi Energy						
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	GRI 3-3	Manajemen topik material Topic management disclosures	58, 86, 93, 109	-	-	-
GRI 302: Energi 2016 Energy 2016	GRI 302-1	Konsumsi energi dalam organisasi Energy consumption within the organization	92, 93	-	-	-
	GRI 302-2	Konsumsi energi di luar organisasi Energy consumption outside of the organization	93	-	Informasi tidak tersedia Information unavailable	Hal ini dikarenakan sumber data tidak berada di bawah kendali Perseroan, melainkan membutuhkan pelibatan berbagai pihak serta membutuhkan perhitungan dan validasi data lebih kompleks This is because the data sources are not under the Company's control but requires the involvement of various parties and more complex data calculation and validation
	GRI 302-3	Intensitas energi Enerav intensivy	92, 93	-	-	-



Standar GRI/ Sumber Lain GRI Standard/ Other Source	Pengungkapan Disclosure	Lokasi/ Halaman/ Location/ Page	Yang Tidak Dicantumkan Omission			No. Rujukan Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
			Persyaratan yang Tidak Dicantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
	GRI 302-4 Pengurangan konsumsi energi Reduction of energy consumption	94, 95	-	-	-	-
	GRI 302-5 Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa Reductions in energy requirements of products and services	94, 95	-	-	-	-
Air dan Efluen Water and Effluent						
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	GRI 3-3 Manajemen topik material Topic management disclosures	58, 86, 96, 109	-	-	-	-
	GRI 303-1 Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama Interactions with water as a shared resource	96, 100	-	-	-	-
	GRI 303-2 Pengelolaan dampak terkait pembuangan air Management of water discharge-related impacts	96, 99, 100	-	-	-	-
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	GRI 303-3 Pengambilan air Water withdrawal	58, 96, 97, 98	-	-	-	-
	GRI 303-4 Pembuangan air Water discharge	100	-	Informasi tidak tersedia Information unavailable	Hal ini dikarenakan ketidakterediaan data yang belum memadai This is because the unavailability of insufficient data	-
	GRI 303-5 Konsumsi/penggunaan air Water consumption	96, 97, 98	-	-	-	-
Emisi Emissions						
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	GRI 3-3 Manajemen topik material Topic management disclosures	58, 86, 109	-	-	-	-
GRI 305: Emisi 2016 Emissions 2016	GRI 305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) langsung Direct (Scope 1) GHG emissions	101, 102	-	-	-	-
	GRI 305-2 Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung Energy indirect (Scope 2) GHG emissions	101, 102	-	-	-	-
	GRI 305-3 Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya Other indirect (Scope 3) GHG emissions	103	-	-	-	-
	GRI 305-4 Intensitas emisi GRK GHG emissions intensity	101, 102	-	-	-	-
	GRI 305-5 Pengurangan emisi GRK Reduction of GHG emissions	101	-	-	-	-
	GRI 305-6 Emisi zat perusak ozon (ODS) Emissions of ozone-depleting substances (ODS)	103	-	-	-	-



Standar GRI/ Sumber Lain GRI Standard/ Other Source	Pengungkapan Disclosure	Lokasi/ Halaman/ Location/ Page	Yang Tidak Dicantumkan Omission			No. Rujukan Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
			Persyaratan yang Tidak Dicantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
	GRI 305-7 Nitrogen Oksida (NO _x), sulfur oksida (SO _x), dan emisi udara signifikan lainnya Nitrogen oxides (NO _x), sulfur oxides (SO _x), and other significant air emissions	103	-	Tidak berlaku Not applicable	Hal ini dikarenakan bidang usaha Perseroan sebagai penjaminan infrastruktur tidak menghasilkan emisi udara yang signifikan lainnya tersebut sehingga informasi tersebut tidak relevan untuk disampaikan dalam laporan keberlanjutan Perseroan This is because the Company's business sector as infrastructure guarantee does not produce these significant air emissions. Therefore, such information is not relevant to be presented in the Company's sustainability report.	-
Limbah Waste						
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	GRI 3-3 Manajemen topik material Topic management disclosures	58, 86, 109	-	-	-	-
	GRI 306-1 Limbah yang dihasilkan dan dampak signifikan terkait limbah Waste generation and significant waste-related impacts	104, 106	-	-	-	-
	GRI 306-2 Pengelolaan dampak signifikan terkait limbah Management of significant waste-related impacts	104, 105, 107	-	-	-	-
GRI 306: Limbah 2020 Waste 2020	GRI 306-3 Limbah yang dihasilkan Waste generated	106, 107	-	-	-	-
	GRI 306-4 Limbah yang dialihkan dari pembuangan Waste diverted from disposal	106	-	Informasi tidak tersedia Information unavailable	Hal ini dikarenakan PT PII belum memiliki program daur ulang limbah, sehingga PT PII belum dapat melakukan pengukuran dan perhitungan jumlah limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir (jumlah limbah yang dimanfaatkan) This is because IIGF has yet to have a waste recycling program. Therefore, IIGF cannot assess and calculate the amount of waste diverted from the landfill (amount of waste utilized)	-
	GRI 306-5 Limbah yang diarahkan ke pembuangan Waste directed to disposal	106, 107	-	-	-	-



Standar GRI/ Sumber Lain GRI Standard/ Other Source		Pengungkapan Disclosure	Lokasi/ Halaman/ Location/ Page	Yang Tidak Dicantumkan Omission			No. Rujukan Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
				Persyaratan yang Tidak Dicantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
Sosial Social							
Kepegawaian Employment							
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	GRI 3-3	Manajemen topik material Topic management disclosures	58, 135	-	-	-	-
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	GRI 401-1	Perekrutan pegawai baru dan pergantian pegawai New employee hires and employee turnover	143, 144	-	-	-	-
	GRI 401-2	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai purnawaktu yang tidak diberikan kepada pegawai sementara atau paruh waktu Benefits provided to full- time employees that are not provided to temporary or part-time employees	150	-	-	-	-
	GRI 401-3	Cuti melahirkan Parental leave	151-152	-	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Training and Education							
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	GRI 3-3	Manajemen topik material Topic management disclosures	58	-	-	-	-
GRI 404: Pendidikan dan Pelatihan 2016 Training and Education 2016	GRI 404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per pegawai Average hours of training per year per employee	147, 148	-	-	-	-
	GRI 404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan pegawai dan program bantuan peralihan Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	77, 146, 147, 153	-	-	-	-
	GRI 404-3	Persentase pegawai yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews	145	-	-	-	-



Standar GRI/ Sumber Lain GRI Standard/ Other Source	Pengungkapan Disclosure	Lokasi/ Halaman/ Location/ Page	Yang Tidak Dicantumkan Omission			No. Rujukan Standar Sektor GRI GRI Sector Standard Ref. No.
			Persyaratan yang Tidak Dicantumkan Requirement Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation	
Keberagaman dan Kesetaraan Peluang Diversity and Equal Opportunity						
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	GRI 3-3	Manajemen topik material Topic management disclosures	58	-	-	-
GRI 405: Keberagaman dan Kesetaraan Peluang 2016 Diversity and Equal Opportunity 2016	GRI 405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan pegawai Diversity of governance bodies and employees	139, 140, 141	-	-	-
	GRI 405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki Ratio of basic salary and remuneration of women to men	148	-	-	-
Masyarakat Lokal Local Communities						
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	GRI 3-3	Manajemen topik material Topic management disclosures	58, 157, 177	-	-	-
GRI 413: Masyarakat Lokal 2016 Local Communities 2016	GRI 413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs	159-177	-	-	-
	GRI 413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities	162-177	-	-	-



Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 dan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021

Disclosure List in Accordance with Financial Services Authority's (FSA) Regulation No.51/POJK.03/2017 and FSA Circular Letter No.16/SEOJK.04/2021

[OJK G.4]

Indeks Index	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy		
OJK A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan About the Sustainability Strategy	29, 34
Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan Sustainability Aspect Performance Highlight		
OJK B.1	Aspek Ekonomi Economic Aspect a. Kuantitas produksi atau jasa yang dijual b. Pendapatan atau penjualan c. Laba atau rugi bersih d. Produk ramah lingkungan e. Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan a. Quantity of products or services sold b. Revenue or sales c. Net profit or loss d. Total Eco-friendly Product e. Local supplier involvement in Sustainable Finance business process	8
OJK B.2	Aspek Lingkungan Hidup Environmental Aspect a. Penggunaan energi b. Pengurangan emisi yang dihasilkan c. Pengurangan limbah dan efluen d. Pelestarian keanekaragaman hayati a. Energy Consumption b. Reduction of emissions produced c. Reduction of effluent d. Biodiversity conservation	8, 9
OJK B.2	Aspek Sosial Social Aspect	8, 10
Profil Perusahaan Company Profile		
OJK C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan Vision, Mission and Sustainability Values	34, 42
OJK C.2	Alamat Perusahaan Company Address	40, 46
OJK C.3	Skala Usaha Business Scale a. total aset atau kapitalisasi aset dan total kewajiban b. jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan c. nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham d. wilayah operasional a. total assets or asset capitalization and total liabilities b. number of employees by gender, position, age, education, and employment status c. name of shareholder and percentage of share ownership d. operational area	41, 46, 139, 140
OJK C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan Products, Services and Businesses	40
OJK C.5	Keanggotaan pada Asosiasi Association Membership	51
OJK C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan Significant Changes in Listed and Public Companies	41, 42, 44, 51
Penjelasan Direksi Statement from Board of Directors		
OJK D.1	Penjelasan Direksi Statement from Board of Directors a. Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan b. Penerapan Keuangan Berkelanjutan c. Strategi pencapaian target a. Policies to address challenges in implementing the sustainability strategy b. Implementation of Sustainable Finance c. Target achievement strategy	18



Indeks Index	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance		
OJK E.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan Person in Charge of Practicing Sustainable Finance	181, 187
OJK E.2	Pengembangan Kompetensi terkait Keuangan Berkelanjutan Capacity Development Related to Sustainable Finance Practice	188
OJK E.3	Penilaian Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Risk Assessment on Practicing Sustainable Finance	130, 131
OJK E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Stakeholder Relationship	203
OJK E.5	Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan Issues Related to Practicing Sustainable Finance	29, 209
Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance		
OJK F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Developing a Sustainability Culture	112, 138, 194
Kinerja Ekonomi Economic Performance		
OJK F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi Comparison of Target and Performance on Production, Portfolio, Financing, Investment, Revenue and Profit-Loss	70
OJK F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan Comparison of Target and Performance on Portfolio, Financing and Investment on Financial Instruments or Projects Aligned with Sustainable Finance Practices	70
Kinerja Lingkungan Hidup Environmental Performance		
Aspek Umum General Aspect		
OJK F.3	Biaya Lingkungan Hidup Environmental Cost	89
Aspek Material Material Aspect		
OJK F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan Use of Environmentally-Friendly Materials	103
Aspek Energi Energy Aspect		
OJK F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan Volume and Intensity of Energy Use	91, 92, 93
OJK F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan Efforts to Achieving Energy Efficiency and the Use of Renewable Energy	94, 95
Aspek Air Water Aspect		
OJK F.8	Penggunaan Air Water Consumption	96, 97, 99
Aspek Keanekaragaman Hayati Biodiversity Aspect		
OJK F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati Impacts of Operating Near or Within Conservation or Biodiversity Areas	108
OJK F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati Biodiversity Conservation Efforts	108
Aspek Emisi Emission Aspect		
OJK F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya Volume and Intensity of Emission Based on Type	101, 102
OJK F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan Emission Reduction Efforts and Realization	101, 103, 104
Aspek Limbah dan Efluen Waste and Effluent Aspect		
OJK F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis Volume of Waste and Effluent Based on Type	100, 106, 107
OJK F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen Waste and Effluent Management Methods	100, 105, 106, 107
OJK F.15	Tumpahan yang Terjadi (jika ada) Spills (if any)	105
Aspek Pengaduan terkait Lingkungan Hidup Environmental Grievance Aspect		
OJK F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan Number and Topic of Incoming and Resolved Environmental Grievances	109



Indeks Index	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
Kinerja Sosial Social Performance		
OJK F.17	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen Commitment to Providing Equal Products and/ or Services to Customers	77, 134
Aspek Ketenagakerjaan Employment Aspect		
OJK F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja Equal Employment Opportunity	139, 143
OJK F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Child and Forced Labor	143
OJK F.20	Upah Minimum Regional Regional Minimum Wage	149
OJK F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman Decent and Safe Work Environment	154
OJK F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Employee Capacity Training and Development	77, 146, 147, 148
Aspek Masyarakat Community Aspect		
OJK F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar Impact of Operations to Local Communities	162-177
OJK F.24	Pengaduan Masyarakat Community Grievances	177
OJK F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Corporate Social Responsibility (CSR)	162-177
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan Responsibility on Sustainable Product/Service Development		
OJK F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan Sustainable Financial Product/Service Innovation and Development	77, 116, 119, 121, 122, 124
OJK F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamananannya bagi Pelanggan Safety-Evaluated Products/Services for Customers	114
OJK F.28	Dampak Produk/Jasa Impacts from Products/Services	74, 114, 119, 121, 122, 124, 176
OJK F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali Volume of Recalled Products	40
OJK F.30	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Customer Satisfaction Survey on Sustainable Financial Products/Services	134
Lain-lain Others		
OJK G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada) Written Verification by Independent Party (if any)	56
OJK G.2	Lembar Umpan Balik Feedback Sheet	227
OJK G.3	Tanggapan terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Response on Feedbacks on the Previous Year's Sustainability Report	60
OJK G.4	Daftar Pengungkapan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik Disclosure List in Accordance with Financial Services Authority's Regulation No. 51/ POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions and Listed and Public Companies	220



Indeks International Financial Reporting Standards (IFRS)

International Financial Reporting Standards (IFRS) Index

Indeks IFRS S1: General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information

IFRS S1: General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information Index

Indeks Index	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
Tata Kelola Governance		
S1-27a	Badan tata atau individu yang bertanggung jawab atas pengawasan risiko dan peluang terkait keberlanjutan The governance body(s) or individual(s) responsible for oversight of sustainability-related risks and opportunities	
S1-27a.1	Tanggung jawab atas risiko dan peluang terkait keberlanjutan Responsibilities for sustainability-related risks and opportunities	186
S1-27a.2	Keterampilan dan kompetensi untuk merespons risiko dan peluang terkait keberlanjutan Skills and competencies to respond to sustainability-related risks and opportunities	182, 184, 188
S1-27a.3	Frekuensi pemberian informasi tentang risiko dan peluang terkait keberlanjutan Frequency of providing information about sustainability-related risks and opportunities	186
S1-27a.4	Mempertimbangkan risiko dan peluang terkait keberlanjutan ketika mengawasi strategi, keputusan, manajemen risiko dan kebijakan Consider sustainability-related risks and opportunities when overseeing strategy, decisions, risk management and policies	186
S1-27a.5	Mengawasi penetapan target yang terkait dengan risiko dan peluang terkait keberlanjutan Oversees the setting of targets related to sustainability-related risks and opportunities	186, 187
S1-27b	Peran manajemen dalam proses tata kelola, kontrol, dan prosedur untuk memantau, mengelola, dan mengawasi risiko dan peluang terkait keberlanjutan Management's role in the governance processes, controls and procedures used to monitor, manage and oversee sustainability-related risks and opportunities	
S1-27b.1	Delegasi peran kepada posisi tingkat manajemen Delegation of roles to a management-level position	187
S1-27b.2	Kontrol dan prosedur untuk mendukung pengawasan risiko dan peluang terkait keberlanjutan Controls and procedures to support the oversight of sustainability-related risks and opportunities	187
Strategi Strategy		
S1-29a	Risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang diperkirakan akan mempengaruhi prospek perusahaan The sustainability-related risks and opportunities that expected to affect the company's prospects	
S1-30a	Risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang diperkirakan akan mempengaruhi prospek perusahaan The sustainability-related risks and opportunities that expected to affect the company's prospects	30, 31
S1-30b	Menentukan jangka waktu risiko dan peluang terkait keberlanjutan diperkirakan akan terjadi Specify the time horizons over which sustainability-related risks and opportunities are expected to occur	30, 31
S1-30c	Definisi jangka waktu dan dikaitkan dengan perencanaan untuk pengambilan keputusan strategis Defines time horizons are linked to the planning for strategic decision-making	-
S1-29c	Dampak dari risiko dan peluang terkait keberlanjutan terhadap strategi dan pengambilan keputusan The effects of sustainability-related risks and opportunities on strategy and decision-making	
S1-33a	Menanggapi risiko dan peluang terkait keberlanjutan dalam strategi dan pengambilan keputusan Responding to sustainability-related risks and opportunities in strategy and decision-making	32
S1-33b	Kemajuan terhadap rencana pada periode pelaporan sebelumnya The progress against plans in previous reporting periods	32
S1-33c	Trade-off antara risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang dipertimbangkan Trade-offs between sustainability-related risks and opportunities that considered	121



Indeks Index	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
Manajemen Risiko Risk Management		
S1-44a	Proses dan kebijakan untuk mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan memantau risiko terkait keberlanjutan The processes and related policies to identify, assess, prioritise and monitor sustainability-related risks	130, 133
S1-44b	Proses untuk mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan memantau peluang yang berkaitan dengan keberlanjutan The processes to identify, assess, prioritise and monitor sustainability-related opportunities	130
S1-44c	Proses untuk mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan memantau risiko dan peluang terkait keberlanjutan diintegrasikan ke dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan The processes for identifying, assessing, prioritising and monitoring sustainability-related risks and opportunities are integrated into overall risk management process	131, 133
Metrik dan Target Metrics and Targets		
S1-46	Metrik yang digunakan untuk Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS yang berlaku Metrics used to applicable IFRS Sustainability Disclosure Standard	31
S1-51	Menjelaskan target yang digunakan Describe targets used	31

Indeks IFRS S2: *Climate-related Disclosures* IFRS S2: *Climate-related Disclosures Index*

Indeks Index	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
Tata Kelola Governance		
S2-6a	Badan tata atau individu yang bertanggung jawab atas pengawasan risiko dan peluang terkait iklim The governance body(s) or individual(s) responsible for oversight of climate-related risks and opportunities	
S2-6a.1	Tanggung jawab atas risiko dan peluang terkait iklim Responsibilities for climate-related risks and opportunities	186
S2-6a.2	Keterampilan dan kompetensi untuk merespons risiko dan peluang terkait iklim Skills and competencies to respond to climate-related risks and opportunities	182, 184, 188
S2-6a.3	Frekuensi pemberian informasi tentang risiko dan peluang terkait iklim Frequency of providing information about climate-related risks and opportunities	186
S2-6a.4	Mempertimbangkan risiko dan peluang terkait iklim ketika mengawasi strategi, keputusan, manajemen risiko dan kebijakan Consider climate-related risks and opportunities when overseeing strategy, decisions, risk management and policies	186
S2-6a.5	Mengawasi penetapan target yang terkait dengan risiko dan peluang terkait iklim Oversees the setting of targets related to climate-related risks and opportunities	186, 187
S2-6b	Peran manajemen dalam proses tata kelola, kontrol, dan prosedur untuk memantau, mengelola, dan mengawasi risiko dan peluang terkait iklim Management's role in the governance processes, controls and procedures used to monitor, manage and oversee climate-related risks and opportunities	
S2-6b.1	Delegasi peran kepada posisi tingkat manajemen Delegation of roles to a management-level position	187
S2-6b.2	Kontrol dan prosedur untuk mendukung pengawasan risiko dan peluang terkait iklim Controls and procedures to support the oversight of climate-related risks and opportunities	187



Indeks Index	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
Strategi Strategy		
S2-9a	Risiko dan peluang terkait iklim yang diperkirakan akan mempengaruhi prospek perusahaan The climate-related risks and opportunities that expected to affect the company's prospects	
S2-10a	Risiko dan peluang terkait iklim yang diperkirakan akan mempengaruhi prospek perusahaan The climate-related risks and opportunities that expected to affect the company's prospects	30, 31
S2-10c	Menentukan jangka waktu risiko dan peluang terkait iklim diperkirakan akan terjadi Specify the time horizons over which climate-related risks and opportunities are expected to occur	30, 31
S2-10d	Definisi jangka waktu dan dikaitkan dengan perencanaan untuk pengambilan keputusan strategis Defines time horizons are linked to the planning for strategic decision-making	30, 31
S2-9c	Dampak dari risiko dan peluang terkait iklim terhadap strategi dan pengambilan keputusan The effects of climate-related risks and opportunities on strategy and decision-making	
S2-14a	Menanggapi risiko dan peluang terkait iklim dalam strategi dan pengambilan keputusan Responding to climate-related risks and opportunities in strategy and decision-making	32, 125
Manajemen Risiko Risk Management		
S2-25a	Proses dan kebijakan untuk mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan memantau risiko terkait iklim The processes and related policies to identify, assess, prioritise and monitor climate-related risks	125, 130
S2-25b	Proses untuk mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan memantau peluang yang berkaitan dengan iklim The processes to identify, assess, prioritise and monitor climate-related opportunities	125, 130, 186
S2-25c	Proses untuk mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan memantau risiko dan peluang terkait iklim diintegrasikan ke dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan The processes for identifying, assessing, prioritising and monitoring climate-related risks and opportunities are integrated into overall risk management process	125, 130
Metrik dan Target Metrics and Targets		
S2-29a	Mengungkapkan pengukuran emisi gas rumah kaca Disclose greenhouse gas emissions measurement	101-104
S2-33	Target kuantitatif dan kualitatif terkait perubahan iklim The quantitative and qualitative climate-related targets	31



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



Lembar Umpan Balik

Feedback Sheet

[OJK G.2]

Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Anda dalam membaca Laporan Keberlanjutan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tahun 2023. Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keberlanjutan kami di tahun 2024, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk berbagi pemikiran, saran, dan masukan melalui Lembar Umpan Balik yang telah kami sediakan serta mengirimkannya kembali kepada kami.

Thank you for your willingness to read the 2023 Sustainability Report of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). We hope that you will fill out this Feedback Sheet and send it back to us to enhance the quality of the Sustainability Report, increase transparency of sustainability performance, and as an input for the 2024 Sustainability Report preparation.

Profil Pembaca Reader's Profile

Nama Lengkap :
Full Name

Nama Institusi/ Perusahaan :
Institution/Company Name

Email :
Email

Telp/HP :
Phone/Mobile Phone

Identifikasi kelompok pemangku kepentingan (pilih salah satu): Identification of stakeholder's group (choose one):

☐ Pemegang Saham Shareholders	☐ Karyawan Employee
☐ Pemerintah Pusat, Daerah dan Badan Legislatif terkait Central Government, Local Governments and related Legislative Bodies	☐ Masyarakat Lokal Local Community
☐ Kreditur/Investor/Development Agency Creditor/Investor/Development Agency	☐ Pemasok/Vendor/Supplier Vendor/Supplier
☐ Badan Usaha Pelaksana (BUP) Implementing Business Entity (BUP)	☐ Media Media
☐ Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Government Contracting Agency	☐ Lain-lain, mohon sebutkan Others, please specify

1. Laporan ini mudah dimengerti This report is easy to understand

☐ Setuju Agree ☐ Tidak Setuju Disagree

2. Laporan ini sudah menggambarkan informasi positif dan negatif Perseroan This report described the Company's positive and negative information

☐ Setuju Agree ☐ Tidak Setuju Disagree

3. Laporan ini sudah menggambarkan komitmen Perseroan yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan This report described the Company's commitment, in line with the achievement of sustainable development goals

☐ Setuju Agree ☐ Tidak Setuju Disagree



4. Topik Material apa yang paling penting menurut anda (nilai 1 = paling tidak penting s/d 5 = paling penting)
Which material topics are the most important in your opinion (1 = least important, up to 5 = most important)

☐ Kinerja Ekonomi Economic Performance	☐ Pengelolaan Limbah Waste Management
☐ Keberadaan Pasar Market Presence	☐ Kepegawaian Employment
☐ Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impact	☐ Pengembangan Kompetensi dan Karir Karyawan Employee Competency and Career Development
☐ Anti Korupsi Anti-Corruption	☐ Keanekaragaman dan Peluang Setara Diversity and Equal Opportunity
☐ Pengelolaan Energi Energy Management	☐ Pemberdayaan Masyarakat Setempat Local Community Empowerment
☐ Pengelolaan Air dan Air Limbah Water and Effluent Management	☐ Portofolio Produk Product Portfolio
☐ Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Greenhouse Gas Emission Control	

5. Mohon berikan saran/usul/komentar Bapak/Ibu atas Laporan ini:
Please provide your advice/suggestions/comments on this Report:

.....

.....

.....

.....

Terima kasih atas partisipasi anda,
Mohon kirimkan kembali lembar umpan balik ini kepada:
Thank you for your participation,
Please send this feedback sheet to:

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

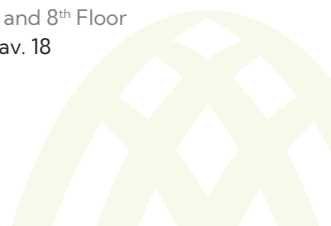
Kantor Pusat Head Office

Capital Place, Lt. 7 dan 8 7th and 8th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710 - Indonesia

(62-21) 5795 0550

info@iigf.co.id

www.ptpii.co.id



EXPANDING IMPACT TOWARDS SUSTAINABLE FUTURE

MEMPERLUAS DAMPAK, MENUJU MASA DEPAN BERKELANJUTAN



PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Capital Place, Lantai 7-8 7-8th Floor

Jl. Gatot Subroto No. Kav 18, RT.6/RW.1

Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan

Kota Jakarta Selatan South Jakarta

+62 21 5795 0550

info@iigf.co.id